



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

**KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Belitung Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kami menyadari bahwa dalam LPPD Kabupaten Belitung ini masih ada hal-hal yang belum teruraikan secara sempurna dari penyampaian data Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan capaian kinerja. Berkenaan dengan hal itu, kami akan terus melakukan peninjauan ulang terhadap LPPD Kabupaten Belitung ini dan melakukan upaya-upaya perbaikan agar lebih baik lagi.

Akhir kata, semoga LPPD ini dapat berguna bagi kita semua untuk dijadikan acuan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang.

Tanjungpandan, Maret 2026

Bupati Belitung,

H. Djoni Alamsyah Hidayat, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
INSPEKTORAT
Jl. JEND. A. YANI NO. 08 TANJUNGPANDAN TELPON 21048

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Belitung untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini.

Tanjungpandan, **30** Maret 2026

Plt INSPEKTUR KABUPATEN BELITUNG,


EDWARD NIZAR, S.T.
NIP. 197012252001121002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	30
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	53
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	56
2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO	56
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	56
2.1.2 Angka Kemiskinan	57
2.1.3 Angka Pengangguran	58
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	58
2.1.5 Pendapatan Per Kapita	59
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>).....	59
2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	61
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci	61
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	70
2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH.....	72
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	198
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	199
4.1 URUSAN PENDIDIKAN	199
4.2 URUSAN KESEHATAN	203
4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM.....	218
4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	222
4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT...	225
4.6 URUSAN SOSIAL	236
4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN	244
BAB V PENUTUP	251
LAMPIRAN 1 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG MENURUT SRUKTUR UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2025	
LAMPIRAN 2 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG MENURUT PEKERJAAN TAHUN 2025	
LAMPIRAN 3 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG MENURUT AGAMA TAHUN 2025	
LAMPIRAN 4 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG MENURUT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN TAHUN 2025	
LAMPIRAN 5 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BELITUNG MENURUT DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN TAHUN 2025	
LAMPIRAN 6 CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang- Undang Pembentukan Daerah

Pembentukan Daerah Kabupaten Belitung didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);

b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Belitung terletak antara 107°08' BT sampai 107°58' BT dan 02°30' LS sampai 03°15' LS. Luas wilayah daratan dan lautan sebesar 8.656,69 km², dengan luas wilayah daratan sebesar 2.293,69 km² atau 229.369 Ha dan sisanya berupa lautan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

Kabupaten Belitung merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terbagi menjadi lima kecamatan dengan Tanjungpandan sebagai ibu kota kabupaten. Luas wilayah kecamatan terbesar adalah Kecamatan Membalong, dan yang terkecil Kecamatan Selat Nasik (kecamatan kepulauan). Luas wilayah dari lima kecamatan adalah sebagai berikut :

- Membalong : 909,550 Km²
- Tanjungpandan : 378,448 Km²
- Badau : 458,200 Km²
- Sijuk : 413,992 Km²
- Selat Nasik : 133,500 Km²

Kabupaten ini terdiri dari sekitar 163 buah pulau besar dan kecil di mana pulau yang terbesar adalah Pulau Belitung. Selain itu, beberapa pulau-pulau besar lainnya adalah Pulau Seliu, Pulau Mendanau, dan Pulau Nadu.

Tabel 1.1
Jumlah Penyebaran Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung

No.	Kecamatan	Jumlah Pulau
1.	Tanjungpandan	17
2.	Membalong	35
3.	Selat Nasik	38
4.	Sijuk	55
5.	Badau	18
Jumlah		163

Sumber : Bappeda Kab. Belitung

Kabupaten Belitung mempunyai iklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan dan kemarau. Iklim di daerah ini cenderung kering dengan curah hujan pada Bulan Januari s/d Agustus tahun 2025 berkisar antara 11,1 mm



hingga 22,0 mm dengan jumlah hari hujan antara 11 hingga 26 hari per bulan. Curah hujan ini relative merata sepanjang tahun, dengan puncaknya terjadi selama musim hujan. Namun, Ada variasi spasial dalam curah hujan, dimana beberapa wilayah mungkin menerima lebih banyak hujan dibandingkan yang lain. Kondisi ini mempengaruhi sektor pertanian, ketersediaan air, dan risiko banjir. Dengan iklim tropis dan letak kepulauan, suhu di Kabupaten Belitung pada Bulan Januari s/d Agustus tahun 2025 cenderung panas, dengan rata-rata 27,6 °C, sedangkan suhu maksimum berada pada 33,2 °C, dan suhu minimum pada 23,7 °C. Kelembaban udara di daerah ini juga cenderung tinggi, dengan rata-rata 77,2%.

Daerah yang paling tinggi di Kabupaten Belitung hanya mempunyai ketinggian kurang lebih 500 m dari atas permukaan laut dengan puncak tertinggi ada di daerah Gunung Tajam. Sedangkan daerah hilir (pantai) terdiri atas beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yakni :

- Sebelah Utara oleh DAS Buding
- Sebelah Selatan oleh DAS Pala & Kembiri, dan
- Sebelah Barat oleh DAS Brang dan Cerucuk

Komposisi batuan utama di Kabupaten Belitung meliputi kwarsa dan pasir, batuan aluvial dan batuan granit. Menurut letaknya, batuan kwarsa dan pasir tersebar secara merata di seluruh wilayah kecamatan dengan luas total mencapai 266.865 ha atau 56,98 persen dari luas Kabupaten Belitung. Untuk batuan aluvial dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Selat Nasik dengan luas total seluruhnya mencapai 133,5 Km² atau 5,82 persen dari luas Kabupaten Belitung.

Kondisi topografi Pulau Belitung pada umumnya bergelombang dan berbukit-bukit telah membentuk pola aliran sungai di daerah ini menjadi pola sentrifugal, yang mana sungai-sungai yang ada berhulu di daerah pegunungan dan mengalir ke daerah pantai. Sedangkan daerah aliran sungai mempunyai pola aliran sungainya berbentuk seperti pohon.

c. Informasi Umum Data Kependudukan

Berdasarkan hasil pendataan, jumlah penduduk Kabupaten Belitung per Desember 2025 berjumlah 194.392 jiwa dengan 67.530 Kepala Keluarga. Sebagian besar penduduk Kabupaten Belitung berkedudukan di Kecamatan Tanjungpandan sebanyak 111.243 jiwa (57,22%) dengan rincian per kecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Kecamatan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Jumlah KK
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Tanjungpandan	56.292	54.951	111.243	38.343
2.	Membalong	14.210	13.405	27.615	10.031
3.	Selat Nasik	2.916	2.785	5.701	2.026
4.	Sijuk	17.244	16.492	33.736	11.524
5.	Badau	8.309	7.788	16.097	5.606
Jumlah		98.971	95.421	194.392	67.530

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Belitung 2025

Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2025 paling banyak adalah lulusan SD/ sederajat yaitu sebanyak 46.108 orang (23,71%). Sedangkan dari segi jenis pekerjaan, penduduk Kabupaten Belitung paling banyak bekerja sebagai Buruh Harian Lepas sebanyak 21.702 orang. Untuk peran serta perempuan dalam pekerjaan hanya sebagian kecil saja perempuan di Kabupaten Belitung memiliki pekerjaan dan mayoritas mengurus rumah tangga sebagaimana rincian Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian terlampir dalam laporan ini.



Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Pendidikan Tahun 2025

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tdk/Blm Sekolah	18.701	17.730	36.431
Blm Tamat SD/Sederajat	15.896	15.896	30.583
Tamat SD/Sederajat	22.834	23.274	46.108
SLTP/Sederajat	14.003	13.247	27.250
SLTA/Sederajat	21.753	19.544	41.297
D-I/II	381	599	980
Akademi/D-III/Sarjana Muda	1.544	1.544	3.440
D-IV/Strata-I	3.683	4.325	8.008
Strata-II	173	115	288
Strata-III	3	4	7
Jumlah	98.971	95.421	194.392

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Belitung 2025

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Wilayah administrasi Kabupaten Belitung dibagi dalam 5 (lima) kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan dan 42 desa, yang terdiri dari :

Tabel 1.7
Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Belitung

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan
1	Tanjungpandan	a. Kelurahan Kota b. Kelurahan Parit c. Kelurahan Kampong Damai d. Kelurahan Paal Satu e. Kelurahan Lesung Batang f. Kelurahan Pangkallalang g. Kelurahan Tanjungpendam h. Desa Buluh Tumbang i. Desa Perawas j. Desa Dukong k. Desa Juru Seberang l. Desa Air Saga m. Desa Air Merbau n. Desa Aik Pelempang Jaya o. Desa Aik Ketekok p. Desa Aik Rayak
2	Membalong	a. Desa Membalong b. Desa Perpat c. Desa Lassar d. Desa Simpang Rusa e. Desa Kembiri f. Desa Bantan g. Desa Tanjung Rusa h. Desa Mentigi i. Desa Pulau Seliu j. Desa Pulau Sumedang k. Desa Gunung Riting l. Desa Padang Kandis
3	Selat Nasik	a. Desa Selat Nasik b. Desa Petaling c. Desa Suak Gual d. Desa Pulau Gersik
4	Sijuk	a. Desa Sijuk b. Desa Batu Itam c. Desa Terong d. Desa Air Seruk e. Desa Tanjung Binga f. Desa Air Selumar g. Desa Sungai Padang h. Desa Keciput i. Desa Pelepak Pute j. Desa Tanjong Tinggi
5	Badau	a. Desa Badau b. Desa Air Batu Buding c. Desa Sungai Samak d. Desa Kacang Butor e. Desa Cerucuk f. Desa Pegantungan g. Desa Ibul
3	Selat Nasik	a. Desa Selat Nasik b. Desa Petaling c. Desa Suak Gual d. Desa Pulau Gersik



No	Kecamatan	Desa / Kelurahan
4	Sijuk	a. Desa Sijuk b. Desa Batu Itam c. Desa Terong d. Desa Air Seruk e. Desa Tanjung Binga f. Desa Air Selumar g. Desa Sungai Padang h. Desa Keciput i. Desa Pelepak Pute j. Desa Tanjong Tinggi
5	Badau	h. Desa Badau i. Desa Air Batu Buding j. Desa Sungai Samak k. Desa Kacang Butor l. Desa Cerucuk m. Desa Pegantungan n. Desa Ibul

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Belitung

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung. Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.8
Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung

No	Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
2	Sekretariat DPRD	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
3	Inspektorat Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
5	Dinas Kesehatan	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
7	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
8	Dinas Pariwisata	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2025**

No	Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
12	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
14	Dinas Perhubungan	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
15	Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
17	Dinas Perikanan	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
20	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



No	Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
24	Badan Pendapatan Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
27	Kecamatan Tanjungpandan	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
28	Kecamatan Membalong	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
29	Kecamatan Sijuk	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
30	Kecamatan Badau	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung
31	Kecamatan Selat Nasik	Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Belitung, 2025

f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Tahun 2025 sebanyak 2.775 orang yang terdiri dari sebagai berikut :

Tabel 1.10
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Belitung Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Sekretariat Daerah	Fungsi Penunjang Lainnya	15	39	49	103
2	Sekretariat DPRD	Fungsi Penunjang Lainnya	3	7	49	24
3	Inspektorat Daerah	Fungsi Penunjang Pengawasan	5	30	8	43
4	Dinas Pendidikan dan	Pendidikan dan	22	1047	36	1105



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
	Kebudayaan	Kebudayaan				
5	Dinas Kesehatan	Kesehatan	16	335	55	406
6	UPT RSUD Marsidi Judono	Kesehatan	11	295	44	350
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12	10	23	45
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	4	6	9	19
9	Dinas Pariwisata	Pariwisata	5	10	11	26
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	- Sosial - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	10	9	25
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	11	9	29
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	6	6	17
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	- Penanaman Modal - Perindustrian	6	11	9	35
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja	- Koperasi - Usaha Kecil dan Menengah - Perdagangan - Tenaga Kerja	11	13	9	33
15	Dinas Perhubungan	Perhubungan	13	6	17	36
16	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	10	9	16	35
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	- Pangan - Pertanian	7	43	13	63
18	Dinas Perikanan	Perikanan	7	7	16	30
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	- Perpustakaan - Kearsipan	6	11	6	23
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	- Statistik - Komunikasi dan Informatika - Persandian	6	12	12	30
21	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13	17	10	40



No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Fungsi Penunjang Kepegawaian - Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	7	16	14	37
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Fungsi Penunjang Perencanaan	7	18	10	35
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi Penunjang Keuangan	14	4	13	31
25	Badan Pendapatan Daerah	Fungsi Penunjang Keuangan	9	1	3	13
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum	6	4	10	20
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4	0	17	21
28	Kecamatan Tanjungpandan	Fungsi Penunjang Kewilayahan	30	0	17	47
29	Kecamatan Membalong	Fungsi Penunjang Kewilayahan	9	0	8	17
30	Kecamatan Sijuk	Fungsi Penunjang Kewilayahan	6	0	9	15
31	Kecamatan Badau	Fungsi Penunjang Kewilayahan	6	0	6	12
32	Kecamatan Selat Nasik	Fungsi Penunjang Kewilayahan	8	0	2	10

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan tingkat penerimaan pendapatan daerah, dengan demikian pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Kemudian baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Berbagai upaya perlu dilakukan dalam mendukung pendapatan Kabupaten Belitung, baik yang menyangkut pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah seperti pendapatan bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan bagi hasil dari pemerintah lain tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Selama periode 2024-2025, target pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami penurunan dari Rp. 967.168.723.887,00 pada tahun 2024 dan menjadi Rp. 940.590.481.222,00 pada tahun 2025. Berdasarkan data pada tabel target dan realisasi pendapatan tahun 2024-2025, realisasi pendapatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 cenderung melebihi target dengan persentase pada Tahun 2024 sebesar 101,05% sedangkan pada Tahun 2025 sebesar 99,96% seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1.11
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2025

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
2024	967.168.723.887,00	977.370.141.296,33	101,05
2025	940.590.481.222,00	940.242.175.366,09	99,96

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung 2025



Pendapatan daerah Kabupaten Belitung ditopang oleh tiga komponen sumber pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Berbagai sumber pendapatan tersebut memiliki kontribusi terhadap total belanja daerah. Kontribusi tiap komponen pendapatan terhadap total belanja daerah Kabupaten Belitung dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1.12
Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Target Per Komponen Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2024-2025

No	Komponen Pendapatan	2025			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Asli Daerah	202.354.324.639,00	213.489.413.556,09	105,50	154.812.555.643,00	185.033.079.282,33	119,52
2	Dana Perimbangan	738.236.156.583,00	726.752.761.810,00	98,44	801.359.016.000,00	781.559.645.246,00	97,53
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	10.997.152.244,00	10.777.416.768,00	98,00
Jumlah		940.590.481.222,00	940.242.175.366,09	99,96	967.168.723.887	977.370.141.296,33	101,05

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung 2025

Masing-masing komponen pendapatan daerah memiliki kontribusi yang berbeda terhadap realisasi belanja daerah daerah. Berdasarkan tabel di atas, kontribusi terbesar pendapatan daerah tahun 2024 dan 2025 bersumber dari dana perimbangan dengan kontribusi pada tahun 2024 sebesar 79,96% dan Tahun 2025 sebesar 77,29%. Komponen kedua pada Tahun 2024 adalah pendapatan asli daerah dengan kontribusi sebesar 18,93% sedangkan pada Tahun 2025 adalah sebesar 22,7%. Untuk Komponen ketiga pada Tahun 2024 adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah adalah sebesar 1,1% sedangkan pada Tahun 2025 sebesar 0%.

Pada Tahun Anggaran 2025, alokasi belanja operasi mempunyai target anggaran sebesar Rp. 888.104.600.616,70 dan terealisasi Rp. 798.966.103.189,53 dengan persentase pencapaian target sebesar 89,96%. Sedangkan pada belanja modal memiliki target Rp. 43.619.973.682,00 dan terealisasi Rp. 38.837.469.692,00 atau 89,96%. Sementara itu, target belanja tak terduga sebesar Rp. 1.250.000.000,00 dan terealisasi Rp. 0,00 atau 0,00% sedangkan target belanja transfer sebesar Rp. 106.639.282.895,00 dan terealisasi sebesar Rp. 105.622.017.300,00 atau 99,78%. Berdasarkan akumulasi komponen belanja di atas maka belanja daerah pada tahun 2024 memiliki target Rp 1.149.800.755.924,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.060.978.760.805,40 atau 92,28%.

Rincian target, realisasi dan persentase pencapaian target per komponen belanja daerah dijelaskan tabel berikut ini :

Tabel 1.13
Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Target Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024-2025

No	Komponen Belanja	2025			2024		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	888.104.600.616,70	798.966.103.189,53	89,96	964.222.300.034,00	885.984.171.231,78	91,89
2	Belanja Modal	43.619.973.682,00	38.837.469.692,00	89,04	74.989.800.190	67.145.369.203,62	89,54
3	Belanja Tak Terduga	1.250.000.000,00	0	0,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
4	Belanja Transfer	106.639.282.895,00	105.622.017.300,00	99,05	108.088.655.700,00	107.849.220.370,00	99,78
Jumlah		1.039.613.857.103,70	943.425.590.181,53	90,75	1.149.800.755.924,00	1.060.978.760.805,40	92,28

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung 2025



h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

Tabel 1.14
Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan Dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Yang Memuat Alokasi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
I.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		568.451.453.874,70	516.601.737.280,00	33.082.783.652,00	29.679.088.862,00
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		229.773.303.554,00	212.603.562.588,00	9.103.110.563,00	8.926.734.329,00
	Dinas Pendidikan		229.773.303.554,00	212.603.562.588,00	9.103.110.563,00	8.926.734.329,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	191.164.501.985,00	175.857.763.582,00	298.447.490,00	196.640.000,00
b.	Program	Pengelolaan Pendidikan	38.497.840.683,00	36.672.914.506,00	8.804.663.073,00	8.730.094.329,00
c.	Program	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	110.960.886,00	72.884.500,00	0,00	0,00
2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		268.755.950.388,66	240.227.365.775,00	9.885.668.144,00	7.682.846.024,00
	Dinas Kesehatan		104.868.865.850,00	94.381.154.360,00	3.807.685.900,00	3.795.253.297,00
a.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52.756.325.687,00	46.942.327.903,00	32.514.120,00	29.193.000,00
b.	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	50.751.027.313,00	46.243.668.426,00	3.775.171.780,00	3.766.060.297,00
c.	Program	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	809.078.850,00	686.510.217,00	0,00	0,00
d.	Program	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	298.158.000,00	286.407.814,00	0,00	0,00
e.	Program	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	254.276.000,00	222.240.000,00	0,00	0,00
	UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono		137.105.586.711,66	121.438.779.101,00	5.061.309.369,00	3.074.749.987,00
f.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.397.526.286,66	113.592.160.945,00	1.615.103.280,00	1.370.052.850,00



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
		Kabupaten/Kota				
g.	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	10.708.060.425,00	7.846.618.156,00	3.446.206.089,00	1.704.697.137,00
	UPT PUSKESMAS SELAT NASIK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG		2.282.917.575,00	2.084.163.441,00	0,00	0,00
h.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.031.251.570,00	934.349.485,00	0,00	0,00
i.	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.215.141.645,00	1.114.749.256,00	0,00	0,00
j.	Program	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	28.869.360,00	28.653.900,00	0,00	0,00
k.	Program	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	7.655.000,00	6.410.800,00	0,00	0,00
	UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG		3.280.023.544,00	2.948.536.973,00	156.216.960,00	72.950.000,00
l.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.181.473.484,00	1.928.985.190,00	156.216.960,00	24.000.000,00
m.	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.040.711.300,00	961.830.203,00	0,00	48.950.000,00
n.	Program	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	53.101.760,00	52.984.580,00	0,00	0,00
o.	Program	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.737.000,00	4.737.000,00	0,00	0,00
	UPT PUSKESMAS MEMBALONG DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG		3.024.683.663,00	2.827.967.758,00	105.174.000,00	34.500.000,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
p.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.904.481.002,00	1.790.368.717,00	105.174.000,00	97.610.750,00
q.	Program	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.081.648.181,00	999.278.641,00	0,00	0,00
r.	Program	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	31.200.880,00	31.167.400,00	0,00	0,00
s.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	7.353.600,00	7.153.000,00	0,00	0,00
	UPT PUSKESMAS BADAU DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG		3.100.223.214,00	2.821.221.293,00	90.323.000,00	88.195.600,00
t.	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.883.191.930,00	1.712.420.079,00	90.323.000,00	88.195.600,00
u.	Program	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.151.397.424,00	1.044.594.884,00	0,00	0,00
v.	Program	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	51.835.560,00	51.727.830,00	0,00	0,00
w.	Program	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	13.798.300,00	12.478.500,00	0,00	0,00
	UPT PUSKESMAS PERAWAS DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG		2.458.983.736,00	2.298.673.713,00	85.422.176,00	81.119.321,00
x.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.557.991.315,00	1.427.656.126,00	85.422.176,00	81.119.321,00
y.	Program	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	878.051.341,00	848.195.798,00	0,00	0,00
z.	Program	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	15.700.880,00	15.583.700,00	0,00	0,00
aa.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	7.240.200,00	7.238.089,00	0,00	0,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	UPT PUSKESMAS SIJUK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG		2.392.869.467,00	2.235.777.728,00	174.985.914,00	117.719.900,00
bb.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.446.262.746,00	1.365.077.617,00	174.985.914,00	117.719.900,00
cc.	Program	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	904.733.961,00	829.052.261,00	0,00	0,00
dd.	Program	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	30.135.560,00	29.910.650,00	0,00	0,00
ee.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	11.737.200,00	11.737.200,00	0,00	0,00
	UPT PUSKESMAS AIR SAGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG		3.809.051.607,00	3.457.853.135,00	141.093.930,00	101.232.000,00
ff.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.737.492.379,00	2.468.975.523,00	141.093.930,00	101.232.000,00
			1.002.756.588,00	920.309.332,00	0,00	0,00
gg.	Program	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
			68.802.640,00	68.568.280,00	0,00	0,00
hh.	Program	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
	UPT PUSKESMAS TANJUNGPANDAN DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG		4.307.490.842,00	3.845.244.209,00	182.811.647,00	133.500.000,00
ii.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.294.819.790,00	2.952.166.746,00	182.811.647,00	133.500.000,00
			923.435.412,00	804.755.683,00	0,00	0,00
jj.	Program	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
			68.802.640,00	68.568.280,00	0,00	0,00
kk.	Program	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				
			20.433.000,00	19.753.500,00	0,00	0,00
ll.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
	UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG		2.125.254.179,00	1.887.994.064,00	80.645.248,00	77.498.100,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
mm.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.335.564.360,00	1.211.482.033,00	80.645.248,00	77.498.100,00
nn.	Program	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	691.092.419,00	588.009.721,00	0,00	0,00
oo.	Program	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	92.123.400,00	83.096.310,00	0,00	0,00
pp.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	6.474.000,00	5.406.000,00	0,00	0,00
3.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		40.282.074.281,04	36.759.577.711,00	8.014.589.311,00	7.107.858.226,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		40.282.074.281,04	36.759.577.711,00	8.014.589.311,00	7.107.858.226,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.981.892.113,00	8.538.854.346,00	0,00	0,00
b.	Program	Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	54.159.345,00	53.966.850,00	1.726.891.270,00	1.724.603.000,00
c.	Program	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4.841.139.020,00	4.557.030.412,00	3.141.196.000,00	3.069.496.000,00
d.	Program	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	50.000.000,00	48.027.500,00	595.000.000,00	592.765.000,00
e.	Program	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	0,00	0,00	558.502.041,00	556.992.000,00
f.	Program	Penataan Bangunan Gedung	7.099.122.300,00	6.767.130.850,00	880.000.000,00	79.809.000,00
g.	Program	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	520.000.000,00	159.881.100,00	0,00	0,00
h.	Program	Penyelenggaraan Jalan	17.542.651.660,04	16.444.224.611,00	1.062.000.000,00	1.033.521.726,00
i.	Program	Pengembangan Jasa Konstruksi	104.124.163,00	101.574.042,00	51.000.000,00	50.671.500,00
j.	Program	Penyelenggaraan Penataan Ruang	88.985.680,00	88.888.000,00	0,00	0,00
4.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		3.734.653.688,00	3.552.090.047,00	4.961.588.764,00	4.861.528.034,00
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		3.734.653.688,00	3.552.090.047,00	4.961.588.764,00	4.861.528.034,00



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
a.	program	Pengembangan Perumahan	93.472.500,00	0,00	0,00	0,00
b.	program	Kawasan Permukiman	75.494.601,00	58.634.567,00	0,00	0,00
c.	program	Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	468.133.930,00	466.839.000,00	0,00	0,00
d.	program	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	3.097.552.657,00	3.026.616.480,00	4.961.588.764,00	4.861.528.034,00
5.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		18.377.928.589,00	16.937.488.257,00	144.933.810,00	136.552.200,00
1)	Satuan Polisi Pamong Praja		11.960.736.404,00	11.547.818.134,00	131.623.800,00	123.348.750,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.835.847.809,00	7.442.583.134,00	131.623.800,00	123.348.750,00
b.	Program	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4.124.888.595,00	4.105.235.000,00	0,00	0,00
2)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		6.417.192.185,00	5.389.670.123,00	13.310.010,00	13.203.450,00
c.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.423.775.765,00	3.864.884.898,00	0,00	0,00
d.	Program	Penanggulangan Bencana	745.942.120,00	576.172.550,00	13.310.010,00	13.203.450,00
e.	Program	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.247.474.300,00	948.612.675,00	0,00	0,00
6.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		7.527.543.374,00	6.521.652.902,00	972.893.060,00	963.570.049,00
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		7.527.543.374,00	6.521.652.902,00	972.893.060,00	963.570.049,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.019.715.093,00	5.237.966.209,00	972.893.060,00	963.570.049,00
b.	Program	Pemberdayaan Sosial	146.525.261,00	137.586.265,00	0,00	0,00
c.	Program	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	13.537.849,00	9.118.618,00	0,00	0,00
d.	Program	Rehabilitasi Sosial	425.656.874,00	367.177.195,00	0,00	0,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
e.	Program	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	521.651.212,00	451.797.645,00	0,00	0,00
f.	Program	Penanganan Bencana	394.070.085,00	314.220.840,00	0,00	0,00
g.	Program	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	6.387.000,00	3.786.130,00	0,00	0,00
II.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		99.921.657.694,00	89.917.899.449,68	7.189.304.770,00	6.472.533.300,00
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		366.029.053,00	355.169.440,00	0,00	0,00
	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja		366.029.053,00	355.169.440,00	0,00	0,00
a.	Program	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	248.005.953,00	243.419.340,00	0,00	0,00
b.	Program	Hubungan Industrial	118.023.100,00	111.750.100,00	0,00	0,00
2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		1.068.325.655,00	868.085.744,00	0,00	0,00
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		1.068.325.655,00	868.085.744,00	0,00	0,00
a.	Program	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	318.857.773,00	294.635.280,00	0,00	0,00
b.	Program	Perlindungan Perempuan	300.789.006,00	140.272.850,00	0,00	0,00
c.	Program	Peningkatan Kualitas Keluarga	13.986.354,00	12.771.000,00	0,00	0,00
d.	Program	Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	24.945.830,00	22.057.900,00	0,00	0,00
e.	Program	Pemenuhan Hak Anak (Pha)	191.346.692,00	185.186.457,00	0,00	0,00
f.	Program	Perlindungan Khusus Anak	218.400.000,00	213.162.257,00	0,00	0,00
3.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		417.962.667,00	350.058.883,68	0,00	0,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		417.962.667,00	350.058.883,68	0,00	0,00
a.	Program	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	313.266.977,00	250.503.004,68	0,00	0,00



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
b.	Program	Penanganan Kerawanan Pangan	22.263.200,00	22.175.879,00	0,00	0,00
c.	Program	Pengawasan Keamanan Pangan	82.432.490,00	77.380.000,00	0,00	0,00
4.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		23.322.800,00	21.335.881,00	0,00	0,00
	Bagian Pemerintahan Setda Kab. Belitung		23.322.800,00	21.335.881,00	0,00	0,00
a.	Program	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	23.322.800,00	21.335.881,00	0,00	0,00
5.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		16.136.728.876,00	15.492.347.168,00	362.899.390,00	325.035.750,00
	Dinas Lingkungan Hidup		16.136.728.876,00	15.492.347.168,00	362.899.390,00	325.035.750,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.692.235.451,00	6.281.973.472,00	0,00	0,00
b.	Program	Perencanaan Lingkungan Hidup	250.386.741,00	246.886.612,00	0,00	0,00
c.	Program	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	906.176.788,00	875.310.515,00	19.000.000,00	18.759.000,00
d.	Program	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	141.497.848,00	131.244.759,00	3.633.030,00	0,00
e.	Program	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	20.390.072,00	16.023.000,00	0,00	0,00
f.	Program	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	63.059.047,00	57.633.516,00	0,00	0,00
g.	Program	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	22.340.323,00	21.372.882,00	0,00	0,00
h.	Program	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	89.978.676,00	88.964.658,00	0,00	0,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
i.	Program	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	9.054.795,00	8.795.390,00	0,00	0,00
j.	Program	Pengelolaan Persampahan	7.941.609.135,00	7.764.142.364,00	340.266.360,00	306.276.750,00
6.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		5.470.163.111,00	4.977.673.940,00	48.666.460,00	21.675.600,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		5.470.163.111,00	4.977.673.940,00	48.666.460,00	21.675.600,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.052.218.119,00	4.624.934.266,00	48.666.460,00	21.675.600,00
b.	Program	Pendaftaran Penduduk	359.220.644,00	298.263.654,00	0,00	0,00
c.	Program	Pencatatan Sipil	21.588.410,00	18.788.410,00	0,00	0,00
d.	Program	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.471.858,00	2.831.610,00	0,00	0,00
e.	Program	Pengelolaan Profil Kependudukan	33.664.080,00	32.856.000,00	0,00	0,00
7.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		7.899.120.660,00	6.691.962.858,00	49.955.000,00	48.406.500,00
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		7.899.120.660,00	6.691.962.858,00	49.955.000,00	48.406.500,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.182.877.796,00	5.261.883.872,00	49.955.000,00	48.406.500,00
b.	Program	Administrasi Pemerintahan Desa	1.313.257.663,00	1.038.077.872,00	0,00	0,00
c.	Program	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	402.985.201,00	392.001.114,00	0,00	0,00
8.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		3.117.574.580,00	2.703.550.023,00	1.218.969.700,00	975.293.600,00



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		3.117.574.580,00	2.703.550.023,00	1.218.969.700,00	975.293.600,00
a.	Program	Pengendalian Penduduk	63.967.000,00	63.683.271,00	0,00	0,00
b.	Program	Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	418.890.300,00	411.943.970,00	1.218.969.700,00	975.293.600,00
c.	Program	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.634.717.280,00	2.227.922.782,00	0,00	0,00
9.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		21.705.275.927,00	19.626.378.677,00	3.736.478.120,00	3.509.927.627,00
	Dinas Perhubungan		21.705.275.927,00	19.626.378.677,00	3.736.478.120,00	3.509.927.627,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.515.821.968,00	6.935.371.941,00	3.833.940,00	3.833.940,00
b.	Program	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	12.327.590.759,00	11.942.419.636,00	3.182.644.180,00	2.957.241.879,00
c.	Program	Pengelolaan Pelayaran	861.863.200,00	748.587.100,00	550.000.000,00	548.851.808,00
10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		8.670.392.840,00	7.574.041.548,00	256.460.020,00	247.228.913,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika		8.670.392.840,00	7.574.041.548,00	256.460.020,00	247.228.913,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.237.675.006,00	5.245.109.881,00	20.182.020,00	13.764.000,00
b.	Program	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	503.857.170,00	432.359.530,00	51.278.000,00	50.005.500,00
c.	Program	Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.928.860.664,00	1.896.572.137,00	185.000.000,00	183.459.413,00
11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		8.845.123.145,00	7.242.567.382,00	132.048.500,00	6.660.000,00
	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja		8.845.123.145,00	7.242.567.382,00	132.048.500,00	6.660.000,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.364.121.696,00	6.360.965.160,00	7.048.500,00	6.660.000,00
b.	Program	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	170.390.156,00	152.806.600,00	0,00	0,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
c.	Program	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	863.936.173,00	379.931.150,00	125.000.000,00	0,00
d.	Program	Pengembangan Umkm	446.675.120,00	348.864.472,00	0,00	0,00
12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		5.805.468.690,00	5.182.666.336,00	0,00	0,00
	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian		5.805.468.690,00	5.182.666.336,00	0,00	0,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.643.278.739,00	5.032.692.367,00	0,00	0,00
b.	Program	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	43.681.944,00	41.506.046,00	0,00	0,00
c.	Program	Promosi Penanaman Modal	60.003.060,00	56.125.797,00	0,00	0,00
d.	Program	Pelayanan Penanaman Modal	39.261.860,00	34.517.696,00	0,00	0,00
e.	Program	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	19.243.087,00	17.824.430,00	0,00	0,00
13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		9.629.015.105,00	8.870.258.871,00	140.040.000,00	131.550.000,00
	Dinas Pemuda dan Olahraga		9.629.015.105,00	8.870.258.871,00	140.040.000,00	131.550.000,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.390.129.487,00	3.918.030.124,00	0,00	0,00
b.	Program	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	743.186.931,00	670.374.773,00	0,00	0,00
c.	Program	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.095.698.687,00	3.952.296.938,00	140.040.000,00	131.550.000,00
d.	Program	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	400.000.000,00	329.557.036,00	0,00	0,00
14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		257.315.367,00	250.665.200,00	0,00	0,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika		257.315.367,00	250.665.200,00	0,00	0,00
a.	Program	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	257.315.367,00	250.665.200,00	0,00	0,00
15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		262.360.709,00	205.052.802,00	0,00	0,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	Dinas Komunikasi dan Informatika		262.360.709,00	205.052.802,00	0,00	0,00
a.	Program	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	262.360.709,00	205.052.802,00	0,00	0,00
16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		3.807.469.817,00	3.260.385.831,00	1.191.268.580,00	1.175.630.310,00
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		3.807.469.817,00	3.260.385.831,00	1.191.268.580,00	1.175.630.310,00
a.	Program	Pengembangan Kebudayaan	921.759.919,00	764.210.890,00	0,00	0,00
b.	Program	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	283.306.208,00	214.385.355,00	40.000.000,00	39.974.000,00
c.	Program	Pengelolaan Permuseuman	2.602.403.690,00	2.281.789.586,00	1.151.268.580,00	1.135.656.310,00
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		6.359.638.594,00	6.168.293.071,00	52.519.000,00	31.125.000,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		6.359.638.594,00	6.168.293.071,00	52.519.000,00	31.125.000,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.539.189.956,00	5.389.071.185,00	21.379.000,00	0,00
b.	Program	Pembinaan Perpustakaan	820.448.638,00	779.221.886,00	31.140.000,00	31.125.000,00
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		80.370.098,00	77.405.794,00	0,00	0,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		80.370.098,00	77.405.794,00	0,00	0,00
a.	Program	Pengelolaan Arsip	80.370.098,00	77.405.794,00	0,00	0,00
III.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		43.041.053.598,00	37.566.806.649,64	1.220.697.900,00	867.815.510,00
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		9.886.266.106,00	8.728.774.129,99	130.300.000,00	126.540.000,00
	Dinas Perikanan		9.886.266.106,00	8.728.774.129,99	130.300.000,00	126.540.000,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.024.954.875,00	6.158.762.549,00	0,00	0,00
b.	Program	Pengelolaan Perikanan Tangkap	891.879.180,00	803.847.338,99	0,00	0,00
c.	Program	Pengelolaan Perikanan Budidaya	740.035.870,00	614.269.464,00	0,00	0,00
d.	Program	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	373.688.489,00	363.275.620,00	0,00	0,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
e.	Program	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	855.707.692,00	788.619.158,00	130.300.000,00	126.540.000,00
2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		13.736.534.318,00	11.644.638.176,00	127.718.820,00	126.806.370,00
	Dinas Pariwisata		13.736.534.318,00	11.644.638.176,00	127.718.820,00	126.806.370,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.681.730.609,00	5.553.649.329,00	0,00	0,00
b.	Program	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.226.097.823,00	3.854.166.937,00	22.665.090,00	21.890.370,00
c.	Program	Pemasaran Pariwisata	2.311.253.322,00	1.743.583.068,00	105.053.730,00	104.916.000,00
d.	Program	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	517.452.564,00	493.238.842,00	0,00	0,00
3.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		17.934.967.254,00	15.877.069.637,65	178.051.000,00	141.327.500,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		17.934.967.254,00	15.877.069.637,65	178.051.000,00	141.327.500,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.252.346.621,00	13.356.244.415,00	133.467.000,00	123.939.500,00
b.	Program	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.631.784.735,00	1.540.542.590,00	0,00	0,00
c.	Program	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	394.587.385,00	356.807.142,65	34.462.000,00	7.266.000,00
d.	Program	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	160.865.801,00	149.814.961,00	0,00	0,00
e.	Program	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	85.686.382,00	79.824.000,00	0,00	0,00
f.	Program	Perizinan Usaha Pertanian	37.754.000,00	37.185.961,00	0,00	0,00
g.	Program	Penyuluhan Pertanian	371.942.330,00	356.650.568,00	10.122.000,00	10.122.000,00
4.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		22.829.668,00	19.097.971,00	0,00	0,00
	Dinas Lingkungan Hidup		22.829.668,00	19.097.971,00	0,00	0,00
a.	Program	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	22.829.668,00	19.097.971,00	0,00	0,00
5.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		912.418.120,00	841.020.346,00	633.038.700,00	355.810.200,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Tenaga Kerja		912.418.120,00	841.020.346,00	633.038.700,00	355.810.200,00
a.	Program	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	800.303.000,00	735.885.900,00	620.765.000,00	343.610.200,00
b.	Program	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	15.321.600,00	10.767.500,00	0,00	0,00
c.	Program	Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	96.793.520,00	94.366.946,00	12.273.700,00	12.200.000,00
6.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		548.038.132,00	456.206.389,00	151.589.380,00	117.331.440,00
	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian		548.038.132,00	456.206.389,00	151.589.380,00	117.331.440,00
a.	Program	Perencanaan dan Pembangunan Industri	548.038.132,00	456.206.389,00	151.589.380,00	117.331.440,00
IV.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		82.656.716.542,00	74.019.430.926,00	1.714.764.760,00	1.450.542.844,00
1.	Sekretariat Daerah		48.206.795.142,00	43.183.449.881,00	241.907.620,00	232.657.100,00
	Bagian Organisasi Setda Kab. Belitung		208.482.400,00	150.967.564,00	0,00	0,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	208.482.400,00	150.967.564,00	0,00	0,00
	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Belitung		1.778.121.982,00	1.684.348.489,00	0,00	0,00
b.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.778.121.982,00	1.684.348.489,00	0,00	0,00
	Bagian Hukum Setda Kab. Belitung		381.257.300,00	353.024.744,00	0,00	0,00
c.	Program	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	381.257.300,00	353.024.744,00	0,00	0,00
	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kab. Belitung		460.098.475,00	312.641.233,00	0,00	0,00
d.	Program	Perekonomian Dan Pembangunan	460.098.475,00	312.641.233,00	0,00	0,00
	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Belitung		10.731.888.350,00	10.470.408.748,00	0,00	0,00
e.	Program	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	10.731.888.350,00	10.470.408.748,00	0,00	0,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	Bagian Umum Setda Kab. Belitung		33.625.105.035,00	29.382.265.222,00	241.907.620,00	232.657.100,00
f.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.625.105.035,00	29.382.265.222,00	241.907.620,00	232.657.100,00
	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Setda Kab. Belitung		237.073.500,00	150.402.313,00	0,00	0,00
g.	Program	Perekonomian Dan Pembangunan	237.073.500,00	150.402.313,00	0,00	0,00
	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Belitung		141.416.200,00	126.455.424,00	0,00	0,00
h.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	43.071.400,00	42.169.300,00	0,00	0,00
i.	Program	Perekonomian Dan Pembangunan	98.344.800,00	84.286.124,00	0,00	0,00
	Bagian Pemerintahan Setda Kab. Belitung		643.351.900,00	552.936.144,00	0,00	0,00
j.	Program	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	643.351.900,00	552.936.144,00	0,00	0,00
2.	Sekretariat DPRD		34.449.921.400,00	30.835.981.045,00	1.472.857.140,00	1.217.885.744,00
	Sekretariat DPRD		34.449.921.400,00	30.835.981.045,00	1.472.857.140,00	1.217.885.744,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.907.354.750,00	20.281.936.213,00	1.472.857.140,00	1.217.885.744,00
b.	Program	Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	11.542.566.650,00	10.554.044.832,00	0,00	0,00
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		44.113.909.042,00	37.032.181.720,90	278.783.210,00	251.529.576,00
1.	PERENCANAAN		10.240.562.642,00	9.718.053.077,90	50.000.000,00	49.420.776,00
	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah		10.240.562.642,00	9.718.053.077,90	50.000.000,00	49.420.776,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.967.418.560,00	8.638.758.555,90	50.000.000,00	49.420.776,00
b.	Program	Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.006.965.178,00	847.438.833,00	0,00	0,00
c.	Program	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	266.178.904,00	231.855.689,00	0,00	0,00
2.	KEUANGAN		23.534.845.299,00	18.473.486.135,00	228.783.210,00	202.108.800,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		11.227.972.984,00	8.847.417.692,00	71.248.680,00	63.880.500,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.785.260.114,00	7.132.156.342,00	32.398.680,00	30.358.500,00
b.	Program	Pengelolaan Keuangan Daerah	1.500.765.518,00	1.033.576.955,00	0,00	0,00
c.	Program	Pengelolaan Barang Milik Daerah	941.947.352,00	681.684.395,00	38.850.000,00	33.522.000,00
2)	Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah		12.306.872.315,00	9.626.068.443,00	157.534.530,00	138.228.300,00
d.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.538.384.655,00	8.419.109.860,00	157.534.530,00	138.228.300,00
e.	Program	Pengelolaan Keuangan Daerah	202.117.410,00	138.634.256,00	0,00	0,00
f.	Program	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.566.370.250,00	1.068.324.327,00	0,00	0,00
3.	KEPEGAWAIAN		9.169.918.911,00	8.058.359.008,00	0,00	0,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		9.169.918.911,00	8.058.359.008,00	0,00	0,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.170.355.273,00	6.538.538.980,00	0,00	0,00
b.	Program	Kepegawaian Daerah	1.999.563.638,00	1.519.820.028,00	0,00	0,00
4.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		1.063.504.883,00	712.536.794,00	0,00	0,00
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.063.504.883,00	712.536.794,00	0,00	0,00
a.	Program	Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.063.504.883,00	712.536.794,00	0,00	0,00
5.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		105.077.307,00	69.746.706,00	0,00	0,00
	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah		105.077.307,00	69.746.706,00	0,00	0,00
a.	Program	Penelitian Dan Pengembangan Daerah	105.077.307,00	69.746.706,00	0,00	0,00
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		11.293.095.213,00	10.036.981.898,00	92.179.950,00	76.212.600,00
	Inspektorat Daerah		11.293.095.213,00	10.036.981.898,00	92.179.950,00	76.212.600,00
	Inspektorat		11.293.095.213,00	10.036.981.898,00	92.179.950,00	76.212.600,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.845.660.142,00	9.728.681.073,00	92.179.950,00	76.212.600,00



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
b.	Program	Penyelenggaraan Pengawasan	265.940.730,00	158.892.995,00	0,00	0,00
c.	Program	Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	181.494.341,00	149.407.830,00	0,00	0,00
7.	UNSUR KEWILAYAHAN		30.468.681.412,00	26.184.019.180,31	21.280.440,00	19.647.000,00
	KECAMATAN		30.468.681.412,00	26.184.019.180,31	21.280.440,00	19.647.000,00
1)	Kecamatan Tanjungpandan		10.977.872.301,00	9.050.410.468,00	0,00	0,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.491.300.231,00	8.620.899.468,00	0,00	0,00
b.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	141.423.620,00	131.485.000,00	0,00	0,00
c.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	259.072.825,00	216.653.900,00	0,00	0,00
d.	Program	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	86.075.625,00	81.372.100,00	0,00	0,00
	Kelurahan Kota		808.838.471,00	774.622.620,00	0,00	0,00
e.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	354.664.937,00	339.946.560,00	0,00	0,00
f.	Program	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	123.375.000,00	123.375.000,00	0,00	0,00
g.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	319.198.534,00	300.101.060,00	0,00	0,00
h.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	11.600.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00
	Kelurahan Parit		730.098.636,00	696.750.450,00	0,00	0,00
i.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	247.099.778,00	228.110.950,00	0,00	0,00
j.	Program	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	166.575.000,00	166.575.000,00	0,00	0,00
k.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	306.623.858,00	293.064.500,00	0,00	0,00
l.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9.800.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	Kelurahan Kampong Damai		701.011.480,00	693.110.049,00	0,00	0,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
m.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	264.709.783,00	259.508.889,00	0,00	0,00
n.	Program	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	125.747.000,00	124.950.000,00	0,00	0,00
o.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	303.581.897,00	301.723.160,00	0,00	0,00
p.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	6.972.800,00	6.928.000,00	0,00	0,00
	Kelurahan Paal Satu		802.200.626,00	747.175.596,00	0,00	0,00
q.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	236.146.775,00	228.936.596,00	0,00	0,00
r.	Program	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	200.400.000,00	200.400.000,00	0,00	0,00
s.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	306.394.209,00	267.264.000,00	0,00	0,00
t.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	59.259.642,00	50.575.000,00	0,00	0,00
	Kelurahan Lesung Batang		844.493.194,00	754.521.073,00	0,00	0,00
u.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	281.981.476,00	220.628.853,00	0,00	0,00
v.	Program	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	186.099.000,00	181.100.000,00	0,00	0,00
w.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	316.076.843,00	297.652.220,00	0,00	0,00
x.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60.335.875,00	55.140.000,00	0,00	0,00
	Kelurahan Pangkal Lalang		1.096.592.073,00	1.006.008.670,00	0,00	0,00
y.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	368.190.429,00	294.142.219,00	0,00	0,00
z.	Program	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	364.999.800,00	364.966.500,00	0,00	0,00
aa.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	339.307.144,00	324.149.951,00	0,00	0,00
bb.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	24.094.700,00	22.750.000,00	0,00	0,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
		Umum				
	Kelurahan Tanjung Pendam		814.803.865,00	713.160.968,00	0,00	0,00
cc.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	299.909.585,00	223.011.773,00	0,00	0,00
dd.	Program	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	172.800.000,00	172.800.000,00	0,00	0,00
ee.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	340.794.280,00	316.949.195,00	0,00	0,00
ff.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.300.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2)	Kecamatan Badau		3.125.603.554,00	2.638.575.268,00	0,00	0,00
gg.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.850.761.877,00	2.382.309.228,00	0,00	0,00
hh.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	42.967.210,00	39.843.000,00	0,00	0,00
ii.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	182.898.375,00	173.494.440,00	0,00	0,00
jj.	Program	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48.976.092,00	42.928.600,00	0,00	0,00
3)	Kecamatan Sijuk		3.567.449.826,00	3.026.556.339,00	21.280.440,00	19.647.000,00
kk.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.160.240.026,00	2.624.653.839,00	21.280.440,00	19.647.000,00
ll.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	66.907.000,00	66.567.000,00	0,00	0,00
mm.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	316.127.800,00	311.160.500,00	0,00	0,00
nn.	Program	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.175.000,00	24.175.000,00	0,00	0,00
4)	Kecamatan Membalong		3.685.870.083,00	3.345.279.517,00	0,00	0,00
oo.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.288.614.483,00	2.973.029.257,00	0,00	0,00
pp.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	99.575.000,00	87.532.000,00	0,00	0,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
qq.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	277.359.600,00	265.156.460,00	0,00	0,00
rr.	Program	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20.321.000,00	19.561.800,00	0,00	0,00
5)	Kecamatan Selat Nasik		3.313.847.303,00	2.737.848.162,31	0,00	0,00
ss.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.968.967.141,00	2.421.560.811,31	0,00	0,00
tt.	Program	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	114.431.440,00	92.688.200,00	0,00	0,00
uu.	Program	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	219.858.582,00	213.214.951,00	0,00	0,00
vv.	Program	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.590.140,00	10.384.200,00	0,00	0,00
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		8.158.033.241,00	7.607.046.085,00	20.179.000,00	20.100.000,00
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		8.158.033.241,00	7.607.046.085,00	20.179.000,00	20.100.000,00
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		8.158.033.241,00	7.607.046.085,00	20.179.000,00	20.100.000,00
a.	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.265.989.625,00	3.870.443.949,00	0,00	0,00
b.	Program	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.063.798.159,00	984.566.384,00	14.646.000,00	14.600.000,00
c.	Program	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.795.516.800,00	1.774.978.687,00	0,00	0,00
d.	Program	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	70.325.400,00	62.913.612,00	0,00	0,00
e.	Program	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	497.143.300,00	459.465.257,00	5.533.000,00	5.500.000,00



NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	NAMA PROGRAM	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI		MODAL	
			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
f.	Program	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	465.259.957,00	454.678.196,00	0,00	0,00
Jumlah			888.104.600.616,70	798.966.103.189,53	43.619.973.682,00	38.837.469.692,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung 2025

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan strategis pemerintah daerah (pemda) biasanya berkaitan dengan isu-isu mendasar yang mempengaruhi pembangunan jangka menengah dan panjang. Berikut beberapa permasalahan strategis yang umum dihadapi pemerintah daerah di Indonesia

1. Tata Kelola dan Birokrasi meliputi : Reformasi birokrasi yang belum optimal, Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pelayanan publik yang lambat dan kurang transparan, Digitalisasi pemerintahan yang belum merata.
2. Keterbatasan Anggaran dan Ketergantungan Fiskal seperti Ketergantungan tinggi pada transfer dari Pemerintah Pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, Belanja pegawai yang mendominasi APBD.
3. Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial seperti Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi, Ketimpangan wilayah perkotaan dengan perdesaan, Akses pendidikan dan kesehatan belum merata.
4. Infrastruktur dan Konektivitas terkait dengan Kualitas jalan, jembatan, dan transportasi umum yang belum memadai, Akses air bersih dan sanitasi terbatas, Kesenjangan infrastruktur antarwilayah.
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan contoh Alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan, Pengelolaan sampah dan limbah, Risiko bencana (banjir, gempa, longsor).
6. Daya Saing Ekonomi Daerah terlihat seperti Ketergantungan pada sektor primer (pertanian/tambang), Kurangnya inovasi dan hilirisasi industri, Iklim investasi yang belum kondusif.
7. Urbanisasi dan Penataan Ruang seperti Pertumbuhan kota yang tidak terkendali, Permukiman kumuh, Kemacetan dan polusi.
8. Kualitas SDM dan Bonus Demografi dengan Rendahnya kualitas tenaga kerja, Ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja, Tantangan pemanfaatan bonus demografi.

Identifikasi Permasalahan Pembangunan daerah Kabupaten Belitung yang dilakukan dari data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten Belitung didapat dari gambaran umum pembangunan daerah Kabupaten Belitung yang dilihat dari berbagai aspek – aspek pembangunan.

1. Ketergantungan Ekonomi pada Sektor Tertentu dengan melihat Ekonomi masih dipengaruhi sektor pariwisata dan pertambangan timah, rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan penurunan kunjungan wisata. Hilirisasi dan diversifikasi ekonomi (UMKM, perikanan, ekonomi kreatif) yang belum optimal.
2. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dengan Belitung dikenal sebagai destinasi unggulan di Kepulauan Bangka Belitung merupakan tantangan seperti infrastruktur pendukung (akses, transportasi lokal, amenities) belum merata, resiko kerusakan lingkungan pesisir akibat aktivitas wisata dan tambang dan peningkatan kualitas SDM pariwisata dan promosi digital.



3. Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah, keterbatasan transportasi antarwilayah dan antar pulau, akses air bersih dan sanitasi di beberapa desa masih perlu peningkatan, Infrastruktur digital (internet cepat) belum sepenuhnya merata.
4. Pengelolaan Lingkungan dan Reklamasi Pascatambang, Banyaknya lahan bekas tambang yang belum direklamasi optimal, Ancaman abrasi pantai dan berkurangnya ekosistem laut, Pengelolaan sampah, khususnya di kawasan wisata, perlu penguatan sistem terpadu.
5. Kualitas SDM dan Ketenagakerjaan, Keterbatasan tenaga kerja terampil di sektor pariwisata dan industri kreatif, Tingkat pengangguran usia muda relatif perlu perhatian, Kesesuaian pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja masih perlu ditingkatkan.
6. Ketahanan Pangan dan Perikanan, Potensi perikanan besar, namun pengolahan dan rantai pasok belum maksimal, Ketergantungan pada pasokan bahan pangan dari luar daerah untuk komoditas tertentu
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Fiskal Daerah masih besarnya Ketergantungan pada dana transfer pusat masih cukup tinggi, Optimalisasi PAD dari sektor pariwisata dan pajak daerah perlu inovasi dan Digitalisasi pelayanan publik masih bisa ditingkatkan
8. Penataan Ruang dan Urbanisasi dengan Pertumbuhan kawasan wisata perlu dikendalikan agar sesuai RTRW juga Potensi konflik tata ruang antara pertambangan, pariwisata, dan konservasi.

❖ Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan perekonomian suatu wilayah menjadi salah satu tolok ukur melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung mengalami perkembangan yang cenderung melambat. Melambatnya perkembangan perekonomian disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi secara global, lemahnya tingkat konsumsi masyarakat akibat dampak dari inflasi. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari kategori pertanian, perikanan dan kehutanan. Walaupun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi namun beberapa kategori mengalami perlambatan.

Perlambatan pertumbuhan terjadi pada kategori industri pengolahan, perdagangan besar, dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan kategori jasa lainnya. Peningkatan aktifitas pertanian, kehutanan dan perikanan, diharapkan mampu meningkatkan aktifitas ekonomi pada lapangan usaha lainnya. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Belitung dalam kurun Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung tahun 2024 sebesar 1,84 persen atau mengalami perlambatan dibanding tahun 2023 yang sebesar 5,75 persen. Namun masih berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebesar 0,77 persen. Perlambatan ekonomi pada tahun 2024 salah satunya diakibatkan oleh perlambatan pertumbuhan pada sektor Industri pengolahan yang berkontraksi sebesar 2,45 persen dan mengalami pertumbuhan paling kecil dibandingkan dengan sektor lainnya.

Di tahun 2024 ini, sektor dengan kontribusi ekonomi terbesar ada pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (27,10 persen), industri pengolahan (12,67 persen), dan Konstruksi (11,74 persen). Namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung pada Triwulan III Tahun 2025 meningkat dan sudah mencapai 4,54 persen. Angka inflasi bulanan di Kabupaten Belitung yang tergolong inflasi ringan atau dibawah 10% pertahun, walaupun belum mengganggu perekonomian daerah namun dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berpenghasilan tetap. Pengendalian terhadap inflasi menjadi penting karena ada keterkaitan yang erat antara kenaikan harga dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap.

Dengan adanya kenaikan harga barang dan jasa yang tidak serta merta disertai dengan meningkatnya pendapatan bukan tidak mungkin akan menyebabkan mereka membatasi pengeluaran dan mengatur ulang perencanaan keuangan. Selain itu potensi peningkatan jumlah penduduk miskin juga kian besar dikarenakan kemampuan membeli barang kebutuhan hidup yang terus menurun. Inflasi di Kabupaten Belitung mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2018 berada pada angka 2,72 kemudian meningkat pada angka 3,19 di tahun 2019 dan turun menjadi 2,11 di tahun 2020. Terjadi lonjakan signifikan di tahun 2021 pada angka 4,01 dan 4,17 di tahun 2022, tahun 2023 sebesar 3,8% , tahun 2024 1,68% dan tahun 2025 1,44%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi tahunan terbesar adalah makanan, minuman dan tembakau yang pada tahun 2025 mengalami inflasi sebesar 4,68 persen, dengan andil inflasi sebesar 1,78 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil



inflasi tahunan adalah cabai rawit (0,27%), cumi-cumi (0,22%), dan ikan bulat (0,18%). Kelompok ini juga merupakan kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar, dengan tingkat inflasi sebesar 1,40 persen dan andil inflasi sebesar 0,55 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi bulanan adalah angkutan udara (0,25%), cabai rawit (0,22%), dan kangkung (0,09%). Secara wilayah, dari empat titik penghitungan inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluruhnya mengalami inflasi, baik secara tahunan maupun bulanan. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Bangka Barat sebesar 4,02 persen, sementara yang terendah terjadi di Tanjung Pandan sebesar 1,44 persen. Secara gabungan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami inflasi tahunan sebesar 2,77 persen dan inflasi bulanan sebesar 0,55 persen.

Indeks Gini Kabupaten Belitung selama periode 2018-2022 berfluktuatif cenderung menurun dari 0,267 pada tahun 2018 terus menurun hingga tahun 2021 menjadi 0,195, mengalami peningkatan menjadi 0,237 pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Kabupaten Belitung. Secara nasional selama lima tahun terakhir Kabupaten Belitung memiliki indeks Gini dibawah Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau Indeks Gini di Kabupaten Belitung berfluktuasi dalam lima tahun terakhir, Indeks Gini 2025 Indeks Gini Tahun sebesar 0,205, Kabupaten Belitung masuk dalam kategori pemerataan pengeluaran yang relatif tinggi antar penduduk atau kesenjangan pendapatan antar penduduk sangat rendah bila dibandingkan dengan provinsi dan nasional. Indeks Gini yang menurun menunjukkan pendapatan antar kelompok masyarakat semakin merata secara umum, kemiskinan di Kabupaten Belitung periode 2021-2025 mengalami fluktuasi.

Pada tahun 2025 tingkat kemiskinan Kabupaten Belitung adalah 6,44 persen atau naik 0,33 poin dari capaian tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin ikut meningkat hingga 12.760 jiwa atau bertambah 790 jiwa dari tahun sebelumnya. Hal ini dipicu oleh kenaikan garis kemiskinan dan inflasi. Selain itu juga mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat rentan yang sebelumnya berada sedikit di atas garis kemiskinan akhirnya masuk dalam kategori miskin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Belitung tahun 2025 sebesar 3,64 persen atau turun 0,24 poin dari tahun sebelumnya. Angka tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan TPT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional. Jadi dari 100 orang angkatan kerja terdapat 3-4 orang yang menganggur di Kabupaten Belitung. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung tahun 2025 mencapai 75,29 meningkat 0,33 poin dari capaian tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dengan capaian IPM tersebut maka Kabupaten Belitung berada pada kelompok status pembangunan manusia “tinggi”.

Masalah Pokok pembangunan perekonomian Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya produksi pertanian dan perikanan

Belum optimalnya produksi pertanian disebabkan oleh belum optimalnya penerapan teknologi dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, masih rendahnya kompetensi petani dan kelembagaan petani, belum terkelolanya air irigasi dengan baik, terjadinya alih fungsi lahan pertanian, dan belum optimalnya pengelolaan pasca panen produk pertanian dan perkebunan.

Belum optimalnya pengembangan perikanan tangkap, dan budidaya dipengaruhi oleh belum optimalnya produksi perikanan tangkap, masih tingginya tangkapan ikan diluar batas biologis yang aman, belum optimalnya produksi perikanan budidaya, adanya *cold storage portable* diharapkan penyimpanan ikan dan sejenisnya bisa lebih segar dan tahan lama sebelum di jual atau di ekspor ke pembeli, belum optimalnya produksi perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Selat Nasik.

2. Belum optimalnya pengembangan koperasi dan usaha mikro

Belum Optimalnya pengembangan koperasi dan mikro disebabkan oleh Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi yang masih rendah, masih rendahnya pemberdayaan usaha mikro, belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah dalam mengembangkan IKM sebagai pendukung kepariwisataan, dan belum optimalnya pembinaan dan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan IKM.



3. Kurangnya daya saing pariwisata

Minimnya daya saing pariwisata Kabupaten Belitung dipengaruhi oleh belum optimalnya amenitas, atraksi, promosi pariwisata, belum optimalnya upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, SDM pariwisata yang masih kurang berkualitas, belum optimalnya pelaku ekonomi kreatif pendukung pariwisata, serta belum optimalnya pengembangan Desa wisata.

4. Belum optimalnya tata kelola penanaman modal dan perizinan

Tata kelola penanaman modal dan perizinan yang belum optimal disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan iklim dan promosi penanaman modal, belum optimalnya pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, belum optimalnya perencanaan penanaman modal, belum optimalnya sistem pelayanan perizinan dan non perizinan, belum optimalnya pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal, belum optimalnya perencanaan kawasan industri.

5. Ketersediaan lapangan kerja formal belum seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja.

Ketersediaan lapangan kerja formal belum seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja menyebabkan masih ditemukannya pengangguranterbuka di Kabupaten Belitung. Pengangguran terbuka disebabkan kurangnya motivasi masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja, informasi bursa kerja yang relatif terbatas, serta kurangnya kemampuan atau kompetensi penduduk usia kerja.

❖ Permasalahan Sumber Daya Manusia Belum Berkualitas dan Berdaya Saing

Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing sangat penting dalam pembangunan daerah karena mereka merupakan aset utama dalam mencapai tujuan pembangunan. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, daerah akan mampu mengembangkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien, serta meningkatkan daya saing dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berikut permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia dan daya saing:

1. Belum optimalnya mutu layanan kesehatan masyarakat

Belum optimalnya mutu layanan kesehatan masyarakat dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya sumber daya, infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan, serta faktor sosial dan ekonomi. Akibatnya, masyarakat mungkin tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang optimal, yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup mereka. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kematian ibu di Kabupaten Belitung. Tahun 2025 angka kematian ibu di Kabupaten Belitung sebesar 216,14 AKI per 100.000 kelahiran hidup.

2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya angka kesakitan dan angka kematian. Beberapa penyebab rendahnya kesadaran masyarakat adalah kurangnya pengetahuan, kurangnya pemahaman akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan, dan kurangnya akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai.

Masih rendahnya kesadaran masyarakat Belitung untuk berperilaku hidup bersih dan sehat ditandai dengan tidak tercapainya salah satu indikator dari 10 indikator PHBS di tatanan rumah tangga adalah menggunakan jamban yang sehat sampai dengan tahun 2025 persentase desa ODF (*Open Defecation Free*) di Kabupaten Belitung baru mencapai 95% atau masih ada 2 desa/kelurahan yang masih melakukan buang air besar sembarangan.

Selain itu masih tingginya kasus stunting di beberapa Kecamatan di Kabupaten Belitung mengindikasikan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Meskipun *prevalensi stunting* secara global kabupaten di angka 16,94 pada tahun 2025 terjadi penurunan signifikan sebesar 8,82% .

3. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali

Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kemiskinan, kekurangan pangan, keterbatasan sumber daya, dan degradasi lingkungan. Beberapa penyebab laju



pertumbuhan penduduk yang belum terkendali adalah kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi tentang kesehatan reproduksi, rendahnya taraf hidup, keinginan untuk memiliki anak yang banyak, serta norma dan budaya yang mendukung kelahiran banyak anak.

4. Kurangnya akses pendidikan

Minimnya akses pendidikan adalah salah satu masalah pembangunan yang dapat mempengaruhi kemajuan dan kualitas sumber daya manusia. Tanpa akses pendidikan yang memadai, masyarakat sulit untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup, sehingga dapat memicu kemiskinan, pengangguran dan ketidakmerataan sosial. Hal ini terlihat dari rata rata lama sekolah 9,11 dan harapan lama sekolah 73,13.

❖ Permasalahan Infrastruktur

Keberadaan infrastruktur pada suatu daerah merupakan hal yang mutlak diperlukan, namun dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur pada sebuah daerah tidaklah mudah, seringkali terdapat masalah yang dapat menghambat.

Pembangunan infrastruktur juga memegang peranan penting untuk peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, sanitasi, drainase, bangunan gedung serta fasilitas publik lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan infrastruktur dapat menopang sistem sosial dan sistem ekonomi yang sekaligus menjadi penghubung dalam sistem lingkungan.

Pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi pendorong bagi pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait dan memberikan *multiplier effect*, yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi. Selain itu, pertambahan penduduk serta adanya urbanisasi menyebabkan peningkatan kebutuhan infrastruktur di Kabupaten Belitung.

Dengan Pembangunan infrastruktur akan memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi sendiri akan berpengaruh terhadap investasi. Sedangkan peningkatan kualitas hidup akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran.

Masalah terkait konektivitas dan infrastruktur yang mendukung perekonomian dan pelayanan dasar yaitu:

1. Kurangnya aksesibilitas antara wilayah

Minimnya infrastruktur kewilayahan menyebabkan kurangnya aksesibilitas antara wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya perencanaan tata ruang, masih rendahnya informasi tata ruang, belum optimalnya penyelenggaraan jalan, kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan, kurangnya sarana dan prasarana perhubungan laut, belum optimalnya pengelolaan pelayaran, belum optimalnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, belum optimalnya pengelolaan sumber daya air.

2. Kurangnya pemenuhan dan pengelolaan sumber daya air

Minimnya pemenuhan dan pengelolaan sumber daya air dipengaruhi oleh belum optimalnya pengelolaan sumber daya air. Untuk pemenuhan dan pengelolaan sumber daya air tersebut perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air, serta meningkatkan pengendalian sumber daya air.

❖ Permasalahan Aspek Tata Kelola Pemerintahan

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas serta penegakan hukum yang baik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa penyelenggara pemerintah harus memperhatikan azas umum penyelenggaraan negara, antara lain : 1) Azas Kepastian Hukum, 2) Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, 3) Azas Kepentingan Umum, 4) Asas Keterbukaan, 5) Asas Proporsionalitas, 6) Asas Profesionalitas dan 7) Asas Akuntabilitas.



Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, masih kurangnya kualitas pelayanan publik, serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan, tercermin dari Nilai Laporan Akuntabilitas dengan kategori “B” dari target yang ditetapkan “BB” dan Indeks Reformasi Birokrasi masih kategori “CC”.

Berikut permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan Tata Kelola Pemerintahan :

1. Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal

Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset dikarenakan pengamanan aset, terutama aset tanah bawah jalan yang belum memiliki sertifikat, serta aset yang tidak diketahui keberadaanya. Pengelolaan dan penataan aset oleh perangkat daerah yang belum optimal, serta belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berbasis elektronik / Digitalisasi PAD.

2. Perencanaan pembangunan daerah belum berkualitas

Kualitas perencanaan pembangunan dalam penghitungan mandiri sudah menunjukkan peningkatan, hanya pengawalan dari personel perencana paada level Desa/Kelurahan sampai Kecamatan untuk menajamkan kualitas usulan rencana pembangunan disertai dengan kelengkapan teknis bukti dukung.

3. Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah

Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang belum optimal sesuai target, belum optimalnya pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah, belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas aparatur pengawasan intern pemerintah yang belum optimal.

4. Kualitas dan profesionalitas SDM aparatur masih rendah

Kualitas dan profesionalitas aparatur disebabkan karena integritas dan kompetensi aparatur masih kurang, belum optimalnya pengelolaan sistem manajemen aparatur, dan sistem manajemen talenta pemerintahan yang belum terlaksana dengan baik.

5. Belum optimalnya pelayanan publik dengan teknologi informasi yang terintegrasi

Permasalahan pelayanan publik di Kabupaten Belitung disebabkan oleh kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik masih belum optimal, keterbukaan informasi publik yang masih kurang, pelayanan publik yang masih kurang, belum optimalnya tindak lanjut keluhan dan aduan masyarakat, pelayanan administrasi pertanahan yang masih kurang, terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik, pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi untuk pelayanan kepada masyarakat belum optimal, ketersediaan data dan informasi pembangunan yang masih kurang, serta masih kurangnya infrastruktur dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

❖ Permasalahan Aspek Lingkungan Hidup

Definisi lingkungan hidup telah dijabarkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sementara itu pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak lepas dari penggunaan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang terbarukan maupun sumber daya alam tak terbarukan. Masalah lingkungan hidup merupakan ancaman terhadap pembangunan baik saat ini maupun di masa depan.

Permasalahan utama terkait aspek lingkungan hidup di Kabupaten Belitung adalah belum optimalnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi penurunan kualitas air, kualitas udara serta kualitas tutupan lahan serta perilaku membuang sampah dan sarpras sampah yang ada di setiap rumah dan lingkungan.

Berikut penjelasan permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Belitung :

1. Menurunnya kualitas air, udara dan tutupan lahan

Kualitas air yang menurun disebabkan beberapa hal antara lain penggunaan bahan baku yang berpotensi mencemari air, seperti limbah industri, limbah rumah tangga dan limbah pertanian. Kegiatan masyarakat yang



meningkat di sekitar daerah hulu sungai terutama terkait kegiatan penambangan inkonvensional (TI) / PIP/ penambangan rakyat menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas air. Pengujian kualitas air juga belum optimal dilakukan karena keterbatasan sarana dan prasarana peralatannya. Kemudian terkait kualitas udara yang menurun dapat disebabkan banyak factor dengan satu diantaranya adalah meningkatnya emisi serta pencemaran udara ambein.

Adapun kualitas tutupan lahan yang belum optimal dikarenakan penggunaan lahan yang meningkat sehingga menjadi lahan kritis, pencadangan sumber daya alam hayati yang masih rendah serta masih kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2. Meningkatnya timbulan sampah

Sarana dan prasarana persampahan yang belum memadai dan sumber daya manusia yang terbatas mengakibatkan terhambatnya pengelolaan sampah di Kabupaten Belitung yang selanjutnya berdampak pada peningkatan timbulan sampah. Selain itu peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah padahal mereka merupakan penyumbang timbulan volume sampah terbesar. Penanganan sampah melalui program 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) juga harus ditingkatkan. Masalah lainnya terkait sampah yaitu pengelolaan dalam hal sistem pemrosesan akhir sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Gunung Sadai juga masih belum optimal.

❖ Tantangan Utama Pembangunan Kabupaten Belitung

Perekonomian

Transformasi ekonomi dan hilirisasi sektor unggulan untuk menciptakan nilai tambah pada sektor unggulan (pertanian, perkebunan dan perikanan), kolaborasi lintas sektor, mempertahankan status, unesco global geopark sesuai standar unesco, peningkatan pariwisata menjadi quality tourism.

Pembangunan Manusia

Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (talenta digital), Pergeseran budaya kerja, Masalah Kesehatan dan stunting, Tingginya angka kemiskinan karena tingginya garis kemiskinan, *Brain Drain* (pelarian modal manusia) dan Perdagangan Manusia, Menciptakan ekosistem pekerjaan yang menarik bagi lulusan sarjana lokal agar mau pulang dan membangun daerahnya (sektor teknologi, manajemen pariwisata dan ekonomi kreatif), Degradasi nilai budaya lokal.

Infrastruktur dan Lingkungan

Ketahanan air bersih, Revitalisasi aksesibilitas Internasional, Konektivitas pulau-pulau kecil, Pengelolaan sampah terintegrasi, Abrasi pantai dan kenaikan permukaan laut, Rehabilitasi lahan pasca tambang, Pelestarian Biodiversitas ditengah pembangunan

Tata Kelola Pemerintahan

Kemandirian fiskal, Sistem pajak digital yang Terintegrasi, Diversifikasi pendapatan (mencari sumber pendapatan baru di luar pajak serta pemberdayaan BUMD), Transformasi digital dan birokrasi, Menyatukan data antar OPD agar kebijakan yang diambil berbasis data Tunggal, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Pengelolaan SDM Aparatur (Meritokrasi).

b. Visi dan Misi

- Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung tahun 2025-2045 dan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029, penentuan visi misi pada RPJMD didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahapan pertama dan isu strategis yang aktual.



Tahun 2025 merupakan masa transisi, dari yang sebelumnya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Setelah dilantiknya Bupati terpilih dan ditetapkan RPJMD 2025-2029, maka Visi Kabupaten Belitung sesuai dengan yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Belitung 2025-2045. Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun berdasarkan Visi kepala daerah terpilih serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Berikut merupakan Visi RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 :

“ Belitung Maju, Inovatif, dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera ”

- Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang. Misi merupakan pernyataan yang menggambarkan tujuan pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa daerah kepada suatu fokus. Pemerintah Kabupaten Belitung, telah menetapkan tiga misi sebagai sarana untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut :

Misi Kesatu	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dalam mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera;
Misi Kedua	Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing berbasis sektor unggul dan potensial;
Misi Ketiga	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, bersih dan bermartabat;
Misi Keempat	Membangun infrastruktur yang berkualitas secara merata dan berkelanjutan.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Adapun dokumen perencanaan jangka menengah yang digunakan pada tahun 2025 adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung tahun 2025-2045 dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam implementasi program pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Program strategis yang perlu dilaksanakan oleh pengampu urusan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD disebut sebagai program prioritas. Karena program prioritas yang ditentukan diharapkan dapat mampu memberikan daya ungkit untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut merupakan program prioritas Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Belitung :

Tabel 1.15
Program Prioritas Pembangunan Daerah
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

NO	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
	MISI KESATU : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdaya saing dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera	
I.	TUJUAN : Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	
1)	Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidikan	
a.	Program Bupati : Program Cerdas (Cipta edukasi ramah daerah sepanjang hayat) berkarakter untuk semua	
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NO	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
3.	Program Pemenuhan Hak Anak	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Program Perlindungan Khusus/Anak	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5.	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
7.	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
2)	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kesehatan	
b.	Program Bupati : Program Gerbang Sehat (Gerakan Pembangunan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Terintegrasi)	
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
5.	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
6.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3)	Sasaran : Menurunnya prevalensi stunting	
c.	Program Bupati : Program Siaga Stunting (Sinergi Aksi Gizi Anak untuk Penurunan Stunting Terintegrasi)	
1.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4)	Sasaran : Meningkatnya Pemerataan dan Pendapatan Masyarakat	
d.	Program Bupati : Program “INSPIRASI” (Inisiatif Pemberdayaan Sosial dan Perempuan untuk Kesejahteraan Inklusif)	
1.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
	MISI KEDUA : Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing Bebas Sektor Unggul dan Potensial	
I.	TUJUAN :	



NO	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Sektor Unggulan dan Potensial	
1)	Sasaran : Meningkatnya Investasi Daerah	
e.	Program Bupati : Program “SINERGI INVESTASI” (Sinergi Pengembangan Infrastruktur dan Pasar untuk Menarik Investasi dan Meingkatkan Kesetaraan Harga)	
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
2.	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
3.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DPMPTSP
4.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
2)	Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Prima	
f.	Program Bupati : Program Daerah “Prima Unggul” untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Prima	
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Darana Pertanian	Dinas Ketanahan Pangan dan Pertanian
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketanahan Pangan dan Pertanian
3.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
4.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
5.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
7.	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
8.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
9.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
10.	Program Standarisasi dan perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
11.	Program Penigkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
12.	Program Satbilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Tenaga Kerja
3)	Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pariwisata serta Budaya Daerah	
g.	Program Bupati : Program Pariwisata “Unggul”	
1.	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
4.	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
7.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
	MISI KETIGA : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih dan Bermartabat	
I.	TUJUAN : Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Sektor Unggulan dan Potensial	
1)	Sasaran : Meningkatnya Investasi Daerah	
h.	Program Bupati : Program SPBE Unggul	
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Program Pengelolaan Kearsipan	Dinas Komunikasi dan Informatika
i.	Program Bupati : Program Prioritas Daerah : “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Kinerja dan akuntabilitas (SAKIP Smart)”	
1.	Program Perencaanaan Pengedalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapperida
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida



NO	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Koordinasi dan Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah)	Sekretariat Daerah
j.	Program Bupati : Program Prioritas Daerah : “ Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju Opini WTP”	
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
k.	Program Bupati : Program “SINAR PELAYANAN” (Sinergi Integritas, Akuntabilitas, dan Transparansi untuk Pelayanan Prima)	
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	Satpol PP
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
7.	Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMTSP
8.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
9.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan
10.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
11.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
12.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
2)	Sasaran : Terwujudnya Profesionalitas ASN	
l.	Program Bupati : Program “Menara Integritas Belitung”	
1.	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
3)	Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	
m.	Program Bupati : PAD KUAT (Program Penguatan Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah)	
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bappenda
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
	MISI KEEMPAT : Membangun Infrastruktur yang Berkualitas Secara Merata dan Berkelanjutan	
l.	TUJUAN : Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan	
1)	Sasaran : Tersedianya Infrastruktur yang Inklusif dan Berkualitas	
n.	Program Bupati : Program “KOTAKITA” (Kota Tertata, Inklusif, dan Tangguh)	
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4.	Program Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
7.	Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
o.	Program Bupati : ”RUPAKOTA” (Revitalisasi dan Penataan Ruang Kota Terpadu)	
1.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.	Program Penataan Bangunan dan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



NO	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
3.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4.	Program Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2)	Sasaran : Berkurangnya Kesenjangan Pembangunan antar Wilayah	
p.	Program Bupati : Program “BANGUN LESTARI” (Pembangunan Infrastruktur Aksesibel dan Ramah Lingkungan Berkelanjutan)	
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Darinase	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4.	Program Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7.	Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8.	Program Pelayaran	Dinas Perhubungan
q.	Program Bupati : Program “INFRASEJAHTERA” (Infrastruktur Sejahtera untuk Masyarakat Desa Berdaya)	Dinas Perhubungan
1.	Program Administrasi Pemerintah Desa	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
r.	Program Bupati : Program “Belitung Lestari Aksi Sadar Lingkungan”	
1.	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
2.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
4.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
s.	Program Bupati : Program “Sinergi Hijau Belitung: Masyarakat Garda Terdepan Lingkungan” (SIHITUNG)	
1.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
t.	Program Bupati : Program “SIRAM” (Sumber Daya Air yang Ramah dan Berkelanjutan)	
1.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Lingkungan Hidup
u.	Program Bupati : Program “BERSIH” (Bangun Infrastruktur dengan Energi Ramah, Sehat, Inovatif, dan Hijau)	
1.	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
v.	Program Bupati : Program “TANGGUH Bencana” (Tumbuh Tanggap, Unggul dalam Mitigasi Bencana)	
1.	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	BPBD

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026



d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah mencakup semua kegiatan yang ada di Perangkat Daerah. Uraian kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

➤ **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN**

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Peningkatan pelayanan BLUD
- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- Penataan Organisasi
- Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- Layanan Administrasi DPRD

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**

Kegiatan :

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

➤ **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Kegiatan :

- Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

➤ **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**

Kegiatan :

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Kegiatan :

- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota
- Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



➤ **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**

Kegiatan :

- Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal , Usah Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi ioleh Industri Rumah Tangga
- Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

➤ **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**

Kegiatan :

- Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya masyarakat (UKBM) Tingkat Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Sehat dalam Promotif Prenventif Tingkat Daerah kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

Kegiatan :

- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**

Kegiatan :

- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

Kegiatan :

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**

Kegiatan :

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/kota

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**

Kegiatan :

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

➤ **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PEGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

➤ **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**

Kegiatan :

- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**



Kegiatan :

- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota

➤ **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**

Kegiatan :

- Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**

Kegiatan :

- Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

➤ **PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Kegiatan :

- Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

➤ **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**

Kegiatan :

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

➤ **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**

Kegiatan :

- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**

Kegiatan :

- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota

➤ **PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**

Kegiatan :

- Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

➤ **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**

Kegiatan :

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

➤ **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

Kegiatan :

- Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENAGGULANGAN BENCANA**

Kegiatan :

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**

Kegiatan :

- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN**

Kegiatan :

- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota



- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**
Kegiatan :
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**
Kegiatan :
 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**
Kegiatan :
 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**
Kegiatan :
 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah
- **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**
Kegiatan :
 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
- **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**
Kegiatan :
 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan
- **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**
Kegiatan :
 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**
Kegiatan :
 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**
Kegiatan :
 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**
Kegiatan :
 - Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan
 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi



➤ **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**

Kegiatan :

- Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan
- Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**

Kegiatan :

- Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota

➤ **PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**

Kegiatan :

- Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Kegiatan :

- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang

➤ **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

Kegiatan :

- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupateng/Kota
- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**

Kegiatan :

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**

Kegiatan :

- Penyimpanan Sementara Limbah B3

➤ **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**

Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**

Kegiatan :

- Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
- Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**

Kegiatan :

- Penyimpanan Sementara Limbah B3

➤ **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**

Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



- **PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**
Kegiatan :
 - Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
- **PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**
Kegiatan :
 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kmasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**
Kegiatan :
 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**
Kegiatan :
 - Pengelolaan Sampah
 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
- **PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**
Kegiatan :
 - Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**
Kegiatan :
 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- **PROGRAM PENCATATAN SIPIL**
Kegiatan :
 - Pelayanan Pencatatan Sipil
- **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**
Kegiatan :
 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Administrasi Kependudukan
- **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**
Kegiatan :
 - Penyusunan Profil Kependudukan
- **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**
Kegiatan :
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**
Kegiatan :
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**
Kegiatan :
 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk



➤ **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**

Kegiatan :

- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi

➤ **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**

Kegiatan :

- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

➤ **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**

Kegiatan :

- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota
- Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**

Kegiatan :

- Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

Kegiatan :

- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**

Kegiatan :

- Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

Kegiatan:

- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

Kegiatan:

- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**

Kegiatan :

- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**

Kegiatan :

- Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

➤ **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**

Kegiatan :

- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil



- **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**
Kegiatan :
 - Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**
Kegiatan :
 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah, kabupaten/kota
- **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**
Kegiatan :
 - Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**
Kegiatan :
 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**
Kegiatan :
 - Penyadaran,pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- **PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**
Kegiatan :
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah Provinsi
 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
- **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**
Kegiatan :
 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
- **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**
Kegiatan :
 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**
Kegiatan :
 - Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PELESTRAIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**
Kegiatan :
 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**
Kegiatan :
 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota



➤ **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**

Kegiatan :

- Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**

Kegiatan :

- Pengelolaan Arsip Dinamis Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**

Kegiatan :

- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**

Kegiatan :

- Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

➤ **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kegiatan :

- Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**

Kegiatan :

- Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
- Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

➤ **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**

Kegiatan :

- Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**

Kegiatan :

- Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

➤ **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

Kegiatan :

- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

➤ **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**

Kegiatan :

- Pengawasan penggunaan sarana pertanian
- Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota
- Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota



- Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota lain
- **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**
Kegiatan :
 - Pengembangan prasarana pertanian
 - Pembangunan prasarana pertanian
- **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**
Kegiatan :
 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota
 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
- **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**
Kegiatan :
 - Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota
- **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**
Kegiatan :
 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**
Kegiatan :
 - Pelaksanaan penyuluhan pertanian
- **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**
Kegiatan :
 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
- **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**
Kegiatan :
 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota
 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubdidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- **PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**
Kegiatan :
 - Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**
Kegiatan :
 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**
Kegiatan :
 - Penyusunan, Perencanaan dan Pendanaan
 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
Kegiatan :
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
Kegiatan :
 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Anggaran Daerah
 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah



- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
- **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**
Kegiatan :
 - Pengelolaan Barang Milik Daerah
- **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**
 - Pengelolaan pendapatan Daerah
- **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**
Kegiatan :
 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - Mutasi dan Promosi ASN
 - Pengembangan Kompetensi ASN
 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
Kegiatan :
 - Pengembangan Kompetensi Teknis
 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
- **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
Kegiatan :
 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
Kegiatan :
 - Administrasi Tata Pemerintahan
 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - Fasilitasi Dan koordinasi Hukum
 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah
- **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**
Kegiatan :
 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa
 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
- **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**
Kegiatan:
 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - Fasilitasi Tugas DPRD
- **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**
Kegiatan :
 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**
Kegiatan :
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - Pendampingan dan Asistensi



➤ **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Kegiatan :

- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

➤ **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

Kegiatan :

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

➤ **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

➤ **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

Kegiatan :

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

➤ **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**

Kegiatan :

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa

➤ **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**

Kegiatan :

- Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan parpol, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan Situasi Politik

➤ **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL DAN BUDAYA**

Kegiatan :

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya

➤ **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK**

Kegiatan :

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pembangunan daerah ditujukan selain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, juga untuk menciptakan pemerataan atas hasil pembangunan itu sendiri. Terkait hal tersebut, Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, mengingatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu, Pasal 298 menyebutkan juga bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Dalam rangka menyediakan pelayanan yang merupakan urusan wajib, Pemerintah Daerah harus mengacu kepada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah. SPM ini menjadi tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Bila dikaji secara mendalam ada pergeseran makna SPM pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Secara tekstual, SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, namun



terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Dengan kata lain SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria.

Dalam penerapannya, SPM harus berdasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian, tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan hal-hal sebagai berikut; (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Perubahan Paradigma penting lain berkaitan dengan SPM adalah dalam konteks belanja daerah. Dalam belanja daerah harus ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM, sebagai jaminan pemenuhan hak konstitusional masyarakat oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian prioritas utama penyelenggaraan pemerintahan bukanlah kinerja Pemerintah Daerah tetapi terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara. Adapun Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kebutuhan dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah mencakup 6 (enam) bidang urusan wajib yaitu bidang urusan pendidikan; urusan kesehatan; urusan pekerjaan umum; urusan perumahan rakyat; urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan urusan sosial.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

c. Kebijakan Umum

Kebijakan Umum pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 merupakan arahan umum dalam perencanaan pembangunan jangka menengah terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan umum berisikan arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja yang merupakan pedoman berupa rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk mengarahkan strategi agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran bertahap selama lima tahun.

Kebijakan Umum Pembangunan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi erangkat Daerah (Renstra PD) dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan



mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diprioritaskan dalam target-target pembangunan Kabupaten Belitung, serta akan digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan semakin mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belitung, serta pada pencapaian visi Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 yaitu : “ **Belitung Maju, Inovatif, dan Berkelanjutan Sebagai Maritim Kawasan Barat dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera** ”

d. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator SPM, Kabupaten Belitung telah menyusun Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM di Kabupaten Belitung Tahun 2023-2027 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 13 Tahun 2023. Rencana aksi diharapkan dapat memberikan pedoman bagi para stakeholder terkait dalam pencapaian SPM tersebut dan harus diintegrasikan kepada dokumen perencanaan di daerah supaya bisa diimplementasikan, diterapkan dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Belitung. Adapun arah kebijakan yang terkait SPM di Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 adalah :

1. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar yang inklusif
2. Peningkatan mutu dan kemudahan akses layanan kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan intervensi konvergensi dengan kelompok sasaran : ibu hamil, nifas dan menyusui; anak usia 0-23 bulan; anak usia 24-59 bulan; remaja Putrid dan Catin; Komunitas dan Keluarga (rumah tangga dan masyarakat)
4. Peningkatan kesehatan masyarakat melalui akses layanan kesehatan yang lebih baik melalui peningkatan akses pusat kesehatan masyarakat serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak
5. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar
6. Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur perkotaan
7. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu
8. Peningkatan infrastruktur pemukiman yang layak
9. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan keterampilan yang inklusif
10. Penguatan Kapasitas SDM dalam akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan
11. Peningkatan kualitas pemetaan dan penilaian risiko bencana



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Indikator makro merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio). Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada skala nasional pascapandemi telah memberikan dampak positif pada proses pembangunan ekonomi di daerah yaitu baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Ibarat organ tubuh, perekonomian berfungsi layaknya jantung yang memompa darah serta mengalirkan oksigen keseluruh tubuh. Peranannya sangat vital dalam memompa denyut kehidupan suatu wilayah. Adapun gambaran indikator makro Kabupaten Belitung tahun 2024 dan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Makro Kabupaten Belitung Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,96 (Persen)	75,29 (Persen)	0,44
2	Persentase Penduduk Miskin	6,11 (Persen)	6,44 (Persen)	5,40
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,88 (Persen)	3,64 (Persen)	-6,19
4	Pertumbuhan Ekonomi	1,85 (Persen)	4,06 (Persen)	119,46
5	PDRB Per Kapita	73,794(Juta Rupiah)	78,751(Juta Rupiah)	6,72
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,248	0,205	-17,34

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu :

- a. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*),
Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH),
- b. Pengetahuan (*knowledge*), dan
Pengetahuan dapat diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).
- c. Standar hidup layak (*decent standard of living*).
Standar hidup layak dapat digambarkan oleh pengeluaran per kapita.

Nilai indeks pembangunan manusia di Kabupaten Belitung terus mengalami kemajuan selama kurun 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung

NO	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	TAHUN 2024	TAHUN 2025	KET
1	IPM KABUPATEN BELITUNG	74,96	75,29	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2026

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belitung terus mengalami peningkatan. Sebagaimana data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung bahwa IPM Kabupaten Belitung Tahun 2025 mencapai 75,29. Angka ini sedikit lebih tinggi dari nilai IPM tahun sebelumnya yang sebesar 74,96. Nilai IPM Kabupaten Belitung juga berada di atas IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2024 dengan nilai IPM sebesar 75,26 .

Pada tahun 2025, capaian masing-masing dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Angka Harapan Hidup/Usia Harapan Hidup (AHH/UHH) sebesar 73,13, naik 0,37 tahun dari sebelumnya, Harapan Lama Sekolah sebesar 12,10 tahun naik sebesar 0,01 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 9,11 tahun, naik 0,06 tahun dari tahun sebelumnya. Pengeluaran Per Kapita meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 14.449.000,- per tahun, meningkat menjadi Rp14.559.000,- per tahun.

2.1.2 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini akan dihasilkan Garis Kemiskinan, sedangkan jumlah penduduk miskin adalah banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sementara interpretasi tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk seluruhnya di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

Persentase penduduk miskin menurut BPS adalah persentase penduduk yang berada di Bawah Garis Kemiskinan (GK). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung dibandingkan pada tahun 2024 erjadi peningkatan pada tahun 2025 yaitu 6,11% pada tahun 2024 kemudian turun menjadi 6,44% pada tahun 2025.

Garis kemiskinan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di suatu daerah. Garis kemiskinan merupakan tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu daerah. Pada tahun 2024 garis kemiskinan Kabupaten Belitung mencapai Rp. 937.759,- atau bertambah sebesar Rp. 18.387,- dari tahun 2024 yang sebesar Rp. 919.372,-. Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang yang tinggal di wilayah Kabupaten Belitung akan dikategorikan sebagai penduduk miskin jika total pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non makanan setiap bulannya kurang dari Rp. 937.759,-. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, garis kemiskinan Kabupaten Belitung tergolong tinggi, bahkan jauh melebihi garis kemiskinan nasional yang hanya sebesar Rp. 641.443,- pada tahun 2025 atau memiliki selisih Rp. 296.316,- dan selisih Rp. 19.074,- dari garis kemiskinan Provinsi Kep. Bangka Belitung yang meningkat sebesar Rp. 956.833,- di tahun yang sama.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan secara parsial namun perlu kolaborasi dan sinergi atau secara holistik, intergratif dan spasial antar *stakeholder* maupun pemangku kepentingan..



Tabel 2.3
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belitung

NO	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN	TAHUN 2024	TAHUN 2025	KET
1	KABUPATEN BELITUNG	6,11	6,44	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2026

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan total angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi mengindikasikan adanya persoalan kemiskinan yang serius karena dengan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi berarti banyak penduduk yang belum memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Belum adanya penghasilan menyebabkan penduduk yang menganggur belum mampu mencapai tingkat kehidupan yang layak. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belitung tahun 2025 sebesar 3,64 menurun dari tahun 2024 sebesar 3,88 TPT Kabupaten Belitung tahun 2024 sedikit menurun dari tahun 2023 dengan selisih 0,24%.

Tabel 2.4
Persentase Angka Pengangguran Kabupaten Belitung

NO	PERSENTASE ANGKA PENGANGGURAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025	KET
1	KABUPATEN BELITUNG	3,88	3,64	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2026

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebagaimana data yang terdapat pada tabe; di bawah ini :

Tabel 2.5
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Belitung

NO	PDRB ADHK (%)	TAHUN 2024	TAHUN 2025	KET
1	KABUPATEN BELITUNG	1,85	4,06	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2026

Pada tahun 2025 LPE Kabupaten Belitung sebesar 4,06%, meningkat jika dibandingkan LPE tahun 2024 sebesar 1,84%. Perlambatan LPE ini tentunya dipengaruhi oleh laju pertumbuhan per lapangan usaha. Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Belitung pada tahun 2024 dan tahun 2025 :

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Belitung
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024-2025(Persen)

Kategori	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,78	3,69
B	Pertambangan dan Penggalian	-1,68	12,29
C	Industri Pengolahan	-2,45	2,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,20	2,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,84	2,69
F	Konstruksi	-2,11	-0,82



G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	-0,67	5,50
H	Transportasi dan Pergudangan	-0,78	3,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,32	8,05
J	Informasi dan Komunikasi	10,04	9,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,32	1,94
L	Real Estate	4,51	3,78
M,N	Jasa Perusahaan	9,37	6,93
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	7,91	-0,10
P	Jasa Pendidikan	10,83	6,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,53	5,54
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,23	9,63
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		1,85	4,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2026

2.1.5 PDRB Per Kapita

Penghitungan pendapatan per kapita yang digunakan saat ini adalah menggunakan metode penghitungan PDRB Per Kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan. Pada Tahun 2024 PDRB Per Kapita Riil Kabupaten Belitung tercatat Rp 73,794.000,- sedangkan pada Tahun 2025, PDRB Per Kapita Riil juga mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 78,751.000,-

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Nilai Rasio Gini Kabupaten Belitung tahun 2025 berada di angka 0,205. Angka tersebut menunjukkan pengeluaran penduduk Kabupaten Belitung pada tahun 2025 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah karena Rasio Gini atau Indeks Gini merupakan suatu indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada suatu daerah. Semakin tinggi atau besar Rasio Gini, semakin tinggi pula tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya tidak merata) dan sebaliknya jika semakin kecil Rasion Gini semakin rendah tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya semakin merata).

Distribusi pendapatan merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu daerah. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu daerah seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Rasio Gini Kabupaten Belitung berfluktuasi dari 0,195 pada tahun 2021 naik menjadi 0,237 tahun 2022, kemudian meningkat hingga mencapai angka 0,253 pada tahun 2023 dan turun menjadi 0,248 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 menurun menjadi 0,205.

Sementara itu, guna terus menekan angka capaian rasio gini, PemerintahKabupaten Belitung berupaya memperkuat usaha mikro. Karena UKM menjadi pilar penting dalam membangun perekonomian masyarakat. Sejumlah program seperti pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) dan pengembangan UMKM dilakukan untuk mencapai hal tersebut.

Pemerintah Kabupaten Belitung juga berupaya menekan angka capaian indeks gini melalui pemberian bantuan kepada masyarakat dari segi pengeluaran seperti dalam sektor pendidikan, pemberian beasiswa Pendidikan dan program beasiswa simpor, kemudian ada bantuan-bantuan sosial dan sejenisnya. Dan menjamin akses-akses barang kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Ketimpangan ekonomi pada dimensi distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Fenomena ini telah menjadi perhatian publik, sehingga upaya evaluasi yang sangat mendesak dilakukan. Dari hasil evaluasi diharapkan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya juga akan membawa konsekuensi berkurangnya tingkat ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat sejalan dengan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Apabila ketimpangan ini dibiarkan semakin melebar maka akan semakin mendistorsi hasil pembangunan.

Oleh karena itu upaya mengetahui besaran ketimpangan pengeluaran antar golongan penduduk maupun secara spasial perlu dilakukan. Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika



secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau Indeks Gini di Kabupaten Belitung berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Dengan Indeks Gini sebesar 0,205, Kabupaten Belitung masuk dalam kategori pemerataan pengeluaran yang relatif tinggi antar penduduk atau kesenjangan pendapatan antar penduduk sangat rendah bila dibandingkan dengan provinsi dan nasional. Indeks Gini yang menurun menunjukkan pendapatan antar kelompok masyarakat semakin merata.



2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	1.	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{26.256}{28.676} \times 100\%$ $= 91,56\%$	Disdikbud	
		2.	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{527}{6.277} \times 100\%$ $= 8.40\%$		
		3.	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Anak Usia Dini	$\frac{5.811}{6.139} \times 100\%$ $= 94,66\%$		
		4.	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	$\frac{661}{1.001} \times 100\%$ $= 66.03\%$		
		5.	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	$\frac{918}{1.240} \times 100\%$ $= 74.03\%$		
2	Kesehatan	1.	Persentase kematian ibu	$\frac{3}{1574} \times 1000$ $= 0.19\%$	Dinkes	
		2.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	$\frac{764}{8661} \times 100\%$ $= 8.82\%$		
		3.	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	$\frac{1.874}{2.339} \times 100\%$ $= 80.12\%$		
		4.	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	$\frac{2.187}{2.339} \times 100\%$ $= 93.50\%$		
		5.	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	$\frac{2.096}{2.228} \times 100\%$ $= 94.08\%$		
		6.	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{9.929}{11.319} \times 100\%$ $= 87.72\%$		
		7.	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	$\frac{27.306}{27.306} \times 100\%$		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			= 100%		
		8. Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	$\frac{104.839}{126.220} \times 100\%$ = 83.06%		
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{19.316}{21.243} \times 100\%$ = 90.93%		
		10. Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	$\frac{12.734}{13.124} \times 100\%$ = 97.03%		
		11. Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus sesuai standar	$\frac{3.425}{3.495} \times 100\%$ = 98.00%		
		12. Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	$\frac{329}{329} \times 100\%$ = 100%		
		13. Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkolosis sesuai standar	$\frac{3.378}{3.378} \times 100\%$ = 100%		
		14. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	$\frac{2.900}{3.461} \times 100\%$ = 83.79%		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	$\frac{169,7}{1.118,09} \times 100\%$ = 15,18%	DPUPR	
		2. Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	$\frac{610,063}{696,96} \times 100\%$ = 87,53%		
		3. Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	$\frac{39,009}{194,392} \times 100\%$ = 20,07%		



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Belitang Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{46,588}{53,742} \times 100\%$ = 86,69%		
		5.	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	$\frac{183,59}{288,37} \times 100\%$ = 63,66%		
		6.	Persentase peningkatan perlindungan kawasan sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	$\frac{15,13}{216,19} \times 100\%$ = 7,00%		
		7.	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	$\frac{109}{109} \times 100\%$ = 100%		
		8.	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Tidak Dapat Dilaksanakan		
		9.	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{44}{852} \times 100\%$ = 5,16%		
		10.	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	$\frac{11}{11} \times 100\%$ = 100%		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Tidak Dapat Dilaksanakan	DPUPR	
		2.	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	$\frac{0,86}{0,50} \times 100\%$ = 172%		
		3.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	$\frac{6}{1.606} \times 100\%$ = 0,37%		
		4.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	$\frac{1}{1} \times 100\%$ = 100%		
5.	Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	$\frac{1}{3} \times 100\%$ = 33.33%	BPBD	
		2.	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	$\frac{72}{72} \times 100\%$ = 100%	SAT POL PP	



No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3.	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	$\frac{16}{22} \times 100\%$ = 72.73%	SAT POL PP	
		4.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{2.772}{2.967} \times 100\%$ = 93.43%	BPBD	
		5.	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{845}{845} \times 100\%$ = 100%		
		6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{28}{36} \times 100\%$ = 77.78%		
6	Sosial	1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{30}{30} \times 100\%$ = 100%	DSPPPA	
		2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{15}{15} \times 100\%$ = 100%		
		3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{60}{60} \times 100\%$ = 100%		
		4.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{19}{19} \times 100\%$ = 100%		
		5.	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	$\frac{183}{183} \times 100\%$ = 100%		
		6.	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	$\frac{13.168}{33.100} \times 100\%$ = 39.78%		Proses penentuan kategori kesejahteraan membutuhkan proses yg panjang dan di tentukan oleh BPS Pusat
7.	Tenaga Kerja	1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{1}{1} \times 100\%$ = 100%	DKUKMPTK	
		2.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)	$\frac{88}{111} \times 100\%$ = 79.28%		
		3.	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	$\frac{5.623}{31.162} \times 100\%$ = 18.04%		



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Belitung Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	$\frac{34}{34} \times 100\% = 100\%$	DSPPPA	
		2.	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	$\frac{22}{22} \times 100\% = 100\%$		
9	Pangan	1.	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	$\frac{22.853}{15.99} \times 100\% = 142.92\%$	DKPP	
10	Pertanahan	1.	Persentase ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah	$\frac{3.372.681}{13.518.416} \times 100\% = 24.95\%$	BPKAD	
		2.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	$\frac{2.263.368.000}{2.293.690.000} \times 100\% = 98.68\%$	DPUPR	
		3.	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	$\frac{1}{9} \times 100\% = 11.11\%$	DPUPR	
11	Lingkungan Hidup	1.	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	$\frac{21}{48} \times 100\% = 43,75\%$	DLH	
		2.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	$\frac{21.208,16}{36.065,29} \times 100\% = 58,80\%$		
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1.	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	$\frac{53.380}{53.677} \times 100\% = 99.45\%$	Dindukcapil	
		2.	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	$\frac{34.270}{50.609} \times 100\% = 67.72\%$		
		3.	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$		



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4.	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	$\frac{141.976}{143.795} \times 100\%$ $= 98.74\%$		
		5.	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{3.428}{3.428} \times 100\%$ $= 100\%$		
		6.	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{78.350}{78.350} \times 100\%$ $= 100\%$		
		7.	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	$\frac{4.832}{4.832} \times 100\%$ $= 100\%$		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.	Persentase pengentasan desa tertinggal	Tuntas hasil 100%	DPPKBPMMD	
		2.	Persentase peningkatan status desa mandiri	$\frac{0}{1} \times 100\%$ $= 0\%$		Surat Keterangan Kepala DPPKBPMMD Kabupaten Belitung
		3.	Persentase fasilitasi kerja sama desa	$\frac{1}{1} \times 100\%$ $= 100\%$		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 tahun	$\frac{2,08}{2,17} \times 100\%$ $= 95,85\%$	DPPKBPMMD	Capaian TFR Kab. Belitung 2025 adalah 2,08 mencerminkan keberhasilan pengendalian kelahiran yang seimbang, didukung oleh peningkatan akses layanan KB, pendewasaan usia perkawinan, serta sinergi lintas sektor dalam pembangunan keluarga
		2.	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	$\frac{24.507}{31.470} \times 100\%$ $= 77,87\%$		Tingkat partisipasi KB Pria masih rendah jika dibandingkan dengan wanita
		3.	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{7,07}{7,08} \times 100\%$ $= 99,85\%$		Masih adanya mitos dan ketakutan masyarakat terhadap efek samping pemakaian kontrasepsi
15	Perhubungan	1.	Konektivitas Kabupaten/Kota	$= \frac{(0.65 \times 50) + (0.40 \times 50)}{100}$ $= \frac{(32,50 + 20,00)}{100}$ $= 52,50 / 100 = 0,53$	DISHUB	dinas perhubungan kab belitung menggunakan satuan indeks, dengan skor 0 s/d 1
		2.	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	$\frac{295,8}{1.019}$ $= 0,29$		
		3.	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	$\frac{10}{10} \times 100\%$ $= 100\%$		



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitang Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
16	Komunikasi dan Informatika	1.	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	$\frac{31}{31} \times 100\% = 100\%$	DISKOMINFO	
		2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$		
		3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	$\frac{132.439}{132.439} \times 100\% = 100\%$		
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	$\frac{59.857.865.560}{197.891.983.314} \times 100\% = -69,75\%$	DKUKMPTK	
		2.	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	$\frac{10.134}{22.127} \times 100\% = 45,80\%$		
18	Penanaman Modal	1.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	$\frac{-386.964.916.240}{1.116.727.112.505} \times 100\% = -34,65\%$	DPMPTSP	
		2.	Realisasi total terhadap target investasi	$\frac{729.762.196.300}{1.200.000.000.000} \times 100\% = 60,81\%$		
19	Kepemudaan dan Olahraga	1.	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{1.446}{9.250} \times 100\% = 15,63\%$	DISPORA	
		2.	Persentase partisipasi pemuda dalam Organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{34.939}{46.253} \times 100\% = 75,54\%$		
		3.	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	$\frac{11}{86} \times 100\% = 12,79\%$		
		4.	Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	$\frac{7}{17} \times 100\% = 41,18\%$		
20	Statistik	1.	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	$\frac{3.362}{3.978} \times 100\% = 84,51\%$	DISKOMINFO	
21	Persandian	1.	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	$\frac{566}{918} \times 100\% = 61,66\%$	DISKOMINFO	
22	Kebudayaan	1.	Persentase jumlah warisan budaya yang	$\frac{12}{12} \times 100\%$	DINDIKBUD	



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2025

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			dilestarikan	12 = 100%		
		2.	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	1 =----- x 100% 1 = 0%		Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung
23	Perpustakaan	1.	Nilai tingkat kegemaran membaca (TKM) masyarakat	= 56,41	DPKD	
		2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	= 19,78		
24	Kearsipan	1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	T = (100+73,22+81,35+12,40)/4 = 66,74%	DPKD	
25	Kelautan dan Perikanan	1.	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	41.008,47 =----- x 100% 41.352 = 99.17%	Dinas Perikanan	
		2.	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	= 42.82 kg/kap/Th		
26	Pariwisata	1.	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	11.751.666.682 =----- x 100% 729.762.196.300 =1.61%	DISPAR	
		2.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	12.697 =----- x 100% 10.591 =19.88%		
		3.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	232.217 =----- x 100% 276.251 = -15.94%		
27	Pertanian	1.	Peningkatan produksi tanaman pangan	-665,2 =----- x 100% 3.866,43 = -117,2%	DKPP	
		2.	Peningkatan produksi hortikultura	-4.947,45 =----- x 100% 14.847,18 =-133,32%		
		3.	Peningkatan produksi komoditas peternakan	-681,09 =----- x 100% 7.904,82 = -108.62%		
		4.	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	31 =----- x 100% 31 = 100%		
28	Kehutanan		Tidak Ada	0		
29	Energi Sumber Daya Mineral		Tidak Ada	0		



No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
30	Perdagangan	1.	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	$\frac{2.708}{3.577} \times 100\%$ $= 75.71\%$	DKUKMPTK	
31	Perindustrian	1.	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	0	DPMPTSP	Surat Pernyataan Kepala DPMPTSP Kabupaten Belitung
		2.	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	$\frac{15}{2.456} \times 100\%$ $= 4.68\%$		
		3.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	$\frac{49}{2.407} \times 100\%$ $= -97.96\%$		
		4.	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	$\frac{187.021.040.375}{729.762.196.265} \times 100\%$ $= 25.63\%$		
32	Transmigrasi	1.	Tidak Ada	0		



2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
33	Perencanaan	1.	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	$\frac{15}{17} \times 100\% = 88,24\%$	BAPPERIDA	
34	Keuangan	1.	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	$\frac{442.375.170.295}{1.039.613.857.104} \times 100\% = 42.55\%$	BAPENDA	
		2.	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	$\frac{213.489.413.556,09}{936.970.885.032,09} \times 100\% = 22.79\%$		Keterbatasan potensi PAD dari sektor-sektor tertentu, serta fluktuasi kondisi ekonomi, dengan demikian mempengaruhi rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung tahun 2025
		3.	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	$\frac{551.584.928.027}{943.425.590.182} \times 100\% = 58.47\%$		
		4.	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	$\frac{268.872.090.920}{932.974.574.398} \times 100\% = 28.82\%$	BPKAD	
35	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{1.021}{1.289} \times 100\% = 79.21\%$	BKPSDM	
36	Penelitian dan Pengembangan	1.	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	$\frac{6}{10} \times 100\% = 60\%$	BAPPEDA	
37	Fungsi Pengawasan	1.	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	INSPEKTORAT	Sasaran kinerja di tingkat strategis Pemda dan OPD, serta di tingkat program belum seluruhnya SMART dan berorientasi hasil. Penetapan target tidak memperhatikan



No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
						kondisi dan tantangan terkini dan capaian kinerja tahun sebelumnya
		2.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	4		Terdapat penilaian/pengukuran baru sesuai dengan Peraturan BPKP RI Nomor 6 Tahun 2025, yang mana sebelumnya terdapat 6 elemen, sekarang menjadi 5 elemen dan fokus pada kualitas pengawasan
		3.	Manajemen Risiko Indeks	4		Rencana Tindak Pengendalian/Mitigasi risiko korupsi/risiko fraud, risiko operasional dan risiko strategis yang telah dilakukan belum tindaklanjut , selain itu risiko kemitraan yang dibuat belum disusun berdasarkan hubungan antar mitra
		4.	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	$\frac{864}{1.016} \times 100\% = 85.04\%$		
38	Pengadaan	1.	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40 Poin		
		2.	Pemanfaatan sistem pengadaan	24,30 Poin	BAGIAN PBJ SETDA	
		3.	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	11,47 Poin		
39	Hubungan dengan Perwakilan Daerah	1.	Ketepatan Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	1.Tepat Waktu	BPKAD	
		2.	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	$\frac{1}{9} \times 100\% = 11,11\%$	BAGIAN HUKUM SETDA	
40	Pelayanan Publik	1.	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	93.07	BAGIAN ORGANISASI SETDA	



2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

❖ Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuannya, demi mengukur peningkatan kinerja, serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan kinerja utama dari instansi pemerintah bersangkutan. Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU jadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan.

Dalam rangka untuk memperoleh informasi kinerja, ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, maka setiap instansi pemerintah harus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk periode 2024 – 2026, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Kabupaten Belitung dan tingkat Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026.

Adapun Tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung pada Tahun 2025 sesuai dengan RPD 2024-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7. : Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	2025 Realisasi	% Capaian
1.	Rasio gini	Poin	0,247 – 0,252	0,205	114,94
2.	Laju pertumbuhan ekonomi	Persentase	4,6	4,06	88,26
3.	Tingkat kemiskinan	Persentase	6,3	6,44	97,78
4.	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persentase	65,85	49,68	75,44
5.	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Poin	74,77	75,29	100,70
6.	Angka harapan hidup	Tahun	71,42	73,13	102,39
7.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,80	9,11	103,52
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	BB	109,88
9.	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100
10.	Nilai SAKIP	Predikat	BB	B	93,54
11.	Indeks Profesionalitas ASN	Skala	71 – 80 Sedang	81,29 Tinggi	101,61
12.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,26	75,77	109,40

Selanjutnya pada Triwulan IV Tahun 2025 penetapan IKU Pemerintah Kabupaten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029, ditetapkan melalui Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029, Hasil pengukuran atas IKU Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 sesuai dengan RPJMD 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8. : Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 terhadap Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	2025 Realisasi	% Realisasi
1.	Indeks Modal Manusia	Nilai	0,55	n.a	n.a
2.	Tingkat Kemiskinan	Persentase	5,2	6,44	76,15
3.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,16	9,11	99,45
4.	Harapan lama sekolah	Tahun	12,42	12,1	97,42
5.	Usia harapan hidup	Tahun	74,15	73,13	98,62



6.	Prevalensi stunting	Persentase	16,94	8,82	147,93
7.	Pengeluaran per kapita	Juta Rupiah	14.651.000	14.550.000	99,31
8.	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	3,74	3,64	102,67
9.	Indeks Gini	Nilai	0,241	0,205	114,94
10.	Laju pertumbuhan ekonomi	Persentase	2,11	4,06	192,42
11.	Nilai investasi (tahun berkenaan) (dalam juta rupiah) (PMDN dan PMA)	Skala	1.200.000 Juta Rupiah	730.000 Juta Rupiah	60,83
12.	Pertumbuhan sektor Prima	Persentase	3,8	3,78	99,47
13.	Indeks Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kota	Nilai	3,8	3,14	82,63
14.	Indeks reformasi birokrasi	Nilai	80 (BB)	79,74 (Nilai Tahun 2024)	99,67
15.	Indeks pemerintah digital	Nilai	1,80	Indeks SPBE 4,15	n.a
16.	Nilai SAKIP	Nilai	65,84 (B)	65,49	99,47
17.	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Nilai	76,8121	70.4597	91,73
18.	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,1	4,06	99,02
19.	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level3 (3,541)	Level2 (2,449)	69,16
20.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	79,80	81,29	101,87
21.	Rasio kemandirian fiskal	Persentase	23,94	29,38	122,72
22.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	Baik (85,35)	72,5	84,94
23.	Penurunan intensitas Emisi GRK	Nilai	54,55	54,4	99,73
24.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	67,28	70,30	104,49
25.	Indeks Kesulitan geografis	Nilai	32,52	32,72	99,39
26.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	76,81	75,77	98,65
27.	Indeks Resiko Bencana	Nilai	117,14	98,97	117,30

Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing misi sebagai berikut:

1. Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dalam mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dapat dilihat pada indikator:
1. Indeks Modal Manusia, capaian n.a

2. Tingkat kemiskinan, capaian 76,15%

3. Rata-rata lama sekolah, capaian 99,45 %

4. Harapan lama sekolah, capaian 97,42%

5. Usia harapan hidup, capaian 98,62%

6. Prevalensi stunting, capaian 147,92%

7. Pengeluaran per kapita, capaian 99,37%

8. Tingkat pengangguran terbuka, capaian 102%

9. Indeks Gini, capaian 114,94%
2. Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya saing berbasis sektor unggul dan potensial dapat dilihat pada indikator:
1. Laju pertumbuhan ekonomi, capaian 192,42 %

2. Nilai investasi, capaian 60,83 %

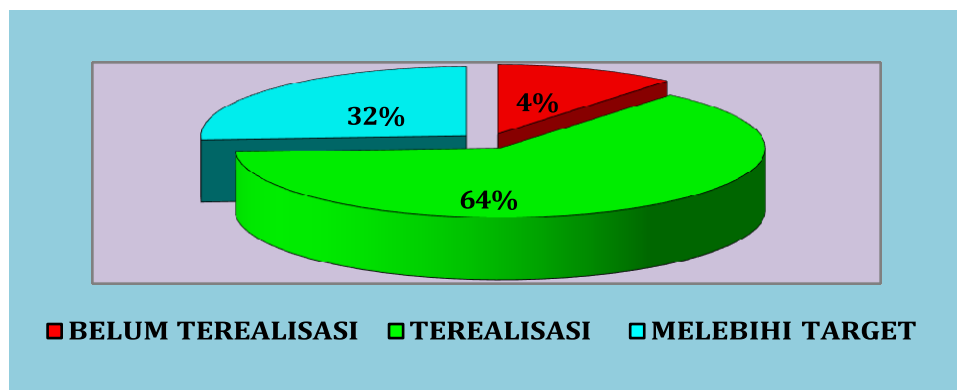
3. Pertumbuhan sektor prima, capaian 99,47 %

4. Indeks Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kota, capaian 82,63%
3. Misi 3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dapat dilihat pada indikator :
1. Indeks Reformasi Birokrasi, capaian 99,67%



2. Indeks pemerintahan digital, capaian n.a
 3. Nilai SAKIP, capaian 99,47%
 4. Indeks pengelolaan keuangan daerah, capaian 91,73%
 5. Indeks pelayanan publik, capaian 99,02%
 6. Tingkat Maturitas SPIP, capaian 69,16%
 7. Indeks profesionalitas ASN, capaian 101,87%
 8. Rasio kemandirian fiskal, capaian 122,72%
4. Misi 4 : Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan dapat dilihat pada indikator :
1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur, 84,94 %
 2. Penurunan intensitas Emisi GRK, capaian 99,73%
 3. Indeks Pembangunan Infrastruktur, capaian 104,49%
 4. Indeks Kesulitan Geografis, capaian 99,39 %
 5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, capaian 98,65%
 6. Indeks Resiko Bencana, capaian 117,30 %

Gambar 2.1.: Capaian IKU Kabupaten Belitung 2025



Secara umum pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Belitung telah dapat melaksanakan seluruh tugas dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025 – 2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

❖ Pengukuran dan Analisis Pencapaian Target Kinerja

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. Formulir Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan formulir isian data kinerja Target dan Realisasi Tahun 2025, yang diisi oleh Perangkat Daerah berdasarkan kewenangannya.

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu:

- a. Spesifik;
- b. Dapat dicapai;
- c. Relevan;
- d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. Dapat dihitung dan diukur.

Pengumpulan data kinerja merupakan tanggungjawab Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung yang memiliki fungsi pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung dilakukan secara berkala secara triwulanan dan tahunan dengan sistem desk timbal balik yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui perbandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 serta menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan perangkat daerah



dalam mendukung pencapaian target, termasuk kendala yang dihadapi dan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan melalui inovasi.

Tingkat pencapaian kinerja diklasifikasikan dalam skala pengukuran sebagai berikut:

Persentase	Tingkat	Kode Warna
< 100%	BELUM TEREALISASI (BT)	
= 100%	TEREALISASI (T)	
> 100%	MELEBIHI TARGET (MT)	

Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja dari program dan kegiatan serta indikator makro, diberlakukan nilai dan disertai makna dari nilai tersebut dengan pendekatan sebagai berikut :

Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025

KATEGORI	RATA-RATA % CAPAIAN
Sangat Berhasil (SB)	>90
Berhasil (B)	75.00 – 89.00
Cukup (C)	50.00 – 74.99
Kurang (K)	0.00 – 49.00

Pencapaian kinerja kemudian dianalisa dan dievaluasi dengan memaparkan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Perhitungan pencapaian kinerja indikator sasaran menggunakan *asumsi 1*: Jika **semakin tinggi realisasi**, menunjukkan pencapaian kinerja yang **semakin baik**, atau sebaliknya **realisasi makin rendah** pencapaian kinerja **semakin rendah/ jelek** adalah:

PRESENTASE TINGKAT
CAPAIAN KINERJA

=

REALISASI

RENCANA

100%

Sedangkan apabila **semakin tinggi realisasi** menunjukkan pencapaian sasaran kinerja **semakin rendah/jelek**, atau sebaliknya realisasi **semakin rendah** pencapaian kinerja **semakin baik** menggunakan perumusan:

PRESENTASE
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA

=

RENCANA – (REALISASI – RENCANA)

RENCANA

× 100%

PRESENTASE TINGKAT
CAPAIAN KINERJA

=

(2x RENCANA) – REALISASI

RENCANA

× 100%

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026, pencapaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mewujudkan pencapaian misi secara terukur diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung.



Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2025 yang tergambar dalam laporan ini merupakan gambaran penilaian tingkat pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPD. Berdasarkan RPD Kabupaten Belitung tahun 2024 – 2026, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan, 8 (delapan) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja (*outcomes*) yang menjadi Indikator Kinerja Utama, dengan rincian sebagai berikut:

Tujuan 1	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1	Indikator
Sasaran 1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1	Indikator
Sasaran 2	Menurunnya kemiskinan penduduk	1	Indikator
Sasaran 3	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	1	Indikator
Tujuan 2	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1	Indikator
Sasaran 4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Indikator
Sasaran 5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1	Indikator
Tujuan 3	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih inovatif, professional, akuntabel dan transparan	1	Indikator
Sasaran 6	Terciptanya Birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	2	Indikator
Sasaran 7	Terciptanya Birokrasi yang inovatif dan professional	1	Indikator
Tujuan 4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indikator
Sasaran 8	Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	1	Indikator

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10.: Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025
sesuai RPD Tahun 2024-2026

No	TUJUAN/ SASARAN	No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1	Rasio gini	Poin	0,247 – 0,252	0,205	114,94
2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	2	Laju pertumbuhan ekonomi	Persentase	4,6	4,06	88,26
3.	Menurunnya kemiskinan penduduk	3	Tingkat kemiskinan	Persentase	6,3	6,44	97,78
4.	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	4	Persentase Pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persentase	65,85	49,68	75,44
5.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	74,77	75,29	100,70
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6	Angka harapan hidup	Tahun	71,42	73,13	102,39
7.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	7	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,80	9,11	103,52



8.	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	8	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	BB	109,88
9.	Terciptanya Birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	9	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100
		10	Nilai SAKIP	Predikat	BB	B	92,54
10.	Terciptanya Birokrasi yang inovatif dan profesional	11	Indeks Profesionalitas ASN	Skala	71 – 80 Sedang	81,29 Tinggi	101,87
11.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,26	75,77	109,40

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja di atas dapat digambarkan Kategori Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.11.: Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025

sesuai RPD Tahun 2024-2026			
No.	KATEGORI	RATA-RATA % CAPAIAN	JUMLAH INDIKATOR
1	Sangat Berhasil (SB)	>90	10
2	Berhasil (B)	75.00 – 89.00	1
3	Cukup (C)	50.00 – 74.99	0
4	Kurang (K)	0.00 – 49.00	1
JUMLAH			12

Adapun kategori pencapaian indikator kinerja kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12: Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025
sesuai RPD Tahun 2024-2026

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA SASARAN	0.00 – 49.00 KURANG	50.00 – 74.99 CUKUP	75.00 – 89.00 BERHASIL	>90 SANGAT BERHASIL
MISI 1 : Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkugan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembagunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat							
1.	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Rasio gini	114,94%				SANGAT BERHASIL
2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Laju pertumbuhan ekonomi	88,26			BERHASIL	
3.	Menurunnya kemiskinan penduduk	Tingkat kemiskinan	97,78%				SANGAT BERHASIL
4.	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase Pemenuhan infrastruktur kewilayahan	75,44			BERHASIL	



MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah				
5.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	100,70%	SANGAT BERHASIL
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	102,39%	SANGAT BERHASIL
7.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	103.52%	SANGAT BERHASIL
8.	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	109,88	SANGAT BERHASIL
9.	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1. Opini BPK	100%	SANGAT BERHASIL
10.		2. Nilai SAKIP	93,54	SANGAT BERHASIL
11.	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks Profesionalitas ASN	101,61%	SANGAT BERHASIL
MISI 3 : Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan				
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	109,40%	SANGAT BERHASIL
JUMLAH			0	0
			2	10

TUJUAN 1 : Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Capaian kinerja tujuan “Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi ” diukur melalui pencapaian indikator Rasio Gini. Capaian kinerja tujuan dengan rinci terpapar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13.: Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Belitung Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	2025			Kategori	Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Rasio Gini	Poin	0,237	0.248-0.253	0,205	114,94	SB	0,246-0,251

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2025. Capaian kinerja Rasio Gini sebesar 114,94% dengan kategori **SANGAT BERHASIL**.

Nilai Rasio Gini Kabupaten Belitung tahun 2025 berada di angka 0,205. Angka tersebut menunjukkan pengeluaran penduduk Kabupaten Belitung pada tahun 2025 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah karena Rasio Gini atau Indeks Gini merupakan suatu indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada suatu daerah. Semakin tinggi atau besar Rasio Gini, semakin tinggi pula tingkat ketidakmerataannya (distribusi



pendapatannya tidak merata) dan sebaliknya jika semakin kecil Rasion Gini semakin rendah tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya semakin merata).

Distribusi pendapatan merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu daerah. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu daerah seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Rasio Gini Kabupaten Belitung berfluktuasi dari 0,195 pada tahun 2021 naik menjadi 0,237 tahun 2022, kemudian meningkat hingga mencapai angka 0,253 pada tahun 2023 dan turun menjadi 0,248 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 menurun menjadi 0,205.

Sementara itu, guna terus menekan angka capaian rasio gini, Pemerintah Kabupaten Belitung berupaya memperkuat usaha mikro. Karena UKM menjadi pilar penting dalam membangun perekonomian masyarakat. Sejumlah program seperti pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) dan pengembangan UMKM dilakukan untuk mencapai hal tersebut.

Pemerintah Kabupaten Belitung juga berupaya menekan angka capaian indeks gini melalui pemberian bantuan kepada masyarakat dari segi pengeluaran seperti dalam sektor pendidikan, pemberian beasiswa Pendidikan dan program beasiswa simpor, kemudian ada bantuan-bantuan sosial dan sejenisnya. Dan menjamin akses-akses barang kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Ketimpangan ekonomi pada dimensi distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Fenomena ini telah menjadi perhatian publik, sehingga upaya evaluasi yang sangat mendesak dilakukan. Dari hasil evaluasi diharapkan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya juga akan membawa konsekuensi berkurangnya tingkat ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat sejalan dengan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Apabila ketimpangan ini dibiarkan semakin melebar maka akan semakin mendistorsi hasil pembangunan.

Oleh karena itu upaya mengetahui besaran ketimpangan pengeluaran antar golongan penduduk maupun secara spasial perlu dilakukan. Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau Indeks Gini di Kabupaten Belitung berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Dengan Indeks Gini sebesar 0,205, Kabupaten Belitung masuk dalam kategori pemerataan pengeluaran yang relatif tinggi antar penduduk atau kesenjangan pendapatan antar penduduk sangat rendah bila dibandingkan dengan provinsi dan nasional. Indeks Gini yang menurun menunjukkan pendapatan antar kelompok masyarakat semakin merata.

Struktur ekonomi Kabupaten Belitung yang mempengaruhi nilai gini ratio adalah Sektor Agraris, dimana Lebih dari 27,10 persen perekonomian didukung oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Bahwa ketimpangan di wilayah agraris lebih kecil dibandingkan dengan wilayah industri karena rendahnya level penghasilan yang diterima oleh individu di wilayah agraris tersebut. Adapun tingkat ketimpangan mengalami peningkatan pada wilayah dengan struktur perekonomian yang bercorak industri.

Berdasarkan Perkembangan rasio gini Kabupaten Belitung antara Tahun 2023 s/d 2025 cenderung fluktuatif, maka upaya yang dilakukan antara lain

1. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian untuk mengejar ketertinggalan dari sektor lainnya;
2. Perlu adanya upaya untuk mendorong transfer surplus tenaga kerja di sektor pertanian ke sektor ekonomi kreatif dengan mengadakan pelatihan maupun kursus keterampilan termasuk penguatan pangsa pasar. ;
3. Hampir separuh dari tenaga kerja yang ada berlatar belakang tingkat pendidikan menengah ke bawah. Oleh karena itu, perlu dibuat program untuk menjaga tingkat APM (Angka Partisipasi Murni) agar tidak turun dan meningkatkan target APM untuk level Sekolah Menengah.



4. Dalam jangka pendek, intervensi terhadap kelompok pengeluaran terbawah dapat dilakukan dengan melanjutkan program raskin maupun bantuan tunai. Namun demikian kebijakan ini perlu selalu dimonitor dan dievaluasi mengingat dalam jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan dan inefisiensi anggaran.
5. Perlu dibuatkan program pengelolaan ekonomi (pariwisata) berbasis komunitas dengan mengedepankan modal sosial (kultur sosial). Program tersebut harus mengutamakan keterlibatan dari kelompok masyarakat.

Tabel 2.14.: Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 1

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 1 Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Sasaran 1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan Meningkatkan produksi pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan Meningkatnya pengembangan perikanan tangkap dan budidaya Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan perindustrian Memperkuat ekonomi desa dan kawasan pedesaan Meningkatkan pengendalian, pengawasan ekonomi dan pembangunan
	Sasaran 2 Menurunya kemiskinan penduduk	Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja Mengurangi beban pengeluaran
	Sasaran 3 Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah Peningkatan sarana dan prasaarana permukiman yang layak huni

SASARAN 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu indikator kinerja utama RPD dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan target “4,06”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 2.15.: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2025		Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target Akhir RPD 2026
			RPD	Target				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,71	4,6	4,06	88,26	B	4,9

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja tujuan tidak bisa mencapai target yang ditetapkan dalam RPD. Target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Belitung tahun 2025 adalah 4,6 dan terealisasi hanya sebesar 4,06 dengan capaian kinerja sebesar 88,26% dengan kategori **BERHASIL**.

Kemampuan ekonomi suatu daerah memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi untuk berinvestasi di daerah tersebut. Investasi yang masuk tentunya akan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi peningkatan daya saing



daerah. Salah satu tolok ukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Laju Pertumbuhan Ekonomi dihitung berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu.

Penyusunan PDRB menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi, pada Laporan ini, menggunakan PDRB dari sisi lapangan usaha. Rendahnya ekonomi maka pendapatan akan menurun drastis.

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Belitung tahun 2025 ditopang oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Industri Pengolahan. Kedua kategori lapangan usaha ini memberikan kontribusi masing-masing sebesar 28,01 persen dan 12,68 persen.

PDRB ADHB Kabupaten Belitung tahun 2025 adalah 15.243,01 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang nilainya 14.124,70 miliar

rupiah. Demikian juga dengan PDRB ADHK juga mengalami peningkatan dari 7.638,90 miliar rupiah di tahun 2024, menjadi 7.948,69 miliar rupiah di tahun 2025.

Secara detail perkembangan PDRB Kabupaten Belitung selama kurun waktu 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16.: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung 2023 – 2025, (milyar rupiah) ADHK 2010

LAPANGAN USAHA	2023	2024*	2025**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 917,39	1 989,95	2 063,29
Pertambangan dan Penggalian	503,81	495,33	556,21
Industri Pengolahan	873,94	852,74	869,90
Pengadaan Listrik dan Gas	10,38	10,92	11,20
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,28	2,37	2,44
Konstruksi	908,50	889,29	881,99
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	815,16	809,68	854,20
Transportasi dan Pergudangan	517,22	513,16	528,83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	288,37	300,84	325,06
Informasi dan Komunikasi	388,69	427,72	468,08
Jasa Keuangan dan Asuransi	189,47	190,08	193,77
Real Estat	244,05	255,04	264,69
Jasa Perusahaan	24,62	26,93	28,79
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	442,99	478,02	477,56
Jasa Pendidikan	146,22	162,05	172,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	167,08	169,64	179,04
Jasa Lainnya	60,18	65,13	71,41
Produk Domestik Bruto	7 500,36	7 638,90	7 948,69

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2023 – 2025 PDRB Kabupaten Belitung menunjukkan kecenderungan meningkat. Dilihat dari sisi lapangan usaha, lapangan usaha yang paling banyak berkontribusi adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pada tahun 2025 kontribusinya sebesar Rp 2.063,26 miliar atau sebesar 28,01%. Lapangan usaha yang kedua adalah industri pengolahan sebesar 12,68%,



kemudian konstruksi sebesar 10,84%, dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 10,72%. Berikut ditampilkan distribusi persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha kurun waktu 2023 – 2025 :

Tabel 2.17.: Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung 2023 – 2025, ADHB

LAPANGAN USAHA	2023	2024*	2025**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,46	27,15	28,01
Pertambangan dan Penggalian	4,92	4,86	5,42
Industri Pengolahan	12,99	12,57	12,68
Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,14	0,14
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03
Konstruksi	12,15	11,70	10,48
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,61	10,33	10,72
Transportasi dan Pergudangan	8,26	8,12	7,67
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,13	4,23	4,29
Informasi dan Komunikasi	3,52	3,71	3,71
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,46	2,38	2,32
Real Estat	3,06	3,07	2,97
Jasa Perusahaan	0,35	0,36	0,36
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,17	6,46	5,95
Jasa Pendidikan	1,98	2,12	2,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,92	1,89	1,87
Jasa Lainnya	0,83	0,88	0,91

Catatan : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2026

Dapat diuraikan bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terjadi peningkatan kontribusi beberapa lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Belitung dan beberapa lapangan usaha lain mulai berkurang. Lapangan usaha yang menunjukkan penurunan antara lain pertambangan dan penggalian, konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Keuangan dan Asuransi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial .

Hal ini mengindikasikan bahwa mulai terjadi pergeseran kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Belitung, dari ketergantungan terhadap alam menuju masyarakat yang mengandalkan jasa. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mempersiapkan SDMnya dan membekali masyarakat dengan keahlian.

Pada tahun 2025 LPE Kabupaten Belitung sebesar 4,06%, meningkat jika dibandingkan LPE tahun 2024 sebesar 1,84%. Perlambatan LPE ini tentunya dipengaruhi oleh laju pertumbuhan per lapangan usaha. Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.18.: Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2023–2025

LAPANGAN USAHA	2023	2024*	2025**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,77	3,78	3,69
Pertambangan dan Penggalian	-0,04	-1,68	12,29
Industri Pengolahan	4,91	-2,43	2,01
Pengadaan Listrik dan Gas	2,52	5,20	2,60
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,77	3,84	2,69
Konstruksi	9,19	-2,11	-0,82
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,78	-0,67	5,50
Transportasi dan Pergudangan	10,51	-0,78	3,05



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2025

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,23	4,32	8,05
Informasi dan Komunikasi	13,97	10,04	9,44
Jasa Keuangan dan Asuransi	15,28	0,32	1,94
Real Estat	4,25	4,51	3,78
Jasa Perusahaan	8,99	9,37	6,93
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,85	7,91	-0,10
Jasa Pendidikan	11,04	10,83	6,28
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,19	1,53	5,54
Jasa Lainnya	11,35	8,23	9,63
Produk Domestik Bruto	5,74	1,85	4,06

Catatan : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Sumber : Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2026

Pada tahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 1,85%.

Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi menurut Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu tiga tahun terakhir :

Tabel 2.19.: Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten di Prov. Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2025

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN		
		2023	2024*	2025**
1	Bangka	4,44	-0,44	4,96
2	Belitung	5,75	1,85	4,06
3	Bangka Barat	2,50	5,47	1,72
4	Bangka Tengah	5,16	-0,34	6,06
5	Bangka Selatan	3,69	0,90	3,83
6	Belitung Timur	4,72	-0,03	4,30
7	Pangkalpinang	5,32	-2,30	4,54
Provinsi Bangka Belitung		3,32	4,40	4,09

Sumber : Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2026

Dari deskripsi di atas dapat tergambar bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung Tahun 2025 mengalami peningkatan.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi melalui langkah-langkah dan program-program strategis sebagai upaya pencapaian tujuan sesuai dengan RPD dan RPJMD.

Adapun faktor pendukung laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

- ❖ Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan sector andalan Kabupaten Belitung dalam menunjang pertumbuhan ekonomi;
- ❖ Iklim usaha yang kondusif bagi usaha perdagangan dan industri yang sudah ada maupun bagi investasi baru, sector industry dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui nilai tambah yang dihasilkan;
- ❖ Meningkatnya pangsa sektor industri pengolahan di pasar domestik;
- ❖ Meningkatnya penerapan standarisasi produk industri sebagai penguat daya saing produk industri;
- ❖ Penetapan Kabupaten Belitung sebagai salah satu dari 10 Destinasi Wisata Nasional menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor terutama yang bergerak di sektor industri pariwisata;
- ❖ Stabilitas sosial, politik dan keamanan yang terjaga;
- ❖ Bonus demografi yang dimiliki Kabupaten Belitung.

Sedangkan faktor penghambat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

- ✖ Tingkat inflasi yang masih tinggi;



- ❌ Rendahnya daya tarik investasi dan kurangnya kemandirian fisKal yang mempengaruhi pendapatan yang mampu diperoleh daerah untuk menjalankan perekonomian, termasuk penyediaan barang publik;
- ❌ Kualitas SDM yang belum memadai, rendahnya angka partisipasi murni dan lama sekolah mempengaruhi kualitas SDM yang akhirnya mempengaruhi produktivitas.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran di masa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut :

- ⌘ Upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, dan industri;
- ⌘ perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan;
- ⌘ Mendorong peningkatan investasi yang sesuai dengan potensi daerah dengan memberi kemudahan-kemudahan seperti proses perijinan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- ⌘ Mendorong pengembangan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memberi kesempatan sektor swasta untuk berinovasi sehingga memberikan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah;
- ⌘ Meningkatkan kuaitas SDM dengan program-program pelatihan.

SASARAN 2 : Menurunnya Kemiskinan Penduduk

Menurunnya Kemiskinan Penduduk merupakan salah satu indikator kinerja utama RPD dengan indikator Tingkat kemiskinan dengan target “6,3”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Menurunnya Kemiskinan Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 2.20.: Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Kemiskinan Penduduk

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2025		Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target Akhir RPD 2026
			RPD	Target				
1	Tingkat Kemiskinan	Persentase	6,45	6,3	6,44	97,78	SB	6,2

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja tujuan melebihi target yang ditetapkan dalam RPD. Target Tingkat Kemiskinan Kabupaten Belitung tahun 2025 adalah 6,3 dan terealisasi sebesar 6,44 dengan capaian kinerja sebesar 97,78% dengan kategori **SANGAT BERHASIL**.

Persentase penduduk miskin menurut BPS adalah persentase penduduk yang berada di Bawah Garis Kemiskinan (GK). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 berfluktuasi dan cenderung meningkat. Dengan angka kemiskinan pada tahun 2023 yaitu 6,46 kemudian turun menjadi 6,11% pada tahun 2024 dan meningkat ditahun 2025 yaitu 6,44.

Sama halnya di tingkat provinsi juga berfluktuatif dan juga cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir namun di tahun 2025 mengalami kenaikan dengan selisih 0,5% menjadi 5,00% di tahun 2025. Meski demikian persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung masih berada di bawah nasional yaitu sebesar 8,47% pada tahun 2025. Sebagaimana tampak pada gambar perkembangan persentase penduduk miskin (%) Kabupaten Belitung Tahun 2023-2025.

Tabel 2.21.: Perkembangan persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2025

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN		
		2023	2024	2025
1	Bangka		4,24	4,71
2	Belitung		6,11	6,44



3	Bangka Barat	2,59	2,92
4	Bangka Tengah	5,94	6,70
5	Bangka Selatan	3,74	4,17
6	Belitung Timur	6,36	6,69
7	Pangkalpinang	4,04	4,50
Provinsi Bangka Belitung		4,55	5,00

Sumber Data : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2026

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Belitung selama tiga tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 terus mengalami peningkatan. Garis kemiskinan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di suatu daerah. Garis kemiskinan merupakan tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu daerah. Pada tahun 2024 garis kemiskinan Kabupaten Belitung mencapai Rp. 937.759,- atau bertambah sebesar Rp. 18.387,- dari tahun 2024 yang sebesar Rp. 919.372,-. Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang yang tinggal di wilayah Kabupaten Belitung akan dikategorikan sebagai penduduk miskin jika total pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non makanan setiap bulannya kurang dari Rp. 937.759,-. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, garis kemiskinan Kabupaten Belitung tergolong tinggi, bahkan jauh melebihi garis kemiskinan nasional yang hanya sebesar Rp. 641.443,- pada tahun 2025 atau memiliki selisih Rp. 296.316,- dan selisih Rp. 19.074,- dari garis kemiskinan Provinsi Kep. Bangka Belitung yang meningkat sebesar Rp. 956.833,- di tahun yang sama.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan secara parsial namun perlu kolaborasi dan sinergi atau secara holistik, intergratif dan spasial antar *stakeholder* maupun pemangku kepentingan. Beberapa hal yang dapat upayakan untuk peningkatan tahun berikutnya yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemutakhiran data penduduk miskin yang telah diverifikasi dan validasi
2. Perlu adanya inovasi bagi perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan penanggulangan kemiskinan
3. Mengevaluasi kembali program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk melihat efektivitas dan keberhasilan program-program tersebut dalam rangka penanggulangan kemiskinan
4. Penanggulangan kemiskinan perlu didukung dengan kebijakan yang menekankan perubahan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan anggaran, serta penataan kelembagaan penanggulangan kemiskinan
5. Kinerja Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah perlu ditingkatkan.

SASARAN 3 : Meningkatnya infrastruktur kewilayahan

Meningkatnya infrastruktur kewilayahan merupakan salah satu indikator kinerja utama RPD dengan indikator Meningkatnya infrastruktur kewilayahan dengan target “65,85”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya infrastruktur kewilayahan Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 2.22.: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya infrastruktur kewilayahan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2025		Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target Akhir RPD 2026
			RPD	Target				
1	Persentase infrastruktur kewilayahan	Persentase	58,85	65,85	49,68	75,44	B	69,01



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran meningkatnya infrastuktur kewilayahan yaitu indikator kinerja Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan tahun 2025 sebesar 48,93 % dari target sebesar 65,85 %, dengan capaian kinerja sebesar 75,44 % berkategori BAIK.

Pencapaian kinerja sasaran persentase infrastruktur kewilayahan dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut:

$(0,5 \times (\text{infrastruktur ke PUan dan permukiman})) + (0,5 \times \text{infrastruktur perhubungan})$ dimana:

1. Infrastruktur ke PUan dan permukiman = $(0,5 \times \text{Persentase pemenuhan infrastruktur kePUan}) + (0,5 \times \text{Rata-rata pemenuhan PSU Pemukiman})$
2. Infrastruktur perhubungan = $(0,5 \times \text{persentase pemenuhan pelabuhan}) + (0,5 \times \text{sarpras keselamatan jalan})$

Pencapaian kinerja sasaran persentase infrastruktur kewilayahan dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= (0,5 \times (46,86)) + (0,5 \times 52,50) \\ &= (23,43 + 26,25) \\ &= 49,68 \end{aligned}$$

Pencapaian kinerja meningkatnya infrastruktur kewilayahan dicapai melalui strategi yaitu meningkatnya aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman yang layak huni.

Ada 13 (tiga belas) arah kebijakan strategi meningkatkan aksebilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah, yaitu 1) meningkatkan kebijakan perencanaan tata ruang; 2) meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang; 3) peningkatan standar jalan kabupaten; 4) peningkatan jalan non status menjadi jalan kabupaten; 5) meningkatkan legalitas dan pengelolaan sumber daya air; 6) meningkatkan pengendalian sumber daya air; 7) meningkatkan kanektivitas transportasi antar moda; 8) peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; 9) peningkatan pelayanan keselamatan transportasi darat; 10) peningkatan manajemen rekayasa lalu lintas; 11) meningkatkan konektivitas antar pulau; 12) meningkatkan pelayanan pelabuhan; dan 13) meningkatkan pemenuhan persyaratan kebutuhan pembangunan pelabuhan.

Dan ada 8 (delapan) arah kebijakan strategi peningkatan sarana dan prasarana permukiman layak huni, yaitu 1) pemenuhan rumah layak huni korban bencana; 2) pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah; 3) Rehabilitasi rumah layak huni untuk MBR; 4) Meningkatnya aksesibilitas lingkungan dan permukiman; 5) Pengurangan kawasan kumuh; 6) Meningkatkan pelayanan air minum/ air bersih; 7) Meningkatkan sarana dan prasarana air limbah; 8) Meningkatkan sarana dan prasarana drainase lingkungan.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung atas sasaran strategis terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang yang dijabarkan dalam **indikator pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dan permukiman, menunjukkan bahwa indikator kinerja sebesar 49,68% telah mencapai target.**

Hal ini disebabkan adanya pencapaian yang cukup signifikan dari pemenuhan PSU Permukiman, yang sampai triwulan IV untuk sebagian kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sudah selesai dilaksanakan.

Tabel 2.23.: Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Capaian	Capaian (%)
1	Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an	Pemenuhan infrastruktur ke-Pu-an	Persen	26,17	25,57	97,71

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an = $(0,25 \times \text{jalan standar kabupaten}) + (0,25 \times \text{rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman}) + (0,25 \times \text{rumah dengan layanan SPALD}) + (0,25 \times \text{sumber daya air yang terkelola dengan baik})$

Keterangan :



- a. Persentase jalan standar = (Panjang jalan Standar kabupaten / Panjang jalan kabupaten) x 100%

$$\frac{\text{Panjang jalan standar kabupaten}}{\text{Panjang jalan kabupaten}} \times 100 \%$$
$$\frac{183,18}{666,02} \times 100 \%$$

Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten adalah sebesar 27,50% dengan perhitungan Panjang jalan standar kabupaten sebesar 183,18 km dibagi dengan Panjang jalan kabupaten yaitu 666,02 km dikali seratus persen.

- b. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman = (jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman/Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Belitung) x 100%

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman}}{\text{Jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung}} \times 100 \%$$
$$\frac{11.431}{61.297} \times 100 \%$$

Realisasi Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman adalah sebesar 18,65 % dengan perhitungan Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman sebesar 11.431 rumah tangga dibagi dengan jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung yaitu 61.297 rumah tangga dikali seratus persen.

- c. Persentase rumah dengan layanan SPALD = (Jumlah rumah dengan SPALD/Jumlah Rumah di Kabupaten Belitung) x 100%

$$\frac{\text{Jumlah rumah dengan SPALD}}{\text{jumlah rumah di Kabupaten Belitung}} \times 100 \%$$
$$\frac{2.935}{38.153} \times 100 \%$$

Realisasi Persentase rumah dengan layanan SPALD adalah sebesar **7,69 %** dengan perhitungan jumlah rumah dengan SPALD sebesar **2.935 rumah** dibagi dengan jumlah rumah di Kabupaten Belitung yaitu **38.153 rumah** dikali seratus persen.

- d. Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik = (0,4 x Persentase Luas Sawah Fungsional terlindungi infrastruktur + (0,6 x Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai yang terlindungi Infrastruktur).

Dengan Menggunakan rumus tersebut, realisasi indikator pemenuhan infrastruktur ke-PU-an pada tahun 2024 adalah sebesar 25,57%. Tingkat capaian kinerja sebesar 97,71%, dengan rincian sebagai berikut:

$$(0,4 \times \text{Persentase Luas Sawah Fungsional terlindungi infrastruktur} + (0,6 \times \text{Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai yang terlindungi Infrastruktur}))$$
$$= (0,4 \times 55,72\%) + (0,6 \times 43,58\%)$$
$$= 48,44\%$$

Realisasi Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik adalah sebesar 48,44% dengan perhitungan 40% Persentase Luas Sawah Fungsional terlindungi infrastruktur dan 60% Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai yang terlindungi Infrastruktur.

Belum Optimalnya standar lebar jalan lokal kabupaten (lokal primer maupun lokal sekunder) dikarenakan ketersediaan lahan untuk pembangunan jalan masih amat kurang. Pembangunan Infrastruktur terutama bidang jalan baik itu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Daerah memerlukan ketersediaan lahan yang cukup. Kesiapan lahan menjadi salah satu readiness criteria agar Pemerintah Pusat melalui dana APBN dapat melaksanakan kegiatannya di daerah.



Gambar 2.2.: Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Tahun 2025

Penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah kegiatan tahun 2025 hanya untuk operasional dan pemeliharaan baik itu irigasi maupun saluran air. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) didukung oleh 2 kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.



Gambar 2.3.: Kegiatan pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Untuk mewujudkan pencapaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung melaksanakan 1 (satu) kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota dengan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
3. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan

Dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota, telah terpasang 375 Sambungan Rumah (SR) selama tahun 2025 sehingga terdapat penambahan sekitar 521 Rumah Tangga yang terlayani air minum yang layak.

Gambar 2.4.: Kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tahun 2025



Pelaksanaan pencapaian kinerja pelayanan air minum didorong oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah adanya Pelayanan air minum yang dilaksanakan melalui UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung dengan berbagai pelayanan diantaranya; pendistribusian air melalui sambungan rumah (SR), pelayanan air kemasan, dan pendistribusian air melalui mobil tangki. Pendistribusian air melalui mobil tangki merupakan pelayanan SPM air minum terhadap masyarakat yang tempat tinggalnya belum terlayani dengan jaringan perpipaan. Selain itu, pelayanan dengan mobil tangki dimaksudkan untuk mendukung pelayanan air minum yang bersifat insidental, seperti pelayanan pasca bencana serta sebagai komitmen Dinas PUPR Kabupaten Belitung untuk mendukung program Pemerintah Daerah dalam sektor pariwisata. Selain pelayanan air minum ke rumah-rumah penduduk, UPT PAM dinas PUPR juga



mendistribusikan air minum ke hotel-hotel di Kawasan KSPN dan kelompok nelayan pelabuhan perikanan Tanjungpandan.

Berikut adalah jumlah pelanggan aktif UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung tahun 2025.

Tabel 2.24.: Jumlah Pelanggan Aktif UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung Tahun 2025

No.	Nama SPAM	Jumlah pelanggan
1	SPAM Juru Seberang	108
2	SPAM IKK Sijuk	332
3	SPAM IKK Membalong	199
4	SPAM Desa Bantan	249
5	SPAM IKK Badau	257
6	PAM Kws, PPN Tanjungpandan	25
7	Mobil Tangki	0
8	Air Kemasan/Galon	92
9	SPAM Kws. Tanjung batu	272
10	SPAM IKK Selat Nasik	350
	Jumlah	1952

Sumber : UPT PAM DPUPR Kab. Belitung, 2025



Gambar 2.5.: Sosialisasi Perda Retribusi serta Penarikan Retribusi



Gambar 2.6.: Pengambilan Sampling Air



Gambar 2.7: Sosialisasi Edukasi Air dari SMA Anugerah Belitung dan Kegiatan UPT PAM Tahun 2025

Pencapaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah didukung oleh Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota serta 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam



Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.



Gambar 2.7.: Kegiatan Pembangunan SPALD

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase didukung Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota serta 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan pembangunan sistem drainase perkotaan serta sub kegiatan pembangunan sistem drainase lingkungan. Pada Tahun 2024 panjang drainase yang sudah dibangun adalah sepanjang 1.046 meter.



Gambar 2.8.: Kegiatan Pengembangan Sistem Drainase

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota serta Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

1. Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan pada tahun 2024.
2. Mengoptimalkan sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan evaluasi setiap triwulan terkait dnegan pelaksanaan kegiatan serta pencapaian kinerja

Capaian kinerja yang tidak mencapai target disebabkan antara lain oleh:

1. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan untuk lokasi dimaksud sudah dilaksnakan oleh pihak lain yaitu BPIW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



2. Tidak adanya anggaran untuk mendukung terhadap ketercapaian indikator kinerja dikarenakan adanya keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2025 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung akan melakukan :

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk pencapaian kinerja.
2. Melakukan evaluasi dan monitoring setiap triwulan untuk mengetahui pencapaian dari indikator kinerja yang sudah ditentukan.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak lain sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Tabel 2.25.: Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Infrastruktur Permukiman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Capaian	Capaian (%)	Notifikasi
1	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Pemenuhan PSU Permukiman	Persen	64,52	65,14	100,96	tercapai

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2026

Sasaran ini merupakan sasaran startegis untuk urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pencapaian sasaran Meningkatnya Infrastruktur Permukiman diukur dengan menggunakan indikator kinerja Pemenuhan PSU Permukiman.

Uraian kinerja atas indikator kinerja meningkatnya infrastruktur ke-PU-an sebagai berikut :

1.1.1 Pemenuhan PSU Permukiman

Target kinerja pada tahun 2025 untuk indikator pemenuhan PSU Permukiman sebesar 64,52%.

Pada Tahun 2025, indikator pemenuhan PSU permukiman yang terealisasi sebesar 65,14% atau mencapai 100,96% dari target tahun 2024, dengan ringkasan sebagaimana disajikan berikut:

Tabel 2.26.: Realisasi Pemenuhan PSU Permukiman Tahun 2024

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Pemenuhan PSU Permukiman	64,52	65,14

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja meningkatnya infrastruktur permukiman dengan capaian sebesar 65,14% diperoleh dari rumus berikut:

Pemenuhan PSU Permukiman = (0,25 x jalan lingkungan) + (0,25 x RTH) + (0,25 x RLH korban bencana) + (0,25 x RLH korban relokasi program pemerintah)

Keterangan :

- Persentase jalan lingkungan = (Panjang jalan lingkungan yang tertangani / panjang jalan lingkungan yang direncanakan) x 100%;
- Persentase Ruang Terbuka Hijau berdasarkan persentase yang ada di RTRW;
- RLH Korban Bencana yaitu teranggarkannya program terkait dengan RLH korban bencana;
- RLH Korban Relokasi Program Pemerintah yaitu rumah layak huni yang dibangun.

Dengan menggunakan rumus tersebut, realisasi indikator pemenuhan PSU permukiman pada tahun 2024 adalah sebesar 65,14% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,96%, dengan rincian sebagai berikut :

- Persentase jalan lingkungan didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman}}{\text{Jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung}} \times 100 \%$$

- Persentase Ruang Terbuka Hijau berdasarkan persentase yang ada di RTRW;



- RLH Korban Bencana yaitu teranggarkannya program terkait dengan RLH korban bencana;
- RLH Korban Relokasi Program Pemerintah yaitu rumah layak huni yang dibangun.

Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Permukiman didukung dengan pelaksanaan 3 (dua) program yaitu program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) serta program pengembangan perumahan.

Untuk sasaran strategis meningkatnya infrastruktur permukiman merupakan sasaran strategis tahun pertama untuk Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung periode 2024-2026.

Tabel 2.27.: Target, Realisasi dan Capaian Program untuk Sasaran Pemenuhan PSU Permukiman

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Capaian Kinerja (%)	Notifikasi
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh	99,80 %	99,80 %	100,00	tercapai
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU yang dikelola	66,02 %	48,42 %	73,34	belum tercapai
3	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Mendapat Rumah Layak Huni	100,00 %	0,00 %	0,00	belum tercapai

Sumber : DPUPR Kab. Belitung, 2025

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh mencapai tingkat capaian kinerja 100% sehingga target yang direncanakan sudah memenuhi target. Kegiatan yang mendukung program ini adalah perbaikan rumah tidak layak huni, dimana untuk tahun 2024 sebanyak 8 (delapan) unit rumah rumah tidak layak huni yang diperbaiki.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mencapai tingkat capaian kinerja sebesar 73,34% yaitu dari target sebesar 66,02% yang terealisasi sebesar 48,42%, penyebab tidak terealisasinya target kinerja program adalah jalan lingkungan serta prasarana, sarana dan utilitas umum yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang direncanakan didalam Rencana Strategis. Untuk prasarana, sarana dan utilitas umum, kendala yang dihadapi adalah masih banyaknya pihak dari Developer perumahan yang belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sehingga berpengaruh ke capaian program.

Program Pengembangan Perumahan merupakan program untuk mendukung sistem pelayanan minimal (SPM), untuk capaiannya sebesar 0,00% dikarenakan untuk program ini merupakan untuk program penanggulangan bencana sementara di Kabupaten Belitung sepanjang tahun 2024 tidak terjadi bencana.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan pada tahun 2024.
- Mengoptimalkan sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan evaluasi setiap triwulan terkait dengan pelaksanaan kegiatan serta pencapaian kinerja

Capaian kinerja yang mencapai target disebabkan antara lain oleh:

- Adanya pengalokasian anggaran untuk mendukung program-program pemerintah seperti program stunting dan pengentasan kemiskinan.



Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2024 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung akan melakukan :

- Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk pencapaian kinerja.
- Melakukan evaluasi dan monitoring setiap triwulan untuk mengetahui pencapaian dari indikator kinerja yang sudah ditentukan.
- Melakukan koordinasi dengan pihak lain sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Gambar 2.9.: Kegiatan untuk Mendukung Sasaran Strategis Pemenuhan PSU Permukiman



Tabel 2.28.: Pembangunan PSU di Kabupaten Belitung Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Realisasi			
		Output			
		Panjang	Satuan	Lebar Rata-rata	Satuan
1	Program Penyelenggaraan PSU Perumahan				
	- Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
	- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				
1	- Pemeliharaan Jalan Setapak di Kecamatan Tanjungpandan (Paket 1) (Sisa Dana Insentif Fiskal Tahun 2023)	258,0	M	1,2 s.d 2,5	M
	1 a. Gang Rambutan, Kampong damai	118,0	M		M
	2 b. RT04/RT05 Perbatasan (Jalan Kik Bujang)	140,0	M		M
2	- Pemeliharaan Jalan Setapak di Kecamatan Tanjungpandan (Paket 2) (Sisa Dana Insentif Fiskal Tahun 2023)	249,0	M	1,0 s.d 2,0	M
	3 a. Gang Depan Kantor Pos, Jl. Merdeka	200,0	M		M
	4 b. Gang Kelinci, Kel. Kota	49,0	M		M
3	- Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Setapak di Kelurahan Parit	339,0	M	1,2 s.d 2,2	M
	5 a. Jalan Veteran Lingkungan RT 03 (Dekat Nafisa)	123,0	M		M
	6 b. Jalan Depan Toko Mas Hero	216,0	M		M
4	- Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Tanjungpandan (Dana Insentif Fiskal Tahun 2024)	419,0	M	3,0	M
	7 a. Jalan Muallim Dalam	419,0	M		M
5	- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Paket 1 (Dana Insentif Fiskal Tahun 2024)	890,0	M	3,0	M
	8 a. Jalan Peternakan	310,0	M		M
	9 b. Jalan Lingkar Dusun	580,0	M		M
6	- Peningkatan Jalan Lingkungan Handayani P2IP/Haryani (Lanjutan)	100,0	M	4,0	M
	10 a. Jalan Handayani P2IP/Haryani	100,0	M		M
7	- Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Tanjungpandan	1.725,8	M	3,0 s.d 4,0	M
	11 a. Jalan Kenanga	177,0	M		M
	12 b. Gang Duren	96,0	M		M
	13 c. Jalan Berlian	371,0	M		M
	14 d. Jalan Jerat Nangka	481,0	M		M
	15 e. Jalan Muallim Dalam	148,8	M		M
	16 f. Jalan Bina Insani	452,0	M		M
8	- Peningkatan jalan Lingkungan Kecamatan Sijuk	879,0	M	3,0 s.d 4,0	M
	17 a. Jalan Padat Karya	265,0	M		M
	18 b. Jalan Kik Janggau	292,0	M		M
	19 c. Jalan Aik Dulang (Pesantren Putra)	322,0	M		M
	Jumlah	4.859,8	M		
	Total Panjang Jalan Lingkungan	4.013,8	M		
	Total Panjang Jalan Setapak	846,0	M		

Sumber : Bidang Perkim Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

Pada Sasaran strategis terwujudnya konektivitas antar wilayah bidang perhubungan dengan indikator rasio konektivitas memiliki rumus:

Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) Dimana :

- IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)
- IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)



Keterangan:

IK1 (Angkutan Jalan)

- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP
- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu
- IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)
- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil
- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu

Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :

1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)
2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)
3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)
4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas:

Sedangkan sasaran strategis dari meningkatnya sistem transportasi daerah dengan indikator Kinerja lalu lintas, memiliki formulasi dari Rata-Rata Volume kapasitas jalan/Kapasitas Jalan. Indikator Survey Kepuasan Masyarakat memiliki formulasi Jumlah dari Nilai rata rata tertimbang/ Nilai unsur pelayanan.

Berikut data konektivitas antar wilayah bidang perhubungan:

Tabel 2.29.: Data Trayek Penumpang Angkutan Jalan Kabupaten Belitung Tahun 2025

No	Trayek		Jarak	Jumlah Trayek	
	Dari	Ke		Kebutuhan	Ketersediaan
1	Tanjungpandan	Teluk Gembira	67	1	1
2	Tanjungpandan	Tanjung Rusa	55	1	-
3	Membalong	Tanjung Rusa	22	1	-
4	Selat Nasik	Petaling	17	1	-
5	Selat Nasik	Tanjung Nyato	10,5	1	-
6	Tanjungpandan	Tanjung Tinggi -via Tanjung Binga	37	1	1
7	Tanjungpandan	Tanjung Kelayang	37	1	1
8	Tanjungpandan	Tanjung Tinggi –via Sijuk	37	1	1
9	Tanjungpandan	Air Batu	42	1	1
10	Tanjungpandan	Tanjung Ru	30	1	1
11	Tanjungpandan	Badau (Batu Mentas)	27	1	1
12	Tanjungpandan	Ibul	27	1	1
13	Dalam Kota Tanjungpandan 1		15	1	1
14	Dalam Kota Tanjungpandan 2		15	1	1
15	Tanjungpandan	Bandara H.AS. Hanandjoeddin	14	1	-
16	Bandara H.AS Hanandjoeddin	Tanjung Kelayang	35	1	1
17	Bandara H.AS. Hanandjoeddin	Tanjung Ru	43	1	-
Jumlah				17	11

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Belitung 2025



Perhitungan Indikator Kinerja Angkutan Jalan:

- Bobot Trayek atau lintas adalah dengan frekuensi tinggi (> 5 X dalam seminggu) sehingga bobot =1
- Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota dikali bobot Trayek dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut : $(11 \times 1) / 17 = 0,65$

Tabel 2.30.: Data Lintas Komersil dan Lintas Perintis Kabupaten Belitung Tahun 2025

No	Lintas Komersil	Kebutuhan	Tersedia	Persentase
1	Tanjung Ru-Nyato	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
2	Tanjung Ru-Selat Nasik	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
3	Tanjung Pakuk (Teluk Gembira) – Seliu	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
4	Tanjung Kelayang – Lengkuas	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
5	Tanjung Pakuk (Teluk Gembira) – Pulau Sumedang	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
6	Tanjungpandan- Selat Nasik	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
7	Tanjungpandan- Pulau Gersik	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
8	Tanjung pandan- Pulau Kuil	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
9	Tanjungpandan- Pulau Sumedang	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
10	Tanjungpandan- Buntar	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
TOTAL		10 Lintasan	4 Lintasan	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Belitung 2025

Bobot Trayek atau lintas adalah dengan frekuensi tinggi (> 5 X dalam seminggu) sehingga bobot =1

Jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)

$$(4 \times 1) / 10 = 0,40$$

Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$

Untuk bobot angkutan jalan atau sungai, danau dan penyeberangan di Kabupaten Belitung adalah Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)

sehingga perhitungan rasio konektivitas adalah :

$$= ((11 \times 1 / 17) \times 50) + ((4 \times 1 / 10) \times 50)$$

$$= (0,65 \times 50) + (0,40 \times 50)$$

$$= 32,50 + 20,00$$

$$= 52,50$$

Nilai 52,50 ini menunjukan bahwa tingkat konektivitas di Kabupaten Belitung berada pada kondisi kurang baik sehingga masih diperlukan penambahan terhadap lintas trayek.

Dukungan kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.31.: Rekapitulasi Data Kendaraan Lulus Uji Tahun 2025

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Sub Jenis	Jumlah Kendaraan Lulus Ujian
1	M. Penumpang Umum	Sedan/ Non Sedan	0
2	Mobil Bus		81
3	Mobil Barang	Pick Up	405
		Box Pick Up	84
		Truck	313
		Box Truck	71



	Tangki	35
	B.Khusus	3
4	Kereta Tempelan	0
5	Kereta Gandengan	0
Total		992

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Belitung 2025

Tabel 2.32.: Rekapitulasi Data KendaraanTidak Lulus Uji Tahun 2025

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Sub Jenis	Jumlah Kendaraan Lulus Ujian
1	M. Penumpang Umum	Sedan/ Non Sedan	0
2	Mobil Bus		26
3	Mobil Barang	Pick Up	45
		Box Pick Up	26
		Truck	78
		Box Truck	39
		Tangki	14
		B.Khusus	2
4	Kereta Tempelan		0
5	Kereta Gandengan		0
Total			230

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Belitung 2025

Keterangan:

Jumlah Kendaraan di Uji Tahun 2025 : 1.222 Unit
Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji Tahun 2025 : 992 Unit
Jumlah Kendaraan yang Tidak Lulus Uji Tahun 2025 : 230 Unit

Tabel 2.33.: Data Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan Jalan Tahun 2025

No	Jenis Sarana Prasarana/ Faskes	Kebutuhan s/d		Capaian											
		2024		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
1	Rambu Lalu Lintas	2937	Unit	3847	Unit	1967	Unit	1967	Unit	2027	Unit	2067	Unit	2083	Unit
2	Trafic Light	39	Titik	7	Titik	27	Titik	33	Titik	33	Titik	33	Titik	33	Titik
3	Warning Light	91	Titik	15	Titik	21	Titik	79	Titik	81	Titik	82	Titik	84	Titik
4	Deliniator	2601	Unit	20	Unit	1946	Unit	1946	Unit	1946	Unit	1947	Unit	1947	Unit
5	Guard Rail	15	Titik	7	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik
6	RPJ	200	Unit	120	Unit	132	Unit	132	Unit	138	Unit	138	Unit	138	Unit
7	Pita Penggadu	36	Titik	18	Titik	23	Titik	23	Titik	23	Titik	23	Titik	23	Titik
8	Paku Marka	8	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik
9	Cermin Tikungan	50	Titik	0	Titik	10	Titik	10	Titik	35	Titik	46	Titik	73	Titik
10	Marka Jalan	25	Titik	20	Titik	20	Titik	20	Titik	20	Titik	20	Titik	20	Titik
11	Zebra Cross	60	Titik	45	Titik	45	Titik	45	Titik	45	Titik	45	Titik	46	Titik
12	Papan Nama Jalan	300	Unit	116	Unit	170	Unit	170	Unit	206	Unit	206	Unit	206	Unit
13	RPA	11	trayek	9	trayek	10	trayek	11	trayek	11	trayek	11	trayek	11	trayek
14	Trayek	150	Unit	110	Unit	110	Unit	110	Unit	110	Unit	110	Unit	110	Unit
15	Bus,Teminal,Halte	35	Unit	24	Unit	24	Unit	24	Unit	24	Unit	24	Unit	24	Unit
16	Penerangan Jalan Umum	5,519	Unit	3,433	Unit	4,015	Unit	4,080	Unit	5,014	Unit	7,471	Unit	7,471	Unit

Dari total kebutuhan sampai tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 persentase yang tercapai untuk fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan adalah sebesar **73,45 %**.

Pengukuran Pencapaian Kinerja terwujudnya konektivitas antar wilayah bidang perhubungan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2024 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Terwujudnya konektivitas antar wilayah bidang perhubungan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Tahun 2024 secara keseluruhan berjalan dengan baik, namun masih terdapat adanya kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya. Untuk itu, melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung mengupayakan langkah strategis untuk meningkatkan keberhasilan kinerja pada tahun berikutnya dengan melihat beberapa



permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja, antara lain dengan melakukan beberapa strategi yaitu:

- ⌘ Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, termasuk pelatihan tentang keselamatan berlalu lintas, manajemen lalu lintas, dan pengelolaan sistem transportasi yang berkelanjutan;
- ⌘ Fokus pada peningkatan kualitas dan pemeliharaan infrastruktur transportasi, seperti perbaikan jalan dan perbaikan fasilitas umum;
- ⌘ Meningkatkan kerja sama dengan lembaga terkait, seperti kepolisian, Dinas Pekerjaan Umum, serta pihak swasta untuk mempercepat implementasi proyek dan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor transportasi.

TUJUAN 2 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

Capaian kinerja tujuan “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” diukur melalui pencapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia. Capaian kinerja tujuan dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.34.: Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	2025			Kategori	Target Akhir
				Target	Realisasi	Capaian		RPD 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Skala	73,38	74,77	75,29	100,70	SB	74,95

Dari tabel di atas terlihat bahwa kedua indikator kinerja tujuan melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2025. Capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia sebesar 100,70% dengan kategori **SANGAT BERHASIL**.

IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS menggambarkan lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan/dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

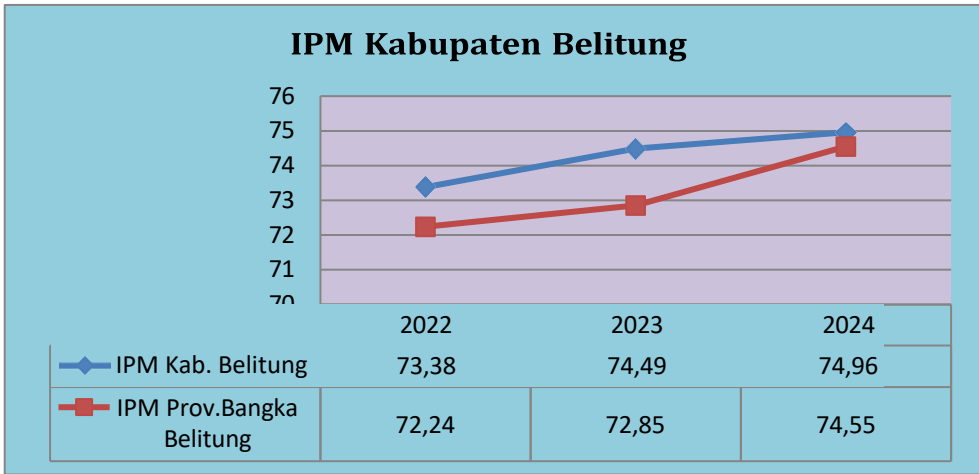
IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Capaian

Capaian Nilai IPM Kabupaten Belitung (Grafik 2.1) selama tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dan terus mengalami peningkatan mulai dari 74,49 pada tahun 2023 hingga mencapai 75,29 atau berada pada capaian “tinggi” (70<IPM<80; berdasarkan kriteria dari United Nations Development Programme (UNDP)) pada tahun 2023. Nilai capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,33 poin bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024



dengan nilai 74,96. Dibandingkan dengan level IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang pada tahun 2025 tercapai sebesar 75,29, nilai IPM Kabupaten Belitung tercapai lebih tinggi 0,03 poin. Adapun perkembangan IPM Kabupaten Belitung dari Tahun 2023 – 2025 disajikan sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.1.: Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, IPM Kabupaten Belitung tertinggi ketiga setelah Kota Pangkalpinang yang memiliki nilai IPM 81,64 kategori Sangat Tinggi dan Kabupaten Bangka dengan nilai IPM 75,38. Namun Nilai IPM Kabupaten Belitung berada dibawah nilai IPM Nasional yang pada tahun ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang semula 75,02 menjadi 75,90 dengan capaian pertumbuhan IPM 0,88 poin. Berikut nilai IPM Kabupaten Belitung dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam periode tahun 2023 - 2025:

Tabel 2.35.: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2023 – 2025

NO	URAIAN	TAHUN		
		2023	2024	2025
1	Umur Harapan Hidup	72,52	72,76	73,13
2	Harapan Lama Sekolah	11,90	12,09	12,10
3	Rata-rata Lama Sekolah	8,98	9,05	9,11
4	Pengeluaran per Kapita	14.365	14.449	14.559

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2026

Pada tahun 2025, capaian masing-masing dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Angka Harapan Hidup/Usia Harapan Hidup (AHH/UHH) sebesar 73,13, naik 0,37 tahun dari sebelumnya, Harapan Lama Sekolah sebesar 12,10 tahun naik sebesar 0,01 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 9,11 tahun, naik 0,06 tahun dari tahun sebelumnya, Pengeluaran Per Kapita meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 14.449.000,- per tahun, meningkat menjadi Rp 14.559.000,- per tahun.

Dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026, upaya pencapaian Tujuan 2 “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia”, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 7 (tujuh) strategi sebagaimana terinci pada tabel berikut:



Tabel 2.36.: Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 2

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 2 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Sasaran 1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses pendidikan

SASARAN 4 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” merupakan salah indikator kinerja utama RPD dengan indikator Angka Harapanan Hidup dengan target “71,42”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2025.

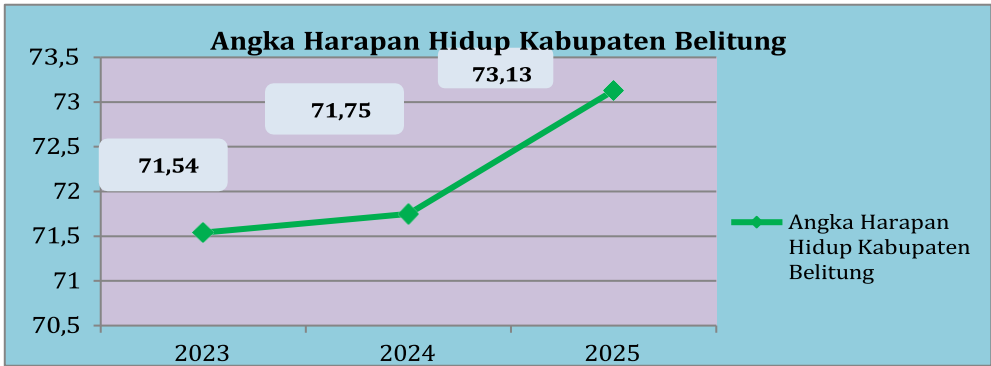
Tabel 2.37.: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi		2025		Kategori	Akhir RPD 2026 Target
			Awal RPD	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,31	71,42	73,13	102,39	SB	72,00

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat digunakan Angka Harapan Hidup (AHH), yang merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir hingga suatu tahun tertentu. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator sasaran Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan keberhasilan dimana tahun 2025 dari target 71,42 tahun, terealisasi umur harapan hidup penduduk Belitung mencapai 73,13 tahun atau 102,39% dari target kinerja.

Trend Angka Harapan Hidup di Kabupaten Belitung cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada tabel perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2023-2025.

Grafik 2.2.: Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2023 – 2025



Sumber: Belitung Dalam Angka 2025



Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Tingginya pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan.

Tabel 2.38.: Perkembangan Angka Harapan Hidup Wilayah Bangka Belitung Tahun 2023 – 2025

Wilayah Babel	TAHUN		
	2023	2024	2025
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	71,23	71,49	74,46
Bangka	71,60	71,80	73,56
Belitung	71,54	71,75	73,13
Bangka Barat	70,43	70,59	72,35
Bangka Tengah	72,11	72,36	74,11
Bangka Selatan	68,98	69,24	72,07
Belitung Timur	72,59	72,85	74,12
Pangkal Pinang	73,96	74,24	75,64

Sumber: Website BPS Provinsi Kep.Bangka Belitung <https://babel.bps.go.id>

Peningkatan AHH menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat relatif membaik yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Peningkatan AHH juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, peningkatan gizi masyarakat dan akses serta mutu pelayanan kesehatan. Kepedulian tinggi pemerintah dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu:

1. Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang merupakan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui deteksi dini faktor risiko dan penyakit tidak menular maupun menular. Kegiatan ini dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama serta lintas sektor terkait
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap mutu layanan puskesmas melalui Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB)
3. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Gerakan Masyarakat (Germas)
4. Optimalisasi pengelola program di pelayanan dengan peningkatan SDM

Tabel 2.39.: Hasil kinerja upaya kesehatan masyarakat untuk 12 jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2025

NO	KINERJA BIDANG KESEHATAN			Target	Realisasi (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			100	82,40
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin			100	94,80
3	Pelayanan	Kesehatan	Bayi Baru Lahir	100	95,07
4	Pelayanan Kesehatan Balita			100	90,18
5	Pelayanan Pendidikan Dasar	Kesehatan	pada Usia	100	100
6	Pelaynan Usia Produktif	Kesehatan	pada	100	86,45
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			100	92,74
8	Pelayanan Hipertensi	Kesehatan pada Penderita		100	97,62
9	Pelayanan Diabetes Militus	Kesehatan Penderita		100	98,40



10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100	87,03

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2025

Meningkatnya angka harapan hidup merupakan tantangan kompleks yang melibatkan berbagai aspek, termasuk kesehatan masyarakat, pendidikan, ekonomi, dan aksesibilitas layanan kesehatan. Angka harapan hidup yang tinggi tidak hanya mencerminkan kesehatan individu tetapi juga mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistic dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi berbagai factor yang mempengaruhi angka harapan hidup. Rekomendasi/ solusi untuk permasalahan tersebut adalah pertama-tama penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan. Investasi dalam infrastruktur kesehatan, pelatihan tenaga medis, dan penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Sistem kesehatan yang efisien dan terjangkau harus menjadi prioritas, termasuk program imunisasi, pencegahan penyakit menular dan perawatan primer.

Selain itu, pendidikan kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan gaya hidup sehat, pola makan yang baik dan kebersihan pribadi. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye public. Kurikulum sekolah, dan kampanye komunitas untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup sehat. Dalam menghadapi kompleksitas tentang ini, kolaborasi antara pemerintah, sector swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil adalah kunci. Hanya dengan kerjasama yang kuat dan komitmen bersama, kita dapat mencapai peningkatan berkelanjutan dalam rangka harapan hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berkelanjutan.

SASARAN 5 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Pembangunan dibidang pendidikan terus dilaksanakan di Kabupaten Belitung dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan menjadi salah satu faktor pendukung majunya pendidikan suatu bangsa. Jika kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya Belitung mampu mencapai kualitas maksimal, tidak menutup kemungkinan akan menjadikan Belitung sebagai daerah maju. Pendidikan merupakan faktor penting sebagai dasar pembentukan kepribadian manusia.

Mutu pendidikan di Kabupaten Belitung masih terbilang cukup rendah. Kabupaten Belitung masih harus banyak melakukan pembangunan dalam sektor pendidikan agar mampu memberikan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warganya, antara lain dengan mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan non formal dan meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah.

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat” diukur melalui Indikator Sasaran Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah. Target 2025 yang ditetapkan adalah 8,80 tahun. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40.: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI		2025		KATEGORI	TARGET
			AWAL RPD	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		AKHIR RPD 2026
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,74	8,80	9,11	103,08	SB	8,82

Indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Berdasarkan penghitungan dari BPS, realisasi RLS Kabupaten Belitung tahun 2025 sebesar 9,11 tahun.



Realisasi ini melampaui target sebesar 3,52%. Berikut disajikan data capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Belitung dan Provinsi Bangka Belitung dari tahun 2023 sampai 2025.

Tabel 2.41. : Perkembangan Capaian RLS Kabupaten Belitung terhadap Prov. Kep. Babel dan Nasional Tahun 2023 - 2025

Wilayah Babel	TAHUN		
	2023	2024	2025
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	8,25	8,33	8,65
Bangka	8,32	8,45	8,77
Belitung	8,98	9,05	9,11
Bangka Barat	7,47	7,48	7,80
Bangka Tengah	7,23	7,24	7,33
Bangka Selatan	6,91	6,93	7,25
Belitung Timur	8,90	8,99	9,03
Pangkal Pinang	10,50	10,67	10,90

Sumber: Website BPS Provinsi Kep.Bangka Belitung <https://babel.bps.go.id>

Dari grafik terlihat bahwa selama kurun waktu 2023 – 2025, capaian RLS Kabupaten Belitung sudah di atas provinsi Bangka Belitung dan juga jika dibandingkan dengan capaian RLS nasional, RLS Kabupaten Belitung berada sedikit lebih tinggi. Pada tahun 2024, capaian RLS Kabupaten Belitung 9,11 tahun, melampaui RLS Provinsi Kep Babel yang sebesar 8,65 tahun, dan capaian nasional sebesar 9,07 tahun.

Peningkatan pembangunan urusan pendidikan di Kabupaten Belitung terus dilakukan karena telah memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pendidikan daerah yang ditunjukkan dengan kenaikan angka rata-rata lama sekolah. Berbagai upaya tersebut antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan akses pembiayaan pendidikan, peningkatan tata kelola dan kualitas sumber daya manusia pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mencapai capaian indikator kinerja “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat” dilakukan melalui strategi “Meningkatkan Akses Pendidikan” dengan 10 (sepuluh) arah kebijakan, yaitu:

1. Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah;
2. Meningkatkan akreditasi sekolah (PAUD, SD dan SMP dan pendidikan kesetaraan);
3. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
4. Meningkatkan penyelenggaraan PAUD;
5. Meningkatkan mutu pembelajaran dengan penguatan karakter dan akhlak;
6. Menigkatkan kualitas SDM pendidikan dan tenaga kependidikan;
7. Meningkatkan pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan;
8. Memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi;
9. Meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi pada anak usia sekolah; dan
10. Meningkatkan literasi pada anak usia sekolah dan masyarakat.

Untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah pada anak usia sekolah dilakukan de ngan menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu; Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Putus Sekolah (APTs).

❖ Angka Partisipasi Kasar (APK)

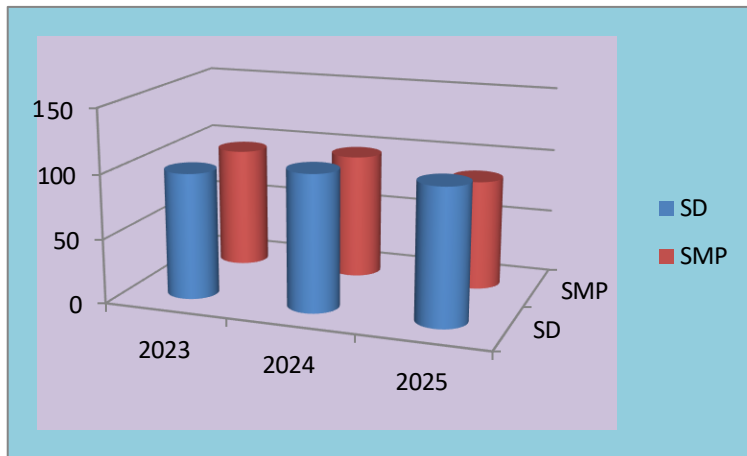
Salah satu tolok ukur partisipasi penduduk ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). APK bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Sehingga seluruh anak usia sekolah dasar dan menengah baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dapat memperoleh pendidikan. APK juga menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya dan merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.



Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Berikut angka partisipasi kasar (SD/MI + Paket A, SMP/Mts + Paket B) di Kabupaten Belitung Tahun 2024:

Grafik 2.3.: Perkembangan APK Tahun 2023 – 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik 2026

Terlihat bahwa APK SD/MI di Kabupaten Belitung berfluktuatif cenderung menurun. Hal tersebut perlu mendapatkan evaluasi yang komprehensif oleh pemerintah daerah sehingga perencanaan dan intervensi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah anak-anak yang bersekolah di SD/MI/Paket A di Kabupaten Belitung terus meningkat. Sama halnya dengan APK jenjang SD, pada APK jenjang SMP/MTs mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meurun. Ini menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan dan intervensi di dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang SMP/MTs/Paket B memberikan kesempatan kepada anak-anak usia SMP/MTs untuk bias melanjutkan pendidikan mereka. Pemenuhan sarana dan prasarana belajar disekolah juga mendorong semakin banyak anak-anak usia SMP yang bias bersekolah di lingkungan tempat tinggal mereka.

❖ Angka Partisipasi Murni (APM)

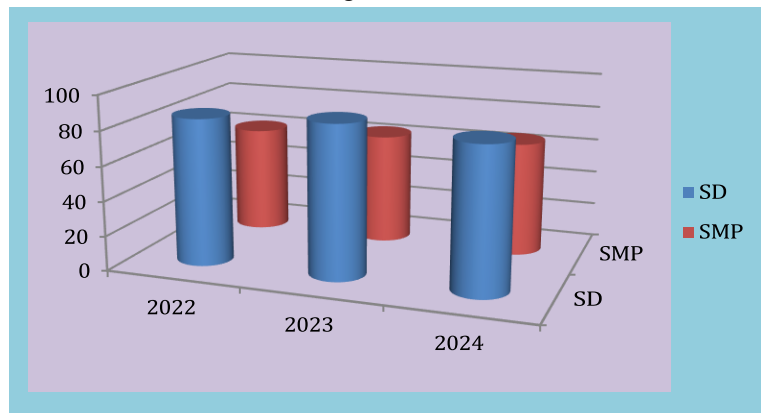
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa di luar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

Berikut angka partisipasi murni (SD/MI + Paket A, SMP/Mts + Paket B) di Kabupaten Belitung tahun 2025.



Grafik 2.4.: Perkembangan APM Tahun 2023-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

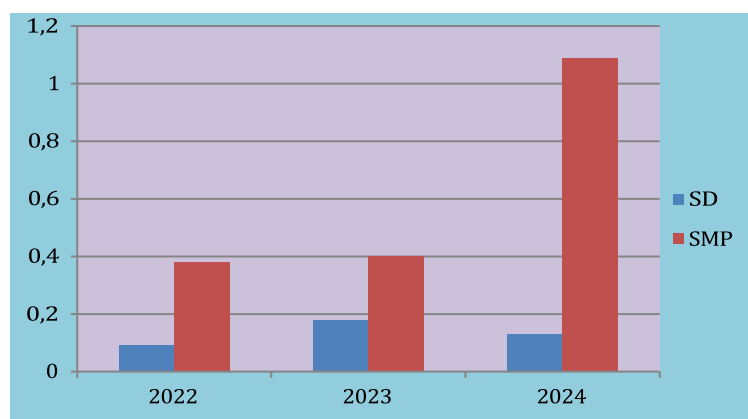
Tren penurunan APM yang terjadi baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs dipengaruhi berbagai factor, antara lain ketidakmerataan infrastruktur pendidikan hingga danya regulasi terkait zonasi sekolah yang telah diberlakukan memberikan dampak terhadap turunnya APM SD. Angka APM kurang dari 100% berarti terdapat anak usia SD maupun SMP yang bersekolah sebelum usia berdasarkan ketentuan atau ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Anak usia sekolah yang tidak bersekolah dimungkinkan karena: anak yang difabel, yang tidak bias sekolah melalui sekolah formal, anak usia sekolah bersekolahnya dengan cara *home shoolling*, anak *drop out* sekolah. Oleh karena itu, diperlukan penelusuran lebih lanjut penyebab APM belum mencapai 100%, agar dapat dirumuskan kebijakan yang tepat untuk menanggapi *gap* yang ada.

❖ Angka Putus Sekolah (APTs)

Angka Putus Sekolah adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7 - 12 tahun, 13 - 15 tahun dan 16 - 18 tahun. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Di Kabupaten Belitung, APTs mengalami penurunan terutama di tingkat SD/MI + Paket A dan SMP/Mts + Paket B. Sebagaimana terlihat pada berikut:

Grafik 2.5.: Perkembangan Angka Putus Sekolah Kab. Belitung Tahun 2022 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu:

- 1) Melakukan Pembinaan secara Intensif ke sekolah serta interaksi dengan pemangku kepentingan setempat seperti pemerintah Desa, untuk dukungan mencegah siswa putus sekolah
- 2) Melalui bidang Teknis Melakukan pendampingan kepada sekolah sebagai tindakan responsif jika ditemukan laporan siswa yang putus sekolah.

Untuk meningkatkan kinerja tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan:



- 1) Melakukan Pembinaan secara intensif kepada sekolah untuk melakukan antisipasi dan pemetaan terhadap siswa yang rentan putus sekolah.
- 2) Meningkatkan komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan setempat untuk mencegah angka putus sekolah melalui kesadaran kolektif masyarakat.

Tabel 2.42.: Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang TK/PAUD di Kabupaten Belitung Tahun 2024/2025 - 2025/2029

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	2024/2025	2025/2026	2024/2025	2025/2026	2024/2025	2025/2029
Membalong	7	7	26	29	255	252
Tanjungpandan	21	20	113	117	1.369	1.371
Badau	4	4	19	20	118	139
Sijuk	9	10	45	39	312	335
Selat Nasik	1	1	5	5	28	31
Belitung	42	42	208	210	2.082	2.128

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2026

Tabel 2.43.: Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang SD di Kabupaten Belitung Tahun 2024/2025 - 2025/2026

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	2024/2025	2025/2026	2024/2025	2025/2026	2024/2025	2025/2026
Membalong	30	30	263	230	2.449	2.423
Tanjungpandan	45	45	585	541	10.737	10.751
Badau	17	17	147	131	1.561	1.581
Sijuk	22	22	207	186	2.908	2.870
Selat Nasik	7	7	55	43	496	479
Belitung	121	121	1 257	1 131	18.151	18.104

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2026

Tabel 2.44.: Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang SMP di Kabupaten Belitung
Tahun 2024/2025 - 2025/2026

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Membalong	5	5	69	73	961	972
Tanjungpandan	15	15	276	272	4.825	4.875
Badau	3	3	46	47	755	751
Sijuk	4	4	79	82	1.314	1.293
Selat Nasik	2	2	18	22	241	217
Belitung	29	29	488	496	8.096	8.108

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2026

Dari tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir terjadi peningkatan sebaran guru-guru pada jenjang SD di tiap kecamatan, peningkatan dan penurunan sebaran guru-guru ini terjadi karena adanya penerimaan PNS untuk kategori guru TK/ PAUD, SD dan SMP dan guru yang memasuki masa pensiun. Peningkatan yang tinggi sebaran guru-guru di Kecamatan Tanjungpandan karena mutasi dari kecamatan lain di Kabupaten Belitung. Sedangkan jumlah sekolah tidak mengalami peningkatan. Khusus untuk jumlah sekolah diprioritaskan pada peningkatan kualitas gedung sekolah dengan perbaikan-perbaikan ruang kelas, penambahan ruang kelas, serta penambahan kelengkapan sarana pendidikan.



Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Belitung juga berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui program inovatif yang diusung Bupati dan Wakil Bupati, yaitu: Program Pelayanan Pendidikan Bagi Siswa Kurang Mampu dan Siswa Berprestasi (SIMPOR). Program ini merupakan upaya untuk mencegah putus sekolah bagi siswa kurang mampu yang rentan putus sekolah. Program SIMPOR menasar Siswa SD dan SMP yang kurang mampu dan rentan putus sekolah, tetapi tidak mendapat bantuan pada Program Indonesia Pintar (PIP). Program SIMPOR dilaksanakan sejak tahun 2019 sampai dengan 2025 dirasakan sangat efektif dalam rangka menekan angka putus sekolah serta meningkatkan angka melanjutkan sekolah di Kabupaten Belitung. Penerima manfaat dari Program SIMPOR adalah Peserta Didik Jenjang SD dan SMP yang berlatar belakang dari keluarga kurang mampu yang masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Upaya pencapaian indikator sasaran ini bisa berjalan baik karena adanya faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- ❖ Ketersediaan anggaran yaitu tersedianya anggaran yang cukup untuk meringankan beban orangtua siswa melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan komitmen pimpinan karena pendidikan merupakan dasar utama manusia untuk maju dan berkembang.

- ❖ Program pusat yaitu Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 yang berkaitan dengan wajib belajar dan pengentasan kemiskinan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;

- ❖ Melakukan Komunikasi dan Pembinaan Kepada pihak sekolah dalam upaya menekan angka putus sekolah serta meningkatkan angka melanjutkan sekolah dan pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan manusia.

- ❖ Program Inovatif daerah "SIMPOR" dapat berjalan dengan baik.

Adapun faktor Penghambat Pencapaian Kinerja antara lain;

- ✘ Akses pendidikan kurang merata. Hal tersebut dapat ditandai dengan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar, sehingga dengan kurangnya akses pendidikan tersebut berpengaruh terhadap angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Belitung;

- ✘ Cukup tingginya APTs di Kabupaten Belitung.

Kurangnya pembinaan secara intensif ke sekolah serta interaksi dengan pemangku kepentingan setempat seperti pemerintah Desa, untuk dukungan mencegah siswa putus sekolah.

- ✘ Masih adanya anggapan masyarakat bahwa Pendidikan anak usia dini biayanya mahal, dan tidak penting karena untuk mengikuti pendidikan SD tidak wajib lulus PAUD.

Memperhatikan faktor pendukung dan penghambat di atas beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung ke depan adalah sebagai berikut:

- ⌘ Meningkatkan pemerataan akses pendidikan terutama untuk daerah terpencil.

- ⌘ Meningkatkan kemampuan pembelajaran.

Pemerintah Kabupaten Belitung harus dapat memastikan bahwa siswa setidaknya mencapai standar minimal pembelajaran dan pengembangan diri siswa di setiap jenjang sistem pendidikan.

- ⌘ Meningkatkan prasarana dan sarana.

- ⌘ Meningkatkan kompetensi dasar dan memperbaiki sikap yang harus dimiliki pembelajar/guru.

Tanpa pengajaran yang lebih baik secara konsisten, siswa di Kabupaten Belitung tidak akan memperoleh fondasi yang kuat untuk belajar di tahap selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belitung harus dapat memastikan bahwa Kabupaten Belitung memiliki jumlah guru berkualifikasi tinggi di tempat yang membutuhkan, khususnya di sekolah-sekolah yang berprestasi rendah, terpencil, dan di daerah pedesaan, serta memastikan para guru tersebut berkinerja sesuai kemampuan terbaiknya.

- ⌘ Menjalin hubungan sekolah dengan masyarakat dan pemanfaatan lingkungan untuk meningkatkan peran dan kapabilitas orang tua siswa dan masyarakat dalam meningkatkan motivasi belajar anak.



TUJUAN 3 :Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan

Capaian kinerja tujuan terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan diukur melalui pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.45.: Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi		2025		Kategori	Target Akhir RPD 2026
			Awal RPD	Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	B	BB (Tahun 2024)	109,88	SB	BB

Pada tahun 2025 secara resmi Kementerian PANRB belum mengeluarkan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung, sehingga yang dipergunakan adalah Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Berikut ini Perkembangan dan pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022 dan 2024 :

Tabel 2.46.: Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Belitung Tahun 2022-2025

No	Tahun	Indeks Reformasi Birokrasi
1	2022	57,71 (CC)
2	2023	75,14 (BB)
3	2024	79,74 (BB)
4	2025	79,74 (BB) (Nilai Tahun 2024)

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sejak tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah melakukan penajaman evaluasi reformasi birokrasi dengan lebih mengukur indeks reformasi birokrasi dari sisi dampak kinerja dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif yang disebut dengan reformasi birokrasi tematik yang terdiri dari empat tema yaitu: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden (peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi).

Evaluasi reformasi birokrasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari siklus pengelolaan reformasi birokrasi. Dalam Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 50 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023-2024. Komitmen melaksanakan reformasi birokrasi Reformasi Birokrasi diLingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung ditunjukkan dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 188.45/001/VIII/2025 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Berikut Kategori, Nilai angka dan Persepsi Indeks Reformasi Birokrasi:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Istimewa
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat Baik
4.	B	>60-70	Baik, perlu sedikit perbaikan



5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi pada tahun 2025 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024. Berikut hasil evaluasi yang didasarkan pada hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB diuraikan sebagai berikut Tahun 2023-2024 :

Tabel 2.47.: Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Belitung Tahun 2023-2025 (Komponen dan Sub Komponen)

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2023			Tahun 2024		
				Bobot	Skor	Skor Index	Bobot	Skor	Skor Index
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	1.88	1.88	3	2.21	2.21
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	100	4.39	7	87	4.49
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyerhanaan Struktur Organisasi	2	99.62	1.99			
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyerhanaan Birokrasi	2	2	0.8	3	4	2.4
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3.2	2.56	4	3.54	2.83
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3.5	1.5	1.5	3.5	0.5	0.5
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	63.52	2.54	4	64.68	2.59
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.5	1	0.5	2.5	1	0.5
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Digitalisasi Arsip	2.5	93.22	2.33	2.5	92.36	2.31
10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2.5	3	1.5	2.5	3	1.5
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Kualitas Kebijakan	2.5	0	0	2.5	0	0
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Reformasi Hukum	2.5	45.61	1.14	2.5	97.84	2.45
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor	2.5	2.12	1.06	2.5	2.62	1.31



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2025**

14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2.5	72.4	1.81	2.5	73.66	1.84
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Sistem Merit	4	252.5	2.46	4	252.5	2.46
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pelayanan Publik	1.5	3.89	1.17	2	4.02	1.61
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1.5	88.87	1.33	2	93.07	1.86
18	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	3.11	5.6	9	3.35	6.03
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	98	1.96	4	98.79	3.95
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	57.14	2.9	6	78.21	3.04
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Opini BPK	5	5	5	5	3	5
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	80.1	3.2	4	77.38	3.1
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks BerAkhlak	4	61.6	2.46	4	63.26	2.53
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Penilaian Integritas	10	76.61	7.66	10	76.55	7.66
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Kepuasan Masyarakat	8	89.33	7.15	8	89.71	7.18
26	RB General	Koefisien	Koefisien	10			10		
27	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	0.4	0.28	0.28	1	0.6	0.6
28	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	0.4	0.28	0.28	1	0.86	0.86
29	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	0.4			1	0.61	0.61
30	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	0.4	0.4	0.4	1	0.69	0.69
31	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	0.4	0.27	0.27	1	0.5	0.5
32	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0.6	54.61	0.23			
33	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Output)	0.6					
34	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	0.6					



35	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0.6	100	0.42			
36	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	0.6					
37	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1.5	1.5	3	1.98	1.98
38	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1.61	1.61	3	1.53	1.53
39	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3			3	0.75	0.75
40	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2.8	2.8	3	2.87	2.87
41	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	2.46	2.46	3	0	0

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana level mikro melaksanakan reformasi birokrasi dalam Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, serta bersifat *mandatory*, Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Belitung melaksanakan 21 kegiatan utama dalam reformasi birokrasi general menetapkan 5 (lima) tema dalam reformasi birokrasi tematik Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), dan Pengendalian Inflasi. Serta Menyusun Rencana Aksi untuk 4 tema baru yang mendukung Visi Misi Presiden RB Berdampak utuk Kesejahteraan Rakyat yaitu, RB Mendorong Hilirisasi, RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional, RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan.

Faktor Pendukung:

Tuntutan pelayanan prima dari segenap masyarakat menjadi pemicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar semakin adaptif dan lincah. Adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipilah secara tematik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih fokus.

Faktor Penghambat:

Kurangnya kesadaran dan komitmen bersama diantara seluruh elemen pemerintahan menjadi penghambat dalam rangka menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi, karena reformasi birokrasi merupakan tanggungjawab bersama segenap elemen pemerintahan. Beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Rencana aksi belum sepenuhnya relevan untuk mencapai target sasaran kegiatan utama dan belum menggambarkan intervensi terhadap permasalahan utama;
2. Masih terdapat indicator output atas rencana aksi yang belum cukup menggambarkan sasaran dan targetnya;
3. Secara umum capaian pelaksanaan kebijakan dengan 3 (tiga) indikator nilainya belum baik yaitu Tingkat Maturitas SPIP, Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI, Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE, serta Tematik Pengendalian Inflasi untuk strategi pembangunan dan capaian indikator dampak yang belum maksimal.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang diperlukan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga pengampu untuk peningkatan nilai indeks indicator penilaian dalam RB General khususnya untuk indeks yang masih dinilai buruk. Karena secara



umum, indeks indikator penilaian dalam RB General khususnya untuk indeks penilaian Pemerintah Kabupaten Belitung di Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. Perbaikan dalam strategi penyusunan kegiatan dalam rencana aksi juga perlu dilakukan agar relevan untuk mencapai target sasaran dalam kegiatan utama. Pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2025 melalui pelaksanaan program dan kegiatan terkait 21 kegiatan utama telah menghasilkan dan mendukung pencapaian kondisi yang cukup baik sebagaimana telah diuraikan. Dalam rangka mengetahui sejauh mana keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam melaksanakan reformasi birokrasi sesuai yang diamanatkan, perlu untuk melakukan evaluasi baik internal maupun eksternal baik dalam rb general maupun dalam rb tematik.

Dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026, upaya pencapaian Tujuan 2 “Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan”, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 7 (tujuh) strategi sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 2.48.: Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 2

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 2 Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan	Sasaran 6 Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan kinerja pemerintah daerah Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatkan pengelolaan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Meningkatkan statistic sektoral Meningkatkan kualitas pelayanan public Meningkatkan stabilitas politik, keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif.
	Sasaran 7 Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Meningkatnya kapabilitas aparatur

SASARAN 6 : Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

Capaian kinerja sasaran “Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel” merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama RPD Kabupaten Belitung tahun 2024 – 2026. Capaian kinerja tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.49.: Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi		2025		Kategori	Akhir RPD 2026 Target
			Awal 2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	100	SB	WTP
2	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Predikat	B	BB	B	93,54	SB	BB

(*)Indikator sasaran Opini BPK masih menunggu hasil audit BPK



Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa penyelenggara pemerintah harus memperhatikan azas umum penyelenggaraan negara, antara lain : 1) Azas Kepastian Hukum, 2) Azas Tertib.

Pencapaian kinerja sasaran Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel melalui 2 (dua) indikator, yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai SAKIP Kabupaten Belitung dengan target BB. Dari dua indikator tersebut, indikator Opini BPK belum dapat diukur dikarenakan masih menunggu hasil audit BPK dan indikator Nilai SAKIP Kabupaten Belitung juga belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu dari target BB di dapatkan Hasil Evaluasi AKIP dari Kementerian PAN dan RB Tahun 2025 yaitu B dengan nilai 65,49 dengan capaian kinerja sebesar 93,54%.



Opini BPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK RI paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sampai saat ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2025 sedang dalam proses penyusunan dan Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan akan diterima setelah proses pemeriksaan oleh BPK RI selesai.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Berikut opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung dan Nilai SAKIP Kabupaten Belitung Tahun 2025



Gambar 3.11.: Penerimaan Penghargaan atas Opini BPK

Tabel 2.58.: Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung

TAHUN	OPINI BPK RI
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung tanggal 22 Mei 2024. Pencapaian kinerja sasaran 5 melalui 3 (tiga) strategi, yaitu: meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah. Setiap strategi memiliki arah kebijakan masing-masing yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program-program kegiatan dalam upaya pencapaian kinerja sasaran.



Ada 3 (tiga) arah kebijakan dari strategi meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, yaitu: 1) Meningkatkan pengelolaan keuangan; 2) Meningkatkan barang milik daerah (BMD); dan 3) Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu adanya reformasi birokrasi. Permasalahan mengenai pengelolaan aset dan SDM pengelolanya perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Belitung. Oleh karena itu perlu peningkatan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah ini diarahkan pada peningkatan tata kelola aset, pelaporan keuangan dan peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggunakan teknologi informasi. Selain itu dengan menerapkan e-budgeting yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaporan keuangan daerah. Kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belitung meningkat. Hal ini terlihat dari ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen pengelolaan keuangan daerah, di mana pemerintah berusaha untuk menyusun dokumen keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini sejalan dengan diraihnya predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang masih harus dibenahi adalah berkenaan dengan penataan aset di perangkat daerah hal ini terus dilakukan untuk tetap terus mempertahankan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belitung dan mempertahankan predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, serta langkah upaya yang kuat dalam rangka mempertahankan predikat WTP dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung. Sedangkan Faktor penghambat capaian kinerja adalah perubahan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang terus terjadi, dan juga transisi peralihan sistem informasi keuangan dari SIMDA ke SIPD. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, akan melakukan :

- Mendukung upaya untuk mempertahankan predikat WTP dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung.
- Meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang baik antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban APBD.
- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan instansi vertikal terkait pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah .



Nilai SAKIP Kabupaten Belitung

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten. Penerapan reformasi birokrasi berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Ada 5 komponen penilaian SAKIP, pertama perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Kedua, pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran dengan bobot 20. Ketiga, pelaporan kinerja, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Keempat, evaluasi kinerja, terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Kelima, pencapaian kinerja, bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan (*output* dan *outcome*), dan kinerja lainnya.

Perubahan penilaian AKIP tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana terdapat 4 komponen penilaian SAKIP, pertama perencanaan kinerja, kedua pengukuran kinerja, ketiga pelaporan kinerja, keempat evaluasi kinerja.

Untuk melihat perkembangan capaian kinerja nilai SAKIP Kabupaten Belitung dari tahun 2023 – 2025 sebagai berikut:



Tabel 2.59.: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung

KOMPONEN	BOBOT	2023	% kinerja komponen terhadap bobot	2024	% kinerja komponen terhadap bobot	2025	% kinerja komponen terhadap bobot
Perencanaan Kinerja	30	22.40	74.67	22.28	74.26	22.45	74.83
Pengukuran Kinerja	30	16.16	53.87	16.27	54,23	16.39	54,63
Pelaporan Kinerja	15	10.25	68.33	10.48	69,87	10.88	72,53
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14.71	58.84	15,65	62,60	15,77	63,08
Nilai Hasil Evaluasi	100	63.52		64,68		65,49	
Kategori		B		B		B	

Sumber : Bagian Organisasi Setda 2025

Nilai SAKIP Kabupaten Belitung pada tahun 2025 sebesar 65,49, dengan kategori B (Baik) sesuai dengan Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KementerianPANRB Nomor B/170/AA.05/2025 tanggal 26 Desember 2025. Tahun 2024 dengan kategori yang sama B, ada kenaikan di tahun 2025 sebesar 0,81 poin. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa evaluasi pada tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level organisasi perangkat daerah.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah Meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Pada November 2024 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Dan penetapan Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029.

Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan renstra dan juga perjanjian kinerja dan seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala, Laporan capaian kinerja Tahunan, Triwulanan, Laporan Dalev Pelaksanaan RKPD dan Laporan Evaluasi RENJA per OPD, ditambahkan dengan Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan setiap OPD melalui website monev.belitung.go.id yang telah diintegrasikan dengan sakup.belitung.go.id.

Namun dari data capaian nilai SAKIP di atas yang menjadi catatan penting adalah predikat akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dari hasil evaluasi atas penerapan SAKIP yang masih berada di kategori B atau nilai dalam *range* 60 – 70. Ini dapat diartikan bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kabupaten Belitung masih rendah dan diindikasikan adanya potensi terjadinya inefisiensi. Inefisiensi ini dapat terjadi karena tujuan dan sasaran tidak berorientasi hasil, ukuran kinerja tidak jelas (tidak ada keterkaitan antara program dan kegiatan), kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Kondisi ini tentunya kurang sejalan dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Sementara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa penyelenggara pemerintah harus memperhatikan azas umum penyelenggaraan negara, antara lain; (1) Azas Kepastian Hukum; (2) Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; (3) Azas Kepentingan Umum; (4) Asas Keterbukaan; (5) Asas Proporsionalitas; (6) Asas Profesionalitas; dan (7) Asas Akuntabilitas. Menyempurnakan rumusan sasaran strategis yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART, terutama pada perangkat daerah dan kepala bidang merupakan hal yang harus dilakukan Pemkab Belitung untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi yang di berikan oleh Kementerian PAN RB dalam evaluasinya.



Upaya pencapaian kinerja sasaran Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel terus dilakukan dengan dukungan dari berbagai faktor. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain:

Komitmen Pimpinan untuk meraih Opini WTP, Indeks RB dan meningkatkan nilai SAKIP.

Namun demikian dalam upaya pencapaian kinerja sasaran terdapat faktor penghambat pencapaian kinerja, yaitu:

Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah, dikarenakan:

- ⌘ belum optimalnya reviu dan perbaikan dokumen perencanaan yang telah dilakukan sehingga masih terdapat indikator yang belum berorientasi hasil pada level perangkatdaerah dan melakukan penyempurnaan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- ⌘ belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang belum optimal;
- ⌘ belum optimalnya pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- ⌘ belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas aparatur pengawasan intern pemerintah yang belum optimal.

Kualitas dan profesionalitas SDM aparatur masih rendah, dikarenakan:

- ⌘ integritas dan kompetensi aparatur masih kurang, belum optimalnya pengelolaan sistem manajemen aparatur;
- ⌘ sistem manajemen pemerintahan yang belum terlaksana dengan baik.

Belum optimalnya Pelayanan publik, dikarenakan:

- ⌘ kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik masih belum optimal;
- ⌘ keterbukaan informasi publik yang masih kurang;
- ⌘ pelayanan publik yang belum optimal.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan di masa datang dalam upaya meningkatkan kinerja sasaran birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel di masa yang akan datang sebagai berikut :

- ❖ Terus melakukan upaya monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- ❖ Meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait perencanaan, pengukuran kinerja, pencapaian kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;
- ❖ Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

SASARAN 7 : Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional

Capaian kinerja sasaran “Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional” merupakan salah indikator kinerja utama RPD dengan indikator Indeks Profesional ASN dengan target “71-80” Sedang. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 2.60.: Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan professional

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target	2025		Kategori	Akhir RPD 2026 Target
					Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Profesional ASN	Skala	75,44	71-80	81,29	101,61	SB	71-80

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permenpan RB No. 38 Tahun 2019). Indeks Profesionalitas ASN merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif



yang hasilnya digunakan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat profesionalitas ASN. Adapun indikator profesionalitas ASN adalah pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, organisasinya semakin modern dan memiliki disiplin yang tinggi.

Indeks Profesionalitas ASN dikeluarkan dan ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara selaku Pembina Kepegawaian Nasional. Sumber Data yang digunakan untuk mengukur IP ASN adalah data SAPK yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara. Adapun unsur-unsur yang dinilai yaitu Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi (kediklatan), Kinerja dan Disiplin dengan kategori sebagai berikut:

- Nilai 91% - 100% : Sangat Tinggi
- Nilai 81% - 90% : Tinggi
- Nilai 71% - 80% : Cukup/Sedang
- Nilai 61% - 70% : Rendah
- Nilai < 60% : Sangat Rendah

Indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) adalah :

Kualifikasi, dengan nilai maksimal 25
Kompetensi, dengan nilai maksimal 40
Kinerja, dengan nilai maksimal 30
Disiplin, dengan nilai maksimal 5
Total nilai maksimal 100

Kualifikasi, meliputi data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, Kompetensi, meliputi data dan informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas.

Indikator yang digunakan adalah :

Diklat kepemimpinan, Diklat fungsional, Diklat teknis, Seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya, dalam 2 (dua) tahun terakhir. Kinerja, meliputi data dan informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat serta perilaku PNS.

Disiplin, meliputi data dan informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Indikator : hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat. Data hukuman disiplin tersebut telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir).

Realisasi kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2024 berdasarkan perhitungan dalam portal <https://myasn.bkn.go.id> dari Badan Kepegawaian Negara adalah **81,29 (tinggi)**.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 sebagai berikut:

Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai	Kategori
20,78	30,49	25,02	5,00	81,29	Tinggi

Penjelasan:

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari unsur: Kualifikasi 20,78 dari 25; Kompetensi 30,49 dari 40; Kinerja 25,02 dari 30 dan Disiplin 5 dari 5. Dengan Jumlah PNS sebanyak 2.734 orang dan Jumlah PPPK sebanyak 293 orang.

Tabel 2.61.: Tabel Perbandingan IP ASN Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024

Tahun	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai	Kategori	Sumber Data
2021	12,69	18,52	23,23	5,00	59,44	Sangat Rendah	Hasil Penilaian BKN No: 870/B-BH.02.01/SD/C/2022 Tanggal 13 Januari 2022
2022	21,04	21,14	24,38	5,00	71,56	Sedang	Hasil Penilaian BKN No: 470/B-BM.02/SD/KR.VII/2023 Tanggal 18 Oktober 2023
2023	20,86	28,50	24,26	5,00	78,63	Sedang	Hasil Penilaian BKN No: 435/B-



							BM.02/SD/KR.VII/2024 tanggal 07 Oktober 2024
2024	20,78	30,49	25,02	5,00	81,29	Tinggi	Hasil Perhitungan pada portal https://myasn.bkn.go.id

Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kab Belitung Tahun 2025

Adapun faktor pendorong peningkatan nilai IP ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 antara lain : Tersedianya database pegawai pada aplikasi Simpeg dengan tujuan terciptanya sistem informasi dan database kepegawaian yang dapat menampung, mengolah, menyimpan dan menemukan kembali data kepegawaian. Adanya pengembangan e-SKP sesuai dengan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, dimana pada Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 memiliki ruang lingkup yang lebih luas yakni ASN (PNS dan PPPK) dengan perilaku kinerja Core Values ASN yang merupakan pengembangan PP Nomor 30 Tahun 2019 yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif.

Dengan demikian, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

Strategi dalam rangka memperbaiki nilai IP ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 untuk meningkatkan nilai dimensi kompetensi:

- Berkoordinasi dengan OPD untuk memaksimalkan kegiatan pengembangan kompetensi ASN;
- Melaporkan hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN beserta bukti dukung kepada BKPSDM Kabupaten Belitung;
- Melaksanakan Melaksanakan Sosialisasi atau seminar online kepegawian dengan target peserta massal.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung harus senantiasa ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Dan upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah agar dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan tidak hanya dilakukan oleh internal organisasi perangkat daerah, melainkan juga terkait dengan pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian PAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara) dan juga pihak-pihak lainnya.

TUJUAN 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, upaya pencapaian Tujuan 4 “ meningkatkan kualitas lingkungan hidup “ telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) strategi, sebagaimana terinci pada tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Sasaran 8 Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Meningkatkan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatkan Pengelolaan sampah

Lingkungan hidup berkesinambungan diangkat dari suatu pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan, perlu adanya pelestarian dari pemanfaatan sumber daya alam, dan upaya untuk melindungi, memulihkan pemanfaatan ekosistem dan upaya untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya Kehadiran Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak pembangunan.



Capaian kinerja tujuan “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPD dengan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2025 dengan target 69,26. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Tabel 2.62.: Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	2025			Kategori	Akhir RPD 2026 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,25	69,26	75,77	109,40	SB	69,27

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator dari tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yaitu indeks kualitas lingkungan hidup, telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan realisasi kinerja sebesar 75,77 melampaui target dengan kategori SANGAT BERHASIL. Dari realisasi IKLH Tahun 2025 sebesar 75,77 nilai IKLH Kabupaten Belitung pada posisi dan katagori **Baik**. Kondisi tersebut perlu dipertahankan untuk terus meningkatkan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang merupakan komponen terpenting dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Belitung.

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam proses perhitungannya sudah mempergunakan Aplikasi Pelaporan dan Perhitungan IKLH PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan rumus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. rumusannya sebagai berikut :

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

IKA : Indeks Kualitas Air

IKU : Indeks Kualitas Udara

IKL : Indeks Kualitas Lahan

Untuk perhitungan nilai IKLH sebagai berikut :

Indeks Kualitas Air (IKA) : 74,59

Indeks Kualitas Udara (IKU) : 82,53

Indeks Tutupan Lahan (IKL) : 65,28

$$\begin{aligned} IKLH &= (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL) \\ &= (0.376 \times 74,59) + (0.405 \times 82,53) + (0.219 \times 65,28) \\ &= 28,046 + 33,425 + 14,296 \\ &= 75,77 \end{aligned}$$

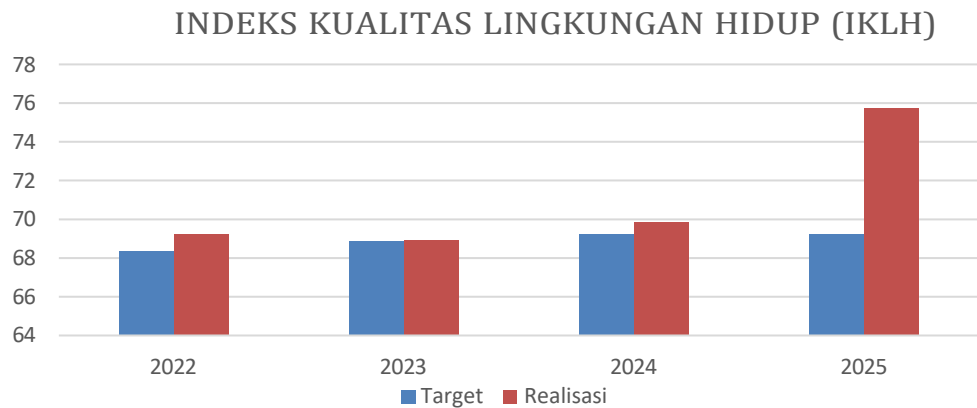
Untuk melihat perbandingan antara nilai IKLH dari tahun 2022 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.63.: Perbandingan Nilai IKLH Tahun 2022 sampai dengan 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,25	68,90	69,84	75,77



Grafik 2.6 Perbandingan Nilai IKLH Tahun 2022 sampai dengan 2025



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai IKLH pada tahun 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Beberapa alternatif kebijakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai IKLH diantaranya adalah:

1. Pembuatan kebijakan yaitu peraturan daerah mengenai pengendalian pencemaran air, pengelolaan pengendalian pencemaran udara serta pengendalian kerusakan lahan.
2. Sosialisasi lebih lanjut dan intens kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di area sempadan sungai serta menggunakan air sungai untuk aktivitas sehari-hari agar dapat menjaga perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Sosialisasi dan peningkatan pelayanan IPAL domestik kepada masyarakat dan usaha-usaha kecil.
4. Peningkatan pengawasan dan pembinaan industri terkait pengelolaan limbah dan emisi udara yang dihasilkan.
5. Penambahan lokasi titik pantau kualitas udara agar dapat mewakili semua kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung dan pelaksanaan pemantauan secara kontinyu menggunakan *Air Quality Monitoring System* (AQMS).
6. Peningkatan inventarisasi data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan data vegetasi lainnya, baik data primer maupun sekunder serta melakukan penetapan Kawasan area terbuka hijau melalui kebijakan peraturan daerah.
7. Peningkatan program pemulihan kualitas lingkungan atau kegiatan inovasi lainnya bersama masyarakat dan pemangku kepentingan.
8. Penyebarluasan informasi dan publikasi terkait ruang terbuka hijau dan tutupan hutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan hutan.
9. Sosialisasi dan publikasi terkait dengan pengelolaan kualitas lingkungan hidup terhadap *stakeholder-stakeholder*.

SASARAN 8 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara dan Tutupan Lahan

Capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara dan Tutupan Lahan” merupakan salah satu indikator kinerja utama dengan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2025 dengan target 69,26. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 2.64.: Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	2025			Kategori	Akhir RPD 2026 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skala	69,25	69,26	75,77	109,40	SB	69,27



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator dari tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yaitu indeks kualitas lingkungan hidup, telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan realisasi kinerja sebesar 75,77 melampaui target dengan kategori SANGAT BERHASIL. Dari realisasi IKLH Tahun 2025 sebesar 75,77 nilai IKLH Kabupaten Belitung pada posisi dan katagori **Sangat Berhasil**.

Dalam perhitungan nilai IKLH Tahun 2025 dipengaruhi oleh nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Adapun nilai IKA, IKU dan IKL Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Indeks Kualitas Air (IKA)**

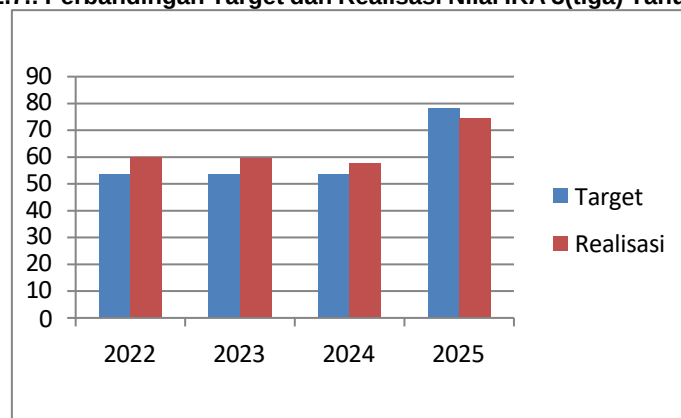
Nilai IKA pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 77,99 sedangkan realisasi kinerja tahun 2025 ialah 74,59 dengan tingkat capaian sebesar 95,64%.

Nilai IKA tahun 2025 diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air sungai pada titik-titik yang merepresentasikan hulu, tengah dan hilir sungai di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong dan Kecamatan Selat Nasik. Titik yang dipantau yang terlapor sejumlah 24 (Dua puluh empat) titik yang terdiri dari 18 (delapan belas) titik air sungai dan 6 (enam) air danau/Kolong/SPAM. Nilai IKA pada tahun 2025 memenuhi target sebagaimana yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh:

1. Perubahan lokasi titik pantau untuk mendapatkan keterwakilan pemantauan air sungai berdasarkan lokasi hulu, tengah dan hilir sungai.
2. Penambahan nilai IKA yang dihitung dari lokasi yang diuji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 1 (satu) lokasi di Sungai Air Batu Buding yang diukur sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 4 (empat) titik.
3. Adanya pengaruh dari kondisi cuaca pada triwulan akhir yang memengaruhi besarnya debit air sehingga terdapat beberapa parameter yang mengalami penurunan kualitas terutama kandungan oksigen dalam air / *Dissolve oxygen* (DO). Selain itu, sifat tanah di Kabupaten Belitung yang bersifat asam memengaruhi parameter Ph air menjadi asam.
4. Nilai IKA yang dihitung ialah perhitungan berdasarkan aplikasi IKLH yang dikeluarkan oleh KLHK. Perhitungan dilakukan berdasarkan 8 (delapan) parameter wajib. Data yang terverifikasi sejumlah 103 (seratus tiga) dari 104 (serratus empat) titik air sungai dan danau yang terinput dengan persentase titik yang memenuhi baku mutu sebanyak 39 titik (37,5%), dan cemar ringan sebanyak 64 titik (62,13%). Terlihat bahwa terdapat perbedaan jumlah yang cukup signifikan antara persentase titik yang memenuhi baku mutu dengan titik yang tercemar ringan.

Untuk melihat perbandingan antara nilai IKA 3(tiga) Tahun Terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 2.7.: Perbandingan Target dan Realisasi Nilai IKA 3(tiga) Tahun terakhir



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung 2026

➤ **Indeks Kualitas Udara (IKU)**

Nilai IKU Tahun 2025 ditargetkan 82,49 sedangkan realisasi kinerja Tahun 2025 sebesar 82.53 dengan tingkat capaian sebesar 100.05%. Indeks kualitas udara diketahui dengan melakukan pemantauan kualitas udara

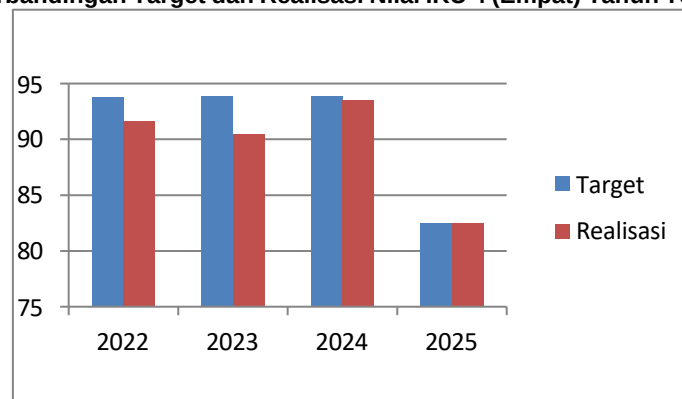


menggunakan metode *Passive Sampler* yang dilakukan 2 (dua) kali setahun (dalam hal ini per-semester) selama 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari pada 4 (empat) titik lokasi, yaitu area transportasi, industri, Kawasan perkantoran dan pemukiman. Data yang diukur berupa konsentrasi rata-rata tahunan untuk parameter pencemar udara SO_2 dan NO_2 .

Pada tahun 2025, terdapat parameter baru yang dimasukkan dalam perhitungan IKU, yaitu $PM_{2.5}$ dengan melakukan pengambilan contoh uji selama 24 jam dengan metode manual aktif atau dengan menggunakan citra satelit yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang. Untuk Kabupaten Belitung, nilai $PM_{2.5}$ didapatkan dari pencitraan satelit yang dilakukan oleh Badan Riset Inovasi Nasional. Lokasi sampling ditemukan berdasarkan 4 (empat) kriteria Lokasi, antara lain:

1. **Kepadatan transportasi**
Untuk kepadatan transportasi dilakukan sampling di lokasi Terminal Bis Tanjungpandan Jalan Jendral Sudirman.
2. **Kepadatan pemukiman**
Untuk kepadatan pemukiman dilakukan sampling di lokasi Kantor Desa Aik Pelempang Jaya Jalan Nusantara RT.04 RW.02.
3. **Lokasi perkantoran**
Untuk kepadatan perkantoran dilakukan sampling di Area Perkantoran dekat Dinas Lingkungan Hidup Kab.Belitung.
4. **Lokasi industri**
Untuk kepadatan industri dilakukan sampling di Kawasan Industri Suge Jalan TS RUU, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau.

Grafik 2.8.: Perbandingan Target dan Realisasi Nilai IKU 4 (Empat) Tahun Terakhir 2022-2025



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Belitung 2026

➤ Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)

Nilai IKL pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 64,28 sedangkan realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 65,28 dengan tingkat capaian sebesar 101,56%. Nilai IKL dihitung berdasarkan data yang diinput oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dalam aplikasi IKLH. Kabupaten menginput data yang tersedia berupa data Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang didapat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Belitung dan data Taman Kehati oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung serta Data Vegetasi Lainnya yang didapat dari verifikasi lapangan reklamasi yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Belitung.

Pengambilan data tutupan lahan secara garis besar diperoleh dari metode penginderaan jauh yaitu menggunakan citra satelit (citra satelit resolusi tinggi maupun citra satelit resolusi menengah). Hasil pengolahan data penginderaan jauh tersebut selanjutnya dianalisis secara multi temporal (waktu yang berbeda) dan multi tingkat (skala atau tingkatan yang berbeda). Dua puluh dua (22) data kelas tutupan lahan diperoleh dari Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan dan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan, Kementerian Kehutanan. Sedangkan data tutupan lahan berupa ruang terbuka hijau (kebun raya) diperoleh dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan (taman kehati) diperoleh dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber

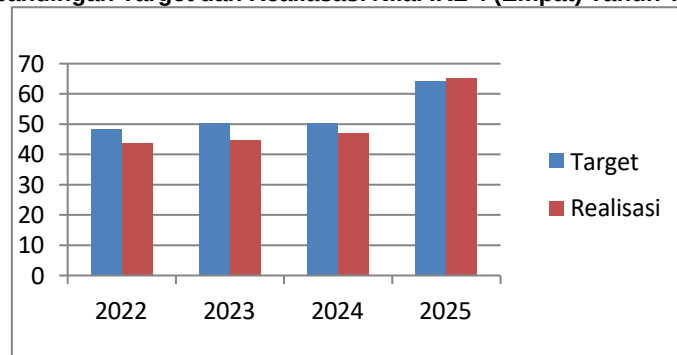


Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Adapun data rehabilitasi hutan dan lahan diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Kehutanan serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, data luas wilayah administrasi diperoleh dari Bdan Informasi Geospasial (BIG) apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian data dari hasil analisis citra satelit maka perlu dilakukan verifikasi data hasil klasifikasi (penafsiran) dengan cara:

1. Peninjauan langsung ke lapangan (pengecekan lapangan);
2. Merujuk citra lain yang memiliki resolusi lebih tinggi (memiliki Tingkat akurasi atau nilai kebenaran yang lebih baik);
3. Merujuk pada data sekunder lain yang memiliki Tingkat akurasi yang lebih tinggi.

Grafik 2.9.: Perbandingan Target dan Realisasi Nilai IKL 4 (Empat) Tahun Terakhir 2022-2025



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Belitung 2026

- Faktor Pendorong dan faktor penghambat untuk sasaran strategis I Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan
 - Faktor Pendorong :
 - ❖ Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 Tahun 2020.
 - ❖ Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
 - ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Domestik.
 - ❖ Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin lingkungan dan persetujuan teknis lingkungan.
 - ❖ Monitoring dan pengawasan kegiatan setiap industri atau kegiatan usaha yang melakukan kegiatan wajib melaksanakan pencegahan dan pengurangan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
 - ❖ SDM sudah didukung oleh pejabat fungsional yaitu pengawas lingkungan hidup, pengendali dampak lingkungan dan penyuluh lingkungan hidup.
 - ❖ Sudah didukung oleh Laboratorium Lingkungan Hidup yang sudah terakreditasi oleh lembaga KAN.
 - Faktor Penghambat :
 - ✘ Nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dipengaruhi adanya perubahan iklim.
 - ✘ Masih rendahnya Indeks Tutupan Lahan (IKL) dikarenakan rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - ✘ Masih kurangnya pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup, pengendali dampak lingkungan dan penyuluh lingkungan hidup.
 - Solusi :
 - 1) Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKL) perlu pembuatan kebijakan yaitu peraturan daerah mengenai pengendalian pencemaran air dan pengelolaan pengendalian pencemaran udara.



- 2) Peningkatan inventarisasi data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan data vegetasi lainnya, baik data primer maupun sekunder serta melakukan penetapan Kawasan area terbuka hijau melalui kebijakan peraturan daerah.
- 3) Menambah SDM fungsional pengawas lingkungan hidup, pengendali dampak lingkungan dan penyuluh lingkungan hidup.

Selanjutnya pada Triwulan IV Tahun 2025 penetapan IKU Pemerintah Kabupaten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029, ditetapkan melalui Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029, Hasil pengukuran atas IKU Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 sesuai dengan RPJMD 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7. : Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025					
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK	2025 Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Modal Manusia	Nilai	0,55	n.a	n.a
2.	Tingkat Kemiskinan	Persentase	5,2	6,44	76,15
3.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,16	9,11	99,15
4.	Harapan lama sekolah	Tahun	12,42	12,1	97,42
5.	Usia harapan hidup	Tahun	74,15	73,13	98,62
6.	Prevalensi stunting	Persentase	16,94	8,82	147,93
7.	Pengeluaran per kapita	Juta Rupiah	14.651.000	14.559.000	99,37
8.	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	3,74	3,64	102,67
9.	Indeks Gini	Nilai	0,241	0,205	114,94
10.	Laju pertumbuhan ekonomi	Persentase	2,11	4,06	192,42
11.	Nilai investasi (tahun berkenaan) (dalam juta rupiah) (PMDN dan PMA)	Skala	1.200.000 Juta Rupiah	730.000 Juta Rupiah	60,83
12.	Pertumbuhan sektor Prima	Persentase	3,8	3,78	99,47
13.	Indeks Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kota	Nilai	3,8	3,14	82,63
14.	Indeks reformasi birokrasi	Nilai	80(BB)	79,74 (BB) Tahun 2024	99,67
15.	Indeks pemerintah digital	Nilai	1,80	n.a 4,15 (Indeks SPBE)	n.a
16.	Nilai SAKIP	Nilai	65,84 (B)	65,49	99,47
17.	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Nilai	76,8121	70,4597	91,73
18.	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,1	4,06	99,02
19.	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level3 (3,541)	Level2 (2,449)	69,16
20.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	79,80	81,29	101,87
21.	Rasio kemandirian fiskal	Persentase	23,94	29,38	122,72
22.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	Baik (85,35)	72,5	84,94
23.	Penurunan intensitas Emisi GRK	Nilai	67,28	54,4	99,73
24.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	67,28	70,30	104,49
25.	Indeks Kesulitan geografis	Nilai	32,52	32,72	99,39
26.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	76,81	75,77	98,65
27.	Indeks Resiko Bencana	Nilai	117,14	98,97	117,30

Adapun kategori pencapaian indikator kinerja kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.66.: Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 sesuai RPJMD 2025-2029



No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA SASARAN	0.00 – 49.00 KURANG	50.00 – 74.99 CUKUP	75.00 – 89.00 BERHASIL	>90 SANGAT BERHASIL
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dalam mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera							
	Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	1. Indeks Modal Manusia	n.a				
		2. Tingkat kemiskinan	76,15%			BERHASIL	
	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	99,45%				SANGAT BERHASIL
		2. Harapan lama sekolah	97,42%				SANGAT BERHASI
	Meningkatnya kualitas kesehatan	Usia harapan hidup	98,62%				SANGAT BERHASIL
	Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi stunting	147,93%				SANGAT BERHASIL
	Meningkatnya pemerataan dan pendapatan masyarakat	1. Pengeluaran per kapita	99,37%				SANGAT BERHASIL
		2.Tingkat pengangguran terbuka	102,67%				SANGAT BERHASIL
		3. Indeks Gini	114,94%				SANGAT BERHASIL
MISI 2 : Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya saing berbasis sektor unggul dan potensial							
	Meningkatnya daya saing ekonomi sektor unggulan dan potensial	Laju pertumbuhan ekonomi	192,42				SANGAT BERHASIL
	Meningkatnya investasi daerah	Nilai investasi (tahun berkenaan) (dalam juta rupiah) (PMDN dan PMA)	60,83%		CUKUP		
	Meningkatnya pertumbuhan sektor prima	Pertumbuhan sektor Prima	99,47%				SANGAT BERHASIL
	Meningkatnya kualitas dan daya saing pariwisata serta budaya daerah	Indeks Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Kota	82,63%			BERHASIL	
MISI 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)							
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, adaptif dan Kolaboratif)	Indeks reformasi birokrasi	99,67				SANGAT BERHASIL
		Indeks pemerintah digital	n.a				
	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital	Nilai SAKIP	99,47				SANGAT BERHASIL
		Indeks pengelolaan keuangan daerah	91,73				SANGAT BERHASIL
		Indeks pelayanan publik	99,02				SANGAT BERHASIL
		Tingkat Maturitas SPIP	69,16		CUKUP		
	Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	101,87				SANGAT BERHASIL
	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian fiskal	122,72				SANGAT BERHASIL



MISI 4 : Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan					
Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	84,94			SANGAT BERHASIL
	2. Penurunan intensitas Emisi GRK	99,73			SANGAT BERHASIL
Tersedianya Infrastruktur yang inklusif dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	104,49			SANGAT BERHASIL
Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	Indeks Kesulitan geografis	99,39			
Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	1.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	98,65			SANGAT BERHASIL
	2.Indeks Resiko Bencana	117,30			SANGAT BERHASIL
JUMLAH (KET. 2 n.a)		0	2	3	20

TUJUAN 1 : Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia

Tujuan pembangunan yang pertama adalah meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber daya manusia. Tujuan tersebut merupakan penjabaran dari misi pembangunan yang pertama yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia yang berdaya saing dalam mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera”. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang dimaksud dilihat dari perspektif pembangunan manusia dari segi pemenuhan pendidikan dan kesehatan terhadap produktivitasnya di masa mendatang. Sehingga diharapkan setiap Masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung dapat mencapai puncak produktivitasnya di masa mendatang. Dengan gambaran kondisi yang diharapkan tersebut maka ditetapkan dua indikator kinerja yang representatif yaitu Indeks Modal Manusia dan Tingkat Kemiskinan.

Capaian kinerja tujuan “Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia” diukur melalui pencapaian indikator Indeks Modal Manusia dan Tingkat kemiskinan . Capaian kinerja tujuan dengan rinci terpapar pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.67.: Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia Tahun 2025

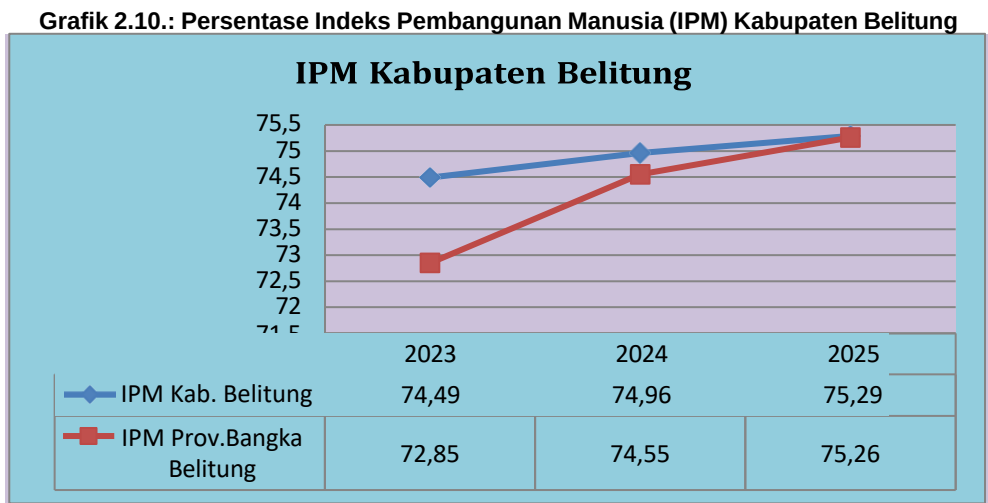
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2025			Kategori	Target Akhir RPJMD 2030
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Modal Manusia	Nilai	n.a	0,55	n.a	n.a	n.a	0,60
2	Tingkat Kemiskinan (%)	Persentase	6,11	5,20	6,44	76,15	B	2,59

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator pertama kinerja tujuan pertama yaitu Indeks Modal Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2025 masih dalam tahap perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung. Sedangkan perhitungan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2025 adalah 75,29 tahun.



IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS menggambarkan lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan/dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Capaian Nilai IPM Kabupaten Belitung (Grafik 3.1) selama tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dan terus mengalami peningkatan mulai dari 74,49 pada tahun 2023 hingga mencapai 75,29 atau berada pada capaian “tinggi” ($70 < IPM < 80$; berdasarkan kriteria dari United Nations Development Programme (UNDP)) pada tahun 2023. Nilai capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,33 poin bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024 dengan nilai 74,96. Dibandingkan dengan level IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang pada tahun 2025 tercapai sebesar 75,29, nilai IPM Kabupaten Belitung tercapai lebih tinggi 0,03 poin. Adapun perkembangan IPM Kabupaten Belitung dari Tahun 2023 – 2025 disajikan sebagaimana grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, IPM Kabupaten Belitung tertinggi ketiga setelah Kota Pangkalpinang yang memiliki nilai IPM 81,64 kategori Sangat Tinggi dan Kabupaten Bangka dengan nilai IPM 75,38. Namun Nilai IPM Kabupaten Belitung berada dibawah nilai IPM Nasional yang pada tahun ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang semula 75,02 menjadi 75,90 dengan capaian pertumbuhan IPM 0,88 poin. Berikut nilai IPM Kabupaten Belitung dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam periode tahun 2023 - 2025:

Tabel 2.68.: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2023 – 2025

URAIAN	TAHUN		
	2023	2024	2025
Belitung Timur	73,31	73,62	73,99
Bangka	74,49	74,66	75,38
Bangka Tengah	72,36	72,54	73,10
Bangka Barat	71,13	71,36	72,23
Bangka Selatan	69,67	70,01	70,83
Belitung	74,49	74,96	75,29
Pangkal Pinang	80,45	80,90	81,64
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	72,85	74,55	75,26



Indonesia	74,39	75,02	75,90
-----------	-------	-------	-------

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2026

Peningkatan IPM Kabupaten Belitung ini tidak terlepas dari kinerja 3 (tiga) dimensi dasar yang merupakan komponen pembentuk IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dimensi kesehatan diukur melalui umur panjang dan hidup sehat dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), dengan arti bahwa umur yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pendidikan diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (dalam tahun), sedangkan rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata lamanya (dalam tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara dimensi ekonomi diukur dengan standar hidup layak, yaitu pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Selama kurun waktu 2023 – 2025, peningkatan 3 (tiga) dimensi dasar IPM Kabupaten Belitung yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut ditampilkan perkembangan ketiga dimensi IPM Kabupaten Belitung periode 2023 – 2025.

Tabel 2.69.: Komponen Penyusun IPM Kabupaten Belitung Tahun 2023 – 2025

NO	URAIAN	TAHUN		
		2023	2024	2025
1	Umur Harapan Hidup	72,52	72,76	73,13
2	Harapan Lama Sekolah	11,90	12,09	12,10
3	Rata-rata Lama Sekolah	8,98	9,05	9,11
4	Pengeluaran per Kapita	14.365	14.449	14.559

Sumber : Badan Pusat Statistik 2026

Pada tahun 2025, capaian masing-masing dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Angka Harapan Hidup/Usia Harapan Hidup (AHH/UHH) sebesar 73,13, naik 0,37 tahun dari sebelumnya, Harapan Lama Sekolah sebesar 12,10 tahun naik sebesar 0,01 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 9,11 tahun, naik 0,06 tahun dari tahun sebelumnya, Pengeluaran Per Kapita meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 14.449.000,- per tahun, meningkat menjadi Rp 14.559.000,- per tahun.

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kedua kinerja tujuan belum bisa melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2025. Persentase Capaian kinerja Tingkat Kemiskinan sebesar 76,15% dengan kategori Berhasil.

Persentase penduduk miskin menurut BPS adalah persentase penduduk yang berada di Bawah Garis Kemiskinan (GK). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 berfluktuasi dan cenderung meningkat. Dengan angka kemiskinan pada tahun 2023 yaitu 6,46 kemudian turun menjadi 6,11% pada tahun 2024 dan meningkat ditahun 2025 yaitu 6,44.

Sama halnya di tingkat provinsi juga berfluktuatif dan juga cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir namun di tahun 2025 mengalami kenaikan dengan selisih 0,5% menjadi 5,00% di tahun 2025. Meski demikian persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung masih berada di bawah nasional yaitu sebesar 8,47% pada tahun 2025. Sebagaimana tampak pada gambar perkembangan persentase penduduk miskin (%) Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024.

Tabel 2.70.: Perkembangan persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2025

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN		
		2023	2024	2025
1	Bangka		4,24	4,71
2	Belitung		6,11	6,44



3	Bangka Barat	2,59	2,92
4	Bangka Tengah	5,94	6,70
5	Bangka Selatan	3,74	4,17
6	Belitung Timur	6,36	6,69
7	Pangkalpinang	4,04	4,50
Provinsi Bangka Belitung		4,55	5,00

Sumber Data : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2026

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Belitung selama tiga tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 terus mengalami peningkatan. Garis kemiskinan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di suatu daerah. Garis kemiskinan merupakan tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu daerah. Pada tahun 2024 garis kemiskinan Kabupaten Belitung mencapai Rp. 937.759,- atau bertambah sebesar Rp. 18.387,- dari tahun 2024 yang sebesar Rp. 919.372,-. Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang yang tinggal di wilayah Kabupaten Belitung akan dikategorikan sebagai penduduk miskin jika total pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non makanan setiap bulannya kurang dari Rp. 937.759,-. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, garis kemiskinan Kabupaten Belitung tergolong tinggi, bahkan jauh melebihi garis kemiskinan nasional yang hanya sebesar Rp. 641.443,- pada tahun 2025 atau memiliki selisih Rp. 296.316,- dan selisih Rp. 19.074,- dari garis kemiskinan Provinsi Kep. Bangka Belitung yang meningkat sebesar Rp. 956.833,- di tahun yang sama.

Kemiskinan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Belitung yang berdampak pada berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Meskipun tren penurunan angka kemiskinan secara umum menunjukkan perbaikan, namun masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan belum sepenuhnya tersentuh oleh program perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi.

Ketimpangan pendapatan, terbatasnya kesempatan kerja, serta akses terbatas terhadap layanan dasar turut memperkuat struktur kemiskinan yang ada. Pengurangan kemiskinan merupakan agenda utama dalam Pembangunan manusia dan penguatan perlindungan sosial nasional. Pemerintah pusat menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem hingga 0% pada akhir periode perencanaan. Strategi nasional mencakup perluasan program bantuan social berbasis data terpadu, integrasi layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta penguatan akses pembiayaan dan kewirausahaan.

Pada perencanaan pembangunan di provinsi juga mengidentifikasi kemiskinan sebagai isu prioritas, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses dan ketimpangan pembangunan. Program-program provinsi diarahkan untuk mendorong inklusi keuangan, pelatihan keterampilan kerja, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan ekonomi lokal yang melibatkan kelompok rentan. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam pembangunan.

Selaras dengan itu, RPJPD Kabupaten Belitung 2025–2045 menekankan pembangunan inklusif dan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok sosial. Kemiskinan diidentifikasi sebagai hambatan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata. Strategi jangka Panjang meliputi peningkatan daya saing tenaga kerja lokal, penguatan ekonomi kerakyatan, dan transformasi program bantuan menjadi intervensi berbasis pemberdayaan.

Dalam perspektif keberlanjutan, KLHS RPJMD Kabupaten Belitung memasukkan isu kemiskinan sebagai bagian dari pilar sosial. KLHS menyoroti bahwa kerentanan ekonomi masyarakat sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, kualitas lingkungan, dan ketimpangan akses layanan dasar. Oleh karena itu, pengurangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan tunai, melainkan harus melalui peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh, terutama bagi kelompok marginal seperti perempuan kepala keluarga, lansia miskin, dan penyandang disabilitas. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pasar rakyat, dan pusat layanan publik menjadi pondasi penting dalam menciptakan ruang tumbuh ekonomi lokal yang pro-masyarakat miskin.

Upaya pengurangan jumlah penduduk yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan harus menjadi prioritas utama RPJMD Kabupaten Belitung 2025–2029. Intervensi yang dilakukan perlu bersifat lintas sektor, menyasar akar penyebab struktural kemiskinan, serta diarahkan pada peningkatan produktivitas, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pembangunan ekosistem kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.



Dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan secara parsial namun perlu kolaborasi dan sinergi atau secara holistik, intergratif dan spasial antar *stakeholder* maupun pemangku kepentingan. Beberapa hal yang dapat upayakan untuk peningkatan tahun berikutnya yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemutakhiran data penduduk miskin yang telah diverifikasi dan validasi
2. Perlu adanya inovasi bagi perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan penanggulangan kemiskinan
3. Mengevaluasi kembali program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk melihat efektivitas dan keberhasilan program-program tersebut dalam rangka penanggulangan kemiskinan
4. Penanggulangan kemiskinan perlu didukung dengan kebijakan yang menekankan perubahan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan anggaran, serta penataan kelembagaan penanggulangan kemiskinan
5. Kinerja Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah perlu ditingkatkan.

Tabel 2.71.: Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 1

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 1 Meningkatnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Strategi Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dalam Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera	1.Penguatan sumber daya manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar Pendidikan 2.Peningkatan pelayanan dasar kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat 3.Meningkatkan layanan intervensi spesifik, sensitif dan koordinatif dalam penanganan stunting 4.Memperluas kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat

SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas pendidikan

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat” diukur melalui Indikator Sasaran Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah. Target 2025 yang ditetapkan adalah 9,16 tahun. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.72.: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET	2025		KATEGORI	TARGET AKHIR RPJMD 2030
					REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,05	9,16	9,11	99,45	SB	9,70
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,09	12,42	12,1	97,42	SB	13,22

Indikator pertama dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Berdasarkan penghitungan dari BPS, realisasi RLS Kabuapten Belitung tahun 2025 sebesar 9,11 tahun. Realisasi ini belum bisa melampaui target yang ditetapkan. Berikut disajikan data capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Belitung dan Provinsi Bangka Belitung dari tahun 2022 sampai 2025.



Tabel 2.73. : Perkembangan Capaian RLS Kabupaten Belitung terhadap Prov. Kep. Babel dan Nasional Tahun 2023 - 2025

Wilayah Babel	TAHUN		
	2023	2024	2025
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	8,25	8,33	8,65
Bangka	8,32	8,45	8,77
Belitung	8,98	9,05	9,11
Bangka Barat	7,47	7,48	7,80
Bangka Tengah	7,23	7,24	7,33
Bangka Selatan	6,91	6,93	7,25
Belitung Timur	8,90	8,99	9,03
Pangkal Pinang	10,50	10,67	10,90

Sumber: Website BPS Provinsi Kep.Bangka Belitung <https://babel.bps.go.id>

Dari grafik terlihat bahwa selama kurun waktu 2023 – 2025, capaian RLS Kabupaten Belitung sudah di atas provinsi Bangka Belitung dan juga jika dibandingkan dengan capaian RLS nasional, RLS Kabupaten Belitung berada sedikit lebih tinggi. Pada tahun 2024, capaian RLS Kabupaten Belitung 9,11 tahun, melampaui RLS Provinsi Kep Babel yang sebesar 8,65 tahun, dan capaian nasional sebesar 9,07 tahun.

Indikator kedua dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, yaitu Harapan Lama Sekolah. angka harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. AHLS menjadi indikator yang menunjukkan peluang seorang anak dalam menempuh pendidikan, realisasi HLS Kabuapten Belitung tahun 2025 sebesar 12,1 tahun. Realisasi ini belum bisa melampaui target yang ditetapkan.

Penguatan harmoni sosial memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai masalah sosial dan pembangunan, termasuk kualitas pendidikan, kesehatan, literasi digital, stunting, dan kemiskinan. Masalah-masalah ini saling mempengaruhi dan menciptakan siklus yang menghambat kemajuan Masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan dan literasi digital yang rendah cenderung sulit berpartisipasi penuh dalam masyarakat modern. Mereka lebih rentan terhadap misinformasi, yang bisa memicu konflik dan perpecahan, sehingga merusak harmoni sosial. Ketika masyarakat hidup dalam harmoni, lingkungan belajar menjadi lebih kondusif. Kerja sama dan toleransi antar individu dari berbagai latar belakang bisa meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua orang. Sebaliknya, konflik sosial dapat mengganggu proses belajar-mengajar dan menghambat akses pendidikan, terutama bagi kelompok rentan.

Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat merupakan salah satu isu strategis utama yang dihadapi Kabupaten Belitung. Meskipun capaian rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi pendidikan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat tantangan besar dalam hal pemerataan kualitas pendidikan, akses pendidikan tinggi, serta penguatan kapasitas literasi dan numerasi dasar masyarakat. Hal ini menjadi penting karena Pendidikan merupakan fondasi peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM), yang pada gilirannya sangat menentukan keberhasilan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola daerah.

Peningkatan pembangunan urusan pendidikan di Kabupaten Belitung terus dilakukan karena telah memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pendidikan daerah yang ditunjukkan dengan kenaikan angka rata-rata lama sekolah. Berbagai upaya tersebut antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan akses pembiayaan pendidikan, peningkatan tata kelola dan kualitas sumber daya manusia pendidikan.

Untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah pada anak usia sekolah dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu; Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Putus Sekolah (APTs).

❖ **Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Salah satu tolok ukur partisipasi penduduk ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). APK bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Sehingga seluruh anak usia sekolah dasar dan menengah baik laki-laki maupun perempuan

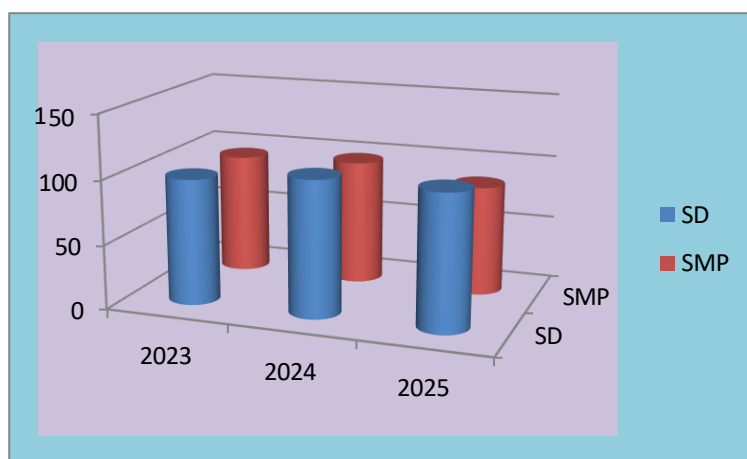


dan anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dapat memperoleh pendidikan. APK juga menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya dan merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Berikut angka partisipasi kasar (SD/MI + Paket A, SMP/Mts + Paket B) di Kabupaten Belitung Tahun 2025:

Grafik 2.11.: Perkembangan APK Tahun 2023 – 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung 2026

Terlihat bahwa APK SD/MI di Kabupaten Belitung berfluktuatif cenderung menurun. Hal tersebut perlu mendapatkan evaluasi yang komprehensif oleh pemerintah daerah sehingga perencanaan dan intervensi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah anak-anak yang bersekolah di SD/MI/Paket A di Kabupaten Belitung terus meningkat. Sama halnya dengan APK jenjang SD, pada APK jenjang SMP/MTs mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meurun. Ini menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan dan intervensi di dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang SMP/MTs/Paket B memberikan kesempatan kepada anak-anak usia SMP/MTs untuk bias melanjutkan pendidikan mereka. Pemenuhan sarana dan prasarana belajar disekolah juga mendorong semakin banyak anak-anak usia SMP yang bias bersekolah di lingkungan tempat tinggal mereka.

❖ Angka Partisipasi Murni (APM)

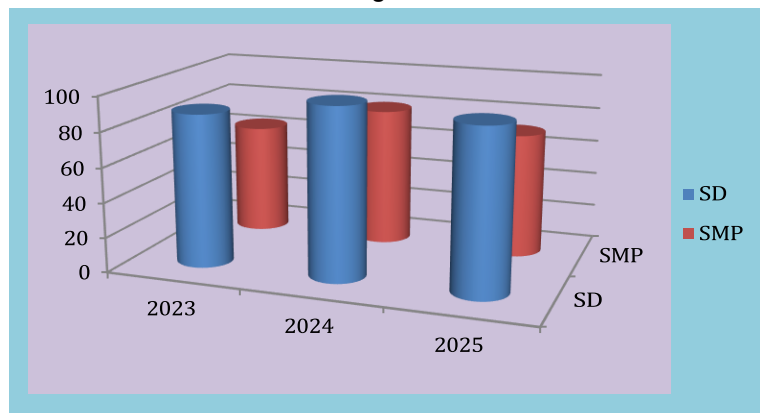
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa di luar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

Berikut angka partisipasi murni (SD/MI + Paket A, SMP/Mts + Paket B) di Kabupaten Belitung tahun 2025.



Grafik 2.12.: Perkembangan APM Tahun 2023-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Tren penurunan APM yang terjadi baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs dipengaruhi berbagai factor, antara lain ketidakmerataan infrastruktur pendidikan hingga danya regulasi terkait zonasi sekolah yang telah diberlakukan memberikan dampak terhadap turunnya APM SD. Angka APM kurang dari 100% berarti terdapat anak usia SD maupun SMP yang bersekolah sebelum usia berdasarkan ketentuan atau ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Anak usia sekolah yang tidak bersekolah dimungkinkan karena: anak yang difabel, yang tidak bias sekolah melalui sekolah formal, anak usia sekolah bersekolahnya dengan cara *home shoolling*, anak *drop out* sekolah. Oleh karena itu, diperlukan penelusuran lebih lanjut penyebab APM belum mencapai 100%, agar dapat dirumuskan kebijakan yang tepat untuk menanggapi *gap* yang ada.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu:

- 1) Melakukan Pembinaan secara Intensif ke sekolah serta interaksi dengan pemangku kepentingan setempat seperti pemerintah Desa, untuk dukungan mencegah siswa putus sekolah
- 2) Melalui bidang Teknis Melakukan pendampingan kepada sekolah sebagai tindakan rensponsif jika ditemukan laporan siswa yang putus sekolah.

Untuk meningkatkan kinerja tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan:

- 1) Melakukan Pembinaan secara intensif kepada sekolah untuk melakukan antisipasi dan pemetaan terhadap siswa yang rentan putus sekolah.
- 2) Meningkatkan komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan setempat untuk mencegah angka putus sekolah melalui kesadaran kolektif masyarakat.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Belitung juga berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui program yaitu Program Pelayanan Pendidikan Bagi Siswa Kurang Mampu dan Siswa Berprestasi (SIMPOR). Program ini merupakan upaya untuk mencegah putus sekolah bagi siswa kurang mampu yang rentan putus sekolah. Program SIMPOR menyasar Siswa SD dan SMP yang kurang mampu dan rentan putus sekolah, tetapi tidak mendapat bantuan pada Program Indonesia Pintar (PIP). Program SIMPOR dilaksanakan sejak tahun 2019 sampai dengan 2025 dirasakan sangat efektif dalam rangka menekan angka putus sekolah serta meningkatkan angka melanjutkan sekolah di Kabupaten Belitung. Penerima manfaat dari Program SIMPOR adalah Peserta Didik Jenjang SD dan SMP yang berlatar belakang dari keluarga kurang mampu yang masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Upaya pencapaian indikator sasaran ini bisa berjalan baik karena adanya faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- ❖ Ketersediaan anggaran yaitu tersedianya anggaran yang cukup beban orangtua siswa melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan komitmen pimpinan karena pendidikan merupakan dasar utama manusia untuk maju dan berkembang.
- ❖ Program pusat yaitu Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 yang berkaitan dengan wajib belajar dan pengentasan kemiskinan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;



- ❖ Melakukan Komunikasi dan Pembinaan Kepada pihak sekolah dalam upaya menekan angka putus sekolah serta meningkatkan angka melanjutkan sekolah dan pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan manusia.
- ❖ Program Inovatif daerah “SIMPOR” dapat berjalan dengan baik.
- ❖ Dalam dokumen RPJPD Kabupaten Belitung 2025–2045 menetapkan peningkatan kualitas dan daya saing SDM sebagai prioritas jangka panjang. Strategi ini mencakup pembangunan pendidikan sepanjang hayat, penguatan pendidikan vokasional, serta peningkatan partisipasi pendidikan yang inklusif. Pencapaian tujuan tersebut sangat bergantung pada sistem pendidikan daerah yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan dinamis terhadap kebutuhan wilayah maritim dan sektor unggulan Belitung.

Adapun faktor Penghambat Pencapaian Kinerja antara lain;

- ❖ Akses pendidikan kurang merata. Hal tersebut dapat ditandai dengan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar, sehingga dengan kurangnya akses pendidikan tersebut berpengaruh terhadap angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Belitung;
- ❖ Cukup tingginya APTs di Kabupaten Belitung.
Kurangnya pembinaan secara intensif ke sekolah serta interaksi dengan pemangku kepentingan setempat seperti pemerintah Desa, untuk dukungan mencegah siswa putus sekolah.
- ❖ Masih adanya anggapan masyarakat bahwa Pendidikan anak usia dini biayanya mahal, dan tidak penting karena untuk mengikuti pendidikan SD tidak wajib lulus PAUD.

Memperhatikan faktor pendukung dan penghambat di atas beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung ke depan adalah sebagai berikut:

- ⌘ Meningkatkan pemerataan akses pendidikan terutama untuk daerah terpencil;
- ⌘ Meningkatkan kemampuan pembelajaran
Pemerintah Kabupaten Belitung harus dapat memastikan bahwa siswa setidaknya mencapai standar minimal pembelajaran dan pengembangan diri siswa di setiap jenjang sistem pendidikan.
- ⌘ Meningkatkan prasarana dan sarana
- ⌘ Meningkatkan kompetensi dasar dan memperbaiki sikap yang harus dimiliki pembelajar/guru.
Tanpa pengajaran yang lebih baik secara konsisten, siswa di Kabupaten Belitung tidak akan memperoleh fondasi yang kuat untuk belajar di tahap selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belitung harus dapat memastikan bahwa Kabupaten Belitung memiliki jumlah guru berkualifikasi tinggi di tempat yang membutuhkan, khususnya di sekolah-sekolah yang berprestasi rendah, terpencil, dan di daerah pedesaan, serta memastikan para guru tersebut berkinerja sesuai kemampuan terbaiknya.
- ⌘ Menjalin hubungan sekolah dengan masyarakat dan pemanfaatan lingkungan untuk meningkatkan peran dan kapabilitas orang tua siswa dan masyarakat dalam meningkatkan motivasi belajar anak.

SASARAN 2 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan

Peningkatan kualitas layanan kesehatan juga menjadi prioritas nasional dalam rangka memperkuat ketahanan sosial dan membangun manusia Indonesia yang sehat. RPJMN menargetkan penguatan layanan primer, percepatan penurunan stunting, peningkatan cakupan JKN, serta penanggulangan penyakit menular dan tidak menular secara terpadu. Arah ini menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat sistem kesehatan berbasis masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas kesehatan” merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Usia Harapan Hidup dengan target “74,15”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 2.74.: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat

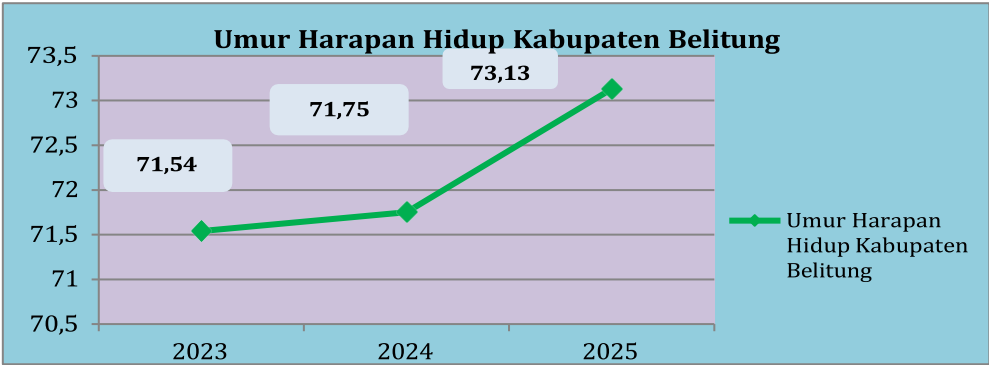


No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target	2025 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2030 Target
1	Umur Harapan Hidup	Tahun	72,76	74,15	73,13	98,62	SB	75,84

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat digunakan Umur Harapan Hidup (UHH), yang merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir hingga suatu tahun tertentu. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator sasaran Meningkatnya kualitas kesehatan, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) menunjukkan dimana tahun 2025 dari target 74,15 tahun belum terealisasi sesuai target yang diharapkan Dimana umur harapan hidup penduduk Belitung Tahun 2025 hanya mencapai 73,13 tahun atau 98,62% dari target kinerja.

Adapun Trend Umur Harapan Hidup di Kabupaten Belitung cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada tabel perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2023-2025.

Grafik 2.13.: Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2023 – 2025



Sumber: Belitung Dalam Angka 2024

Umur Harapan Hidup (UHH) mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Tingginya pencapaian Umur Harapan Hidup (UHH) juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan.

Tabel 2.75.: Perkembangan Umur Harapan Hidup Wilayah Bangka Belitung Tahun 2022 – 2025

Wilayah Babel	TAHUN			
	2022	2023	2024	2025
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	70,98	71,23	71,49	74,46
Bangka	71,37	71,60	71,80	73,56
Belitung	71,31	71,54	71,75	73,13
Bangka Barat	70,25	70,43	70,59	72,35
Bangka Tengah	71,82	72,11	72,36	74,11
Bangka Selatan	68,68	68,98	69,24	72,07
Belitung Timur	72,33	72,59	72,85	74,12
Pangkal Pinang	73,68	73,96	74,24	75,64

Sumber: Website BPS bps.go.id

Peningkatan AHH menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat relatif membaik yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Peningkatan AHH juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, peningkatan gizi masyarakat dan akses serta mutu pelayanan kesehatan. Kepedulian tinggi pemerintah dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu:



1. Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang merupakan upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui deteksi dini faktor risiko dan penyakit tidak menular maupun menular. Kegiatan ini dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan dengan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama serta lintas sektor terkait;
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap mutu layanan puskesmas melalui Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB);
3. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Gerakan Masyarakat (Germas);
4. Optimalisasi pengelola program di pelayanan dengan peningkatan SDM.

Tabel 2.76.: Hasil kinerja upaya kesehatan masyarakat untuk 12 jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2025

NO	KINERJA BIDANG KESEHATAN			Target	Realisasi (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			100	82,40
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin			100	94,80
3	Pelayanan	Kesehatan	Bayi Baru Lahir	100	95,07
4	Pelayanan Kesehatan Balita			100	90,18
5	Pelayanan Pendidikan Dasar	Kesehatan	pada Usia	100	100
6	Pelaynan Usia Produktif	Kesehatan	pada	100	86,45
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			100	92,74
8	Pelayanan Hipertensi	Kesehatan pada Penderita		100	97,62
9	Pelayanan Diabetes Militus	Kesehatan Penderita		100	98,40
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB			100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV			100	87,03

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2025

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung 12 (dua belas) pencapaian kinerja SPM tersebut diatas antara lain yaitu :

- a) Memaksimalkan kegiatan/program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman Definisi Operasional (DO) dan melakukan peningkatan skrining. Kegiatan lebih banyak didanai oleh Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang bersumber dari APBN. Pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.
- b) Melakukan kerjasama lintas sektor/lintas program dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
- c) Meningkatkan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui promosi kesehatan
- d) Meningkatkan kapasitas petugas sehingga capaian SPM menjadi lebih berkualitas
- e) Melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala per bulan/per triwulan pada pengelola program agar dapat melakukan pengumpulan data tepat waktu.
- f) Mengefisienkan kegiatan dan memilah dan memprioritaskan pada kegiatan yang menunjang SPM.

Meningkatnya angka harapan hidup merupakan tantangan kompleks yang melibatkan berbagai aspek, termasuk kesehatan masyarakat, pendidikan, ekonomi, dan aksesibilitas layanan kesehatan. Angka harapan hidup yang tinggi tidak hanya mencerminkan kesehatan individu tetapi juga mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistic dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi berbagai factor yang mempengaruhi angka harapan hidup. Rekomendasi/ solusi untuk permasalahan tersebut adalah pertama-tama penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan. Investasi dalam infrastruktur kesehatan, pelatihan tenaga medis, dan penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dapat meningkatkan pelayanan



kesehatan masyarakat. Sistem kesehatan yang efisien dan terjangkau harus menjadi prioritas, termasuk program imunisasi, pencegahan penyakit menular dan perawatan primer.

Selain itu, pendidikan kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan gaya hidup sehat, pola makan yang baik dan kebersihan pribadi. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye public. Kurikulum sekolah, dan kampanye komunitas untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup sehat. Dalam menghadapi kompleksitas tentang ini, kolaborasi antara pemerintah, sector swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil adalah kunci. Hanya dengan kerjasama yang kuat dan komitmen bersama, kita dapat mencapai peningkatan berkelanjutan dalam rangka harapan hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berkelanjutan.

SASARAN 3 : Menurunnya prevalensi stunting

Stunting masih menjadi persoalan serius dalam pembangunan Kesehatan di Kabupaten Belitung. Prevalensi stunting yang tinggi mencerminkan tidak hanya masalah gizi kronis, tetapi juga akumulasi dari berbagai persoalan sistemik, seperti kemiskinan, sanitasi yang buruk, pola asuh yang kurang tepat, dan akses layanan kesehatan ibu dan anak yang belum merata.

Capaian kinerja sasaran “Menurunnya prevalensi stunting” merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Prevalensi stunting dengan target “16,94”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Prevalensi stunting Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 2.77.: Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya prevalensi stunting

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target	2025 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2030 Target
1	Prevalensi Stunting	Persentase	18,1	16,94	8,82	147,93	SB	11,78

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator sasaran Menurunnya prevalensi stunting, yaitu Prevalensi Stunting menunjukkan dimana tahun 2025 dari target 16,94 % terealisasi melebihi target yang diharapkan Dimana Prevalensi Stunting Belitung Tahun 2025 mencapai 8,82% tahun atau 147,93% dari target kinerja.

Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi yang berlangsung lama, yang artinya anak tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup dan berkualitas sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Ini adalah masa 1000 Hari Pertama Kehidupan yang sangat krusial, Keterkaitan utamanya adalah ketidakmampuan keluarga untuk menyediakan makanan yang cukup, bergizi, dan beragam. Ketika sebuah rumah tangga mengalami kerawanan pangan, ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan menjadi terganggu. Akibatnya, anak-anak tidak mendapatkan nutrisi esensial seperti protein, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal, Bahkan jika ketersediaan pangan secara kuantitas cukup, kurangnya pengetahuan tentang gizi seimbang dan pola asuh yang salah bisa menyebabkan anak tetap kekurangan gizi. Misalnya, pola makan yang didominasi karbohidrat tanpa protein dan sayuran yang memadai.Kondisi ini menjadi tantangan strategis karena berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat di masa depan.



Pada tahun 2025 prevalensi stunting Kabupaten Belitung berhasil di tekan hingga 8,82%, hal ini tidak terlepas dari Percepatan penurunan stunting Kabupaten Belitung yang merupakan salah satu prioritas nasional, dengan target penurunan yang signifikan melalui pendekatan konvergensi lintas sektor, mulai dari intervensi spesifik (kesehatan dan gizi) hingga intervensi sensitive (air bersih, sanitasi, pendidikan, perlindungan sosial, dan ketahanan pangan keluarga). Stunting tidak hanya dilihat sebagai masalah kesehatan, tetapi juga masalah pembangunan yang kompleks.

Dokumentasi kegiatan skrining hiv di tempat hiburan dan pada ibu hamil Dinas Kesehatan Kab. Belitung



Tabel 2.78 Inovasi di lingkungan Dinas Kesehatan untuk mendukung Penurunan Prevalensi Stunting Kabupaten Belitung Tahun 2025

NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KET.
1	Dinas Kesehatan					
	a. AMBONG	Pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada balita kurus dan ibu hamil KEK berupa pemberian makanan tambahan dan pelayanan asistensi berupa konsultasi dan pendampingan dari petugas kesehatan kepada keluarga sasaran	Menurunkan angka Stunting dan Wasting pada Balita, dan Ibu hamil KEK dan Balita Wasting mendapat PMT	Balita dan bumil KEK	1. Orientasi kader gizi dan petugas gizi 2. Pemberian Susu bagi ibu hamil yang kurang mampu 3. Pemberian PMT Lokal yang dilakukan di masing-masing puskesmas	Inovasi ini masih berjalan
	b. PELANDUK	Memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Belitung untuk mendapatkan pelayanan gawat darurat dan perawatan kesehatan masyarakat terpusat dan terintegrasi yang bermutu, terjamin kepastian dan profesional.	Memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan gawat darurat maupun pelayanan perawatan kesehatan masyarakat	Masyarakat yang terkendala mengakses pelayanan kesehatan	Pelanduk mendatangi masyarakat di daerah terpencil atau daerah yang sulit dijangkau oleh mobil dengan menggunakan kendaraan bermotor	Masih berjalan sampai saat ini terutama untuk kegiatan PERKESMAS di tingkat Puskesmas



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KET.
	c. SEHATI	1. Mengintegrasikan semua kegiatan yang dilakukan yang terkait dengan bidang kesehatan dan pelayanan publik 2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Belitung untuk mendapatkan pelayanan gawat darurat dan perawatan kesehatan masyarakat terpusat dan terintegrasi yang bermutu, terjamin kepastian dan profesional.	Memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mengurus rujukan terpusat pada Loker SEHATI di RSUD dr. H. Marsidi Judono	Masyarakat yang di rujuk ke Rumah Sakit Luar Daerah Kabupaten Belitung	Biaya transportasi pasien dan pendamping (pergi dan pulang), biaya ambulan pasien duduk atau pasien berbaring, biaya pemulasaran dan pemulangan jenazah, uang pendampingan rujukan	Masih berjalan sampai saat ini
		3. Memberikan pelayanan rujukan di Loker SEHATI selama 24 jam berupa (informasi tentang rujukan pasien, tiket pasien dan pendamping, transportasi dan akomodasi pasien, kepastian pelayanan kepulangan baik pasien dalam keadaan hidup/meninggal)				
2	Puskesmas Tanjungpandan					
	a. URISAN PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN (Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif dan Usia Lanjut)	Untuk meningkatkan capaian atau kinerja, sehingga pelaksanaan kegiatan atau program dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta mencapai target yang telah ditetapkan.	Terjaminnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia produktif (15-59 tahun) usia lanjut (60 ke atas)	1. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar 2. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar 3. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar 4. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Inovasi ini masih dijalankan sampai dengan saat ini, dikarenakan target sasaran belum tercapai 100 persen.
	BEDULANG (Besame Posyandu Lancar Nimbang)	Terpantaunya pertumbuhan semua balita dan ibu hamil di posyandu dan masalah-masalah gizi bayi dan balita serta ibu hamil di wilayah kerja	Masalah gizi pada bayi, balita dan ibu hamil dapat segera diketahui secara dini dan dapat dilakukan	Semua bayi dan balita yang ada di wilayah UPT Puskesmas Tanjungpandan	Pelayanan pemantauan status gizi bayi dan balita di posyandu melakukan penimbangan secara langsung bayi dan balita, pemberian konsultasi pada bayi, balita yang	Inovasi ini masih dijalankan sampai dengan saat ini, dikarenakan target sasaran



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KET.
		UPT Puskesmas Tanjungpandan.	upaya-upaya untuk mencegah permasalahan tersebut.		mengalami masalah gizi.	belum tercapai 100 persen.
	KOPIASIK (Skrining Kelompok Beresiko Bila Ketemu Kasus Segera Terapi Jaga Privasi ODHIV Kawal Pengobatan)	menjaring kelompok beresiko dan segera di tindaklanjuti	Skrining Kelompok Beresiko	Ibu Hamil, LSL, Waria, WPS, Pasien TB, Penasun	Skrining, Pengobatan, Pemantauan	Inovasi terus berjalan sampai saat ini
	PELANGI (Pasien Lama di kunjungi Kembali)	Untuk Menemukan Pasien Baru	Dengan kegiatan pelangi untuk menemukan pasien baru yang mempunyai riwayat kontak dengan pasien TB yang sudah sembuh	Pasien TB yang sudah sembuh 1, 2, 3 Tahun yang lalu dan keluarga yang kontak dengan pasien TB	Kunjungan Rumah	Inovasi terus berjalan sampai saat ini
3	Puskesmas Air Saga					
	a. Marisahak (Mari Periksa Dahak)	Tujuan Umum: Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian dengan cara memutuskan mata rantai penularan sehingga penyakit TB tidak lagi merupakan masalah kesehatan masyarakat Tujuan khusus: 1. Peningkatan penemuan kasus TB secara aktif dan / massif berbasis keluarga dan masyarakat 2. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang TB 3. Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan tentang penularan TB di	Target SPM semua terduga TB di periksa sesuai standar telah mencapai target Kabupaten	Masyarakat	1. Melakukan kegiatan lintas program dan integrasi program 2. Melakukan kegiatan lintas sektor di wilayah kerja puskesmas 3. Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa /Kelurahan 4. Melakukan kegiatan pengambilan sampel dahak pada sasaran di Puskesmas, Pustu, posyandu, RT, tempat pengajian, Hotel, cafe dan panti pijat, sekolah dan instansi pemerintahan dan swasta, dilaksanakan dari bulan Januari sampai Desember 2024	inovasi terus berjalan sampai saat ini



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KET.
		lingkungan masyarakat				
	b. Ketan bu Jian (Periksa Kesehatan Ibu-ibu Pengajian)	Mendeteksi sedini mungkin penyakit tidak menular pada ibu ibu pengajian		Ibu ibu pengajian usia 15 tahun keatas	Pemeriksaan tinggi badan, lingkaran perut, tekanan darah, pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat.	Inovasi terus berjalan sampai saat ini
	c. Pindang Patin (Pemeriksaan dan Edukasi Gigi pada Calon Pengantin)	Meningkatkan kesehatan gigi dan mulut bagi calon ibu hamil sedini mungkin, yaitu pada masa sebelum pernikahan, melalui edukasi catin	Memberikan edukasi kesehatan gigi dan mulut, meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan gigi dan mulut bagi catin sebagai salah satu persiapan untuk kehamilan	Pasangan catin yang datang ke UPT Puskesmas Air Saga	Pemeriksaan dan edukasi kesehatan gigi dan mulut bagi calon pengantin.	Inovasi terus berjalan sampai saat ini
	d. Pasar Berehun (Puskesmas Air Saga Bersama Pantau SPM Tahunan)	Monitoring evaluasi yang berkelanjutan untuk capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) 100% di UPT Puskesmas Air Saga	Agar capaian SPM di UPT Puskesmas Air Saga dapat di pantau, di monitoring dan dievaluasi secara bersama-sama baik oleh pengelola program, Kepala Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Lintas Sektor)	Masyarakat, Pengelola Program, Kepala Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Lintas Sektor	Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi SPM	Inovasi terus berjalan sampai saat ini
	e.KEREMUNTIN G (Kegiatan Rembuk Terpadu Menurunkan Stunting) di UPT Puskesmas Air Saga	Meningkatkan pelayanan dan penguatan program penanggulangan stunting sehingga bermanfaat dan berdampak langsung kepada masyarakat luas dan masyarakat yang memiliki anak stunting dan membantu serta mendukung pemerintah dalam melaksanakan intervensi spesifik penurunan stunting dalam bidang kesehatan dan mencegah terjadinya peningkatan kasus stunting di wilayah UPT Puskesmas Air Saga	Remaja putri, ibu hamil, ibu nifas, dan balita di wilayah kerja UPT Puskesmas Air Saga	Edukasi dan Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri, Gerakan Aksi Bergizi (Rematri Fokus Minum Tablet Tambah Darah bersama), Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Kurus, Home Visit (Kunjungan Rumah) Ibu Hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) dan Bayi dan Balita dengan Masalah Gizi (Weight Faltering), wasting, underweight, serta beresiko stunting/stunting, Pemantauan Pertumbuhan Balita di Posyandu dan Poli Gizi Puskesmas, Gerakan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Inovasi ini melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait, seperti : Promosi Kesehatan, Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Gizi, Dokter Puskesmas, Imunisasi, Sekolah, serta Desa/Kelurahan. 85% kegiatan sudah berlangsung di tahun kemarin dan akan dimaksimalkan di tahun ini	Inovasi sudah berjalan meskipun belum optimal



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KET.
				Balita, Stimulasi Deteksi Intervensi dan Tumbuh Kembang (SDIDTK), Pemberian Vitamin A Dosis Tinggi secara Rutin bagi Balita, Pemberian Vitamin A Dosis Tinggi untuk Ibu Nifas, Pelatihan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal bagi kader kesehatan wilayah kerja UPT Puskesmas Air Saga, Refreshing Kader Kesehatan wilayah kerja UPT Puskesmas Air Saga, Pemicuan 5 Pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita, Poli Stunting (Pelayanan UKP Terpadu UPT Puskesmas Air Saga)		
	f.SIDAK KOPI (Diskusi Dadakan Kondisi Sepi)	Melakukan kegiatan edukasi kesehatan pada sasaran yang lebih luas tanpa batasan, sehingga dapat menjangkau sasaran yang lebih luas dan membangun koneksi dengan pendengar atau audiens target.	Membangun personal branding Puskesmas, menyampaikan n dan strategi promosi kesehatan yang lebih luas tanpa batasan usia dan batasan wilayah sehingga terbangun jaringan dan komunitas.	Seluruh warga negara yang mengakses media sosial khususnya youtube.	Edukasi seputar kesehatan dengan membuat video dalam bentuk podcast bersama narasumber sesuai keilmuan yang dimilikinya dan penyebarannya melalui media sosial sehingga jangkauannya tidak terbatas memanfaatkan perkembangan teknologi.	Sudah berjalan, dengan slogan “sehat itu tergantung kita, sakit juga tergantung kita”
4	Puskesmas Perawas					
	A. Silansing (Sistem Pelayanan Vaksinasi Keliling)	Meningkatkan akses layanan vaksinasi kepada masyarakat yang mengalami kesulitan menjangkau vaksinasi di fasilitas kesehatan atau pos pelayanan	Meningkatkan cakupan vaksinasi	Masyarakat yang terkendala mengakses layanan vaksinasi di faskes dan pos pelayanan	Bersama kader kesehatan Melakukan kunjungan rumah dan memberikan vaksinasi terhadap sasaran yang terkendala datang ke faskes atau pos pelayanan	Masih berjalan terutama untuk vaksinasi rutin balita
	B. Segar Manis (Sehat Bugar Bersama Program Penyakit Kronis)	Tersedianya wadah kepada penderita penyakit kronis hipertensi dan DM dalam memperoleh informasi dalam upaya menjaga kesehatannya	Meningkatkan pengetahuan peserta Prolanis tentang penyakit kronis dan meningkatkan kekeluargaan peserta	Peserta BPJS memiliki penyakit kronis (Diabetes Melitus tipe II dan Hipertensi)	Penyuluhan dan rekreasi, waktu 1x/bulan menyesuaikan, tempat menyesuaikan, anggaran BPJS	Masih berjalan rutin



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KET.
		sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup para penderita penyakit kronis	Prolanis sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan dan menekan penyakit tidak menular			
	C. Mukat (Melakukan Investigasi Kontak TB)	Meningkatkan penemuan kasus dan mencegah penularan TBC di masyarakat	Meningkatkan capaian pelayanan SPM	Kontak penderita TBC dan kelompok beresiko	Mengumpulkan data kontak yang pernah berhubungan terhadap penderita TB kemudian melakukan screening TB terhadap kontak tersebut. dengan melibatkan kader kesehatan atau pos kelompok kesehatan kerja. Kegiatannya bisa menyesuaikan, bisa dilakukan di faskes atau menjemput bola	Masih berjalan rutin
5	Puskesmas Badau					
	a. Jerami (Jelajah Rumah Terintegrasi)	Meningkatkan Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Terjadi Peningkatan IKS	Semua Keluarga di Desa Ibul	Melakukan intervensi lanjut sesuai masalah kesehatan masing masing keluarga	Masih Berlanjut
	c. Siskamling MRT (Skrining Kesehatan Masyarakat Keliling Masjid dan RT)	Meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat usia produktif dan lansia	Terlaksananya skrining kesehatan	Masyarakat usia produktif dan lansia	Pemeriksaan kesehatan/skrining ke masjid dan RT secara berkala	Masih Berlanjut
	h. Dara Keriting (Dapur Keluarga Untuk Kelola Stunting)	Menurunkan angka Stunting	Peningkatan pengetahuan keluarga dalam mengelola menu keluarga untuk penanganan Stunting	Ibu Rumah Tangga (khususnya keluarga stunting dan Ibu Hamil)	Pelatihan dan demo mengelola makanan keluarga untuk penanganan dan pencegahan stunting	Masih Berlanjut
	i. Sabu Saja (Satu Bulan , Satu Jamban)	Meningkatkan angka akses jamban sehat	Tersedianya akses jamban sehat warga	Keluarga yang belum memiliki akses jamban sehat	Melakukan pembangunan jamban setiap bulan melalui gotong royong, kerjasama dengan desa dan CSR	Masih Berlanjut
	m. Penjaga Di Hati (Penjaringan dan Pengendalian Penyakit Diabetes dan Hipertensi)	terjaringnya dan Mengendalikan penyakit Diabetes dan Hipertensi	Mengurangi angka kesakitan dan komplikasi penyakit	Penderita Hipertensi dan Diabetes	Pemeriksaan rutin kesehatan, cek darah dan konseling obat,gizi penderita HT DM	Masih Berlanjut
6	Puskesmas Sijuk					
	a. Lumpia Sijuk	Pemberian Sertifikat kepada balita yang telah lulus penimbangan	Meningkatkan minat orang tua balita untuk mengunjungi	Balita	Pemberian sertifikat kepada balita yang telah lulus posyandu, dilaksanakan di posyandu	Berjalan dengan bekerjasama dengan desa



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KET.
		sampai usia 5 tahun	posyandu setiap bulan			
	b. Markisa Sijuk	Untuk mengurangi sampah di wilayah kerja sijuk	Membersihkan lingkungan	Wilayah kerja sijuk	Gotong royong dalam membersihkan sampah	Berjalan
	c. Gorong Batik	Pencegahan penyakit DBD	Mengurangi kejadian kesakitan DBD di masyarakat	Masyarakat	Gotong royong dalam pemberantasan jentik dengan melakukan PSN 3M Plus	Berjalan, bekerjasama dengan lintas sektor
	d. Masdarini	Menerapkan kebiasaan ber PHBS dirumah tangga	terbentuknya kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan PHBS di kehidupan sehari-hari	Masyarakat di wilayah kerja	kunjungan rumah dan pembinaan PHBS	Berjalan
	e. Penyuk Baja	Penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan di tempat kerja	Skrining kesehatan pada pekerja	Karyawan/ pekerja	Penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan (tensi, DM, dll)	Berjalan kerjasama pengelola PTM dan kesjaor
	f. Bersahabat	Berobat sebelum batuk hebat (mengurangi risiko TBC)	Menghindari terjadinya penyakit yang lebih parah dikarenakan batuk	Masyarakat yang berobat	Skrining pada pasien yang batuk	Berjalan
	g. Doger Pedes	Adanya kegiatan home visit bertujuan sebagai upaya kesehatan masyarakat secara holistik mencakup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan	Meningkatkan kemandirian dan pengetahuan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan, meningkatkan hubungan tenaga medis dan pasien, dan sebagai kegiatan promosi kesehatan yang sebaiknya dilakukan secara rutin	Masyarakat di wilayah kerja	Kunjungan rumah meliputi pemeriksaan kesehatan dan promosi kesehatan	Berjalan
	h. Ngenjugak	Mendeteksi dini penyakit tidak menular, memberikan pelayanan kesehatan penderita hipertensi dan DM sesuai standar, Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang faktor risiko PTM	Mengurangi risiko PTM	Masyarakat di wilayah kerja	Skrining dan kunjungan rumah, melakukan deteksi dini PTM	Berjalan



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KET.
	i. Batu Bedil	Bank Darah Untuk Bersiap Dulu Menuju Bersalin	tersedianya calon pendonor darah bagi ibu hamil yang belum memiliki calon pendonor darah, khususnya untuk bumil yang memiliki resiko tinggi	Masyarakat di wilayah kerja yang sudah terbiasa dan bersedia menjadi calon pendonor darah	Membentuk sebuah grup yang terdiri dari calon2 pendonor darah yang sewaktu waktu bumil memerlukan darahnya, calon tersebut siap dan bersedia	Berjalan
7	Puskesmas Tanjung Binga					
	Healthy Traveling by SIMPKI (Wisata Sehat oleh Keluarga Simpor Laki)	Menjalin kerja sama lintas sektor dengan penggiat wisata berupa pembinaan protokol kesehatan khususnya selama pandemi, pembinaan IRTP, pembinaan jasa catering, pembinaan homestay, penginapan/ hotel dan P3K	Melaksanakan pelayanan kepada objek dan pelaku wisata yang berada diwilayah UPT Puskesmas Tanjung Binga.	Pelaku dan objek wisata	Pemeriksaan Tekanan darah, Berat badan, tinggi badan, lingkaran pinggang, pemeriksaan kolesterol, gula darah, asam urat, iva test	berjalan
	Plesir Simpki SEHATI (Patroli Ambulans Air SIMPKI SEHATI)	memberikan pertolongan cepat pada kondisi sakit/ kecelakaan berupa patroli ambulans air pada hari Sabtu dan Minggu	Tujuan dari Kegiatan PLESIR SIMPKI SEHATI adalah meningkatkan pelayanan Kesehatan khususnya di bidang kepariwisataan di kawasan perairan.	Yang menjadi sasaran dalam kegiatan PLESIR SIMPKI SEHATI adalah wisatawan dan penggiat wisata di Pantai Tanjung Kelayang dan pulau-pulau disekitarnya.	Tim PLESIR SIMPKI SEHATI berkeliling di seputar pantai dan pulau sekitar hingga pos Kesehatan di Pulau Lengkuas.Tim melakukan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan.Be rkoordinasi dengan Tim UGD UPT Puskesmas Tanjung Binga untuk menindaklanjuti kejadian yang harus dirujuk.	berjalan
	Pelayanan Akupresur dan Pijat Relaksasi	Untuk Memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupresur pada Pasien	memberikan pengobatan dengan akupresur dan pijat relaksasi untuk pengobatan tradisional	pasien yang dirujuk oleh dokter untuk di berikan layanan ini	memberikan pelayanan akupressur dan pijak relaksasi kepada seluruh pasien yang dirujuk oleh dokter	
	Kerapu Asam Garam (Kreasi ramuan jamu dan asuhan mandiri TOGA Masyarakat)	Untuk Memberikan Hasil Olahan TOGA yang Berupa Ramuan Jamu pada Pasien	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara kesehatannya sendiri melalui pelayanan kesehatan tradisional asuhan mandiri TOGA dan Akupresur.	1. Ramuan seleraja disajikan kepada 20 pasien antrian pertama dan tamu yang berkunjung ke UPT Puskesmas Tanjung Binga pada kegiatan tertentu. 2. Sasaran pelayanan akupresur yaitu pasien yang memiliki gejala dan telah disetujui dokter untuk dilakukan akupresur (3-5 Pasien Per Hari)	Menyajikan Ramuan Seleraja kepada tamu yang berkunjung ke Puskesmas Tanjung Binga. - Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara membuat Ramuan Seleraja.	berjalan



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KET.
				3. Sasaran penyehat tradisional yang didata berjumlah 14 penyehat tradisional yang terdaftar pada laporan UPT Puskesmas Tanjung Binga. 4. Sasaran asuhan mandiri yaitu minimal ada 1 kelompok asuhan mandiri di setiap desa dan setiap kegiatan program lain bisa diisi dengan penyuluhan tentang toga dan akupresur		
	Galeri SIMPKI	Menjadi galeri promosi industri rumah tangga pangan, industri kreatif, ramuan tradisional dan jamu binaan Puskesmas	memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM dan mempromosikan hasil karya UMKM binaan	seluruh pengunjung	menjual hasil UMKM binaan	berjalan
	TANJAK Si SIMPKI (Tanya Jawab Kesehatan Streaming bersama Simpor Laki)	Sebagai inovasi penyuluhan di saat pandemi dengan memberikan Informasi Kesehatan dalam jaringan Kepada Masyarakat melalui sosial media	kegiatan inovasi ini adalah sebagai inovasi penyuluhan disaat pandemic dengan memberikan informasi kesehatan dengan media sosial kepada masyarakat.		1. Petugas membuat jadwal dan tema yang akan dijadikan topik 2. Petugas berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor 3. Petugas menyiapkan lokasi dan alat untuk melakukan streaming 4. Petugas dan narasumber menyampaikan informasi (materi penyuluhan) melalui facebook 5. Petugas membuka sesi tanya-jawab dengan audience yang menonton melalui kolom komentar 6. Petugas menutup kegiatan streaming	berjalan
	Cempedak Masak (Cek Penyakit Tidak Menular di Hari Bemasak)	Meningkatkan Cakupan Skrining Kesehatan Usia (15-59)	Terlaksananya pencegahan dan pengendalian faktor resiko Penyakit Tidak Menular berbasis peran serta masyarakat secara terpadu, rutin dan periodik	Sasaran dari kegiatan CEMPEDAK MASAK adalah masyarakat yang berusia 15-59 tahun, yang memiliki atau tidak memiliki faktor resiko PTM di lokasi pesta/ kenduri	Membentuk tim dan koordinasi kegiatan CEMPEDAK MASAK Bersama Ketua Pokja UKM, lintas program dan lintas sektor berkoordinasi dalam penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan Mensosialisasi kegiatan CEMPEDAK MASAK. Mensosialisasikan jadwal dan tempat pelaksanaan kepada Pihak Desa dan Kader Kesehatan Menginformasikan dan izin dengan tuan rumah pesta/kenduri Bersurat dan tatap muka kepada Pihak	berjalan



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KET.
					Tuan rumah yang akan diadakan pelaksanaan kegiatan CEMPEDAK MASAK Pemeriksaan Kesehatan Menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur lingkar perut, mengukur tekanan darah. Pemeriksaan Laboratorium Melakukan Pemeriksaan Laboratorium Sederhana berupa, pemeriksaan Gula Darah dan Kolesterol Konseling Kesehatan Melakukan konseling kesehatan sesuai dengan masalah Kesehatan Rujukan Kegiatan rujukan ke UPT Puskesmas Tanjung Binga dengan pemanfaatan sumber daya tersedia termasuk respon cepat sederhana dalam penanganan prarujukan	
	Peyek Ikan (Penyuluhan Edukasi dan Informasi di Rawat Jalan)	memberikan informasi dan edukasi untuk pasien rawat jalan	meningkatkan pengetahuan masyarakat	seluruh pasien yang berkunjung		berjalan
	Mutik Sahang (Mutik Saran dan Harapan Pengunjung)	mengumpulkan saran dan harapan dari pasien maupun pengunjung yang datang ke Puskesmas Tanjung Binga	meningkatkan pelayanan puskesmas	seluruh pasien yang berobat	memberikan kertas untuk menuliskan saran dan harapan kepada pasien yang berkunjung	berjalan
	Mempelam (Menu GERMAS untuk Pasien Melampun)	Untuk Mendukung Sekaligus Mempromosikan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang memeriksakan diri ke Puskesmas.	Sasaran dari kegiatan Mempelam adalah 20 Pasien antrian pertama pada Pelayanan Rawat Jalan di UPT Puskesmas Tanjung Binga	1.Mempelam disajikan dengan mematuhi hygiene penyajian makanan dengan porsi perorangan. 2. Mempelam diletakkan di rak Mempelam yang terletak di ruang tunggu pasien pendaftaran. 3. Mempelam disajikan untuk 20 pasien antrian pertama pelayanan rawat jalan	berjalan



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KET.
	PELUK MESRA SIMPKEI (Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Serentak oleh Keluarga Simpor Laki)	meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan kunjungan lapangan lintas program UKM secara serentak	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam satu siklus hidup untuk mencapai masyarakat sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat	seluruh masyarakat dalam siklus hidup	Melakukan Pemeriksaan Tekanan Darah b. Melakukan Pemeriksaan Berat badan dan Tinggi Badan c. Melakukan Skrining Kesehatan seluruh siklus hidup d. Melakukan Pemeriksaan Darah e. Memberikan Edukasi Kesehatan	berjalan
8	Puskesmas Membalong					
	a. Begadai (Begalor Bujang Dayang)	Menjaring dan melakukan pemeriksaan kepada remaja di wilayah kerja Puskesmas membalong dalam kegiatan Posyandu Remaja	Meningkatkan capaian kunjungan remaja, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja tentang kesehatan reproduksi, mencegah kenakalan remaja dan pernikahan dini	Usia remaja 10-18 tahun di wilayah kerja puskesmas Membalong	Melakukan pemeriksaan Tekanan darah, Berat Badan, Tinggi Badan, Lingkar perut, Lingkar Lengan, cek Hb dan pemberian KIE terkait Kesehatan Reproduksi	Kegiatan berlangsun g setiap bulan
	b. Ceklis Rupa (Ceklis 10 indikator Rumah Tangga)	Pemantauan rumah tangga yang sudah Ber PHBS	Meningkatkan kualitas kesehatan melalui kesadaran masyarakat dalam menjalani prilaku kehidupan sehari hari yang bersih dan sehat	Seluruh Rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas Membalong	Melakukan kunjungan rumah untuk pemeriksaan 10 indikator PHBS di Rumah tangga	kegiatan berlangsun g setiap bulan
	c. Bekemas (Bejamban Kerjasama Lintas sektor)	Mendorong masyarakat untuk akses jamban sehat	Mengurangi penyakit berbasis lingkungan terkait BAB sembarangan dan meningkatkan PHBS	Seluruh Rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas Membalong	Verifikasi	kegiatan berlangsun g setiap bulan
	d. SIBIRU (Swiping Ibu Hamil Baru)	Menjaring ibu hamil baru yang belum melakukan pemeriksaan kehamilan ke petugas kesehatan di fasyankes	Meningkatkan capaian ibu hamil baru dan menurunkan angka K1 akses	Seluruh ibu hamil baru yang belum melakukan pemeriksaan kehamilan di wilayah kerja Puskesmas Membalong	Kegiatan dilaksanakan berdasarkan informasi dari kader, masyarakat terkait keberadaan ibu hamil di wilayah kerja puskesmas membalong yang belum melakukan pemeriksaan kepada petugas kesehatan, waktu pelaksanaan fleksibel berdasarkan informasi	Kegiatan sampai saat ini masih berjalan



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KET.
	e. Sirih Merah (Cek tensi dan Gula darah dari rumah ke rumah)	Mendeteksi dini dan menumukan secara awal adanya faktor resiko Penyakit tidak menular pada masyarakat usia 15-59 tahun	Mencegah faktor resiko penyakit tidak menular secara dini	seluruh masyarakat usia 15-59 tahun	Melakukan pemeriksaan Tekanan darah, Berat Badan, Tinggi Badan, Lingkar perut, cek gula darah dan pemberian KIE terkait penyakit tidak menular	kegiatan berlangsung setiap bulan
	f. Kawal Imunisasi (Kartu jadwal Imunisasi Bayi dan Baduta)	Memudahkan orang tua bayi/balita untuk mengingat jadwal imunisasi anaknya sesuai dengan usianya	Meningkatkan cakupan imunisasi dan mencegah penyakit PD3I	Orang tua bayi/balita yang diimunisasi	Kegiatan ini dilakukan di setiap posyandu dengan memberikan kartu jadwal imunisasi kepada orang tua bayi/balita yang baru pertama kali datang untuk imunisasi, dan petugas mencatat imunisasi yang diberikan sesuai tanggal pemberiaan dan mengingatkan kembali waktu untuk anak imunisasi selanjutnya	Kegiatan masih berlangsung
	g. Perawan Ceking (Peduli Rahim wanita dengan cek iva keliling)	Mendeteksi secara dini kanker leher rahim pada wanita usia subur yang sudah menikah	Meningkatkan capaian iva test dan mendeteksi secara dini kanker leher rahim	Seluruh Wanita yang sudah pernah menikah	Melakukan pemeriksaan iva test dengan menggunakan asam cuka	Kegiatan masih berlangsung
	h. Gerubak (Gerakan orang tua peduli 1000 hari kehidupan)	Meningkatkan pelayanan preventif kasus stunting	Mengurangi angka stunting	Ibu hamil K1 yang memeriksakan diri ke Puskesmas dan Ibu hamil di kelas ibu hamil	Melakukan KIE pada ibu hamil yang melakukan K1 di Puskesmas dan Kelas ibu hamil	Kegiatan sudah berjalan
9	Puskesmas Simpang Rusa					
	a. SANGU KETAN (Sambil nunggu antrian nonton video kesehatan)	Memberikan informasi mengenai kesehatan dan pencegahan penyakit kepada pasien yang sedang menunggu antrian	Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan dan pencegahan penyakit pada pasien	Pasien dan keluarga pasien yang sedang menunggu antrian	Melakukan pemutaran video kesehatan dan informasi pencegahan penyakit, dilakukan pada saat jam pelayanan di laksanakan di ruang tunggu antrian pasien	Masih berjalan
	b.MARTABAK (Mari Akselerasi Pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis)	Mencegah terjadinya sakit TBC sehingga dapat menurunkan beban TBC	Sebagai pengobatan pencegahan bagi masyarakat sehat yang kontak erat dengan penderita positif TBC	Kontak serumah dan kontak erat penderita positif TBC	1. PP TB melakukan investigasi kontak 2. Kontak serumah atau kontak erat dilakukan mantoux tes dan telah dibaca oleh dokter pemeriksa bila hasil > 10 mm (1 cm) pasien di rujuk ke poli DOTS bila < 10 mm (<1 cm) pasien di observasi dan dilakukan pemeriksaan menggunakan algoritma pemeriksaan ILTB	Masih berjalan



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KET.
					3. Kontak serumah/ kontak erat yang berisiko mendapatkan Terapi Pencegahan Tuberkulosis 3. Sosialisasi dengan media video edukasi yang diunggah melalui media sosial resmi UPT Puskesmas Simpang Rusa (Facebook) 4. Aksi sikat gigi Bersama anak sekolah dasar 5. Pemberian lembar KASIH (Kalender Sikat Gigi Harian) dan sticker	
	c. CEMARA (Cek Kesehatan Masyarakat Ramai)	Mencapai cakupan skrining uspro 100%	Masyarakat berperilaku CERDIK dan terkendalnya PTM	Usia 15-59 tahun	1. Kegiatan penggalan informasi faktor risiko dengan wawancara sederhana tentang riwayat PTM pada keluarga dan diri peserta, aktifitas fisik, merokok, kurang makan sayur dan buah, serta informasi lainnya 2. Kegiatan pengukuran berat badan, tinggi badan, Indeks Massa Tubuh (IMT), lingkar perut, tekanan darah. 3. Pemeriksaan tajam penglihatan dan pendengaran 4. Skrining PUMA untuk perokok usia >40 tahun. 5. Kegiatan pemeriksaan gula darah, kolesterol total dan asam urat (jika stik ada) 6. Kegiatan konseling dan penyuluhan	Masih berjalan
					7. Kegiatan rujukan ke Puskesmas jika dibutuhkan.	
	d. DUTA HP (hiDUp Tanpa Hipertensi)	Memberikan edukasi mengenai penyakit hipertensi melalui media sosial	Untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan masyarakat tentang bahaya hipertensi, dan cara mencegah hipertensi melalui YouTube.	Seluruh Msyakat	1. Edukasi melalui link YouTube https://m.youtube.com /@rafliakbar4325 sebagai pembelajaran digital yang memanfaatkan video sebagai media utama untuk menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan kepada masyarakat.	Baru berjalan (Oktober 2025)



NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KET.
					2. Materi edukasi disajikan secara visual dan audio, sehingga lebih mudah dipahami	
10	Puskesmas Selat Nasik					
	a. Asyira	Untuk menurunkan angka kesakitan Penyakit Tidak Menular	Meningkatkan kebugaran dan daya tahan tubuh, serta membiasakan pola hidup sehat	Anak-anak, Remaja, Usia Produktif, dan Usia Lanjut	Senam Bersama, Penyuluhan Kesehatan, Pemeriksaan Kesehatan	Masih berjalan
11	RSUD dr.H.Marsidi Judono					
	a. Belungkak	Membantu pasien atau keluarga untuk mendapatkan akta kelahiran bayi baru lahir di UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono tanpa harus datang ke Dinas Disdukcapil	Memberikan kemudahan bagi pasien / keluarga yang melahirkan di UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono	Seluruh bayi hidup yang lahir di UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono	Membantu pengurusan penerbitan akta kelahiran bayi baru lahir, dengan cara menyampaikan seluruh kelengkapan berkas administrasi, dalam waktu kurang lebih 7 hari kerja	Proses perpanjang n Kerjasama dengan Dinas jependudukan dan Catatan Sipil Setempat
	b. Simino	Mempermudah pasien dalam melakukan pendaftaran rawat jalan, secara online melalui aplikasi SIMINO atau Website resmi UPT RSUD dr.H. Marsidi Judono	Memberikan kemudahan pendafataran pasien rawat jalan tanpa harus datang langsung ke RS, dapat memonitoring antrian serta jadwak pelayanan dokter. Pasien / keluarga dapat langsung datang pada saat hari pelayanan tanpa antrian panjang dan tidak perlu dtang pagi-pagi	Seluruh masyarakat yang akan menggunakan layanan rawat jalan	Pendaftaran online melalui aplikasi SIMINO atau Website resmi UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono	Masih Berjalan
	c. Sehati	Mempermudah pasien / keluarga pasien (Kepesertaan BPJS PBI) baik rawat jalan maupun rawat inap dalam hal perujukan pasien ke luar daerah Kabupaten Belitung	Memberikan keringanan bagi pasien / keluarga (Kepesertaan PBI) dalam proses perujukan pasien ke luar daerah baik pasien rawat jalan maupun rawat inap	Seluruh pasien kepesertaan BPJS PBI yang membutuhkan perujukan ke luar daerah	Proses pengurusan administrasi perujukan pasien ke luar daerah	Masih Berjalan



Stunting merupakan isu yang secara konsisten muncul dan diperkuat dalam hampir seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. RPJMD Kabupaten Belitung 2025–2029 perlu menempatkan isu ini sebagai prioritas strategis yang ditangani secara lintas sektor, berorientasi keluarga dan komunitas, serta berbasis data dan evaluasi kinerja secara berkala. Penurunan stunting bukan sekadar indikator keberhasilan sektor kesehatan, tetapi juga cermin dari efektivitas tata kelola pembangunan daerah secara menyeluruh.

SASARAN 4 : Meningkatnya pemerataan dan pendapatan masyarakat

Kemiskinan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Belitung yang berdampak pada berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Meskipun tren penurunan angka kemiskinan secara umum menunjukkan perbaikan, namun masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dan belum sepenuhnya tersentuh oleh program perlindungan sosial maupun pemberdayaan ekonomi. Ketimpangan pendapatan, terbatasnya kesempatan kerja, serta akses terbatas terhadap layanan dasar turut memperkuat struktur kemiskinan yang ada.

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pemerataan dan pendapatan masyarakat” merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator pertama Pengeluaran per kapita dengan target “Rp. 14.651.000”, indikator kedua Tingkat pengangguran terbuka target 3,74 %, Indeks Gini dengan target 0,241. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Prevalensi stunting Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 2.80.: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pemerataan dan pendapatan masyarakat

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi 2025		Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2030 Target
			Awal RPJMD	Target				
1	Pengeluaran per Kapita	Rupiah	14.449.000	14.651.000	14.559.000	99,37	SB	15.664.605
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	3,88	3,74	3,64	102,67	SB	2,82
3	Indeks Gini	Nilai	0,248	0,241	0,205	114,94	SB	0,210

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian sasaran Meningkatnya pemerataan dan pendapatan masyarakat,dengan indikator sasaran pertama yaitu Pengeluaran per kapita menunjukkan dimana tahun 2025 dari target Rp.14.449.000 belum terealisasi sesuai target yang diharapkan Dimana Pengeluaran per kapita Kabupaten Belitung Tahun 2025 sebesar Rp. 14.559.000 atau 99,37% dari target kinerja.

Tabel 2.81 : Tabel Perkembangan Capaian Pengeluaran per kapita Kabupaten Belitung terhadap Kab/Kota di Prov. Kep. Babel dan Nasional Tahun 2025

Provinsi/Kab/Kota	Pengeluaran per kapita (Ribu Rupiah)		
	2023	2024	2025
KEP. BANGKA BELITUNG	13.589	13.667	13.837
Bangka	13.146	13.205	13.411
Belitung	14.365	14.449	14.559
Bangka Barat	13.105	13.199	13.380
Bangka Tengah	13.643	13.677	13.768
Bangka Selatan	12.627	12.718	12.920
Belitung Timur	12.536	12.610	12.694



Kota Pangkal Pinang	16.734	16.750	16.856
Nasional	11.899	12.341	12.802

Sumber: Website resmi bps.go.id 2026

Dari tabel terlihat bahwa pada tahun 2025, capaian Pengeluaran per kapita Kabupaten Belitung terus meningkat, berada diatas pengeluasran per kapita provinsi Bangka Belitung dan juga diatas capaian pengeluaran per kapita nasional. Pada tahun 2025, capaian Pengeluaran per kapita Kabupaten Belitung Rp. 14.559.000, sedangkan Pengeluaran per kapita Provinsi Kep Babel yang sebesar Rp.13.873.000, sedangkan capaian nasional sebesar Rp. 12.802.000

Tingginya pengeluaran per kapita ini dipengaruhi oleh tingkat inflasi, walaupun pada November 2025, berdasar catatan BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tingkat inflasi y-on-y terendah terjadi di Tanjungpandan sebesar 1,67 persen dengan IHK sebesar 107,05. Namun inflasi y-on-y nflasi y-on-y Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks beberapa kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,30 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,15 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,31 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,78 persen; kelompok transportasi sebesar 0,56 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,54 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,92 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,93 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks atau mengalami deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,29 persen dan kelompok pendidikan sebesar 12,85 persen.

Rata-rata pengeluaran dan tingkat inflasi yang tinggi ini merupakan masalah yang harus dihadapi masyarakat Kabupaten Belitung. Masyarakat Kabupaten Belitung tentunya harus memiliki pendapatan per bulan dari hasil kegiatan ekonomi mereka yang lebih tinggi dari pengeluaran tersebut. Hal ini sangat bergantung pada kondisi ketengakerjaan Kabupaten Belitung.

Dari tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pemerataan dan pendapatan Masyarakat dengan indikator sasaran kedua yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka dapat diketahui bahwa capaian sasaran tahun 2025 dari target 3,74% terealisasi sesuai target yang diharapkan Dimana Pengeluaran per kapita Kabupaten Belitung Tahun 2025 sebesar 3,64% atau 102,67% dari target kinerja.

Tabel 2.82. : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota, 2024 - 2025 di Prov. Kep. Babel

KABUPATEN/KOTA	TPT/UR		TPAK/LFPR	
	2024	2025	2024	2025
Bangka	4.91	4.75	67.92	67.93
Belitung	3.88	3.64	68.18	69.18
Bangka Barat	4.88	4.49	70.36	71.28
Bangka Tengah	4.23	4.21	70.22	70.26
Bangka Selatan	4.94	4.48	69.17	71.80
Belitung Timur	2.63	3.05	70.56	69.10
Pangkalpinang	5.98	5.73	66.99	67.10
Kep. Bangka Belitung	4.63	4.45	68.87	69.38

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Kep Bangka Belitung 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belitung tahun 2025 sebesar 3.64 menurun dari tahun 2024 sebesar 0,24%. Dilihat dari sisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), TPAK Kabupaten Belitung tahun 2025 sebesar 69,18% artinya sebesar 69,18 persen penduduk usia kerja aktif secara



ekonomi. TPAK Kabupaten Belitung tahun 2025 ini meningkat dari tahun 2024 yang sebesar 68,18% Sementara TPAK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 sebesar 69,38%.

Perluasan Kesempatan Kerja dengan 4 (empat) arah kebijakan, yaitu: meningkatkan keterampilan pencari kerja di bidang pariwisata, meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat miskin, meningkatkan serapan tenaga kerja local dan meningkatkan pemuda yang mandiri dan kreatif. Melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja di bidang pariwisata dilakukan pembekalan sektor kepariwisataan terhadap Sumber Daya Manusia Peserta Pembekalan sektor Kepariwisataaan.

Dari tabel Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pemerataan dan pendapatan Masyarakat dengan indikator sasaran ketiga yaitu Indeks Gini dapat diketahui bahwa capaian sasaran tahun 2025 dari target 0,241 terealisasi sesuai target yang diharapkan Dimana Indeks Gini Kabupaten Belitung Tahun 2025 sebesar 0,205 atau 114,94% dari target kinerja.

Nilai Rasio Gini Kabupaten Belitung tahun 2025 berada di angka 0,205. Angka tersebut menunjukkan pengeluaran penduduk Kabupaten Belitung pada tahun 2025 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah karena Rasio Gini atau Indeks Gini merupakan suatu indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada suatu daerah. Semakin tinggi atau besar Rasio Gini, semakin tinggi pula tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya tidak merata) dan sebaliknya jika semakin kecil Rasion Gini semakin rendah tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya semakin merata).

Distribusi pendapatan merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu daerah. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu daerah seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Rasio Gini Kabupaten Belitung berfluktuasi dari 0,195 pada tahun 2021 naik menjadi 0,237 tahun 2022, kemudian meningkat hingga mencapai angka 0,253 pada tahun 2023 dan turun menjadi 0,248 pada tahun 2024. Pada tahun 2025 menurun menjadi 0,205.

Sementara itu, guna terus menekan angka capaian rasio gini, Pemerintah Kabupaten Belitung berupaya memperkuat usaha mikro. Karena UKM menjadi pilar penting dalam membangun perekonomian masyarakat. Sejumlah program seperti pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) dan pengembangan UMKM dilakukan untuk mencapai hal tersebut.

Pemerintah Kabupaten Belitung juga berupaya menekan angka capaian indeks gini melalui pemberian bantuan kepada masyarakat dari segi pengeluaran seperti dalam sektor pendidikan, pemberian beasiswa Pendidikan dan program beasiswa simpor, kemudian ada bantuan-bantuan sosial dan sejenisnya. Dan menjamin akses-akses barang kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Ketimpangan ekonomi pada dimensi distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Fenomena ini telah menjadi perhatian publik, sehingga upaya evaluasi yang sangat mendesak dilakukan. Dari hasil evaluasi diharapkan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya juga akan membawa konsekuensi berkurangnya tingkat ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat sejalan dengan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Apabila ketimpangan ini dibiarkan semakin melebar maka akan semakin mendistorsi hasil pembangunan.

Oleh karena itu upaya mengetahui besaran ketimpangan pengeluaran antar golongan penduduk maupun secara spasial perlu dilakukan. Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini ernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Data Indeks gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung dan Nasional tahun 2023 sampai tahun 2025 sebagai berikut:

Sumber: Website bps.goo.id, 2026



Tabel 2.83.: Tabel Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2025

Provinsi/Kab/Kota	Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota		
	2023	2024	2025
KEP. BANGKA BELITUNG	0,245	0,235	0,214
Belitung	0,253	0,248	0,205
Nasional	0,388	0,381	0,363

Sumber : Website bps. Go.id, 2026

Berdasarkan data Indeks Gini Kabupaten Belitung untuk tahun 2023 hingga 2025, terlihat adanya tren fluktuasi ketimpangan pendapatan selama lima tahun berturut-turut. Indeks Gini Kabupaten Belitung pada tahun 2023 berada di angka 0,253 dan mengalami kontraksi di tahun 2022 menjadi 0,248, kemudian di tahun 2025 kesenjangan pendapatan di kalangan masyarakat Kabupaten Belitung menurun dengan angka 0,205 yang berarti adanya perbaikan tingkat kesenjangan pendapatan tersebut.

Capaian ketimpangan pendapatan di Kabupaten Belitung ini terlihat berada di bawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2025. Namun pada tahun 2022 hingga 2024, ketimpangan pendapatan di Kabupaten, yang mengartikan tingkat kesenjangan pendapatan di Kabupaten Belitung masih berada dibaaawah kesenjangan pendapatan rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau Indeks Gini di Kabupaten Belitung berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Dengan Indeks Gini sebesar 0,205, Kabupaten Belitung masuk dalam kategori pemerataan pengeluaran yang relatif tinggi antar penduduk atau kesenjangan pendapatan antar penduduk sangat rendah bila dibandingkan dengan provinsi dan nasional. Indeks Gini yang menurun menunjukkan pendapatan antar kelompok masyarakat semakin merata.

Struktur ekonomi Kabupaten Belitung yang mempengaruhi nilai gini ratio adalah Sektor Agraris, dimana Lebih dari 27,10 persen perekonomian didukung oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Bahwa ketimpangan di wilayah agraris lebih kecil dibandingkan dengan wilayah industri karena rendahnya level penghasilan yang diterima oleh individu di wilayah agraris tersebut. Adapun tingkat ketimpangan mengalami peningkatan pada wilayah dengan struktur perekonomian yang bercorak industri.

Berdasarkan Perkembangan rasio gini Kabupaten Belitung cenderung fluktuatif, maka upaya yang dilakukan antara lain

- Perlu adanya upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian untuk mengejar ketertinggalan dari sektor lainnya;
- Perlu adanya upaya untuk mendorong transfer surplus tenaga kerja di sektor pertanian ke sektor ekonomi kreatif dengan mengadakan pelatihan maupun kursus keterampilan termasuk penguatan pangsa pasar;
- Hampir separuh dari tenaga kerja yang ada berlatar belakang tingkat pendidikan menengah ke bawah. Oleh karena itu, perlu dibuat program untuk menjaga tingkat APM (Angka Partisipasi Murni) agar tidak turun dan meningkatkan target APM untuk level Sekolah Menengah;

Dalam jangka pendek, intervensi terhadap kelompok pengeluaran terbawah dapat dilakukan dengan melanjutkan program raskin maupun bantuan tunai. Namun demikian kebijakan ini perlu selalu dimonitor dan dievaluasi mengingat dalam jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan dan inefisiensi anggaran; Perlu dibuatkan program pengelolaan ekonomi (pariwisata) berbasis komunitas dengan mengedepankan modal sosial (kultur sosial). Program tersebut harus mengutamakan keterlibatan dari kelompok masyarakat.

TUJUAN 2 : Meningkatnya daya saing ekonomi sektor unggulan dan potensial

Capaian kinerja tujuan “Meningkatnya daya saing ekonomi sektor unggulan dan potensial” diukur melalui pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi. Capaian kinerja tujuan dengan rincian pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.84.: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal2025		Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target Akhir RPJMD 2030
			RPJMD	Target				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	1,84	2,11	4,06	192,42	SB	6,46

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja tujuan melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMDD. Target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Belitung tahun 2025 adalah 2,11 dan terealisasi sebesar 4,06 dengan capaian kinerja sebesar 192,42% dengan kategori SANGAT BERHASIL.

Kemampuan ekonomi suatu daerah memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi untuk berinvestasi di daerah tersebut. Investasi yang masuk tentunya akan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi peningkatan daya saing daerah. Salah satu tolok ukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Laju Pertumbuhan Ekonomi dihitung berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu.

Penyusunan PDRB menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi, pada Laporan ini, menggunakan PDRB dari sisi lapangan usaha. Rendahnya ekonomi maka pendapatan akan menurun drastis.

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Belitung tahun 2025 ditopang oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Industri Pengolahan. Kedua kategori lapangan usaha ini memberikan kontribusi masing-masing sebesar 28,01 persen dan 12,68 persen.

PDRB ADHB Kabupaten Belitung tahun 2025 adalah 15.243,01 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang nilainya 14.124,70 miliar rupiah. Demikian juga dengan PDRB ADHK juga mengalami peningkatan dari 7.638,90 miliar rupiah di tahun 2024, menjadi 7.948,69 miliar rupiah di tahun 2025.

Secara detail perkembangan PDRB Kabupaten Belitung selama kurun waktu 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.85.: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung 2023 – 2025, (milyar rupiah) ADHK

LAPANGAN USAHA	2023	2024*	2025**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 917,39	1 989,95	2 063,29
Pertambangan dan Penggalian	503,81	495,33	556,21
Industri Pengolahan	873,94	852,74	869,90
Pengadaan Listrik dan Gas	10,38	10,92	11,20
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,28	2,37	2,44
Konstruksi	908,50	889,29	881,99
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	815,16	809,68	854,20
Transportasi dan Pergudangan	517,22	513,16	528,83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	288,37	300,84	325,06
Informasi dan Komunikasi	388,69	427,72	468,08
Jasa Keuangan dan Asuransi	189,47	190,08	193,77
Real Estat	244,05	255,04	264,69



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2025

Jasa Perusahaan	24,62	26,93	28,79
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	442,99	478,02	477,56
Jasa Pendidikan	146,22	162,05	172,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	167,08	169,64	179,04
Jasa Lainnya	60,18	65,13	71,41
Produk Domestik Bruto	7 500,36	7 638,90	7 948,69

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2023 – 2025 PDRB Kabupaten Belitung menunjukkan kecenderungan meningkat. Dilihat dari sisi lapangan usaha, lapangan usaha yang paling banyak berkontribusi adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pada tahun 2025 kontribusinya sebesar Rp 2.063,26 miliar atau sebesar 28,01%. Lapangan usaha yang kedua adalah industri pengolahan sebesar 12,68%, kemudian konstruksi sebesar 10,84%, dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 10,72%. Berikut ditampilkan distribusi persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha kurun waktu 2023 – 2025 :

Tabel 2.86.: Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung 2023 – 2025, ADHB

LAPANGAN USAHA	2023	2024*	2025**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,46	27,15	28,01
Pertambangan dan Penggalian	4,92	4,86	5,42
Industri Pengolahan	12,99	12,57	12,68
Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,14	0,14
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03
Konstruksi	12,15	11,70	10,48
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,61	10,33	10,72
Transportasi dan Pergudangan	8,26	8,12	7,67
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,13	4,23	4,29
Informasi dan Komunikasi	3,52	3,71	3,71
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,46	2,38	2,32
Real Estat	3,06	3,07	2,97
Jasa Perusahaan	0,35	0,36	0,36
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,17	6,46	5,95
Jasa Pendidikan	1,98	2,12	2,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,92	1,89	1,87
Jasa Lainnya	0,83	0,88	0,91

Catatan : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2026

Dapat diuraikan bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terjadi peningkatan kontribusi beberapa lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Belitung dan beberapa lapangan usaha lain mulai berkurang. Lapangan usaha yang menunjukkan penurunan antara lain pertambangan dan penggalian, konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Keuangan dan Asuransi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial .

Hal ini mengindikasikan bahwa mulai terjadi pergeseran kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Belitung, dari ketergantungan terhadap alam menuju masyarakat yang mengandalkan jasa. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mempersiapkan SDMnya dan membekali masyarakat dengan keahlian.

Pada tahun 2025 LPE Kabupaten Belitung sebesar 4,06%, meningkat jika dibandingkan LPE tahun 2024 sebesar 1,84%. Perlambatan LPE ini tentunya dipengaruhi oleh laju pertumbuhan per lapangan usaha. Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.87.: Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2023–2025



LAPANGAN USAHA	2023	2024*	2025**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,77	3,78	3,69
Pertambangan dan Penggalian	-0,04	-1,68	12,29
Industri Pengolahan	4,91	-2,43	2,01
Pengadaan Listrik dan Gas	2,52	5,20	2,60
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,77	3,84	2,69
Konstruksi	9,19	-2,11	-0,82
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,78	-0,67	5,50
Transportasi dan Pergudangan	10,51	-0,78	3,05
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,23	4,32	8,05
Informasi dan Komunikasi	13,97	10,04	9,44
Jasa Keuangan dan Asuransi	15,28	0,32	1,94
Real Estat	4,25	4,51	3,78
Jasa Perusahaan	8,99	9,37	6,93
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,85	7,91	-0,10
Jasa Pendidikan	11,04	10,83	6,28
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,19	1,53	5,54
Jasa Lainnya	11,35	8,23	9,63
Produk Domestik Bruto	5,74	1,85	4,06

Catatan : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber : Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2026

Pada tahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 1,85%.

Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi menurut Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu tiga tahun terakhir

Tabel 2.88.: Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten di Prov. Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2025

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN		
		2023	2024*	2025**
1	Bangka	4,44	-0,44	4,96
2	Belitung	5,75	1,85	4,06
3	Bangka Barat	2,50	5,47	1,72
4	Bangka Tengah	5,16	-0,34	6,06
5	Bangka Selatan	3,69	0,90	3,83
6	Belitung Timur	4,72	-0,03	4,30
7	Pangkalpinang	5,32	-2,30	4,54
Provinsi Bangka Belitung		3,32	4,40	4,09

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2026

Dari deskripsi di atas dapat tergambar bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung Tahun 2025 mengalami peningkatan.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi melalui langkah-langkah dan program-program strategis sebagai upaya pencapaian tujuan sesuai dengan RPD dan RPJMD. Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini sebagai berikut:



1. Foto Pelaksanaan Pemberian bantuan Sarana dan Prasarana Penangkapan ikan



2. Foto Pelaksanaan Pemberian bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan



3. Foto Pelaksanaan Penguatan daya saing sektor Perikanan



4. Foto Pelaksanaan Bimtek dan Pembinaan pelaku usaha perikanan





5. Foto Pelaksanaan Bazar Ikan



6. Foto Pelaksanaan operasional kapal perikanan dalam rangka pengendalian SDP



7. Pendampingan Penanaman Padi di Desa Cerucuk



8. Distribusi Bantuan Sapi pada Kelompok Tani Sumber Jaya Makmur Desa Bantan Kecamatan Membalong dan penyaluran bantuan vaksin sebanyak 1.175 dosis dari Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian



9. Pembagian Bibit Lada Bersertifikat ke Gapoktan Maju Bersama Kecamatan Membalong



10. Pelaksanaan CPCL Padi Gogo di Kecamatan Membalong





Adapun faktor pendukung laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

- ❖ Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan sector andalan Kabupaten Belitung dalam menunjang pertumbuhan ekonomi;
- ❖ Iklim usaha yang kondusif bagi usaha perdagangan dan industri yang sudah ada maupun bagi investasi baru, sector industry dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui nilai tambah yang dihasilkan;
- ❖ Meningkatnya pangsa sektor industri pengolahan di pasar domestik;
- ❖ Meningkatnya penerapan standarisasi produk industri sebagai penguat daya saing produk industri;
- ❖ Penetapan Kabupaten Belitung sebagai salah satu dari 10 Destinasi Wisata Nasional menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor terutama yang bergerak di sektor industri pariwisata;
- ❖ Stabilitas sosial, politik dan keamanan yang terjaga;
- ❖ Bonus demografi yang dimiliki Kabupaten Belitung.

Sedangkan faktor penghambat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

- ✕ Tingkat inflasi yang masih tinggi;
- ✕ Rendahnya daya tarik investasi dan kurangnya kemandirian fisKal yang mempengaruhi pendapatan yang mampu diperoleh daerah untuk menjalankan perekonomian, termasuk penyediaan barang publik;
- ✕ Kualitas SDM yang belum memadai, rendahnya angka partisipasi murni dan lama sekolah mempengaruhi kualitas SDM yang akhirnya mempengaruhi produktivitas.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran di masa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut :

- ⌘ Upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, dan industri;
- ⌘ perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan;
- ⌘ Mendorong peningkatan investasi yang sesuai dengan potensi daerah dengan memberi kemudahan-kemudahan seperti proses perijinan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- ⌘ Mendorong pengembangan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memberi kesempatan sektor swasta untuk berinovasi sehingga memberikan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah;
- ⌘ Meningkatkan kuitas SDM dengan program-program pelatihan.

Tabel 2.89.: Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 2

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 2 Meningkatnya daya saing ekonomi sektor unggulan dan potensial	Strategi Misi 2 Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing Berbasis Sektor Unggul dan Potensial	1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif 2. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kesejahteraan pelaku sektor unggulan 3. Pengembangan destinasi, promosi, pelestarian budaya, penguatan sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur

SASARAN 5 : Meningkatnya Investasi Daerah

Investasi sangat dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, maka perlu perbaikan kecepatan pelayanan dan kemudahan berusaha. Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Investasi Daerah” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Nilai Investasi dengan target Rp 1.200.000.000.000,00. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran meningkatnya investasi Kabupaten Belitung Tahun 2025.



Tabel 2.90. : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Investasi Daerah (juta rupiah) Tahun 2025

No	Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target	2025 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2030 Target
1	Nilai Investasi (juta rupiah)	Skala	1.116.727,00	1.200.000,00	730.000	60,83	C	2.200.000

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi indikator sasaran meningkatnya investasi yaitu nilai investasi tahun 2025 sebesar Rp 1.200.000.000.000,00 dengan capaian sebesar 60,83 % atau berkategori CUKUP.

Rendahnya nilai investasi daerah menjadi salah satu tantangan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung. Kondisi ini ditandai oleh terbatasnya realisasi penanaman modal, minimnya diversifikasi sektor investasi, serta belum optimalnya kemudahan berusaha (*ease of doing business*) dan ekosistem investasi yang kompetitif. Padahal, investasi merupakan pendorong penting bagi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Sejalan dengan Kabupaten Belitung, pemerintah provinsi mendorong penguatan infrastruktur pendukung investasi, promosi potensi unggulan daerah (termasuk tambang, pariwisata, dan perikanan), serta harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Di samping itu, penguatan kapasitas daerah dalam pelayanan perizinan dan pemberian insentif menjadi bagian penting dari strategi peningkatan investasi.

Berikut tersaji tabel perbandingan rekapitulasi investasi Tahun 2025 dan Tahun 2024

Tabel 2.91. Perbandingan Rekapitulasi Investasi Tahun 2025
Dan Tahun 2024

No	Jenis Penanaman Modal	Nilai Investasi Tahun 2025 (Rp)	Nilai Investasi Tahun 2024 (Rp)
1	Penanaman Modal Asing (PMA)	412.763.720.540	68.004.736.430
2	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	316.998.475.725	1.048.722.376.075
	JUMLAH	729.762.196.265	1.116.727.112.505

Sumber Data : Bidang Wasdal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian 2026

Tingginya dukungan pemerintah daerah dalam menjaring investor yang menanamkan usahanya di Kabupaten Belitung, hal ini dibuktikan dengan berjalannya program KERISI (Kios, Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Terintegrasi) yang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung untuk mempermudah pelayanan informasi perizinan investasi menyasar sampai dengan seluruh desa di Kabupaten Belitung.



KERISI (Kios, Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Terintegrasi) yang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung

Faktor penghambat :

- ✕ Belum tersebarnya investasi ke seluruh Kabupaten Belitung;
- ✕ Sektor/lapangan usaha yang diminati investor untuk menanamkan usahanya banyak berada pada sektor tersier;



- ✘ Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan-perubahan regulasi, baik regulasi terkait langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan maupun OPD Teknis yang terkait perizinan dan non perizinan. Hal tersebut mengakibatkan perizinan dan non perizinan kurang efektif, karena regulasi seperti SOP, SPP, SPM yang menjadi dasar pemberian pelayanan lintas OPD Teknis belum ada.;
 - ✘ Belum optimalnya perencanaan penanaman modal;
 - ✘ Belum optimalnya pelaksanaan kemitraan antara investor besar dengan pelaku usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil.
 - ✘ Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara online (*Online Single Submission*) terkendala oleh pemenuhan komitmen dari OPD Teknis. Pemenuhan komitmen OSS sebagian besar belum dilakukan secara online.
 - ✘ Masih rendahnya kesadaran investor untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut:
- ⌘ Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal dengan melibatkan seluruh *stake holder*
 - ⌘ Memberikan kemudahan berinvestasi di kabupaten belitung dengan meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan bagi calon investor (*Ease of Doing Business*)
 - ⌘ Meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi yang lebih efisien dan efektif guna mendorong pesebaran investasi di Kabupaten dengan mempertimbangkan karakter dan kondisi geografis daerah
 - ⌘ Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penanganan permasalahan investasi bagi perusahaan PMA/PMD.
 - ⌘ Meningkatkan promosi investasi daerah;

SASARAN 6 : Meningkatnya pertumbuhan sektor prima

Ketergantungan ekonomi Kabupaten Belitung pada sektor-sektor tertentu seperti pariwisata, pertambangan, dan perikanan tangkap menjadikan perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi pasar, krisis global, dan tekanan lingkungan. Diversifikasi ekonomi yang belum berkembang optimal menjadi hambatan dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah lokal, dan menciptakan struktur ekonomi yang tangguh dan inklusif. Sementara potensi lokal seperti pertanian organik, ekonomi kreatif, pengolahan hasil laut, dan produk berbasis kearifan lokal belum tergarap secara maksimal. Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pertumbuhan sektor prima” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Pertumbuhan sektor prima (Pertanian, Perkebunan, Perikanan) dengan target 3,80%. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor prima Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 2.92 : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor prima Tahun 2025

No	Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target	2025 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2030 Target
1	Pertumbuhan sektor prima (Pertanian, Perkebunan, Perikanan)	Persentase	3,78	3,80	3,78	99,47	SB	4,41

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi indikator sasaran Pertumbuhan sektor prima (Pertanian, Perkebunan, Perikanan) yaitu nilai investasi tahun 2025 sebesar 3,80% dengan realisasi 3,78 % capaian sebesar 99,47 % atau berkategori SANGAT BERHASIL.

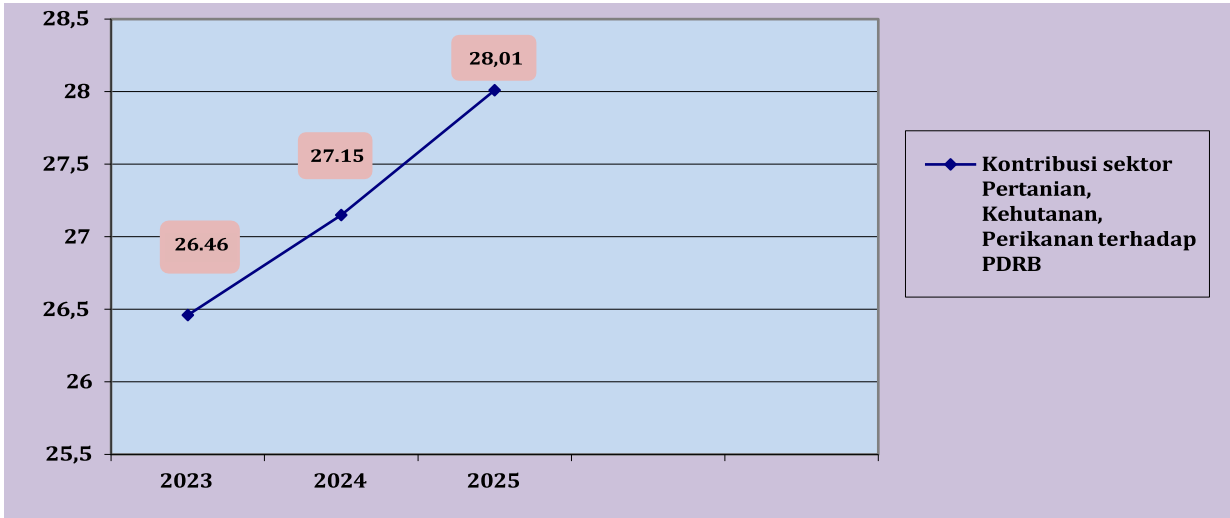
Pemerintah daerah telah memberikan dukungan spasial yang sangat relevan dengan agenda diversifikasi ekonomi. Beberapa kawasan budidaya telah ditetapkan untuk mendukung pengembangan pertanian, perikanan, agrowisata, dan industri rumah tangga. Pengembangan kawasan wisata terpadu, pelabuhan perikanan, dan sentra produksi pangan menjadi bagian dari strategi struktur ruang yang mendukung transformasi ekonomi daerah.



Dengan demikian, kurangnya diversifikasi sektor ekonomi menjadi isu strategis yang perlu segera dijawab oleh RPJMD Kabupaten Belitung 2025–2029. Pembangunan ekonomi tidak cukup hanya bertumpu pada sektor unggulan lama, tetapi perlu mendorong tumbuhnya sektor-sektor baru berbasis potensi lokal, teknologi, dan keberlanjutan. Langkah ini penting untuk meningkatkan resiliensi ekonomi daerah, memperluas basis penerimaan daerah, serta menciptakan peluang kerja yang merata dan berkeadilan.

Berikut kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung, selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Grafik 2.14. : Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung Tahun 2023 – 2025



Sumber: BPS Kabupaten Belitung 2026

Sektor Pertanian memiliki peran yang penting terhadap kontribusi PDRB di Kabupaten Belitung, karena merupakan kontributor terbesar. Selama kurun waktu 2023 – 2025, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memperlihatkan kecenderungan mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 27,15%, pada tahun 2025 meningkat menjadi 28,01%. Mengingat sektor ini merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kabupaten Belitung, maka perlu strategi dan kebijakan khusus untuk meningkatkan kinerjanya.

Produksi tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis tanaman selama kurun waktu 4 (empat) tahun, tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.93. : Produksi tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis tanaman di Kabupaten Belitung (kuintal) Tahun 2024–2025

JENIS TANAMAN	2024	2025
Bawang Daun	1.012,65	1.289,37
Bawang Merah	30,00	8,70
Bayam	3.416,34	3.866,16
Buncis	1.879,40	1.216,10
Cabai Keriting	4.509,86	4.632,10
Cabai Rawit	7.327,45	5.198,98
Kacang Panjang	4.341,50	4.209,33
Kangkung	5.360,31	5.573,12
Ketimun	5.561,05	4.948,10
Petsai	4.175,99	4.609,50
Terung	6.057,92	4.841,06
Tomat	1.725,10	2.113,50

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim menurut jenis tanaman tahun 2025 tertinggi adalah kangkung yaitu 5.573,12 kuintal, dan terendah bawang merah yaitu 8,70 kuintal.

Produksi tanaman Biofarmaka Menurut Jenis tanaman di Kabupaten Belitung (kg) selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, tersaji seperti tabel berikut :

Tabel 2.94. : Produksi tanaman Biofarmaka Menurut Jenis tanaman (kg) tahun 2023–2025

JenisTanaman	2023	2024	2025
Jahe	101.260	35.278	13.195
Kencur	45.606	17.398	7.533
Kunyit	67.337	37.664	17.308
Laos/Lengkuas	236.158	38.300	19.804

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Produksi tanaman Biofarmaka Menurut Jenis tanaman di kabupaten Belitung tahun 2025 tertinggi pada produksi laos/ lengkuas yaitu 19.804 kg dan produksi terendah pada kencur yaitu 7.533 kg.

Selain meningkatkan produksi pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan, perlu juga meningkatkan produksi perkebunan. Adapun produksi perkebunan kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir 2024-2025 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.95. : Produksi Perkebunan Jenis tanaman (ton) Tahun 2024 dan 2025

JENIS TANAMAN	2024	2025
Kelapa Sawit	13.946,37	14.899,30
Kelapa	542,50	447,21
Karet	1.984,97	1.511,81
Kopi	1.050,00	1.230,00
Kakao	-	-
Tebu	-	-
Lada	4.321,86	3.831,82
Aren	687,20	688,75

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa Produksi Perkebunan Jenis tanaman kelapa sawit paling tinggi diantara komoditas lainnya dan mengalami peningkatan dari 13.946,37 ton di tahun 2024 menjadi 14.899,30 ton ditahun 2025; Produksi Perkebunan terendah ada pada produksi perkebunan kelapa yaitu hanya sebesar 447,21 ton di tahun 2025.

Tabel 2.96. : Produksi Daging Ternak Besar Jenis ternak (kg) Tahun 2024 dan 2025

JENIS TERNAK	2024	2025
Sapi	395.365	443.235
Kambing	20.179	21.732
Babi	56.846	55.327

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa Produksi daging ternak besar (kg) paling tinggi tahun 2025 adalah Daging Sapi sebesar 443.235 kg.



Tabel 2.97. : Produksi Unggas menurut Jenis Unggas (kg) Tahun 2024 dan 2025

JENIS TERNAK	2024	2025
Ayam Kampung	202.811	244.994
Ayam petelur	115.640	91.575
Ayam Pedaging	4.917.859	4.432.355
Itik/Itik Manila	12.072	10.705

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa Produksi unggas menurut jenis unggas r (kg) paling tinggi tahun 2025 adalah Ayam Pedaging sebesar 4.432.355. kg.

Tabel 2.98. : Jumlah Produksi dan Barang Keluar Perikanan Tangkap dan Budidaya Menurut Komoditas di Kabupaten Belitung (ton/bulan) Tahun 2025

JENIS TERNAK	Jumlah Produksi	Jumlah Barang keluar
Tuna/ Cakalang/ Tongkol		108.354,20
Kakap		253.144,00
Cucut		1.750,00
Bawal	0,41	57.619,90
Teri		170.195,00
Lemuru		223.554,00
Tenggiri		687.738,50
Lele	89,89	
Patin	26,69	
Nila	9,10	
Kerapu	7,93	
Gurami	0,09	
Udang	316,31	722.928,00
Rajungan dan Kepiting		15.090,00
Kekerangan		31.021,00
Cumi-cumi sotong, dan Gurita		2.004.760,80
Kuwe		3.010,00
Baronang		200,00
Ekor kuning		903.867,40
Selar		41.300,00
Manyung		367.865,70
Pari		225.154,40
Lainnya		1.172.774,30

Sumber : BPS Kab. Belitung - Kabupaten Belitung Dalam Angka 2026

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa Produksi perikanan tangkap dan budidaya dengan komoditas paling tinggi (ton/bulan) tahun 2025 adalah komoditas udang sebesar 316,31 ton/bulan dan Jumlah barang keluar paling tinggi pada komoditas Cumi-cumi, Sotong dan Gurita sebesar 2.004.760,80.

Upaya pemerintah Kabupaten Belitung dalam meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani dalam bentuk persentase sebagai indikator kesejahteraan petani. Nilai tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Nilai Tukar Petani (NTP) juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian



dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Dalam penentuan Nilai Tukar Petani (NTP) dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: luas lahan, harga jual, harga pupuk dan jumlah tanggungan keluarga.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu:

1. Dilaksanakannya kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang meliputi sarana produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan Penerapan Pertanian Terpadu;
2. Dilaksanakannya kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme kewenangan kabupaten/kota yang meliputi pembibitan tanaman secara kultur jaringan;
3. Dilaksanakannya kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota yang meliputi pengelolaan ternak dan peningkatan mutu bibit ternak melalui Inseminasi Buatan;
4. Dilaksanakannya kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain yang meliputi saprodi ternak unggas baik ayam elba maupun ayam pedaging;
5. Dilaksanakannya kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian yang meliputi pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B;
6. Dilaksanakannya kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian yang meliputi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pendukung pertanian antara lain: jaringan usaha tani, jalan usaha tani, prasarana lainnya (Bank Pakan, Puskesmas, jalan produksi);
7. Dilaksanakannya kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi pengobatan, vaksinasi, surveilans, lalu lintas ternak di Kabupaten Belitung;
8. Dilaksanakannya kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi operasional puskesmas;
9. Dilaksanakannya kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang meliputi pelatihan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
10. Dilaksanakannya kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian guna mendampingi petani dalam usaha budidaya pertanian secara terpadu.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Tahun 2025 atau untuk memperbaiki kinerja tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung akan melakukan:

1. Pembinaan, pendampingan kepada petani hortikultura, khususnya timun dan nanas serta petani tanaman pangan seperti padi dan ubi kayu dalam mengelola usaha taninya agar dapat meningkatkan produksi yang nantinya akan mempercepat peningkatan NTP dengan program bantuan input usaha tani dibarengi dengan diseminasi teknologi;
2. Sinergitas lebih diperkuat lagi antara pemerintah dan petani untuk memelihara sawah dan bisa meningkatkan produktivitasnya dari tahun ke tahun;
3. Meningkatkan produksi sektor pertanian sekaligus menjaga kestabilan harga jual produk pertanian.

Sebagaimana yang kita ketahui adalah Pembangunan ekonomi adalah suatu proses peningkatan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk dan perubahan dalam struktur ekonomi serta pemerataan pendapatan di suatu negara, karena dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan perubahan struktur ekonomi. Jika dibandingkan perekonomian negara maju dan negara berkembang, biasanya negara-negara maju lebih mengutamakan untuk mengurangi pengangguran karena sektor industri dan jasa berperan besar dalam peningkatan pendapatan nasional dan penyediaan kesempatan kerja, sedangkan negara-negara berkembang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berupa perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Salah satu subsektor pertanian penyumbang PDRB adalah perikanan. Secara teoritis, meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan asumsi telah terjadi peningkatan PDRB.

Dengan demikian juga dapat diartikan kalau semakin tinggi nilai persentase PDRB Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung dapat diartikan bahwa semakin tinggi juga pengaruh sektor perikanan dalam meningkatkan ekonomi Kabupaten Belitung yang didalamnya diperoleh banyak kesempatan bekerja bagi masyarakat dalam hal ini



nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku sektor perikanan lainnya. Kesempatan kerja yang tinggi ini akan meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya perekonomian pelaku sektor perikanan juga semakin baik.

Upaya upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu:

1. Meningkatkan Produksi sektor perikanan baik produksi perikanan tangkap, Produksi perikanan budidaya dan produksi pengolahan hasil perikanan;
2. Meningkatkan Ketersediaan sarana dan prasarana sektor perikanan yang memadai;
3. Kemudahan dalam perizinan dan persediaan bahan baku operasional bagi pelaku sector perikanan;
4. Meningkatkan SDM sektor perikanan yang berkualitas;
5. Melakukan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang baik.

Melihat dari realisasi tahun 2025 capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung/disebabkan antara lain oleh:

1. Produksi perikanan tangkap, Budidaya dan Pengolahan hasil perikanan yang masih relative tinggi;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana sektor perikanan yang memadai;
3. Kemudahan dalam perizinan dan persediaan bahan baku operasional;
4. SDM sektor perikanan yang berkualitas;
5. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan yang baik.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ini sektor perikanan Kabupaten Belitung akan melakukan

1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap;
2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya;
3. Peningkatan Produksi Pengolahan hasil Perikanan;
4. Penyediaan Sarana dan prasarana sektor perikanan;
5. peningkatan SDM sektor Perikanan;
6. Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan sektor Perikanan;
7. Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan SDKP

Upaya upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2025 untuk mendukung arah kebijakan meningkatkan produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan antara lain :

- ❖ Ketersediaan BBM, kebutuhan pokok untuk melaut dan keperluan lainnya yang mudah diperoleh nelayan sehingga operasional melaut dapat terpenuhi dengan baik;
- ❖ Beberapa kelompok nelayan mendapatkan bantuan dari Pemkab Belitung berupa Kapal penangkap ikan, alat bantu dan alat penangkap ikan untuk memudahkan nelayan dalam menangkap ikan;
- ❖ Penggunaan teknologi penangkapan ikan yang sudah diaplikasikan oleh beberapa nelayan seperti penggunaan GPS dan Fish Finder dalam aktivitas penangkapan ikan;
- ❖ Pembinaan dan penyuluhan yang dilaksanakan rutin kepada nelayan dan kelompok usaha bersama terkait penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, serta kesadaran untuk melaporkan hasil produksi perikanan tangkap.

SASARAN 7

: Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pariwisata serta Budaya Daerah

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Belitung yang telah diakui secara nasional, bahkan ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus 300 (KEK) Tanjung Kelayang dan masuk dalam jaringan geopark UNESCO. Namun demikian, pengembangan sektor ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum meratanya infrastruktur pendukung, rendahnya kapasitas SDM pariwisata, kurangnya promosi terpadu, serta belum



optimalnya integrasi dengan sektor lain seperti UMKM, pertanian, dan budaya lokal. Hal ini menyebabkan potensi pariwisata yang besar belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi yang signifikan dan inklusif bagi masyarakat. Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pariwisata serta Budaya Daerah” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Indeks Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kota dengan target 3,8. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 2.99. : Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pariwisata serta Budaya Daerah Tahun 2025

No	Indikator kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	Target	2025 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Akhir RPJMD 2030 Target
1	Indeks Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kota	Nilai	3,28	3,8	3,14	82,63	B	5,39

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target indikator sasaran Indeks Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kota tahun 2025 sebesar 3,8 dengan realisasi 3,14 capaian sebesar 82,63 atau berkategori BERHASIL.

Sektor pariwisata menjadi salah satu pendorong utama transformasi ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah pusat menekankan pentingnya pembangunan destinasi pariwisata unggulan, penguatan konektivitas antar destinasi, serta pengembangan pariwisata berkualitas tinggi berbasis alam, budaya, dan digital. Selaras dengan itu, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memprioritaskan pengembangan pariwisata sebagai pengganti sektor pertambangan, dengan strategi peningkatan kualitas destinasi, promosi, dan ekosistem usaha pariwisata.

Pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi jangka panjang, dengan visi mewujudkan Belitung sebagai pusat maritim barat yang berdaya saing. Pembangunan pariwisata diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat identitas budaya lokal. Pentingnya mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan secara lingkungan, sosial, dan budaya, dengan menghindari kerusakan ekosistem akibat pembangunan yang tidak terkendali.

Pemerintah Daerah juga mendorong agar pariwisata dirancang untuk memperkuat nilai-nilai lokal dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat desa dan kelompok rentan. Kabupaten Belitung mendukung pengembangan kawasan pariwisata strategis, termasuk KEK Tanjung Kelayang, kawasan pantai, geopark, dan kawasan perdesaan wisata. Dokumen RTRW juga mengarahkan konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan pariwisata dengan infrastruktur pendukung, seperti pelabuhan, bandara, jalan kolektor, dan Kawasan permukiman. Integrasi spasial ini menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan destinasi dan kenyamanan pengunjung.

Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Belitung merupakan akibat dari belum kuatnya koordinasi lintas sektor dan dokumen perencanaan yang ada. Untuk itu diperlukan strategi penguatan tata kelola destinasi, peningkatan kapasitas SDM, integrasi pariwisata dengan sektor ekonomi lokal, serta pendekatan Pembangunan berbasis kelestarian lingkungan dan kearifan budaya. Dengan langkah tersebut, pariwisata dapat menjadi motor utama pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.



3.2.3 TUJUAN 3 : Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)

Capaian kinerja tujuan Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) diukur melalui pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.100.: Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2024	2025 Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Target Akhir RPJMD 2030
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	79,74 BB	80 (BB)	79,74 (BB) Nilai Tahun 2024	99,67	SB	85 (A)

Pada tahun 2025 Secara resmi belum mengeluarkan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung, sehingga yang dipergunakan adalah Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024.

Berikut Perkembangan dan pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2022 dan 2025.

Tabel 2.101.: Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Belitung Tahun 2022-2025

No	Tahun	Indeks Reformasi Birokrasi
1	2022	57,71 (CC)
2	2023	75,14 (BB)
3	2024	79,74 (BB)
4	2025	79,74 (BB) (Nilai Tahun 2024)

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sejak tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah melakukan penajaman evaluasi reformasi birokrasi dengan lebih mengukur indeks reformasi birokrasi dari sisi dampak kinerja dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif yang disebut dengan reformasi birokrasi tematik yang terdiri dari empat tema yaitu: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden (peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi).

Pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Upaya ini dilakukan melalui berbagai langkah perbaikan kelembagaan, penyederhanaan proses birokrasi, serta penguatan sistem manajemen kinerja aparatur. Dengan demikian, reformasi birokrasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas instansi pemerintah, serta mendorong terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi tersebut menunjukkan bahwa upaya pembenahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Belitung terus mengalami perkembangan yang positif. Hal ini tercermin dari berbagai langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah, antara lain melalui penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kualitas pelaporan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Evaluasi reformasi birokrasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari siklus pengelolaan reformasi birokrasi. Dalam Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah KabupatenBelitung telah menetapkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 50 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023-2024. Komitmen melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung ditunjukkan dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor : 188.45/001/VIII/2025 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025.



Berikut Kategori, Nilai angka dan Persepsi Indeks Reformasi Birokrasi :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Istimewa
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat Baik
4.	B	>60-70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi pada tahun 2025 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah. Namun demikian, hingga penyusunan laporan ini dilakukan, hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitong Tahun 2025 masih belum dirilis oleh Kementerian PANRB. Oleh karena itu, hasil evaluasi yang digunakan dalam analisis kinerja masih mengacu pada hasil evaluasi yang disampaikan oleh Kementerian PANRB untuk periode penilaian Tahun 2024. Berikut hasil evaluasi yang didasarkan pada hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB diuraikan sebagai berikut Tahun 2023-2024 :

Tabel 2.102.: Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Belitong Tahun 2023-2025 (Komponen dan Sub Komponen)

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Tahun 2023			Tahun 2024		
				Bobot	Skor	Skor Index	Bobot	Skor	Skor Index
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	1.88	1.88	3	2.21	2.21
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi PembangunanRB General	7	100	4.39	7	87	4.49
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	99.62	1.99			
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Capaian SistemKerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	0.8	3	4	2.4
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3.2	2.56	4	3.54	2.83
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3.5	1.5	1.5	3.5	0.5	0.5
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	63.52	2.54	4	64.68	2.59
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.5	1	0.5	2.5	1	0.5
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Digitalisasi Arsip	2.5	93.22	2.33	2.5	92.36	2.31



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2025

10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2.5	3	1.5	2.5	3	1.5
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Kualitas Kebijakan	2.5	0	0	2.5	0	0
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Reformasi Hukum	2.5	45.61	1.14	2.5	97.84	2.45
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor	2.5	2.12	1.06	2.5	2.62	1.31
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2.5	72.4	1.81	2.5	73.66	1.84
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Sistem Merit	4	252.5	2.46	4	252.5	2.46
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pelayanan Publik	1.5	3.89	1.17	2	4.02	1.61
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1.5	88.87	1.33	2	93.07	1.86
18	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	3.11	5.6	9	3.35	6.03
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	98	1.96	4	98.79	3.95
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	57.14	2.9	6	78.21	3.04
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Opini BPK	5	5	5	5	3	5
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	80.1	3.2	4	77.38	3.1
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks BerAkhlak	4	61.6	2.46	4	63.26	2.53
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Penilaian Integritas	10	76.61	7.66	10	76.55	7.66
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Kepuasan Masyarakat	8	89.33	7.15	8	89.71	7.18
26	RB General	Koefisien	Koefisien	10			10		
27	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	0.4	0.28	0.28	1	0.6	0.6
28	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	0.4	0.28	0.28	1	0.86	0.86



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Belitung Tahun 2025

29	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	0.4			1	0.61	0.61
30	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	0.4	0.4	0.4	1	0.69	0.69
31	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	0.4	0.27	0.27	1	0.5	0.5
32	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0.6	54.61	0.23			
33	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Output)	0.6					
34	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	0.6					
35	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0.6	100	0.42			
36	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	0.6					
37	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1.5	1.5	3	1.98	1.98
38	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1.61	1.61	3	1.53	1.53
39	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3			3	0.75	0.75
40	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2.8	2.8	3	2.87	2.87
41	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	2.46	2.46	3	0	0

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana level mikro melaksanakan reformasi birokrasi dalam Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, serta bersifat mandatory, Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Belitung melaksanakan 21 kegiatan utama dalam reformasi birokrasi general menetapkan 5 (lima) tema dalam reformasi birokrasi tematik Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), dan Pengendalian Inflasi. Serta Menyusun Rencana Aksi untuk 4 tema baru yang mendukung Visi Misi Presiden RB Berdampak untuk Kesejahteraan Rakyat yaitu, RB Mendorong Hilirisasi, RB



Mendukung Ketahanan Pangan Nasional, RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan.

Faktor Pendukung:

Tuntutan pelayanan prima dari segenap masyarakat menjadi pemicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar semakin adaptif dan lincah. Adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipilah secara tematik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih fokus.

Faktor Penghambat:

Kurangnya kesadaran dan komitmen bersama diantara seluruh elemen pemerintahan menjadi penghambat dalam rangka menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi, karena reformasi birokrasi merupakan tanggungjawab bersama segenap elemen pemerintahan. Beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu:

- Rencana aksi belum sepenuhnya relevan untuk mencapai target sasaran kegiatan utama dan belum menggambarkan intervensi terhadap permasalahan utama;
- Masih terdapat indicator output atas rencana aksi yang belum cukup menggambarkan sasaran dan targetnya; Secara umum capaian pelaksanaan kebijakan dengan 3(tiga) indikator nilainya belum baik yaitu Tingkat Maturitas SPIP, Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI, Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE, serta Tematik
- Pengendalian Inflasi untuk strategi pembangunan dan capaian indikator dampak yang belum maksimal.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang diperlukan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga pengampu untuk peningkatan nilai indeks indikator penilaian dalam RB General khususnya untuk indeks yang masih dinilai buruk. Karena secara umum, indeks indikator penilaian dalam RB General khususnya untuk indeks penilaian Pemerintah Kabupaten Belitung di Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. Perbaikan dalam strategi penyusunan kegiatan dalam rencana aksi juga perlu dilakukan agar relevan untuk mencapai target sasaran dalam kegiatan utama. Pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2025 melalui pelaksanaan program dan kegiatan terkait 21 kegiatan utama telah menghasilkan dan mendukung pencapaian kondisi yang cukup baik sebagaimana telah diuraikan. Dalam rangka mengetahui sejauh mana keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam melaksanakan reformasi birokrasi sesuai yang diamanatkan, perlu untuk melakukan evaluasi baik internal maupun eksternal baik dalam rb general maupun dalam rb tematik.

Dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025 – 2029, upaya pencapaian Tujuan 3 “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)”, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) strategi sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 2.103 Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 3

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 3 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)	Strategi Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih dan Bermartabat	1. Penguatan implementasi teknologi informasi digital dalam pengelolaan pemerintahan 2. Meningkatkan integritas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan 3. Penguatan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) manajemen ASN perangkat daerah 4. Penguatan tata kelola pendapatan asli daerah



SASARAN 8 : Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital

Capaian kinerja sasaran “Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital” merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2025 – 2029. Capaian kinerja tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.104.: Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2024	2025 Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target Akhir RPJMD 2030
1	Indeks Pemerintahan Digital	Nilai	n.a	1,80	n.a	n.a	n.a	2,20
2	Nilai SAKIP	Nilai	64,68	65,84(B)	65,49 (B)	99,47	Sangat Baik	71,64(BB)
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	74,7644	76,8121	70,4597	91,73	Sangat Baik	82,5071
4	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	n/a	4,1	4,06	99,02	Sangat Baik	4,35
5	Tingkat Maturitas SPIP	Angka	Level 3	Level 3(3,541)	Level 2 (2,449)	69,16	Cukup	Level 3 (3,546)

*

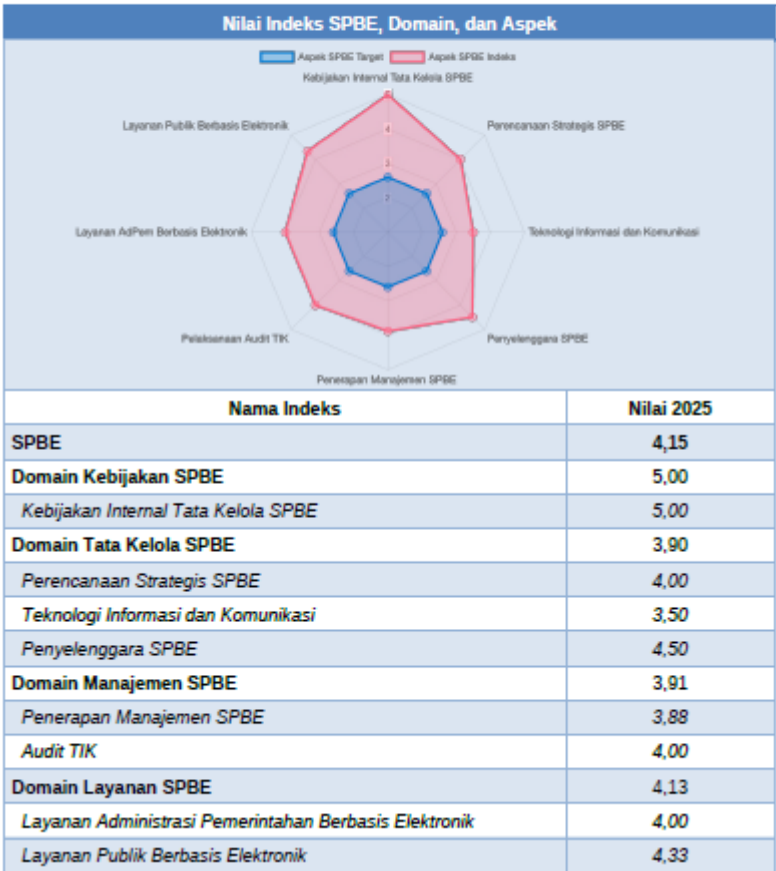
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa target indikator sasaran Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital yang pertama yaitu Indeks Pemerintahan Digital tahun 2025 sebesar 1,80 namun realisasi tahun 2025 masih menggunakan perhitungan Indeks SPBE. Dimana Indeks SPBE Kabupaten Belitung Tahun 2025 adalah 4,15. Sejalan dengan arah kebijakan nasional yang semakin dinamis, cakupan pemantauan ini akan bertransformasi dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdî). Perubahan ini menandakan pergeseran fokus dari sekadar digitalisasi proses bisnis menuju ekosistem digital yang lebih holistik dan berorientasi pada pengguna.

Gambar Hasil pemantauan Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025



INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. BELITUNG

4,15
(Sangat Baik)



Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Indeks SPBE Tahun 2025 Kemenpan RB

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), merupakan pilar penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Di Kabupaten Belitung, pelaksanaan SPBE masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum terintegrasinya sistem informasi lintas perangkat daerah, rendahnya kapasitas SDM aparatur dalam memanfaatkan teknologi, serta infrastruktur TIK yang belum merata. Hal ini menyebabkan proses layanan publik masih belum sepenuhnya digital dan berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Penguatan transformasi digital birokrasi menjadi salah satu agenda strategis nasional. Pemerintah pusat mendorong implementasi SPBE secara menyeluruh melalui integrasi data, interoperabilitas sistem, serta penyederhanaan layanan berbasis digital yang mudah diakses oleh masyarakat. Tujuannya adalah mendorong layanan publik yang adaptif, akuntabel, dan menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah kepulauan seperti Belitung.

Pemerintah daerah menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan berbasis digital untuk peningkatan kualitas layanan publik dan kinerja birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan SDM TIK, serta sinkronisasi platform digital untuk mempercepat pencapaian target reformasi birokrasi digital di seluruh wilayah provinsi. Transformasi tata Kelola pemerintahan digital termasuk dalam agenda pembaruan birokrasi daerah. Visi jangka panjang menekankan pelayanan publik yang adaptif terhadap teknologi, dengan dukungan infrastruktur digital, manajemen data daerah yang terintegrasi, dan penguatan pengawasan berbasis sistem informasi. Namun tantangan di lapangan adalah bagaimana memastikan implementasi SPBE berjalan merata di seluruh OPD dan menjangkau masyarakat secara luas.

Kelemahan dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Belitung menunjukkan masih perlunya integrasi antara infrastruktur, SDM, sistem informasi, dan tata kelola kelembagaan. Pemerintah daerah menanggapi hal ini melalui upaya penguatan kapasitas birokrasi digital, penyediaan infrastruktur TIK yang merata, serta pemanfaatan data dan teknologi untuk mendukung perencanaan dan pelayanan publik. Dengan SPBE yang terintegrasi dan inklusif, Kabupaten Belitung dapat bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.105 Realisasi Terintegrasi Sistem Informasi Tahun 2025

NO	SISTEM INFORMASI	SUB DOMAIN	STATUS	TERINTEGRA SI	OPD PENGAMPU
I	LAYANAN PUBLIK				
1	Layanan Cloud Kabupaten Belitung	https://drive.belitung.go.id	1	1	Diskominfo



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Belitung Tahun 2025

NO	SISTEM INFORMASI	SUB DOMAIN	STATUS	TERINTEGRA SI	OPD PENGAMPU
2	Portal Aplikasi Kabupaten Belitung	https://aplikasi.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
3	Media Center Kabupaten Belitung	https://mediacenter.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
4	Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat	https://sipmas.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
5	Belitung Saluran Aspirasi dan Pengaduan	https://besadu.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
6	Layanan pendaftaran online (Simino)	https://rsud-marsidijudono.belitung.go.id/	1	1	RSUD dr. H. Marsidi Judono
7	Perijinan Terpadu Satu Pintu	https://dpmptspp.belitung.go.id	1	1	DPMPTSP
8	Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan	https://bekawan.belitung.go.id	1	1	Disdukcapil
9	Sistem Informasi Bantuan Sosial Kemanusiaan	https://begalor.belitung.go.id/	1	1	DSPPA
10	Penerimaan Peserta Didik Baru	https://spmb.belitung.go.id/	1	1	Dinas Dikbud
11	Sistem Pemantauan Kualitas Air Online	http://siabel.belitungkab.go.id	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
12	Pelayanan Digital Laboratorium Lingkungan	https://petaling.belitung.go.id/	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
13	Besadu Rakyat Seputar Lingkungan	https://berasan.belitung.go.id	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
14	Aplikasi Persetujuan Lingkungan secara Online	https://pelilean.belitung.go.id/	1	1	Dinas Lingkungan Hidup
15	Survey Kepuasan Masyarakat	http://skm.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
16	Belitung Smart City (BESTY)	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.diskominfo.belitungsmartcity&pcampaignid=web_share	1	1	Diskominfo
17	Sistem Informasi Pemesanan Mess Digital	https://sedaree.belitung.go.id	1	1	Bagian Umum Sekretariat Daerah
II.	ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN UMUM				
1	Belitung Satu Data	https://data.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
2	Aplikasi Data Terkini	https://adat.belitung.go.id	1	1	Diskominfo
3	Whistle Blowing System	http://wbs.belitung.go.id	1	1	Inspektorat
4	e-office Kabupaten Belitung	https://srikandi.arsip.go.id/	1	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
5	Sistem Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik	https://spse.inaproc.id/belitung	1	1	Bagian PBJ Setda
6	Sistem Informasi Pelaporan Dan Evaluasi Program Pembangunan	http://sipelempang.belitung.go.id/	1	1	Bagian Administrasi Pembangunan
7	Sistem Informasi Keuangan Desa	https://siskeudes.belitung.go.id	1	1	DPMKBPM
8	Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa	https://siswaskeudes.belitung.go.id	1	1	Inspektorat
9	Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Belitung	https://simpai.belitung.go.id/	1	1	Bappeda
10	Sistem Informasi Tukang Berkarya	https://sikaya.belitung.go.id/	1	1	DPUPR



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Belitung Tahun 2025

NO	SISTEM INFORMASI	SUB DOMAIN	STATUS	TERINTEGRA SI	OPD PENGAMPU
11	Sistem Utilitas Pengelolaan Aik Kite	https://sugak.belitung.go.id/	1	1	DPUPR
12	Sistem Informasi Rapat	https://sirapat.belitung.go.id/	1	1	Diskominfo
13	Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan Dan Evaluasi Kinerja	https://sakup.belitung.go.id/	1	1	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
14	Sistem Informasi Monitoring Manajemen Risiko Terintegrasi	https://simentari.belitung.go.id /	1	1	Inspektorat
III.	ADMINISTRASI LEGISLASI				
1	JDIH Kabupaten Belitung	http://jdih.belitung.go.id	1	1	Bagian Hukum
2	JDIH DPRD Kabupaten Belitung	http://jdih.dprd.belitung.go.id	1	0	Setwan
IV.	MANAJEMEN PEMBANGUNAN				
1	e-Planning	https://sipd.kemendagri.go.id	1	1	Bappeda
2	e-Monev	https://monev.belitung.go.id	1	1	Bappeda
V.	SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH				
1	Simda BMD	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	1	1	BPKAD
2	Simda Keuangan	Sistem Informasi Keuangan	1	1	BPKAD
3	Sim Gaji	Sistem Informasi Gaji	1	1	BPKAD
4	Simda Pendapatan	Sistem Informasi Pendapatan	1	1	BPPRD
VI.	MANAJEMEN KEPEGAWAIAN				
1	SIMPEG	http://simpeg.belitung.go.id	1	1	BKPSDM
2	ASN Digital	https://asndigital.bkn.go.id	1	1	BKPSDM
3	e-Absensi PNS	http://e-kinerja.belitung.go.id/absen	1	1	BKPSDM
4	e-TPP PNS	https://e-kinerja.belitung.go.id/tpp/v3/	1	1	BKPSDM
5	e-Arsip	http://earsip.belitung.go.id	1	1	BKPSDM
6	e-SIDAK	https://sidak.bkpsdm.belitung.go.id	1	1	BKPSDM
7	e-Lapkin	https://e-kinerja.belitung.go.id/lapkin/	1	1	BKPSDM
8	e-Cuti ASN	https://simpeg.belitung.go.id/cuti	1	1	BKPSDM
9	e-KGB	https://simpeg.belitung.go.id/kgb	1	1	BKPSDM
		JUMLAH	48	47	

Realisasi terintegrasinya sistem informasi ini mengalami peningkatan tahun 2025 sebesar 47 sistem informasi yang terintegrasi dari 48 sistem informasi yang harus terintegrasi sesuai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu :

- 1) Penguatan kebijakan SPBE guna memastikan keberlangsungan layanan
- 2) Pemanfaatan aplikasi umum dan/atau aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis SPBE.



Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung antara lain oleh :

- 1) Penerapan Aplikasi pusat dan sistem layanan digital yang terkelola dengan baik di seluruh perangkat daerah, hal ini berkontribusi signifikan terhadap optimalisasi layanan, karena memastikan integrasi sistem yang lancar, peningkatan efisiensi dan perlindungan data yang lebih baik.
- 2) Dukungan dari pimpinan dinas dalam mendorong adopsi teknologi digital yang sering menjadi kunci sukses dalam reformasi birokrasi.
- 3) Anggaran yang memadai untuk pengembangan aplikasi dan transformasi layanan menjadi lebih aman dan akurat.
- 4) Sinergi dengan OPD lain memfasilitasi integrasi layanan "satu pintu", meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Keberhasilan capaian kinerja dipengaruhi oleh :

- 1) Ketersediaan dan kualitas infrastruktur teknologi informasi yang memadai
- 2) Ketersediaan dana yang memadai untuk mendukung implementasi SPBE

Selanjutnya target indikator sasaran Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital yang kedua yaitu Nilai SAKIP tahun 2025 sebesar 65,84 (B) dan terealisasi tahun 2025 sebesar 65,49 (B) dengan capaian sebesar 99,47%. Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten. Penerapan reformasi birokrasi berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Ada 5 komponen penilaian SAKIP, pertama perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Kedua, pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran dengan bobot 20. Ketiga, pelaporan kinerja, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Keempat, evaluasi kinerja, terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Kelima, pencapaian kinerja, bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja lainnya. Perubahan penilaian AKIP tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana terdapat 4 komponen penilaian SAKIP, pertama perencanaan kinerja, kedua pengukuran kinerja, ketiga pelaporan kinerja, keempat evaluasi kinerja.

Untuk melihat perkembangan capaian kinerja nilai SAKIP Kabupaten Belitung dari tahun 2023 – 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.106.: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung

KOMPONEN	BOBOT	2023	% kinerja komponen terhadap bobot	2024	% kinerja komponen terhadap bobot	2025	% kinerja komponen terhadap bobot
Perencanaan Kinerja	30	22.40	74.67	22.28	74.26	22.45	74.83
Pengukuran Kinerja	30	16.16	53.87	16.27	54,23	16.39	54,63
Pelaporan Kinerja	15	10.25	68.33	10.48	69,87	10.88	72,53
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14.71	58.84	15,65	62,60	15,77	63,08
Nilai Hasil Evaluasi	100	63.52		64,68		65,49	
Kategori		B		B		B	

Sumber : Bagian Organisasi Setda 2025

Nilai SAKIP Kabupaten Belitung pada tahun 2025 sebesar 65,49, dengan kategori B (Baik) sesuai dengan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KementerianPANRB Nomor B/170/AA.05/2025 tanggal 26 Desember 2025. Tahun 2024 dengan kategori yang sama B, ada kenaikan di tahun 2025 sebesar 0,81 poin. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa evaluasi pada tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level organisasi perangkat daerah.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah Meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Pada November 2024 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Dan penetapan Peraturan Bupati Belitung Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025- 2029.

Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan renstra dan juga perjanjian kinerja dan seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala, Laporan capaian kinerja Tahunan, Triwulanan, Laporan Dalev Pelaksanaan RKPD dan Laporan Evaluasi RENJA per OPD, ditambahkan dengan Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan setiap OPD melalui website monev.belitung.go.id yang telah diintegrasikan dengan sakip.belitung.go.id.



Namun dari data capaian nilai SAKIP di atas yang menjadi catatan penting adalah predikat akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dari hasil evaluasi atas penerapan SAKIP yang masih berada di kategori B atau nilai dalam range 60 – 70. Ini dapat diartikan bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kabupaten Belitung masih rendah dan diindikasikan adanya potensi terjadinya inefisiensi. Inefisiensi ini dapat terjadi karena tujuan dan sasaran tidak berorientasi hasil, ukuran kinerja tidak jelas (tidak ada keterkaitan antara program dan kegiatan), kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Kondisi ini tentunya kurang sejalan dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Sementara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa penyelenggara pemerintah harus memperhatikan azas umum penyelenggaraan negara, antara lain; (1) Azas Kepastian Hukum; (2) Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; (3) Azas Kepentingan Umum; (4) Asas Keterbukaan; (5) Asas Proporsionalitas; (6) Asas Profesionalitas; dan (7) Asas Akuntabilitas. Menyempurnakan rumusan sasaran strategis yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART, terutama pada perangkat daerah dan kepala bidang merupakan hal yang harus dilakukan Pemkab Belitung untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi yang di berikan oleh Kementerian PAN RB dalam evaluasinya. Upaya pencapaian kinerja sasaran Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel terus dilakukan dengan dukungan dari berbagai faktor. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain Komitmen Pimpinan untuk peningkatan nilai SAKIP.

Namun demikian dalam upaya pencapaian kinerja sasaran terdapat faktor penghambat pencapaian kinerja, yaitu: Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah, dikarenakan belum optimalnya reviu dan perbaikan dokumen perencanaan yang telah dilakukan sehingga masih terdapat indikator yang belum berorientasi hasil pada level perangkatdaerah dan melakukan penyempurnaan perencanaan kinerja secara keseluruhan, Kualitas dan profesionalitas SDM aparatur masih rendah, dikarenakan, sistem manajemen pemerintahan yang belum terlaksana secara optimal.

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan di masa datang dalam upaya meningkatkan kinerja sasaran birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel di masa yang akan datang Adalah Terus melakukan upaya monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait perencanaan, pengukuran kinerja, pencapaian kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Target indikator sasaran Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital yang ketiga yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2025 sebesar 65,84 (B) dan terealisasi tahun 2025 sebesar 65,49 (B) dengan capaian sebesar 99,47%. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu suatu ukuran yang ditetapkan untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. IPKD diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 dan bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan IPKD yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Menjadikan pengelolaan keuangan daerah lebih transparan dan akuntabel. Menjamin penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang baik.

Target indikator sasaran Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital yang keempat yaitu Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 sebesar 4,1 dan terealisasi tahun 2025 sebesar 4,06 (A-) dengan capaian sebesar 99,02%.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan salah satu instrumen penting dalam menilai kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) Nomor 4 Tahun 2023, IPP dirancang sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Selanjutnya Permen PANRB No. 4 Tahun 2023 menetapkan beberapa komponen utama dalam penyusunan IPP, yang mencakup berbagai aspek pelayanan publik, antara lain:

- 1) Kebijakan Pelayanan
Kebijakan pelayanan mencakup regulasi, standar operasional prosedur (SOP), dan instrumen-instrumen yang digunakan untuk memastikan pelayanan publik dilaksanakan dengan baik. Aspek ini menilai sejauh mana kebijakan yang ada mendukung tercapainya layanan yang efisien dan tepat sasaran.
- 2) Profesionalisme SDM
Kompetensi dan kinerja sumber daya manusia (SDM) yang memberikan pelayanan publik sangat menentukan kualitas layanan. Penilaian dalam aspek ini mencakup ketersediaan pelatihan, profesionalisme, dan etika dalam melayani masyarakat.
- 3) Sarana dan Prasarana Pelayanan
Fasilitas fisik dan teknologi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga menjadi salah satu faktor yang dinilai. Ketersediaan sarana yang memadai, aksesibilitas, dan kemudahan penggunaan layanan adalah elemen penting dalam komponen ini.
- 4) Inovasi Pelayanan
Dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan, inovasi di bidang teknologi dan prosedur sangat diperlukan. Penilaian pada aspek ini menilai sejauh mana instansi pemerintah mampu mengadopsi inovasi untuk memperbaiki proses pelayanan publik.



- 5) Kepuasan Pengguna Layanan
Salah satu indikator kunci dari keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Survei kepuasan pelanggan sering digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diterima.

Berikut Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kab. Belitung Tahun 2023-2025.

Tabel 2.107.: Indeks Pelayanan Publik Kab. Belitung Tahun 2023-2025

No	Tahun	Indeks Pelayanan Publik
1	2023	3,89 (B)
2	2024	4,02 (A-)
3	2025	4,06 (A-)

Tantangan dalam Implementasi Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Belitung 2025 adalah Keterbatasan SDM dan Sumber Daya, Ketersediaan SDM yang kompeten serta keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik menjadi salah satu kendala dalam implementasi IPP. Perbedaan Kualitas Layanan di Berbagai Perangkat Daerah, Kualitas pelayanan publik masih sangat bervariasi antara satu PD dengan PD lainnya, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang infrastrukturnya belum memadai. Tantangan Teknologi dan Inovasi, Meskipun inovasi menjadi salah satu aspek penting dalam IPP, tidak semua PD memiliki kapasitas untuk mengadopsi teknologi terbaru dalam pelaksanaan layanan publik. Sehingga penerapan Indeks Pelayanan Publik berdasarkan Permen PANRB No. 4 Tahun 2023 merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya penilaian yang komprehensif melalui IPP, pemerintah daerah dapat terus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan publik, sekaligus memberikan dorongan kepada perangkat daerah untuk berinovasi dan meningkatkan profesionalisme. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, IPP berperan penting dalam membangun pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Target indikator sasaran Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel berbasis digital yang kelima yaitu Tingkat Maturitas SPIP tahun 2025 sebesar Level 3 (3,541) dan terealisasi tahun 2025 sebesar Level 2 (2,449) dengan capaian sebesar 69,16%. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan instrumen penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui SPIP, instansi pemerintah diharapkan mampu mengelola risiko, menjaga keandalan laporan keuangan, meningkatkan efektivitas program, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Salah satu aspek paling penting dari SPIP Terintegrasi adalah penilaian maturitas. Penilaian ini membantu instansi mengetahui sejauh mana implementasi SPIP telah berjalan efektif, serta area mana yang masih perlu diperbaiki. Berikut Perkembangan Tingkat Maturitas SPIP Kab. Belitung Tahun 2023-2025.

Tabel 2.108.: Tingkat Maturitas SPIP Kab. Belitung Tahun 2023-2025

No	Tahun	Tingkat Maturitas SPIP
1	2023	Level 3 (3,2)
2	2024	Level 3 (3,54)
3	2025	Level 2 (2,449)

Adanya penurunan Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2025 menjadi Level 2 (Berkembang/Developing) disebabkan oleh Beberapa aspek pengendalian sudah diterapkan, meski masih terbatas pada unit atau fungsi tertentu. Belum ada konsistensi antar bagian organisasi. Meskipun bermanfaat, proses penilaian maturitas SPIP tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

- Kurangnya pemahaman pegawai, banyak pegawai yang masih menganggap SPIP sebagai beban administratif, bukan sebagai kebutuhan organisasi.
- Data yang tidak lengkap, dokumen dan bukti pelaksanaan seringkali sulit diperoleh atau belum terdokumentasi dengan baik.
- Keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah SDM, waktu, maupun anggaran, penilaian SPIP membutuhkan dukungan yang cukup.
- Resistensi terhadap perubahan, tidak semua pihak bersedia mengubah pola kerja lama menuju sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Agar tingkat maturitas SPIP terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Belitung perlu mengambil upaya strategis, antara lain:

- Meningkatkan pemahaman seluruh pegawai melalui sosialisasi dan pelatihan rutin.
- Membangun komitmen pimpinan sebagai role model penerapan SPIP.
- Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengendalian intern yang lebih efektif.
- Melakukan monitoring berkala agar perbaikan terus berjalan sesuai rekomendasi.
- Mengintegrasikan SPIP dengan manajemen risiko sehingga sistem lebih relevan dengan kebutuhan organisasi.

Penilaian maturitas SPIP Terintegrasi bukan hanya sekadar formalitas, melainkan langkah penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas. Pemerintah Kabupaten



Belitung akan lebih memahami proses penilaian, indikator yang digunakan, serta tantangan yang ada, sehingga kinerja dapat terus ditingkatkan.

SASARAN 9 : Terwujudnya profesionalitas ASN

Capaian kinerja sasaran “Terwujudnya profesionalitas ASN” merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Indeks Profesional ASN dengan target “79,80”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Terwujudnya profesionalitas ASN Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 3.55.: Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan professional

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		2025		Kategori	Akhir RPD 2030 Target
			RPJMD	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Profesional ASN	Skala	79,58	79,80	81,29	101,87	SB	82,56

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permenpan RB No. 38 Tahun 2019). Indeks Profesionalitas ASN merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat profesionalitas ASN. Adapun indikator profesionalitas ASN adalah pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, organisasinya semakin modern dan memiliki disiplin yang tinggi.

Indeks Profesionalitas ASN dikeluarkan dan ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara selaku Pembina Kepegawaian Nasional. Sumber Data yang digunakan untuk mengukur IP ASN adalah data SAPK yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara. Adapun unsur-unsur yang dinilai yaitu Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi (kediklatan), Kinerja dan Disiplin dengan kategori sebagai berikut:

- Nilai 91% - 100% : Sangat Tinggi
- Nilai 81% - 90% : Tinggi
- Nilai 71% - 80% : Cukup/Sedang
- Nilai 61% - 70% : Rendah
- Nilai < 60% : Sangat Rendah

Indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) adalah :

Kualifikasi, dengan nilai maksimal 25
Kompetensi, dengan nilai maksimal 40
Kinerja, dengan nilai maksimal 30
Disiplin, dengan nilai maksimal 5
Total nilai maksimal 100

Kualifikasi, meliputi data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, Kompetensi, meliputi data dan informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas. Indikator yang digunakan adalah Diklat kepemimpinan, Diklat fungsional, Diklat teknis, Seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya, dalam 2 (dua) tahun terakhir. Kinerja, meliputi data dan informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat serta perilaku PNS. Disiplin, meliputi data dan informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Indikator : hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat. Data hukuman disiplin tersebut telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir). Realisasi kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2024 berdasarkan perhitungan dalam portal <https://myasn.bkn.go.id> dari Badan Kepegawaian Negara adalah **81,29 (tinggi)**. Nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 sebagai berikut:

Penilaian IP ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024

Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai	Kategori
-------------	------------	---------	----------	-------	----------



20,78	30,49	25,02	5,00	81,29	Tinggi
-------	-------	-------	------	-------	--------

Penjelasan:
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari unsur: Kualifikasi 20,78 dari 25; Kompetensi 30,49 dari 40; Kinerja 25,02 dari 30 dan Disiplin 5 dari 5. Dengan Jumlah PNS sebanyak 2.734 orang dan Jumlah PPPK sebanyak 293 orang.

Tabel 2.109.: Tabel Perbandingan IP ASN Kabupaten Belitung
Tahun 2022-2024

Tahun	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai	Kategori	Sumber Data
2021	12,69	18,52	23,23	5,00	59,44	Sangat Rendah	Hasil Penilaian BKN No: 870/B-BH.02.01/SD/C/2022 Tanggal 13 Januari 2022
2022	21,04	21,14	24,38	5,00	71,56	Sedang	Hasil Penilaian BKN No: 470/B-BM.02/SD/KR.VII/2023 Tanggal 18 Oktober 2023
2023	20,86	28,50	24,26	5,00	78,63	Sedang	Hasil Penilaian BKN No: 435/B-BM.02/SD/KR.VII/2024 tanggal 07 Oktober 2024
2024	20,78	30,49	25,02	5,00	81,29	Tinggi	Hasil Perhitungan pada portal https://myasn.bkn.go.id

Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kab Belitung Tahun 2025

Adapun faktor pendorong peningkatan nilai IP ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 antara lain :

- Tersedianya database pegawai pada aplikasi Simpeg dengan tujuan terciptanya sistem informasi dan database kepegawaian yang dapat menampung, mengolah, menyimpan dan menemukan kembali data kepegawaian.
- Adanya pengembangan e-SKP sesuai dengan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, dimana pada Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 memiliki ruang lingkup yang lebih luas yakni ASN (PNS dan PPPK) dengan perilaku kinerja Core Values ASN yang merupakan pengembangan PP Nomor 30 Tahun 2019 yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif.

Dengan demikian, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah menyusun strategi dalam rangka memperbaiki nilai IP ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025 untuk meningkatkan nilai dimensi kompetensi:

- Berkoordinasi dengan OPD untuk memaksimalkan kegiatan pengembangan kompetensi ASN;
- Melaporkan hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN beserta bukti dukung kepada BKPSDM Kabupaten Belitung;
- Melaksanakan Melaksanakan Sosialisasi atau seminar online kepegawian dengan target peserta massal.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator

SASARAN 10 : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung harus senantiasa ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Dan upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah agar dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan tidak hanya dilakukan oleh internal organisasi perangkat daerah, melainkan juga terkait dengan pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian PAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara) dan juga pihak-pihak lainnya.

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kemandirian keuangan daerah” merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Rasio Kemandirian Fiskal dengan target “23,94”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 2.110.: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		2025		Kategori	Akhir RPD 2030 Target
			RPJMD	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Rasio kemandirian fiskal	Skala	23,67	23,94	29,38	122,72	SB	26,10

Kemandirian fiskal menjadi salah satu isu paling krusial dalam dinamika pembangunan daerah Indonesia beberapa tahun terakhir. Di tengah tekanan konsolidasi fiskal pemerintah pusat mulai dari efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) hingga perubahan struktur penganggaran nasional-setiap provinsi dan kabupaten/kota dituntut mampu



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2025

memperkuat fondasi keuangannya sendiri. Kemandirian fiskal membuat daerah bisa membiayai pembangunan dan layanan publiknya tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat, daerah lebih bebas berinovasi, lebih cepat merespons kebutuhan warga, serta lebih tahan terhadap perubahan kebijakan nasional. Pada akhirnya,daerah yangmandiri secara fiskal cenderung lebih maju, lebih akuntabel, dan lebih mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Ketergantungan pada dana pusat memang tidak sepenuhnya dapat dihindari. Namun, tingkat kemandirian daerah dalam membiayai belanja publik menjadi indikator penting untuk menilai kapasitas, kualitas tata kelola, dan keberlanjutan pembangunan wilayah.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH									
TAHUN ANGGARAN 2025									
Nama Pemda		: Kabupaten Belitung							
Data per Tanggal		: 31 Desember 2025							
Rekening				Uraian	Jumlah				
A	K	J	O		Anggaran	Realisasi	Selisih	%	
4				PENDAPATAN DAERAH	940,590,481,222.00	940,242,175,166.09	(348,306,055.91)	99.96	
4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH	202,354,324,639.00	213,489,413,556.09	11,135,088,917.09	105.50	
4	1	01		Pendapatan Pajak Daerah	109,084,621,493.00	104,082,515,970.00	(5,002,105,523.00)	95.41	
4	1	02		Pendapatan Retribusi Daerah	78,007,440,946.00	92,839,320,126.50	14,831,879,180.50	119.01	
4	1	03		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,600,000,000.00	4,886,428,412.02	(713,571,587.98)	87.26	
4	1	04		Lain-Lain PAD yang Sah	9,662,262,200.00	11,681,149,047.57	2,018,886,847.57	120.89	
4	1	05		Zakat	-	-	-	0.00	
4	2			PENDAPATAN TRANSFER	738,236,156,583.00	726,752,761,610.00	(11,483,394,973.00)	98.44	
				Transfer Pemerintah Pusat - Dana	631,510,333,190.00	617,616,555,342.00	(13,893,777,848.00)	97.80	
4	2	01		Dana Bagi Hasil	39,425,962,000.00	38,705,944,300.00	(720,017,700.00)	98.17	
4	2	01		Dana Alokasi Umum	489,709,683,000.00	478,853,010,054.00	(10,856,672,946.00)	97.78	
4	2	01		Dana Alokasi Khusus - Fisik	10,821,511,000.00	8,848,258,410.00	(1,973,252,590.00)	81.77	
4	2	01		Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	91,553,177,190.00	91,209,342,578.00	(343,834,612.00)	99.62	
				Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	62,201,505,000.00	61,207,455,600.00	(994,049,400.00)	98.40	
4	2	02		Dana Insentif Daerah	-	-	-	0.00	
4	2	02		Dana Otonomi Khusus	-	-	-	0.00	
4	2	02		Dana Keistimewaan	-	-	-	0.00	
4	2	02		Dana Desa	41,614,636,000.00	40,620,586,600.00	(994,049,400.00)	97.61	
4	2	02		Insentif Fiskal	20,586,869,000.00	20,586,869,000.00	-	100.00	
				Transfer Pemerintah Daerah	44,524,318,393.00	47,928,750,668.00	3,404,432,275.00	107.65	
4	2	03		Dana Bagi Hasil	42,743,036,393.00	46,262,718,168.00	3,519,681,775.00	108.23	
4	2	03		Bantuan Keuangan	1,781,282,000.00	1,666,032,500.00	(115,249,500.00)	93.53	
4	3			LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	0.00	
4	3	01		Hibah	-	-	-	0.00	
4	3	02		Dana Darurat	-	-	-	0.00	
4	3	03		Pendapatan Lainnya	-	-	-	0.00	
5				BELANJA DAERAH	1,039,613,857,103.70	943,425,589,981.53	(96,188,267,122.17)	90.75	
5	1			OPERASI	888,104,600,616.70	798,965,304,189.53	(89,139,296,427.17)	89.96	
5	1	01		Pegawai	529,950,395,509.00	473,457,900,870.00	(56,492,494,639.00)	89.34	
5	1	02		Barang dan Jasa	335,543,976,031.70	303,356,501,325.53	(32,187,474,706.17)	90.41	
5	1	03		Bunga	-	-	-	0.00	
5	1	04		Subsidi	648,688,228.00	540,823,627.00	(107,864,601.00)	83.37	
5	1	05		Hibah	21,495,325,230.00	21,162,331,642.00	(332,993,588.00)	98.45	
5	1	06		Bantuan Sosial	466,215,618.00	447,746,725.00	(18,468,893.00)	96.04	
5	2			MODAL	43,619,973,682.00	38,838,268,692.00	(4,781,704,990.00)	89.04	
5	2	01		Tanah	500,000,000.00	491,325,000.00	(8,675,000.00)	98.27	
5	2	02		Peralatan dan Mesin	17,118,173,570.00	15,344,502,359.00	(1,773,671,211.00)	89.64	
5	2	03		Gedung dan Bangunan	11,732,488,800.00	8,954,328,979.00	(2,778,159,821.00)	76.32	
5	2	04		Jalan, Irigasi dan Jaringan	11,192,587,965.00	10,996,019,657.00	(196,568,308.00)	98.24	
5	2	05		Aset Tetap Lainnya	3,037,603,347.00	3,013,197,697.00	(24,405,650.00)	99.20	
5	2	06		Aset Lainnya	39,120,000.00	38,895,000.00	(225,000.00)	99.42	
5	3			TIDAK TERDUGA	1,250,000,000.00	-	(1,250,000,000.00)	0.00	
5	3	01		Tidak Terduga	1,250,000,000.00	-	(1,250,000,000.00)	0.00	
5	4			TRANSFER, BANTUAN KEUANGAN, DAN BAGI	106,639,282,805.00	105,622,017,100.00	(1,017,265,705.00)	99.05	
5	4	01		Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	11,811,046,305.00	11,787,830,000.00	(23,216,305.00)	99.80	
5	4	02		Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi	-	-	-	0.00	
5	4	03		Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	300,000,000.00	300,000,000.00	-	100.00	
5	4	04		Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	94,528,236,500.00	93,534,187,100.00	(994,049,400.00)	98.95	
5	4	05		Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kepada	-	-	-	0.00	
				SURPLUS/DEFISIT	(99,023,375,881.70)	(3,183,414,815.44)	95,839,961,066.26	3.21	
6				PEMBIAYAAN DAERAH (PEMBIAYAAN NETTO)	99,023,375,881.70	99,023,375,881.70	-	100.00	
6	1			PENERIMAAN PEMBIAYAAN	99,023,375,881.70	99,023,375,881.70	-	100.00	
6	1	01		Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya	99,023,375,881.70	99,023,375,881.70	-	100.00	
6	1	02		Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	0.00	
6	1	03		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang	-	-	-	0.00	
6	1	04		Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	-	-	-	0.00	
6	1	05		Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	-	-	-	0.00	
6	1	06		Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	0.00	
6	1	07		Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan	-	-	-	0.00	
6	1	08		Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi	-	-	-	0.00	
6	1	09		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	0.00	
6	1	10		Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-	-	0.00	
6	2			PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	0.00	
6	2	01		Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	0.00	
6	2	02		Penyertaan Modal/Investasi Daerah	-	-	-	0.00	
Berikut perhitungan Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten-Belitung Tahun 2025:					-				
Rumus Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal					-				
Rasio Kemandirian Fiskal									



Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Kabupaten Belitung menggambarkan kondisi kemandirian fiskal menuju kemandirian, nilai IKF yang rendah menunjukkan rapuhnya struktur fiskal Kabupaten Belitung serta tingginya risiko perlambatan program pembangunan ketika terjadi penghematan TKD, seperti yang terjadi saat keluarnya Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Optimalisasi pendapatan daerah merupakan faktor penting dalam membangun kemandirian fiskal dan mendukung keberlanjutan program pembangunan di Kabupaten Belitung. Namun demikian, struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat, sementara kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) relatif kecil. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan basis penerimaan daerah, lemahnya sistem intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, serta belum optimalnya digitalisasi layanan perpajakan dan pengelolaan aset daerah. Pemerintah Kabupaten Belitung menekankan pentingnya pembangunan ekonomi lokal yang kuat sebagai basis pertumbuhan PAD. Pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif diharapkan dapat membuka peluang peningkatan PAD yang berkelanjutan dan juga mengingatkan agar peningkatan pendapatan daerah tidak mengorbankan kelestarian lingkungan atau menimbulkan ketimpangan social dan juga mendukung upaya mengarahkan pemanfaatan ruang secara produktif dan berkelanjutan, termasuk pengembangan kawasan yang memiliki potensi ekonomi. Oleh karena itu, Upaya yang perlu dilakukan kedepannya adalah penguatan kelembagaan pajak daerah, reformasi system informasi fiskal, serta integrasi kebijakan pembangunan ekonomi dan fiskal untuk meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan secara berkelanjutan.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1) Gebyar PBB-P2 Tahun 2025



2) High Level Meeting Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Belitung 2025



3) Sosialisasi Pajak Daerah 2025





4) Sosialisasi Dan Pendataan Sarang Burung Walet 2025



5) Pendataan Pbb-P2 2025



6) Pelayanan Terpadu Samsat Setempoh Dan Pembayaran Pbb-P2 2025



7) High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Belitung yang dipimpin oleh Bapak Bupati Belitung selaku Ketua TP2DD Kabupaten Belitung (Tanggal 29 April 2025 Bertempat Diruang Rapat Pemkab. Belitung)





8) Kunjungan Ke KPP Pratama Tanjungpandan terkait Optimalisasi Pajak Daerah Khususnya Pajak Sarang Burung Walet dan PBB P2 (Tanggal 2 Oktober 2025 bertempat di Ruang Kerja Kepala Kantor KPP Pratama Tanjungpandan)



9) High Level Meeting (HLM) Edukasi Terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kabupaten Belitung dengan Bank Indonesia di pimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung selaku Ketua Pelaksana Harian TP2DD Kabupaten Belitung (tanggal 5 Desember 2025 bertempat di Ruang Rapat Bupati Kabupaten Belitung)



10) Monitoring Objek Pajak Terutang



3.2.4 TUJUAN 4 : Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan

Capaian kinerja tujuan Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan. Capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

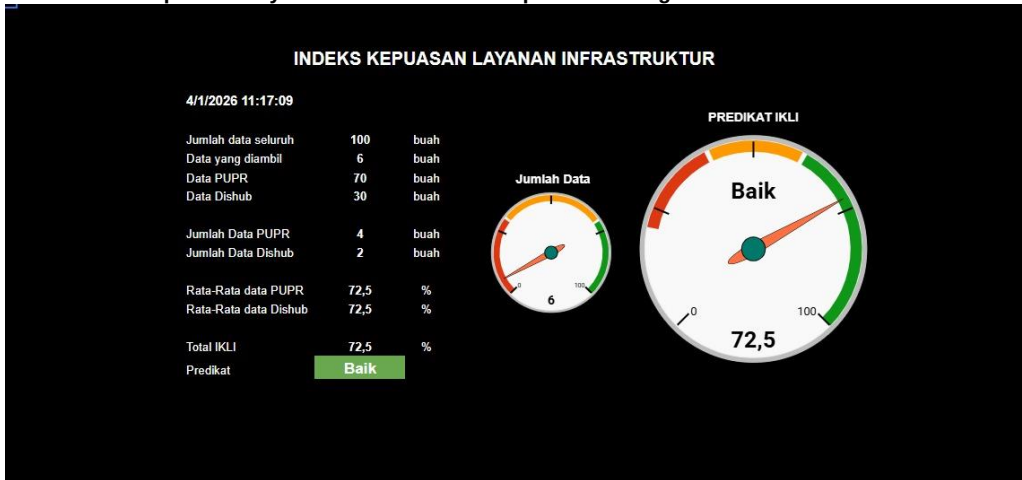
Tabel 2.111.: Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2025			Kategori	Target Akhir RPJMD 2030
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	n.a	Baik	72,5	84,94	SB	Sangat Baik (93,63)
2	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persentase	54,4	54,55	54,4	99.73	SB	65,54



Kabupaten Belitung melalui survei Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), pada tahun 2025 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dengan capaian 84,94. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah indikator baru yang ada di Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Belitung Tahun 2025

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Belitung Tahun 2025



Ketersediaan infrastruktur kewilayahan yang memadai merupakan prasyarat penting dalam pemerataan pembangunan, konektivitas antar wilayah, serta penguatan pelayanan dasar dan ekonomi lokal. Namun di Kabupaten Belitung, masih terdapat ketimpangan kualitas dan jangkauan infrastruktur antar wilayah, terutama di wilayah-wilayah perdesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Permasalahan mencakup keterbatasan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan, minimnya sarana transportasi publik, serta keterbatasan infrastruktur penunjang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rakyat.

Target indikator sasaran Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan yang kedua yaitu Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) tahun 2025 dengan target sebesar 54,55 dan terealisasi tahun 2025 sebesar 54,4 dengan capaian sebesar 99,73%.

Rendahnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Belitung menjadi salah satu hambatan utama dalam pemerataan pembangunan, mobilitas masyarakat, serta distribusi barang dan jasa. Banyak wilayah perdesaan dan kawasan pesisir yang masih sulit dijangkau, baik karena kondisi infrastruktur jalan yang rusak maupun belum tersambung jalur transportasi yang layak. Akibatnya, keterisolasian wilayah-wilayah tertentu masih tinggi dan berdampak pada rendahnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar lokal.

Konektivitas yang rendah juga berdampak langsung pada lambatnya pertumbuhan ekonomi lokal, terutama sektor-sektor berbasis potensi wilayah seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Wilayah yang memiliki keunggulan komparatif belum mampu mengakses rantai pasok dan pasar secara efisien, sehingga potensi ekonomi yang dimiliki belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Keterbatasan sarana transportasi publik, minimnya integrasi antar moda, serta kurangnya dukungan logistik menjadi faktor penghambat utama.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan upaya sistematis dalam memperkuat konektivitas fisik antar wilayah melalui pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan, jembatan, pelabuhan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Selain itu, konektivitas digital juga perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan, agar wilayah-wilayah terpencil tidak tertinggal dalam era transformasi informasi dan ekonomi digital. Akses yang merata akan membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan memperkuat kohesi sosial antar wilayah dalam kerangka pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Tabel 2.112.: Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 4

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 4 Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan,	Strategi Misi 4 Membangun Infrastruktur yang Berkualitas Secara Merata dan Berkelanjutan	1. Peningkatan pelayanan infrastruktur inklusif 2. Pemerataan pelayanan infrastruktur kewilayahan dan kawasan strategis 3. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan 4. Penguatan kapasitas masyarakat, serta tata kelola kebencanaan yang adaptif dan berbasis data



SASARAN 11 : Tersedianya Infrastruktur yang inklusif dan berkualitas

Capaian kinerja sasaran “Tersedianya Infrastruktur yang inklusif dan berkualitas” merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur dengan target “67,28”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 2.113.: Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Infrastruktur yang inklusif dan berkualitas

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		2025		Kategori	Akhir RPD 2030 Target
			RPJMD	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	65,01	67,28	70,30	104,49	SB	107,97

Target indikator sasaran Tersedianya Infrastruktur yang inklusif dan berkualitas yaitu Indeks Pembangunan Infrastruktur tahun 2025 dengan target sebesar 67,28 dan terealisasi tahun 2025 sebesar 70,30 dengan capaian sebesar 104,49%.

Berikut perbandingan realisasi perhitungan Indeks Pembangunan Infrastruktur tahun 2024 dan 2025

Realisasi Tahun 2025						
No	Komponen	Realisasi 2025	rencana s/d 2029	Bobot	Nilai	Satuan
1	Jalan	613.99	696.96	20	17.61908861	km
2	Air Bersih	8,981	11,570	20	15.52463267	rumah tangga
3	Sanitasi	5,682	11,972	20	9.492148346	rumah tangga
4	Drainase	12,392	17,479	10	7.089650438	meter
5	Pelabuhan	23	30	20	15.33333333	Unit
6	Faskes jalan	13,195	25,178	10	5.240686313	Unit
				100	70.29953971	
					70.29953971	
					Baik	

Realisasi Tahun 2024						
No	Komponen	Realisasi 2024	rencana s/d 2029	Bobot	Nilai	Satuan
1	Jalan	591.76	696.96	20	16.981	km
2	Air Bersih	8,070	11,570	20	13.950	rumah tangga
3	Sanitasi	5,547	11,972	20	9.267	rumah tangga
4	Drainase	11,653	17,479	10	6.667	meter
5	Pelabuhan	23	30	20	15.333	Unit
6	Faskes jalan	12,658	25,178	10	5.027	Unit
				100	67.225	
					67.23	
					Baik	

Komponen IPI

Pencapaian :

per komponen : (nilai realisasi/nilai rencana) * bobot

nilai total IPI : (nilai total komponen/total bobot) * 100

bobot : 10 s/d 100

realisasi pertahun komulatif sebelumnya

Range nilai :	Column 1
Sangat baik	>= 80
Baik	60-79
Cukup	40-59
kurang	20-39
sangat kurang	<20



SASARAN 12 : Berkurangnya kesenjangan Pembangunan antar wilayah

Capaian kinerja sasaran “**Berkurangnya kesenjangan Pembangunan antar wilayah** ” merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Indeks Kesulitan Geografis dengan target “32,52”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Belitung Tahun 2025.

Tabel 2.114.: Capaian Kinerja Sasaran Berkurangnya kesenjangan Pembangunan antar wilayah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		2025		Kategori	Akhir RPD 2030 Target
			RPJMD	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Kesulitan Geografis	Nilai	32,72	32,52	32,72	99,39	SB	32,09

Indikator Kinerja Utama Indeks Kesulitan Geografis Tahun 2025 merupakan Indeks Kesulitan Geografis yang dihitung BPS Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Indeks Kesulitan Geografis adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kesulitan geografis yang dihadapi oleh suatu wilayah dalam kaitannya dengan aksesibilitas dan infrastruktur. Indeks ini mempertimbangkan berbagai aspek seperti jarak, kondisi jalan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tingkat aksesibilitas terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik lainnya. Tujuan utama dari pengukuran IKG adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan-tantangan fisik yang dihadapi oleh suatu daerah dalam rangka mendukung kebijakan pemerataan pembangunan.

Indeks Kesulitan Geografis (IKG) merupakan indeks komposit tertimbang yang besarnya antara 0-100 untuk setiap wilayah. Semakin besar indeks yang dimiliki suatu wilayah, maka semakin tinggi tingkat kesulitan wilayah tersebut. IKG disusun oleh BPS yang dilakukan berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 menindaklanjuti permintaan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyediakan data terkait tingkat kesulitan geografis sebagai alat ukur penghitung tingkat kesulitan geografis.

Dampak pemanasan global menjadi permasalahan yang semakin nyata, Kenaikan suhu dan pola curah hujan yang tidak menentu mempengaruhi sektor pertanian, perikanan, dan ketersediaan air bersih. Kerusakan Lingkungan yang terjadi akibat penebangan liar, pembukaan lahan untuk pertanian, dan konversi hutan menjadi wilayah tambang masyarakat berkontribusi pada hilangnya keanekaragaman hayati dan gangguan ekosistem. Perkembangan urbanisasi yang pesat seringkali dilakukan tanpa perencanaan yang matang, menyebabkan kawasan pemukiman yang padat, kumuh, dan rawan terhadap bencana.

Walaupun Kabupaten Belitung telah mengalami pertumbuhan ekonomi, masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial masih menjadi tantangan. Beberapa daerah di wilayah Kabupaten Belitung masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Kesulitan Akses Transportasi karena infrastruktur transportasi yang kurang memadai, Hal ini mempengaruhi mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan konektivitas antar daerah.

Kabupaten Belitung menghadapi serangkaian tantangan geografi fisik dan sosial yang memerlukan perhatian serius. Penanganan masalah-masalah ini tidak hanya membutuhkan kerjasama dari pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat dan sektor swasta. Dengan melibatkan semua pihak dalam solusi yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan lebih efektif. Keberhasilan dalam mengatasi permasalahan ini akan berdampak besar pada pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kabupaten Belitung. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu, penguatan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada keberlanjutan menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Pemerintah Kabupaten Belitung perlu terus mendorong integrasi kebijakan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar, pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijaksana, penguatan ketahanan lingkungan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi. Dengan perencanaan pembangunan yang terarah dan partisipatif, diharapkan Kabupaten Belitung mampu menghadapi berbagai dinamika pembangunan sekaligus mewujudkan pembangunan daerah yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.



SASARAN 13 : Meningkatnya Kelestarian Lingkungan

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kelestarian Lingkungan” merupakan salah indikator kinerja utama RPJMD dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Resiko Bencana”. Berikut realisasi dan capaian sasaran Meningkatnya Kelestarian Lingkungan .

Tabel 2.115.: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kelestarian Lingkungan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		2025		Kategori	Akhir RPD 2030 Target
			RPJMD	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	69,84	76,81	75,77	98,65	SB	77,66
2	Indeks Resiko Bencana	Nilai	143,71	117,14	98,97	84,49	B	111,71

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator dari sasaran Meningkatnya Kelestarian Lingkungan yang pertama yaitu indeks kualitas lingkungan hidup, telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan realisasi kinerja sebesar 75,77 melampaui target dengan kategori SANGAT BERHASIL. Dari realisasi IKLH Tahun 2025 sebesar 75,77 nilai IKLH Kabupaten Belitung pada posisi dan katagori Baik. Kondisi tersebut perlu dipertahankan untuk terus meningkatkan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang merupakan komponen terpenting dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Belitung.

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam proses perhitungannya sudah mempergunakan Aplikasi Pelaporan dan Perhitungan IKLH PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan rumus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. rumusannya sebagai berikut :

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

IKA : Indeks Kualitas Air

IKU : Indeks Kualitas

Udara IKL : Indeks Kualitas

Lahan

Untuk perhitungan nilai IKLH sebagai berikut :

Indeks Kualitas Air (IKA) : 74,59

Indeks Kualitas Udara (IKU) : 82,53

Indeks Tutupan Lahan (IKL) : 65,28

$$\begin{aligned} IKLH &= (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL) \\ &= (0.376 \times 74,59) + (0.405 \times 82,53) + (0.219 \times 65,28) \\ &= 28,046 + 33,425 + 14,296 \\ &= 75,77 \end{aligned}$$

Untuk melihat perbandingan antara nilai IKLH dari tahun 2022 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.116.: Perbandingan Nilai IKLH Tahun 2022 sampai dengan 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,25	68,90	69,84	75,77

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai IKLH pada tahun 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup masih tergolong rendah di Kabupaten Belitung. Masih banyak aktivitas yang tidak memperhatikan dampak ekologis jangka panjang, seperti pembuangan sampah sembarangan, alih fungsi lahan tanpa pengendalian, penangkapan ikan yang merusak, dan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan.



Kurangnya edukasi lingkungan dan minimnya penerapan nilai-nilai kelestarian dalam keseharian menjadi faktor penyebab utama rendahnya kesadaran tersebut.

Selain kesadaran, aspek kelembagaan dan tata kelola lingkungan juga masih belum optimal. Koordinasi antar sektor dalam pengelolaan Kawasan lindung, konservasi sumber daya, dan pengendalian pencemaran seringkali lemah. Pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan belum dilakukan secara konsisten, dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan masih rendah. Hal ini berisiko mempercepat degradasi lingkungan, menurunkan daya dukung wilayah, dan mengancam keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

Meningkatkan kesadaran dan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari pembangunan daerah. Upaya ini dapat dilakukan melalui edukasi publik, kampanye perilaku ramah lingkungan, pemberdayaan komunitas lokal dalam pengelolaan kawasan, serta insentif bagi praktik ekonomi hijau dan biru.

Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat pengelola lingkungan, dan pemanfaatan teknologi pemantauan juga menjadi langkah penting. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak, pembangunan daerah dapat berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan yang menjadi pondasinya.

Rendahnya kesadaran dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan memiliki keterkaitan langsung dengan buruknya pengelolaan sampah dan limbah, yang pada gilirannya menurunkan ketahanan terhadap bencana. Ketiga isu ini saling terkait dalam sebuah siklus negatif yang dapat memperburuk kondisi lingkungan dan sosial. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang benar seperti memilah, mendaur ulang, dan mengurangi limbah mengakibatkan tumpukan sampah di lingkungan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik ini menyumbat saluran air, mencemari Sungai dan laut, serta menjadi sumber penyakit. Buruknya pengelolaan sampah dan limbah secara langsung menurunkan ketahanan terhadap bencana, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir. Penguatan kesadaran dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan adalah kunci untuk memutus siklus negatif ini.

Ketika masyarakat sadar bahwa tindakan mereka berdampak besar pada lingkungan, mereka akan lebih termotivasi untuk mengurangi limbah dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan dan mengurangi konsumsi. Memilah sampah dengan memisahkan sampah organik, anorganik, dan berbahaya untuk memudahkan daur ulang. Mendukung kebijakan lingkungan dengan Berpartisipasi dalam program-program pemerintah atau komunitas yang bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Beberapa alternatif kebijakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai IKLH diantaranya adalah:

1. Pembuatan kebijakan yaitu peraturan daerah mengenai pengendalian pencemaran air, pengelolaan pengendalian pencemaran udara serta pengendalian kerusakan lahan.
2. Sosialisasi lebih lanjut dan intens kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di area sempadan sungai serta menggunakan air sungai untuk aktivitas sehari-hari agar dapat menjaga perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Sosialisasi dan peningkatan pelayanan IPAL domestik kepada masyarakat dan usaha-usaha kecil.
4. Peningkatan pengawasan dan pembinaan industri terkait pengelolaan limbah dan emisi udara yang dihasilkan.
5. Penambahan lokasi titik pantau kualitas udara agar dapat mewakili semua kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung dan pelaksanaan pemantauan secara kontinyu menggunakan Air Quality Monitoring System (AQMS).
6. Peningkatan inventarisasi data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan data vegetasi lainnya, baik data primer maupun sekunder serta melakukan penetapan Kawasan area terbuka hijau melalui kebijakan peraturan daerah.
7. Peningkatan program pemulihan kualitas lingkungan atau kegiatan inovasi lainnya bersama masyarakat dan pemangku kepentingan.
8. Penyebarluasan informasi dan publikasi terkait ruang terbuka hijau dan tutupan hutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan hutan.
9. Sosialisasi dan publikasi terkait dengan pengelolaan kualitas lingkungan hidup terhadap stakeholder- stakeholder.

Indikator Kinerja Utama kedua yaitu Indeks Resiko Bencana Tahun 2025 Kabupaten Belitung Adalah 98,97. Nilai Indeks Resiko Bencana Tahun 2025 dihitung dengan menggunakan salah satu input berupa Nilai IKD Tahun 2025. Nilai Indeks Resiko Bencana Tahun 2025 dihitung menggunakan baseline yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan, sehingga tidak untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan IRB pada periode tahun 2015-2024.

Tabel 2.117. Berikut Nilai IKD 2025 dan IRB 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten Kota	IKD 2025	IRB 2025
1.	Bangka	0,52	100,03
2.	Bangka Barat	0,62	96,66
3.	Bangka Selatan	0,24	159,49
4.	Bangka Tengah	0,40	140,12
5.	Belitung	0,50	98,97
6.	Belitung Timur	0,48	112,36
7.	Kata Pangkapinang	0,51	84,26
8.	Prov.Kep. Bangka Belitung	0,47	113,13

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana



Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Meningkatnya kualitas pelayanan penanggulangan bencana	Indeks Resiko Bencana	117,14	98,97	143,71	158,53	148,48

Berdasarkan data capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) dari tahun 2022 hingga tahun 2025 menunjukkan adanya tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022 nilai IRB tercatat sebesar 148,48, kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 158,53 yang menunjukkan tingkat risiko bencana yang relatif lebih tinggi pada periode tersebut. Pada tahun 2024 terjadi penurunan nilai IRB menjadi 143,71, lebih baik dibandingkan tahun 2023 dan juga lebih rendah dari target tahun 2024 sebesar 148,48. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Selanjutnya pada tahun 2025 capaian IRB kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 98,97, jauh lebih rendah dibandingkan target tahun 2025 yaitu 117,30 serta lebih baik dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan bencana, mitigasi, serta peningkatan kesiapsiagaan yang dilakukan telah memberikan dampak positif dalam menurunkan tingkat risiko bencana di daerah. Secara keseluruhan, walaupun formulasi perhitungan IRB hanya bisa dilakukan oleh BNPB namun tren penurunan nilai IRB dari tahun 2023 hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan kinerja dalam penanggulangan bencana semakin meningkat, sehingga tingkat risiko bencana di wilayah tersebut dapat ditekan secara signifikan.

BENCANA	SKOR BAHAYA A	SKOR KERENTANAN N	SKOR KAPASITAS AS	IRBI	IRB KABUPATEN
	H	V	C	R	
Banjir					98,97
Banjir Bandang					
Cuaca Ekstrem					
Gelombang Ekstrem dan Abrasi					
Gempabumi					
Kebakaran Hutan dan Lahan					
Kekeringan					
Tanah Longsor					

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut Indeks Resiko Bencana Kabupaten Belitung adalah 98,97 atau kategori “SEDANG”.

Faktor pendorong : Indeks Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*). Komponen 27 bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempabumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan. Oleh karena itu, indeks risiko bencana dapat dicapai melalui strategi peningkatan komponen kapasitas (*coping capacity*) yang diukur berdasarkan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan uraian pengaruh komponen dalam penurunan indeks risiko bencana serta strategi pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas, capaian penanggulangan bencana dinilai berdasarkan investasi peningkatan komponen kapasitas. Untuk itu, komponen bahaya dan kerentanan diasumsikan konstan atau sama.

Faktor Penghambat : Komponen kapasitas: dihitung berdasarkan kapasitas pemerintah daerah berdasarkan perangkat Penilaian IKD (71 Indikator).

Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan didaerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi di tataran daerah. Hal ini sulit terealisasi manakala dukungan semua pihak yang terkait belum optimal .



Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja diperlukan untuk mengetahui *cost per outcome* atau biaya/anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja serta menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang ditetapkan telah efektif sebagai pengungkit untuk mencapai kinerja. Analisis efisiensi penggunaan anggaran menggunakan formula pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 466 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, dengan penyesuaian dan modifikasi sesuai kondisi di Pemerintah Daerah.

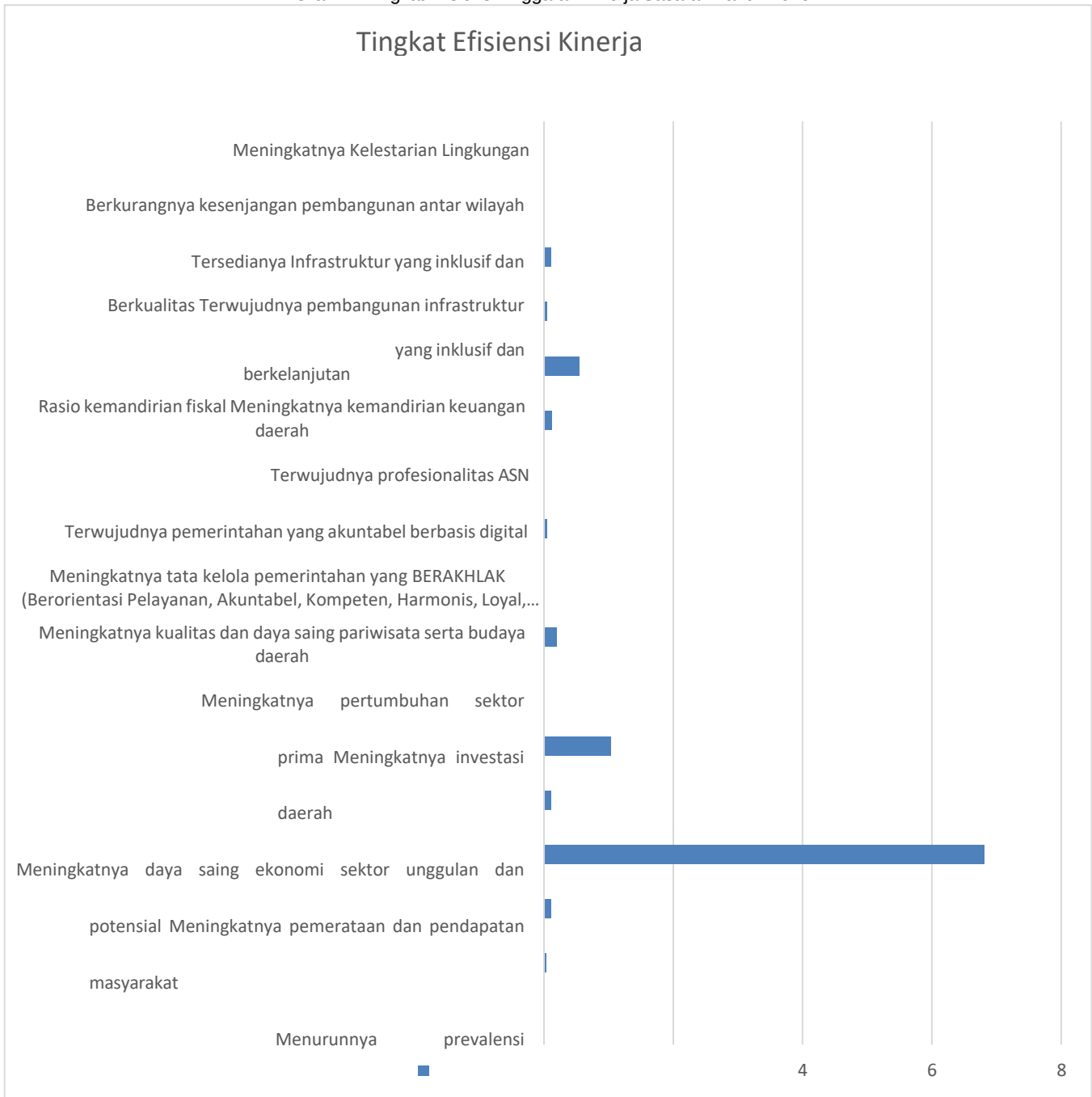
Efisiensi pada pelaporan ini dihitung dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran sasaran dengan capaian kinerja sasaran dan realisasi anggaran sasaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran sasaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran mencapai 100% atau lebih, dan tingkat efisiensi anggaran lebih dari sama dengan 0%. Batas atas kewajaran tingkat efisiensi anggaran adalah maksimal 20%.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja Sasaran kurang dari 100%, dan/atau tingkat efisiensi anggaran kurang dari 0%.
- c. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada tahun 2025

Berdasarkan informasi yang tertuang pada tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja outcome adalah sebesar 105,18% dengan tingkat efisiensi anggaran 0,30%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung sudah cukup efektif dan efisien dalam menggunakan sumber dayanya untuk mencapai kinerja sasaran daerah. Kemudian secara umum capaian anggaran pada seluruh sasaran daerah juga sudah baik karena tidak ada capaian dengan deviasi keuangan lebih dari 10 persen. Namun demikian, masih terdapat tiga sasaran daerah yang belum efisien dalam memanfaatkan sumber daya dikarenakan capaian kinerja tidak melampaui target dan empat indikator sasaran yang masih dalam perhitungan realisasi tahun 2025.



Grafik Tingkat Efisiensi Anggaran Kinerja Sasaran Tahun 2025



Pada sasaran ketujuh “Meningkatnya investasi daerah”, perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi anggaran menunjukkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Capaian Kinerja Sasaran ketujuh pada tahun 2025 sebesar 60,83% yang artinya realisasi lebih kecil dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kemudian, realisasi anggaran untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp1.218.499.342,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp1.598.829.291,00 atau capaian serapan anggarannya sebesar 76,21%.

Selanjutnya pada sasaran sembilan “Meningkatnya kualitas dan daya saing pariwisata serta budaya daerah” juga menunjukkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Capaian Kinerja Sasaran kesembilan pada tahun 2025 sebesar 82,63% yang artinya realisasi lebih kecil dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kemudian, realisasi anggaran untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp26.088.323.915,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp28.033.522.282,00 atau capaian serapan anggarannya sebesar 93,06%.

Pada sasaran tujuh belas “Meningkatnya Kelestarian Lingkungan” juga menunjukkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Capaian Kinerja Sasaran kesembilan pada tahun 2025 sebesar 91,57% yang artinya realisasi lebih kecil dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kemudian, realisasi anggaran untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp25.420.711.851,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp27.296.078.935,00 atau capaian serapan anggarannya sebesar 93,13%.

Selanjutnya, evaluasi terhadap pencapaian kinerja sasaran yang belum tercapai akan dilaksanakan denganmencermati faktor-faktor penghambat kinerja dan memetakan aktor dan stakeholder terkait dalam *crosscutting* intervensi program dan kegiatan pendorong kinerja agar pada tahun tahun 2026 realisasi sasaran tersebut dapat tercapai.



AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kebijakan umum keuangan/anggaran RPD Kabupaten Belitung tahun 2024 – 2026 diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi:

- Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur;
- Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah infrastruktur dasar dan lainnya;
- Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 27 Tahun 2025 tanggal 1 September 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 1.068.887.632.449,00 berkurang sejumlah Rp. 30.615.057.345,30,00 sehingga menjadi Rp. 1.038.272.575.103,70,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan daerah:	
Semula	Rp. 953.887.632.449,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. (14.638.433.227,00)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 939.249.199.222,00
Belanja daerah:	
Semula	Rp. 1.068.887.632.449,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. (30.615.057.345,30)
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.038.272.575.103,70
Pembiayaan daerah:	
Penerimaan pembiayaan	
Semula	Rp. 115.000.000.000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. (15.976.624.118,30)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 99.023.375.881,70
Pengeluaran pembiayaan	
Semula	Rp. --
Bertambah/ (berkurang)	Rp. --
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. --
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 99.023.375.881,70
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. --

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hasil akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah: (1) Pendapatan pajak daerah, (2) Pendapatan retribusi daerah, (3) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari komponen (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari komponen (1) Pendapatan hibah, (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Upaya-upaya efektif dalam penggalan sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Yang Sah yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparaturnya maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2.69.: Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	940.590.481.222,00	940.242.247.555,09	99,96	977.370.104.650,33
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	202.354.324.639,00	213.489.485.745,09	105,50	185.033.042.636,33
	Pajak Daerah	109.084.621.493,00	104.082.515.970,00	95,41	95.733329497,25.
	Retribusi Daerah	78.007.440.946,00	92.848.376.288,50	119,02	28.328.411.252,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.600.000.000,00	4.886.428.412,02	87,25	5.566.654.063,95
	Lain-lain PAD yang Sah	9.662.262.200,00	11.672.165.074,57	120,80	55.404.647.823,13
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	202.354324.639,00	213.489.485.745,09	105,50	185.033.042.636,33
2	PENDAPATAN TRANSFER	738.236.156.583,00	726.752.761.810,00	98,44	781.559.654.246,00
	Dana Perimbangan	-	-	-	661.132.445.242,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	-	80.735.062.654,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	485.393.500.051,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	-	-	10.766.758.288,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	-	-	84.237.114.249,00
	Dana Bagi Hasil (DBH)	39.425.962.000,00	38.705.944.300,00	98,17	-
	Dana Alokasi Umum (DAU)	489.709.683.000,00	478.853.010.054,00	97,78	-
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	102.374.688.190,00	100,057.600.988,00	97,73	-
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	631.510.333.190,00	617.616.555.342,00	97,79	661.132.445.242,00
	Dana Desa	41.614.636.000,00	40.620.586.800,00	97,61	41.477.591.670,00
	Insentif Fiskal	20.586.869.000,00	20.586.869.000,00	100,00	15.976.321.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	62.201.505.000,00	61.207.455.800,00	98,40	57.453.912.670,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.524.318.393,00	47.928.750.668,00	107,64	62.973.287.334,00
	Pendapatan Bagi Hasil	42.743.036.393,00	46.262.718.168,00	108,23	59.001.661.334,00
	Bantuan Keuangan	1781.282.000,00	1.666.032.500,00	93,52	3.971.626.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	44.524.318.393,00	47.928.750.668,00	107,64	62.973.287.334,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	738.236.156.583,00	726.752.761.810,00	98,44	781.559.645.246,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	10.777.416.768,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	10.777.416.768,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	10.777.416.768,00
	JUMLAH PENDAPATAN	940.590.481.222,00	940.242.247.555,09	99,96	977.370.104.650,33

Pengelolaan Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing- masing OPD. Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, Belanja harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan program- program strategis daerah. Belanja Daerah Tahun 2025 dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.64.: Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
1	BELANJA DAERAH	1.039.613.857.103,70	943.425590.181,53	90,74	1.060.978.760.805,40
	BELANJA OPERASI	888.104.600.616,70	798.966.103.189,53	89,96	885.984.171.231,78



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2025

	Belanja Pegawai	529.950.395.509,00	473.457.900.870,00	89,34	475.569.482.472,00
	Belanja Barang dan Jasa	335.543.976.031,70	303.357.300.325,53	90,40	363.320.239.519,78
	Belanja Subsidi	648.688.228,00	540.823.642,00	83,37	638.399.797,00
	Belanja Hibah	21.495.325.230,00	21.162.331.642,00	98,45	46.220.077.443,00
	Belanja Bantuan Sosial	466.215.618,00	447.746.725,00	96,03	235.972.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	888.104.600.616,70	798.966.103.189,53	89,96	885.984.171.231,78
2	BELANJA MODAL	43.619.973.682,00	38.837.469.692,00	89,03	67.145.369.203,62
	Belanja Modal Tanah	500.000.000,00	491.325.000,00	98,26	4.135.660.290,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.118.173.570,00	15.344.503.359,00	89,63	26.330.082.535,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.732.488.800,00	8.954.328.979,00	76,32	18.418.277.038,62
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.192.587.965,00	10.996.019.657,00	98,24	14.696.115.290,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.037.603.347,00	3.012.397.697,00	99,17	3.400.250.200,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	39.120.000,00	38.895.000,00	99,42	164.983.850,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	43.619.973.682,00	38.837.469.692,00	89,03	67.145.369.203,62
	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.250.000.000,00	-	-	-
	Belanja Tidak Terduga	1.250.000.000,00	-	-	-
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	1.250.000.000,00	-	-	-
3	BELANJA TRANSFER	106.639.282.805,00	105.622.017.300,00	99,04	107.849.220.370,00
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	10.931.713.305,00	10.908.500.000,00	99,78	8.774.242.924,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	879.333.000,00	879.330.000,00	99,99	987.814.876,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	300.0000.0000,00	300.000.000,00	100,00	-
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	94.528.236.500,00	93.534.187.300,00	98,94	98.096.162.570,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	106.639.282.805,00	105.622.017.300,00	99,04	107.849.220.370,00
	JUMLAH BELANJA	1.039.613.857.103,70	943.425.590.181,53	90,74	1.060.978.760.805,40
	SURPLUS/DEFISIT	- 99.023.375.881,70	- 3.183.342.626,44	3,21	- 83.608.656.155,07

Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
- 2) Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan.
- 3) Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut ;



Tabel 3.65.: Komposisi Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
1	PEMBIAYAAN DAERAH	99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	100,00	182.632.032.036,77
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	100,00	182.632.032.036,77
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	100,00	182.632.032.036,77
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	100,00	182.632.032.036,77
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	3.000.000.000,00
	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	3.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	3.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	99.023.375.881,70	99.023.375.881,70	100,00	182.632.032.036,77
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	95.840.033.255,26	-	99.023.375.881,70



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Tujuan dari tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Selain itu, tugas pembantuan diberikan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Implementasi tugas pembantuan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah membiayai langsung melalui kementerian teknis yang memberikan pendanaan kepada pemerintah daerah melalui dinas teknis di daerah untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah yang didasarkan oleh usulan dari dinas teknis daerah. Hal ini diberikan atas pertimbangan bahwa tugas pembantuan akan lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan tugas pembantuan tersebut akan lebih bersifat sebagai pendorong dan penguat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah guna mencapai suatu kondisi kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Belitung tidak ada tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.

3.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Belitung tidak menerima dana tugas pembantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat.

3.2 TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Belitung tidak menerima dana tugas pembantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Belitung yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas didalam pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan. Adapun Standar Pelayanan Minimal yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan Pendidikan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sedangkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pelayanan Minimal Pendidikan yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Pendidikan Kesetaraan.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025 berdasarkan dokumen perencanaan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Satuan	Target Tahun 2025
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	4.119
2	Pendidikan Dasar	Orang	26.809
3	Pendidikan Kesetaraan	Orang	807

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2025

4.1.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan tiap jenjang dinyatakan dengan persentase berdasarkan rumusan yang telah dibuat. Persentase Capaian SPM tiap jenjang pada tahun 2024 digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target SPM (Orang)	Realisasi Capaian	Realisasi Persentase (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	4.119	4.176	101,38
2	Pendidikan Dasar	26.809	27.651	103,14
3	Pendidikan Kesetaraan	807	527	65,3

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2025



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2025

No.	KODE APLIKASI E-SPM	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERHAK MENERIMA LAYANAN DASAR	CAPAIAN TW IV TAHUN 2025
1	2	3	4	5	6	7
A.	Bidang Pendidikan					
1.	KI20250310035907500249	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah yang Harus Dilayani	Warga Negara	4.119	4.176
			Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 tahun	Persentase	100,00	78,74
	KI20250310035934002203		1. Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persentase	77,23	100,00
	KI20250310035939002204		2. Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / DIV	Persentase	77,80	78,92
2.	KI20250310035919500250	Pendidikan Dasar	Jumlah yang Harus Dilayani	Warga Negara	26.809	27.651
			Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 15 Tahun	Persentase	100,00	98,73
			SD			
	KID20250310040301002205		1. Kemampuan Literasi	Nilai	78,25	65,81
	KID20250310040349002206		2. Kemampuan Numerasi	Nilai	62,54	55,46
	KID20250310040358002207		3. Indeks Iklim Keamanan	Nilai	75,27	76,02
	KID20250310040404002208		4. Indeks Iklim Kebhinekaan	Nilai	71,58	72,43
	KID20250310040409002209		5. Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai	58,12	60,48
			SMP			
	KID20250310040448002210		1. Kemampuan Literasi	Nilai	84,25	78,63
	KID20250310040455002211		2. Kemampuan Numerasi	Nilai	75,59	67,34
	KID20250310040506002212		3. Indeks Iklim Keamanan	Nilai	73,63	74,98
	KID20250310040515002213		4. Indeks Iklim Kebhinekaan	Nilai	72,01	72,86
	KID20250310040523002214		5. Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai	59,91	62,16
3,	KI20250310040007500251	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah yang Harus Dilayani	Warga Negara	807	527
	KID20250310040836002215		Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 - 18 Kesetaraan	Persentase	100,00	18,85

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2025



4.1.4 Alokasi Anggaran

Urusan Pendidikan pada tahun Anggaran 2025 telah dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 243.875.152.514,00 dengan realisasi sebesar Rp 225.966.313.058,00 atau terserap 92,66% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3
Realisasi Belanja Urusan Pendidikan Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Belanja Pegawai	188.852.167.188,00	173.816.403.458,00	92.04
2.	Belanja Barang dan Jasa	35.823.736.183,00	33.271.905.771,00	92.88
3.	Belanja Hibah	8.904.870.000,00	8.775.639.190,00	98.55
4.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.696.092.906,00	4.577.004.843,00	97.46
5.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.538.000.000,00	2.489.748.010,00	98.10
6.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	32.672.890,00	32.649.089,00	99.93
7.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.027.613.347,00	3.002.962.697,00	99.19
Jumlah		243.875.152.514,00	225.966.313.058,00	92,66

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2025

Adapun alokasi anggaran per Program untuk pembiayaan pembangunan Daerah di bidang Pendidikan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2025

No	Program Pengelolaan Pendidikan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	25.050.403.776,00	23.953.595.844,00	95.62
2	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.992.777.272,00	14.546.209.554,00	97.02
3	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.032.877.324,00	4.839.269.207,00	96.15
4	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.226.445.384,00	2.063.934.230,00	92.70
Jumlah		47.302.503.756,00	45.403.008.835,00	95.98

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2025

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) perlu didukung oleh sumber daya Manusia yang mumpuni baik dari segi jumlah maupun kompetensi yang dimilikinya. Gambaran Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :



Tabel 4.5
Dukungan Personil SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

No	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat / Gol	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
1	65	S2 : 2 orang S1 : 49 orang D3 : 4 orang SMA : 10 orang	Gol II : 7 orang Gol III : 40 orang Gol IV : 18 orang	Esl.II : 1 Esl.III : 6 Esl.IV : 10	48 orang

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2025

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Belitong secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya dan untuk Tahun 2025 capaiannya sebesar 9,11 Tahun, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 9,05 Tahun. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

Permasalahan

1. Masih banyak penduduk usia sekolah yang belum mendapatkan layanan pendidikan.
2. Kualitas layanan pendidikan yang belum memenuhi standar yang di tetapkan.
3. Pemenuhan dan pemerataan guru belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang pendidikan dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi didaerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;
4. Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di PAUD/TK, SD dan SMP, masih adanya guru yang belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengajar dengan metode yang efektif serta belum memiliki sertifikat pendidik;
5. Sekolah dan guru yang belum memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi secara optimal dalam proses pembelajaran;
6. Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran dan asesmen di sekolah.
7. Keterbatasan sarana dan prasarana Pendidikan.
8. Kesenjangan kompetensi antar guru, terutama dalam inovasi pembelajaran berbasis digital.

Solusi

1. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBN, serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah;
2. Pemenuhan penerimaan dan pengadaan guru baru berdasarkan formasi ASN sesuai kebutuhan daerah serta penyebaran guru ke daerah yang kekurangan tenaga pendidik;
3. Memberikan kesempatan pendidikan penyetaraan ke jenjang yang lebih tinggi, S1, S2 atau S3, baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya murni para guru;
4. Peningkatan pelatihan dan sertifikasi guru, insentif bagi guru untuk meningkatkan kualitas mengajar
5. Pendidikan saat ini masih sering berfokus pada aspek akademik, sementara pendidikan karakter sering kali terabaikan. Untuk membentuk generasi yang memiliki integritas, etika, dan kepedulian sosial sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Sekolah perlu lebih banyak mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum serta mendorong kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membentuk kepribadian siswa;
6. Implementasi Pendidikan Berkelanjutan diantaranya: Pelatihan dan Sertifikasi Profesional, Pendidikan Inklusif untuk Semua Usia, Edukasi Lingkungan dan Keberlanjutan serta Pembelajaran Berbasis Teknologi.



- 7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
- 8. Peningkatan dan Optimalisasi Sarana Prasarana TIK
 - a. Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat TIK
 - b. Penyediaan Jaringan Internet yang Lebih Merata
 - c. Pembuatan Bank Soal dan Sumber Belajar Digital
- 9. Mengatasi Kesenjangan Kompetensi Guru dalam Inovasi Pembelajaran Digital
 - a. Pelatihan Berjenjang Berdasarkan Level Kompetensi Guru
 - b. Program Guru Penggerak TIK dan Pembelajaran Berbasis Digital
 - c. Pemberian Apresiasi dan Insentif bagi Guru yang berprestasi dan Inovatif

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pelayanan Kesehatan Balita
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi
- Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Dalam penerapan dan pencapaian SPM di kabupaten Belitung juga melakukan penghitungan kebutuhan untuk tenaga serta sarana dalam menunjang pencapaian SPM ini. Berikut Data penghitungan kebutuhan tenaga, alat / sarana :

Tabel 4.6
Penghitungan Kebutuhan Tenaga Serta Sarana Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

No.	Indikator	Kebutuhan	Tersedia	Keterangan
1	Pelayanan kesehatan Ibu hamil			
	Vaksin tetanus Difteri	1.960 Vial	258 Vial	
	Tablet tambah darah	441.180 Tablet	441.180 Tablet	
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Tes Kehamilan	2.451 Paket	2.451 Paket	



No.	Indikator	Kebutuhan	Tersedia	Keterangan
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	2.451 Paket	2.451 Paket	
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	2.451 Paket	1.541 Paket	
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	367 Paket	367 Paket	
	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining Triple Eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis HIV	2.451 Paket	2.451 Paket	
	Kartu Ibu	2.451 Paket	2.451 Paket	
	Buku KIA	2.451 Buku	2.460 Buku	
	Media Promosi KIE	9 Paket	9 Paket	
	Gel USG	163 Botol	163 Botol	
	Dokter/dokter spesialis kebidanan	25 Orang	25 Orang	
	Bidan	92 Orang	92 Orang	
	Perawat	117 Orang	117 Orang	
	Tenaga Kefarmasian	20 Orang	20 Orang	
	Tenaga Gizi	13 Orang	13 Orang	
2	Pelayanan kesehatan Ibu bersalin			
	Formulir patograf	2.339 Formulir	2.339 Formulir	
	Kartu Ibu	2.451 Paket	2.451 Paket	
	Buku KIA	2.451 Buku	2.460 Buku	
	Media Promosi KIE	9 Paket	9 Paket	
	Dokter/dokter spesialis kebidanan	25 Orang	25 Orang	
	Bidan	92 Orang	92 Orang	
	Perawat	117 Orang	117 Orang	
	Tenaga Kefarmasian	20 Orang	20 Orang	
	Tenaga Gizi	13 Orang	13 Orang	
3	Pelayanan kesehatan Bayi baru lahir			
	Vaksin hepatitis B	2.228 Dosis	2.456 Dosis	
	Vitamin K Injeksi	2.228 Ampul	2.060 Ampul	
	Salep/tetes mata antibiotic	2.228 Tube	2.096 Tube	
	Formulir Bayi baru lahir	2.228 Formulir	2.228 Formulir	
	Formulir manajemen terpadu bayi muda (MTBM)	6684 Formulir	6.684 Formulir	
	Buku KIA	2451 Buku	2.460 Buku	
	Media Promosi KIE	9 Paket	9 Paket	



No.	Indikator	Kebutuhan	Tersedia	Keterangan
	Dokter / Dokter Spesialis Anak	25 Orang	25 Orang	
	Bidan	92 Orang	92 Orang	
	Perawat	117 Orang	117 Orang	
	Tenaga Kefarmasian	20 Orang	20 Orang	
	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	11 Orang	11 Orang	
	Tenaga Gizi	13 Orang	13 Orang	
	Kader Kesehatan	1005 Orang	1005 Orang	
4	Pelayanan Kesehatan Balita			
	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	11.319 Formulir	11.319 Formulir	
	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	11.319 Formulir	11.319 Formulir	
	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	11.319 Buku	22.638 Buku	
	Vitamin A Biru	822 Kapsul	3.300 Kapsul	
	Vitamin A Merah	9.027 Kapsul	50.500 Kapsul	
	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib, Campak, Rubella	2.228 Vaksin	2.228 Vaksin	
	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	2.228 Vaksin	2.228 Vaksin	
	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	2.228 Vaksin	2.228 Vaksin	
	Peralatan Anafilaktik	2.228 Vaksin	2.228 Vaksin	
	Bidan	2.228 Vaksin	2.228 Vaksin	
	Dokter	2.228 Vaksin	2.228 Vaksin	
	Perawat	2.228 Vaksin	2.228 Vaksin	
	Ahli Gizi	2.228 Unit	37.470 Unit	
	Guru Paud	9 Paket	9 Paket	
	Kader kesehatan	9 Paket	9 Paket	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			
	Buku raport kesehatanku	27.306 Buku	27.306 Buku	
	Buku pemantauan kesehatan	27.306 Buku	27.306 Buku	
	Kuesioner skrining kesehatan	27.306 Dokumen	27.306 Dokumen	
	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	27.306 Formulir	27.306 Formulir	
	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	27.306 Formulir	27.306 Formulir	
	Alat Pemeriksaan HB	9 Alat	9 Alat	



No.	Indikator	Kebutuhan	Tersedia	Keterangan
	Strip HB Sasaran Remaja Putri	1.458 Strip	1.458 Strip	
	Media Promosi KIE	9 Paket	9 Paket	
	Dokter/Dokter gigi	25 Orang	25 Orang	
	Bidan	92 Orang	92 Orang	
	Perawat	117 Orang	117 Orang	
	Tenaga Gizi	13 Orang	13 Orang	
	Tenaga Kefarmasian	20 Orang	20 Orang	
	Tenaga kesehatan masyarakat	15 Orang	15 Orang	
	Guru	80 Orang	224 Orang	
	Kader kesehatan	1005 Orang	1005 Orang	
6	Pelayanan kesehatan Usia Produktif			
	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	45 Paket	45 Paket	
	Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	9 Paket	9 Paket	
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	9 Dokumen	9 Dokumen	
	Dokter	25 Orang	25 Orang	
	Perawat	117 Orang	117 Orang	
	Bidan	92 Orang	92 Orang	
	Tenaga Gizi	13 Orang	13 Orang	
	Tenaga Kesehatan masyarakat	15 Orang	15 Orang	
	Tenaga non kesehatan terlatih	1005 Orang	1005 Orang	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			
	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	9 Paket	9 Paket	
	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	9 Paket	9 Paket	
	Buku kesehatan lansia	21.243 Buku	21.243 Buku	
	Dokter	25 Orang	25 Orang	
	Bidan	92 Orang	92 Orang	
	Perawat	117 Orang	117 Orang	
	Tenaga gizi	13 Orang	13 Orang	
	Tenaga Kesehatan masyarakat	15 Orang	15 Orang	



No.	Indikator	Kebutuhan	Tersedia	Keterangan
	Tenaga non kesehatan terlatih	1005 Orang	1005 Orang	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	18 Paket	18 Paket	
	Tensimeter	9 Unit	9 Unit	
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	9 Dokumen	9 Dokumen	
	Dokter	25 Orang	25 Orang	
	Bidan	92 Orang	92 Orang	
	Perawat	117 Orang	117 Orang	
	Tenaga Gizi	13 Orang	13 Orang	
	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	11 Orang	11 Orang	
	Tenaga Kefarmasian	20 Orang	20 Orang	
	Tenaga Kesehatan masyarakat	15 Orang	15 Orang	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus			
	Glukometer	9 Unit	9 Unit	
	BMHP (Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet)	9 Unit	9 Unit	
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	3.495 Formulir	3.495 Formulir	
	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	9 Pedoman	9 Pedoman	
	Dokter	25 Orang	25 Orang	
	Perawat	117 Orang	117 Orang	
	Bidan	92 Orang	92 Orang	
	Tenaga Kefarmasian	20 Orang	20 Orang	
	Tenaga Gizi	13 Orang	13 Orang	
	Tenaga Kesehatan masyarakat	15 Orang	15 Orang	
	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	12 Orang	12 Orang	
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) Berat			
	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	9 Buku	9 Buku	
	Penyediaan Psikofarmaka	9 Paket	9 Paket	



No.	Indikator	Kebutuhan	Tersedia	Keterangan
	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	329 Formulir	329 Formulir	
	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	9 Media	9 Media	
	Dokter	25 Orang	25 Orang	
	Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dibidang kesehatan jiwa	9 Orang	9 Orang	
	Tenaga Profesional lainnya	9 Orang	9 Orang	
	Tenaga lain yang terlatih dibidang kesehatan jiwa	9 Orang	9 Orang	
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis			
	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	100 Paket	100 Paket	
	Reagen Zn TB	232 Kit	232 Kit	
	Masker bedah dan Masker N95	292 Paket	1.277 Paket	
	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	34 Paket	34 Paket	
	Catridge tes cepat molekuler	3.378 Tes	3.378 Tes	
	Formulir pencatatan dan pelaporan	9 Dokumen	9 Dokumen	
	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	9 Dokumen	9 Dokumen	
	Tuberkulin	22 Vial	79 Vial	
	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	17 Orang	17 Orang	
	Perawat	11 Orang	11 Orang	
	Tenaga Kefarmasian	10 Orang	10 Orang	
	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	16 Orang	16 Orang	
	Penata Rontgen	2 Orang	2 Orang	
	Tenaga kesehatan masyarakat	10 Orang	10 Orang	
	Kader Kesehatan	39 Orang	39 Orang	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)			
	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	200 Paket	200 Paket	
	Tes cepat HIV (RDT) pertama	3.461 Tes	3.461 Tes	
	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	9 paket	9 paket	
	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor	3461 paket	3.461 Paket	



No.	Indikator	Kebutuhan	Tersedia	Keterangan
	KTP/NIK			
	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	12 orang	12 Orang	
	Perawat	10 Orang	10 Orang	
	Bidan	10 Orang	10 Orang	
	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	10 Orang	10 Orang	
	Tenaga kesehatan masyarakat	10 Orang	10 Orang	
	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	9 Orang	9 Orang	

Sumber : Dinas Kesehatan 2025

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) dengan target sasaran sebagai berikut :

Tabel 4.7
Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

NO	Jenis layanan	Target	Persentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.339	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	2.339	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.228	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	11.319	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.306	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	126.220	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	21.243	100%
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	13.124	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	3.495	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	329	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB	3.378	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	3.461	100%

Sumber : Dinas Kesehatan 2025



4.2.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Belitung tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

No	Jenis layanan	Realisasi	Persentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.874	80,12%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	2.187	93,50%
3	Pelayanan Kesehatan bayi Baru Lahir	2.096	94,08%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	9.929	87,72%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	27.337	100,11%
6	Pelaynan Kesehatan pada Usia Produktif	104.839	83,06%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	19.316	90,93%
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	12.734	97,03%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	3.425	98,00%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	329	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB	3.899	115,42%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	2.900	83,79%

Sumber : Dinas Kesehatan 2025

a. Realisasi Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil tahun 2025 adalah sebesar 82,40%

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan untuk sub kegiatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil didukung dari sumber pembiayaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Kegiatan yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu hamil melalui kegiatan kelas ibu hamil, kunjungan rumah ibu hamil, pemberian Tablet Tambah Darah pada ibu hamil, memberikan buku KMS Ibu hamil pada saat kontak pertama dengan petugas kesehatan (K1), Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Glukoprotein urin, serta pada ibu hamil dilakukan pelayanan antenatal dengan 10T, pemantauan P4K pada ibu hamil.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan diantaranya kader kesehatan yang membantu tenaga kesehatan dalam memberikan informasi tentang adanya ibu hamil kepada tenaga kesehatan dan membantu memasang stiker P4K, pelasaan kelas ibu hamil, yang dipantau oleh tenaga kesehatan.

b. Realisasi Jenis Pelayanan Ibu Bersalin tahun 2025 adalah sebesar 94.80 %

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada sub kegiatan pelayanan ibu bersalin melalui kegiatan pemberian paket persalinan untuk ibu bersalin dengan ekonomi khusus, penguatan Audit Maternal Perinatal (AMP), pelayanan KB Pasca Salin, pelayanan kesehatan ibu nifas, dan lain-lain.



b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Peran swasta dengan adanya bantuan ambulance desa yang diberikan melalui CSR dan digunakan untuk membantu sistem rujukan bagi ibu hamil yang akan bersalin yang mengalami resiko dalam persalinan (PEB, KPD dan lainnya) / komplikasi dalam persalinan. Peran masyarakat dalam hal ini sangat kuat diantaranya selalu berkoordinasi dengan tenaga kesehatan melalui perannya sebagai kader kesehatan di Desa.

c. Realisasi Jenis Pelayanan Bayi Baru Lahir tahun 2025 adalah sebesar 95.07%

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada sub kegiatan pelayanan Bayi Baru Lahir melalui kegiatan DAK Non Fisik yaitu pemberian buku KIA bayi kecil, pelayanan esensial pada bayi baru lahir, Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK), penyediaan fasilitatif kesehatan ibu dan bayi, penyediaan BMHP SHK, serta penyelenggaraan pelatihan konseling menyusui bagi tenaga kesehatan.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Peran masyarakat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir melalui peran serta kader kesehatan yang membantu tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir, serta mencegah terjadinya bayi baru lahir yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, seperti pelayanan perawatan tali pusat.

d. Realisasi Jenis Pelayanan Balita sesuai standar pada tahun 2025 adalah sebesar 90,18%

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada sub kegiatan pelayanan kesehatan anak Balita bersumber dari Anggaran DAK Non Fisik yang meliputi pelayanan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) pada balita, pemberian bantuan berupa bahan makanan untuk balita dengan ekonomi khusus, Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Peran masyarakat dalam hal ini diwujudkan melalui keterlibatan kader posyandu yang bertugas menjalankan pelayanan pada lima (5) meja posyandu sebagai mitra tenaga kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan.

e. Realisasi Jenis Pelayanan Anak Usia Pendidikan pada tahun 2025 adalah sebesar 100.00%

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan bersumber dari DAK Non Fisik Bantuan Operasional Puskesmas (BOK). Sub kegiatan pelayanan kesehatan anak sekolah dilaksanakan melalui kegiatan penjangkaran kesehatan pada anak sekolah, pelayanan kegiatan UKGS dan lain – lain.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi masyarakat berasal dari warga sekolah, khususnya guru UKS/M, yang berperan aktif dalam membantu tenaga kesehatan melaksanakan kegiatan penjangkaran kesehatan pada peserta didik usia pendidikan dasar, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

f. Realisasi Jenis Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2025 adalah sebesar 86.45 %

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada sub kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber dari DAK Non Fisik yaitu BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas. Pendanaan tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penjangkaran Penyakit Tidak Menular (PTM) baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat desa



b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi masyarakat diwujudkan melalui peran serta sebagai kader kesehatan di Posbindu PTM yang membantu tenaga kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular.

g. Realisasi Jenis Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2025 adalah sebesar 92.74%

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada sub kegiatan kesehatan usia lanjut bersumber dari DAK Non Fisik khususnya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas. Dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan posyandu lansia di desa, senam lansia di desa, pemeriksaan kesehatan bagi lansia yang tidak dapat datang ke posyandu melalui kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh puskesmas.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi masyarakat diwujudkan melalui peran serta sebagai kader kesehatan yang membantu tenaga kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di Posyandu Usia Lanjut dan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM).

h. Realisasi Jenis Pelayanan Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2025 adalah sebesar 97.62%

a) Kontribusi Pemerintah Daerah:

Sumber Pendanaan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber dari DAK Non Fisik. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penjangkaran Penyakit Tidak Menular (PTM) baik di tingkat kabupaten maupun desa, jika di desa yang rutin setiap bulan dilakukan kegiatan Posbindu PTM. Penderita hipertensi dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala di fasilitas pelayanan kesehatan serta menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat (GERMAS).

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi dari masyarakat yaitu dengan membantu tenaga kesehatan menjadi kader kesehatan di Posbindu PTM dan kader kesehatan secara keseluruhan dalam membantu tenaga kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan.

i. Realisasi Jenis Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2025 adalah sebesar 98.40 %

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pendanaan pada Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus bersumber dari DAK Non Fisik (BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas) melalui kegiatan penjangkaran penyakit tidak menular baik di Kabupaten maupun tingkat desa, jika di desa yang rutin setiap bulan dilakukan kegiatan Posbindu PTM, untuk penderita DM harus rutin konsumsi obat dan mengatur pola makan serta melaksanakan GERMAS.

b) Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi masyarakat diwujudkan melalui peran serta sebagai kader kesehatan di Posbindu PTM yang membantu tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

j. Realisasi Jenis Pelayanan ODGJB (Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2025 adalah sebesar 100,00%

a) Kontribusi Pemerintah Daerah:

Sumber Pendanaan pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB) bersumber dari DAK Non Fisik (BOK Kabupaten dan Puskesmas). Kegiatan yang dilakukan yaitu penjangkaran orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJB), pemeriksaan kesehatan jiwa, pemeriksaan kesehatan mental, wawancara (jika memungkinkan), edukasi (Jika Memungkinkan) serta proses rujukan ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ).



b) Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi dari masyarakat yaitu membantu memerikan informasi jika ada masyarakat yang mengalami gangguan jiwa di wilayah kerja puskesmas/ kabupaten. sehingga tenaga kesehatan dapat memberikan penanganan yang tepat.

k. Realisasi Jenis Pelayanan TB Paru yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2025 adalah sebesar 100.00 %

a) Kontribusi Pemerintah Daerah:

Pelaksanaan kegiatan penjarangan terduga TBC didukung dari DAK Non Fisik (BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas) serta anggaran APBD Kabupaten Belitung. Semua layanan melakukan Skrining TBC baik secara Aktif dan Masif. Penemuan kasus secara aktif (Active Case Finding) meliputi : Investigasi Kontak dengan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh anggota keluarga dan orang terdekat dari pasien yang sudah terkonfirmasi positif TBC, Skrining di Populasi Berisiko : dengan pemeriksaan massal di tempat-tempat dengan risiko tinggi seperti asrama, lembaga pemasyarakatan, dan daerah padat penduduk. Kegiatannya terintegrasi antara lintas Program, lintas sector, kegiatan ILP, kegiatan CKG, posyandu (terkait resiko balita stunting/ BGM). Layanan serta beberapa lintas sektor (misalnya pemdes, Lembaga Pendidikan, dll) mulai melakukan edukasi/sosialisasi yang lebih luas mengenai gejala TBC di masyarakat sehingga mendorong lebih banyak masyarakat untuk memeriksakan diri secara mandiri jika mengalami batuk berkepanjangan.

b) Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi swasta dalam mendukung program penanggulangan TBC seperti adanya kerja sama dalam pemeriksaan terduga TBC dan juga dalam pengobatan pasien TBC. Fasyankes swasta yang sudah bekerja sama antara lain seperti RS Almah, RS Utama, Klinik Bakti Timah, Klinik Aisyah Medika, Klinik Bhayangkara Polres, Klinik Utama, Klinik Anak Belitung, Lapas Tanjungpandan dan Polkes 02.10.10 TNI AD.

l. Realisasi Jenis Pelayanan HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2025 adalah sebesar 87.03%

a). Kontribusi Pemerintah Daerah:

Untuk kegiatan pelaksanaan penjarangan terduga HIV didukung dari DAK Non Fisik (BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas) juga dari anggaran APBD Kabupaten Belitung. Kegiatan yang dilakukan seperti pemeriksaan/skrining HIV pada kelompok ibu hamil, penderita TBC, pasien IMS, kelompok LSL, kelompok transgender, kelompok WPS, warga binaan Lapas dan pengguna jarum suntik. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait penyakit HIV di masyarakat serta peningkatan kapasitas petugas terkait HIV.

b). Kontribusi swasta/masyarakat:

Kontribusi swasta dalam mendukung program penanggulangan HIV belum maksimal. Fasyankes swasta yang sudah bekerja sama dalam pemeriksaan HIV seperti RS Almah dan RS Utama. Belum adanya komunitas penjangkau untuk kegiatan skrining ataupun penemuan kasus aktif HIV pada kelompok berisiko, seperti LSL, transgender, dan kelompok lainnya.



4.2.4 Alokasi Anggaran

Adapun alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesehatan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.9
Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	1.082.225.900	1.034.158.245
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan pelayanan kesehatan	18.820.000	17.070.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan pelayanan kesehatan	265.887.000	176.963.610
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan pelayanan kesehatan	344.600.150	338.640.750
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan pelayanan kesehatan	410.314.304	405.652.725
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan pelayanan kesehatan	240.768.100	231.063.935
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan pelayanan kesehatan	48.286.900	47.536.500
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	Pengelolaan pelayanan kesehatan	37.912.500	36.862.500
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Pengelolaan pelayanan kesehatan	37.912.500	36.862.500
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan pelayanan kesehatan	119.362.500	118.687.500
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB	Pengelolaan pelayanan kesehatan	128.952.000	126.654.400
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan pelayanan kesehatan	131.360.000	106.144.700

Sumber : Dinas Kesehatan 2025

4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) baik tenaga kesehatan ASN dan Non ASN serta tenaga lainnya seperti guru, kader kesehatan dan lain - lain yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan dasar

Tabel 4.10
Dukungan Personil Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Dukungan Personil
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	267 orang
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	267 orang
3	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	1.283 orang
4	Pelayanan Kesehatan Balita	1.476 orang
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	1.511 orang



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Dukungan Personil
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.267 orang
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.267 orang
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	293 orang
9	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus	294 orang
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	52 orang
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB	105 orang
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	61 orang

Sumber : Dinas Kesehatan 2025

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Beberapa hal yang menjadi permasalahan tidak tercapainya target 100% SPM di bidang kesehatan adalah :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 82.40 %

Pada indikator ini, ibu hamil wajib mendapatkan pelayanan standar secara kualitas dan kuantitas oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dengan frekuensi pemeriksaan minimal 6 kali (1 kali di trimester pertama, 2 kali di trimester kedua dan 3 kali di trimester ketiga) untuk mendapatkan pelayanan 10T dan pelayanan ultrasonografi (USG) minimal 2 kali oleh dokter atau dokter spesialis obstetrik dan ginekologi (pada trimester pertama dan ketiga).

Pada tahun 2025, di Kabupaten Belitung masih terdapat ibu hamil yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar karena tidak memenuhi kriteria pelayanan baik secara kualitas maupun secara kuantitas yang disebabkan karena :

- Masih terdapat ibu hamil melakukan pemeriksaan di atas trimester 1, sehingga secara kualitas tidak memenuhi standar pelayanan.
- Ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya pada trimester 1 sebagian besar karena mereka menyembunyikan kehamilannya dengan sebab : ibu hamil di luar nikah, ibu yang menikah siri, ibu yang kehamilannya >4 kali dan ibu hamil yang berusia > 40 tahun.
- Masih kurangnya pemahaman ibu hamil dan keluarga tentang pentingnya ANC sejak awal kehamilan.
- Masih ada ibu hamil yang tidak terdata karena melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan di luar domisili ibu hamil.
- Belum semua ibu hamil melakukan USG di trimester pertama dan trimester ketiga, sehingga tidak memenuhi standar secara kuantitas dan kualitas.
- Pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan yang tidak terintegrasi antara sesama fasilitas kesehatan milik pemerintah dan fasilitas kesehatan swasta.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 94.80%

Pada indikator ini, ibu wajib bersalin di fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta yang ditolong oleh tim paling sedikit 1 orang tenaga medis dan 2 orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan (dokter, bidan dan perawat atau dokter dan 2 orang bidan).

Di Kabupaten Belitung, dari perkiraan sasaran 2.339 ibu bersalin pada tahun 2025, hanya terdapat ibu bersalin riil sebanyak 2.188 persalinan, sehingga capaian penerima layanan dasar yang dicapai pada indikator ini hanya sebesar 93,50%. Dari persalinan riil tersebut, ada 2 ibu yang tidak bersalin di fasilitas kesehatan. Dari persalinan riil tersebut, ada 2 ibu yang tidak bersalin di fasilitas kesehatan (dirumah ibu), namun tetap ditolong oleh tenaga kesehatan.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 95.07%

Pada indikator ini, bayi yang berusia 0-28 hari wajib mendapatkan pelayanan sesuai standar secara kuantitas (mendapatkan pelayanan minimal 3 kali selama periode neonatal dengan distribusi pada usia 6-48 jam, 3-7 hari dan 8-28 hari setelah lahir) dan secara kualitas sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor : 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.



Dari perkiraan sasaran 2.228 bayi lahir hidup tahun 2025 di Kabupaten Belitung, terdapat 2.174 bayi lahir hidup riil, dimana yang mendapatkan pelayanan sesuai standar hingga usia 28 hari mencapai 94,08%. Dari jumlah lahir hidup riil tersebut, terdapat 78 bayi lahir hidup yang tidak mendapatkan pelayanan standar karena 23 bayi meninggal pada usia rentang waktu 0-28 hari sehingga belum sempat mendapatkan pelayanan dan sisanya belum mencapai masa untuk mendapatkan pelayanan sesuai standar berdasarkan distribusi waktu yang telah ditetapkan. Selain permasalahan tersebut, adanya perpindahan beberapa ibu hamil/ibu bersalin yang pindah lintas kecamatan/kabupaten, berdampak pada akurasi pencatatan dan pelaporan data pelayanan serta pencapaian indikator pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

4. Pelayanan Kesehatan Balita 90.18%

Secara standar, balita yang berusia 0-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan balita sehat dengan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang menggunakan alat antropometri dan alat deteksi dini perkembangan anak; pemberian kapsul vitamin A untuk usia 6-11 bulan 1 kali setahun dan kapsul vitamin A untuk usia 12-59 bulan 2 kali setahun; pemberian imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan untuk anak badutaserta pemberian edukasi dan informasi dan pelayanan balita sakit dengan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Pemantauan pertumbuhan meliputi penimbangan minimal 8 kali setahun; pengukuran tinggi/panjang badan dan lingkar kepala minimal 2 kali/tahun dan sedangkan pemantauan perkembangan dilakukan sesuai usia minimal 2 kali/tahun.

Tahun 2025, capaian pelayanan kesehatan balita di Kabupaten Belitung hanya mencapai 90.18%. Hal ini disebabkan karena :

- Masih rendahnya peran serta masyarakat untuk datang ke posyandu, dimana posyandu merupakan salah satu fasilitas untuk mendapatkan pelayanan standar tersebut.
- Masih adanya orang tua balita yang menolak untuk pemberian imunisasi dasar lengkap bagi balitanya.
- Sasaran banyak yang tidak hadir di kelas ibu balita, sedangkan kelas ibu balita merupakan salah satu akses untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita.
- Masih kurangnya keterlibatan/peran serta lintas sektor dan stakeholder terkait sesuai kewenangan masing-masing dalam memotivasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga.

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 100.00 %

Untuk indikator pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, sudah dilakukan 100% dengan sasaran yang sesuai dengan jumlah anak usia sekolah kelas 1-9 (untuk pendidikan formal) dan usia 7-15 tahun di luar sekolah. Tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaan pelayanan karena jumlah sasaran sesuai dengan riil yang dilayani.

6. Pelayanan Kesehatan pada Penduduk Usia Produktif (15-59 tahun) 86.45 %

Capaian pelayanan pada Penduduk Usia Produktif (15-59 tahun) 86.45%, hal ini disebabkan karena: Kurangnya peran serta dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan di posyandu/posbindu PTM, karena adanya anggapan tubuh dalam kondisi sehat, adanya kekhawatiran apabila tahu akan penyakit/resiko penyakit yang di derita serta karena kesibukan dalam bekerja untuk pemenuhan ekonomi keluarga. Kurang optimalnya kolaborasi lintas sector dan penggerakan masyarakat untuk melakukan skrining faktor resiko penyakit tidak menular di posyandu/posbindu PTM pada penduduk usia produktif .

7. Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut 92.74%

Pada indikator ini, secara standar warga negara yang berusia 60 tahun ke atas berhak untuk mendapatkan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat serta mendapatkan skrining faktor risiko pada usia lanjut minimal 1 kali dalam setahun berupa : pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, lingkar lengan atas, tekanan darah, gula darah, kolesterol, skrining lansia sederhana, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut dan anamnesis perilaku berisiko.

Capaian pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut 92.74% Hal ini disebabkan karena :

- Dukungan keluarga dalam mendampingi lansia ke posyandu lansia masih terbatas karena keluarga yang bekerja.
- Koordinasi dan kolaborasi yang kurang optimal antar program dalam pelayanan Kesehatan untuk usia lanjut, sehingga kegiatan seperti skrining kesehatan, edukasi, atau layanan posyandu tidak saling mendukung secara efektif dan efisiensi dalam cakupan pelayan.



- Jumlah tenaga kesehatan yang terbatas untuk melakukan pelayanan pada lansia yang tidak dapat hadir ke fasilitas kesehatan ataupun posyandu, sehingga lansia yang dilayani hanya lansia yang memang sudah biasa datang ke puskesmas/posyandu.

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 97.62%

Capaian pelayanan kesehatan pada Penderita Hipertensi 97.62% hal ini disebabkan karena:

- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berkunjung ke fasyankes, posyandu/ Posbindu PTM, karena merasa tidak ada keluhan, sehingga resiko penyakit hipertensi tidak terdeteksi.
- Sebagian masyarakat mencari pengobatan sendiri seperti membeli obat di toko/ apotik atau mencari pengobatan alternatif pada saat merasa ada keluhan sakit.
- Masih terdapat kasus hipertensi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) jejaring puskesmas (klinik kesehatan dan tempat praktik mandiri dokter) yang belum terintegrasi dengan pelaporan di puskesmas.

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus 98.40%

Capaian pelayanan kesehatan pada Penderita Diabetes Mellitus 98.40%, hal ini disebabkan karena:

- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berkunjung ke fasyankes, posyandu/ Posbindu PTM, karena merasa tidak ada keluhan, sehingga resiko penyakit diabetes mellitus (DM) tidak terdeteksi.
- Sebagian masyarakat mencari pengobatan sendiri seperti membeli obat di toko/ apotik atau mencari pengobatan alternatif pada saat merasa ada keluhan sakit.
- Masih terdapat kasus diabetes mellitus (DM) pada Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) jejaring Puskesmas (klinik kesehatan dan tempat praktik mandiri Dokter) yang belum terintegrasi dengan pelaporan di Puskesmas.

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB) 100.00%

Untuk indikator pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB) telah tercapai 100%. Yang menjadi tantangan yaitu adanya stigma negatif pada masyarakat yang menganggap bahwa ODGJB merupakan aib bagi keluarga, membahayakan lingkungan sekitar serta dikaitkan dengan kepercayaan terhadap penyakit yang bersifat magic. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB), rencana tindak lanjut yang akan dilakukan meliputi :

- Peningkatan edukasi kepada masyarakat guna mengurangi stigma negatif terhadap ODGJB, serta penguatan pemahaman bahwa gangguan jiwa merupakan kondisi medis yang dapat ditangani.
- Penguatan kerjasama lintas program dan lintas sektor termasuk peran aktif pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan kader kesehatan.
- Peningkatan dukungan dan keterlibatan keluarga dalam pengawasan dan pendampingan pasien sangat diperlukan, khususnya dalam memastikan kepatuhan konsumsi obat serta keberlanjutan pelaksanaan pengobatan.

11. Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis 100.00%

- Dalam pelaksanaan skrining terduga TBC Tahun 2025 secara Kabupaten tercapai dari target 100%. Semua layanan melakukan skrining TBC baik secara aktif dan massif. Yang menjadi tantangan yaitu kondisi di mana capaian Terduga TBC (suspek) tinggi namun Penemuan Kasus (konfirmasi positif) rendah. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan skrining terduga TBC, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan meliputi:

- 1) Inovasi Skrining Aktif dengan Mengalihkan fokus dari sekadar mencari orang batuk ke pelacakan kontak erat secara intensif (contact tracing) yang memiliki yield penemuan kasus jauh lebih tinggi.
- 2) Peningkatan Kapasitas Nakes TBC terkait Program TBC
- 3) Penguatan Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor dalam melakukan skrining TBC ke masyarakat.

- Capaian Mutu Layanan Dasar Program TBC

Untuk jumlah mutu, barang dan jasa terkait program TBC sudah terpenuhi dalam pelayanannya, yaitu 9 Puskesmas, 1 RSUD, 2 RS Swasta, dan 7 Klinik yang sudah bekerjasama dengan program TBC dan terintegrasi dalam SITB.

12. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV 87.03%

Capaian Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV 87.03%, hal ini disebabkan karena:



- Dalam pengelolaan data pemeriksaan layanan belum maksimal dalam hal melakukan validasi data, penginputan data program HIV ke aplikasi SIHA, serta konfirmasi kesesuaian data antara program yang berhubungan dengan HIV seperti KIA, TBC, Triple Eliminasi, dan koordinasi terkait pergantian pengelola program di puskesmas
- Dalam kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait kegiatan program HIV terdapat kendala berupa keterlibatan lintas program terkait kegiatan skrining HIV pada kelompok resiko ibu hamil, TBC dan lain-lain yang belum maksimal dan koordinasi lintas sektor di wilayah kerja masing-masing layanan yang belum maksimal seperti koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan.
- Pada Kelompok resiko penderita TBC, pasien TBC yang berobat di pelayanan kesehatan swasta tidak berkunjung ke puskesmas untuk pemeriksaan HIV meskipun telah di arahkan oleh petugas.
- Tidak adanya komunitas penjangkau untuk kegiatan skrining ataupun penemuan kasus aktif HIV pada kelompok beresiko, seperti LSL, transgender, dll.
- Pada kelompok resiko waria berdasarkan informasi dari puskesmas terjadi penurunan jumlah waria akibat perpindahan keluar daerah.
- Skrining sasaran di tempat hiburan mengalami kendala berupa terbatasnya akses dan informasi sasaran di dalam tempat hiburan.

Hal diatas menjadi kendala sehingga tidak tercapai atau terpenuhinya standar SPM yang telah ditetapkan, serta belum maksimalnya kerjasama dari lintas program maupun lintas sektor lainnya.

Solusi :

Untuk menanggulangi permasalahan di atas diperlukan beberapa solusi sebagai berikut :

1. Memaksimalkan kegiatan/program yang mendapat dukungan dana dan melaksanakan kegiatan dengan membuat evaluasi pertemuan untuk pemahaman Definisi Operasional (DO) dan melakukan peningkatan skrining. Kegiatan lebih banyak didanai oleh Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas yang bersumber dari APBN. Pemanfaatan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.
2. Melakukan kerjasama lintas sektor/lintas program dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
3. Advokasi dengan stake holder terkait untuk mendapatkan dukungan dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bidang kesehatan terutama terkait Standar Pelayanan Minimal.
4. Meningkatkan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui promosi kesehatan
5. Meningkatkan kapasitas petugas sehingga capaian SPM menjadi lebih berkualitas
6. Melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala per bulan/per triwulan pada pengelola program agar dapat melakukan pengumpulan data tepat waktu.
7. Mengefisienkan kegiatan dan memilah dan memprioritaskan pada kegiatan yang menunjang SPM.
8. Menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan digital yang terintegrasi dalam satu platform.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Belitung meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik bagi masyarakat. Pelayanan dasar tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota.

Pelayanan dasar Urusan Pekerjaan Umum difokuskan pada peningkatan cakupan pelayanan air minum dan peningkatan akses sanitasi layak dan aman bagi masyarakat sebagai bagian dari upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal secara bertahap dan berkelanjutan.



4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4.11
Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	3764
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	140

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2025

4.3.3 Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target dan realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025 merupakan gambaran tingkat capaian pelayanan dasar air minum dan pelayanan pengolahan air limbah domestik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung. Target dan realisasi pencapaian pelayanan dasar air minum dan air limbah domestik Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.12
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Target	Realisasi Pencapaian SPM	Realisasi Persentase (%)
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	3764	3644	96,81
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	140	140	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2025

Berdasarkan tabel tersebut, capaian pelayanan dasar menunjukkan tingkat pemenuhan pelayanan air minum dan pelayanan pengolahan air limbah domestik yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025. Selisih antara target dan realisasi capaian menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan peningkatan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

4.3.4 Alokasi Anggaran

Anggaran untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.13 dan 4.14 di bawah ini :

Tabel 4.13
Alokasi dan realisasi anggaran program dan kegiatan yang mendukung penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp.)
1	APBD KAB. BELITUNG	1,018,373,970,435
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	50,203,888,178
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	8,619,653,220
	APBD	6,514,153,220
	A. APBD MURNI	2,174,211,056
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	4,125,000,000



NO	PENDANAAN	PAGU (Rp.)
	D. APBD DAK NON FISIK	214,942,164
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	2,105,500,000

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2025

Tabel 4.14

Alokasi dan realisasi anggaran program dan kegiatan yang mendukung penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KAB. BELITUNG				8,627,335,020	8,294,186,653	96.14 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				7,982,335,020	7,653,385,153	95.88 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			7,982,335,020	7,653,385,153	95.88 %
	1.03.03.2.01.0029	29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	2,099,283,506	2,073,725,803	98.78 %
	1.03.03.2.01.0032	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaian	SR	5,883,051,514	5,579,659,350	94.84 %
	JUMLAH INDIKATOR				7,982,335,020	7,653,385,153	95.88 %
	JUMLAH PROGRAM				7,982,335,020	7,653,385,153	95.88 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				645,000,000	640,801,500	99.35 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559			645,000,000	640,801,500	99.35 %
	1.03.05.2.01.0039	39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	595,000,000	592,774,000	99.63 %
	1.03.05.2.01.0040	40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	50,000,000	48,027,500	96.06 %
	JUMLAH INDIKATOR				645,000,000	640,801,500	99.35 %
	JUMLAH PROGRAM				645,000,000	640,801,500	99.35 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2025



4.3.5 Dukungan Personil

Pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum juga didukung oleh sumber daya manusia yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan pelayanan dasar air minum dan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Jumlah dan kualifikasi personil yang mendukung pelaksanaan penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.15
Jumlah dan kualifikasi personil yang mendukung pelaksanaan penerapan SPM
Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Bidang Perencanaan	2
4	Bidang Cipta Karya	6
9	UPT Pengelolaan Air Minum	2
	Jumlah	12

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2025

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025 masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian target pelayanan dasar, antara lain belum tersusunnya basis data yang komprehensif dalam penerapan SPM, belum seluruh indikator dan definisi operasional SPM mudah dipahami serta sepenuhnya sesuai dengan karakteristik daerah, serta belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Permasalahan dan upaya penyelesaian dalam penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 4.16
Permasalahan dan upaya penyelesaian dalam penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Permasalahan	Upaya Penyelesaian
1	Belum tersusunnya database yang komprehensif dalam penerapan SPM	Melakukan pemutakhiran dan integrasi data secara bertahap melalui penyusunan basis data SPM yang terintegrasi dengan data sektoral perangkat daerah serta pemanfaatan sistem informasi yang tersedia.
2	Belum semua indikator dan definisi operasional dalam SPM mudah dipahami dan sesuai dengan karakteristik daerah	Melakukan penyusunan pedoman teknis operasional tingkat daerah, peningkatan pemahaman melalui sosialisasi, bimbingan teknis, serta penyesuaian indikator operasional sesuai karakteristik wilayah tanpa mengurangi ketentuan standar nasional.
3	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif antar stakeholder/sektor	Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah melalui rapat koordinasi berkala, pembentukan tim koordinasi penerapan SPM, serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi bersama.

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2025

Berdasarkan tabel tersebut, upaya penyelesaian dilakukan melalui penguatan sistem pendataan dan pemutakhiran database SPM secara terintegrasi, peningkatan pemahaman terhadap indikator dan definisi



operasional melalui sosialisasi dan bimbingan teknis, serta peningkatan koordinasi lintas sektor melalui mekanisme koordinasi dan monitoring secara berkala. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerapan SPM serta mendukung pencapaian target pelayanan dasar secara bertahap dan berkelanjutan.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Jenis Pelayanan Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/kota terdiri dari :

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- 1) Pada saat masa pasca bencana;
- 2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
- 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:

- 1. Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- 2. Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

Di Kabupaten Belitung tidak terjadi bencana sehingga tidak ada SK bencana yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dalam mencapai SPM sebagai berikut :

Tabel 4.17
Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2025



Perhitungan Capaian :

- A. Pencapaian Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu dengan perhitungan :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$$

- B. Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan

Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah,sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan.

Adapun cara Perhitungan Capaian SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\begin{array}{l} \text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas} \\ \text{Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga} \\ \text{Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima} \\ \text{Penyediaan Rumah Layak Huni} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program} \\ \text{Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan} \end{array}} \times 100\%$$

4.4.3 Realisasi

Pada tahun 2025 tidak terealisasi anggaran untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten karena sepanjang Tahun 2025 tidak terjadi bencana alam/lainnya yang dampaknya memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai bencana kabupaten oleh Bupati, sehingga tidak ada rumah korban bencana yang pemiliknya memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam SPM berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Sedangkan untuk Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung tidak ada relokasi program pemerintah daerah.

Tabel 4.18
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	N/A =100%
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2025



4.4.4 Alokasi Anggaran

Anggaran untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.19 di bawah ini :

Tabel 4.19
Realisasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
					(Rp)	%
1	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	APBD	93.472.500,-	-	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2025

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil dalam rangka proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebagai berikut :

Tabel 4.22
Jumlah SDM Dinas PUPR
Dalam Rangka proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No.	Personil	Jumlah
1.	KPA	1 Orang
2.	PPK	1 Orang
3.	PPBJ	1 Orang
4.	Pengawas Lapangan	3 Orang
5.	Penyedia	1 Orang
Jumlah		7 Orang

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2025

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

- ✓ Permasalahan :
- a. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif antar stakeholder/sector;
 - b. Tingkat pemahaman Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum komprehensif antar stakeholder/sector;
 - c. Tidak semua indikator dan definisi operasional dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) mudah dipahami dan sesuai dengan karakteristik Daerah;
 - d. Belum teridentifikasinya perumahan di lokasi rawan bencana dan lahan – lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;



- e. Minimnya alokasi anggaran kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- ✓ Solusi :
- a. Kebijakan pejabat terkait untuk mengakomodir upaya penerapan SPM.
 - b. Dukungan OPD yang terkait dengan Keuangan Daerah.
 - c. Penyiapan dan bimbingan teknis SDM terkait Penyusunan SPM

4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, maka yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Tabel 4.23
Jenis SPM di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	OPD Pelaksana SPM
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Belitung
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung 2025

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Belitung berdasarkan dokumen perencanaan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.24
Target Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No.	Jenis pelayanan dasar	Indikator	Target
1	2	3	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks pencapaian SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%



No.	Jenis pelayanan dasar	Indikator	Target
1	2	3	
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Indeks pencapaian SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks pencapaian SPM pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Indeks pencapaian SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Indeks pencapaian SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
		Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima = 80 %	
		Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu = 20 %	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kab. Belitung 2025

4.5.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Belitung tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Tabel 4.25
Realisasi Pencapaian SPM
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				93,94%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80 %
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	65	65	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				13,94%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Total	Jumlah Mutu Barang /	Jumlah Mutu Barang /	69,72 %
		Jasa Yang Dibutuhkan	Jasa Yang Tersedia	Jasa Yang Belum Tersedia	
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegkan Perda dan Perkada	1656	278	1378	16,79%
	2 . Standar operasional prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan Perda dan Perkada	14	7	7	50%
	3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan Perda dan Perkada	631	325	306	51,51%
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan material dan pelayanan pengobatan	1	1	0	100%
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0	Tidak ada
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	Tidak ada

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Belitung 2025

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						93.83%	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana					88.44%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)			-80%		80.00%	
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	179621	179621	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)			-20%		8.44%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					42.22%	
	1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0	0	0	0.00%	



	2 . Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0	0	0	84.44%	
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%	
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	150	150	0	100.00%	
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	42	42	0	100.00%	
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	4	0	100.00%	
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	13	13	0	100.00%	
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					93.33%	
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	3	2	1	66.67%	
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	1	1	0	100.00%	
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00%	
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00%	
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00%	
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					60.00%	
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	1	1	0	100.00%	
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00%	
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	0	0.00%	
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00%	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					93.06%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah	Jumlah	Yang Belum		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	179621	179621	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	13.06%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /	Jumlah Mutu Yang Terlayani /	Mutu Yang Belum Terlayani /		



			Dipenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					65.28%	
	1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0	0	0.00%	
	2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		0	0	0	0.00%	
	3 . Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		0	0	0	91.67%	
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					83.33%	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	1	1	0	100.00%	
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	0	0.00%	
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00%	
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00%	
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%	
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	1	1	0	100.00%	
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00%	
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00%	
	4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100.00%	
	1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise) *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100.00%	
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan	orang	1	1	0	100.00%	



kebutuhan)							
2) . Gladi Lapang *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu						100.00%	
a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0		100.00%	
b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0		100.00%	
c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0		100.00%	
5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0		100.00%	
1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu						100.00%	
a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365	365	0		100.00%	
b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	1	1	0		100.00%	
c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	1	1	0		100.00%	
d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0		100.00%	
e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0		100.00%	
2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu						100.00%	
a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0		100.00%	
b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0		100.00%	
c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0		100.00%	
d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0		100.00%	
3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu						100.00%	
a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0		100.00%	
b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0		100.00%	
4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu						100.00%	



	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100.00%	
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00%	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					100.00%	
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)							
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	18	18	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				-20%	20.00%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%	
	1 . Respon Cepat Darurat Bencana		0	0	0	100.00%	
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	8	8	0	100.00%	
	2 . Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		0	0	0	100.00%	
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100.00%	
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00%	



	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	100.00%	
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00%	
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100.00%	
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00%	
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00%	
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	0	100.00%	
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						96.94%	
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					96.94%	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00%	
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	32	32	0	100.00%	
PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)					-20%	16.94%	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					84.72%	
	1 . Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	31	31	0	100.00%	
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	1	1	0	100.00%	
	Data Dukung : 1902-20251216064143SOP BPBD.pdf Status : Approved						
	Catatan : Maximal 10 Mb						
	Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.						
	3 . Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	20	15	5	75.00%	



4 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	30	10	20	33.33%	
5 . Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	1	1	0	100.00%	
6 . Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	1	1	0	100.00%	

Sumber : BPBD Kab.Belitung 2025

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran belanja daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM adalah terdiri dari :

Tabel 4.26
Anggaran Pencapaian SPM pada Sat Pol PP Kabupaten Belitung
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum			
Kegiatan	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Alokasi Anggaran	Realisasi
Sub Keg	1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.246.275.000	1.234.858.000
Sub Keg	2. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	52.000.000	49.800.000
Sub Keg	3. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	39.600.000	34.200.000
Sub Keg	4. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	6.680.000,	1.680.000
Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum		1.344.555.000	1.320.538.000

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Belitung 2025

Alokasi anggaran BPBD Kabupaten Belitung dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM adalah :



Tabel 4.27
Anggaran Pencapaian SPM pada BPBD Kabupaten Belitung
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Program Penanggulangan Bencana	759.252.130	589.376.000	77,62
SPM	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	84.334.600	59.676.350	70,76
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	84.334.600	59.676.350	70,76
SPM	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	13.310.010	13.203.450	99,20
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	13.310.010	13.203.450	99,20
SPM	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	661.607.520	516.496.200	78,07
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	661.607.520	516.496.200	78,07
II	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kevakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.247.474.300	948.612.675	76,04
SPM	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1.247.474.300	948.612.675	76,04
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian,Pemadaman,Penyelama tan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.247.474.300	948.612.675	76,04

Sumber : BPBD Kab. Belitung 2025

1.5.5 Dukungan Personil

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 di Kabupaten Belitung didukung oleh Personil Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Belitung.

Tabel 4.28
Alokasi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Satuan	1	
2.	Sekretaris	1	
	Subbag Kepegawaian dan Umum	1	
	Subbagian Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset	1	
	Bendahara	1	
	PPPK Fungsional umum	2	
3.	Kepala Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah	1	
	Seksi Penyelidikan dan penyelidikan	1	
	Seksi pengawasan dan penindakan	1	
	Fungsional Polisi Pamong Praja ahli	4	
	Fungsional Polisi Pamong Praja terampil	3	
	Funsional Umum	2	



No	Unit Kerja	Jumlah	Keterangan
4.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1	
	Seksi penertiban, operasional dan pengendalian	1	
	Seksi samapta	1	
	Fungsional Polisi Pamong Praja ahli	3	
	Fungsional Polisi Pamong Praja terampil	4	
	Fungsional Umum	3	
5.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	1	
	Seksi satuan perlindungan masyarakat	1	
	Seksi bina potensi masyarakat	1	
	Fungsional polisi pamong praja ahli	2	
	Fungsional polisi pamong praja terampil	2	
	Fungsional umum	4	
	Total ASN	43	
6.	Non ASN	94	
	Jumlah	137	Orang

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Belitung 2025

Terhitung per 31 Desember 2024, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung seluruhnya adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) ASN dan 34 (tiga puluh empat) tenaga Non PNS dengan komposisi dilihat dari aspek kelembagaan sebagai berikut:

Tabel 4.29
Komposisi dan Jumlah ASN BPBD Kabupaten BelitungTahun 2025

NO.	J a b a t a n	ASN Berdasarkan Golongan				PPP K VII	Jumlah
		I	II	III	IV		
1.	Kepala Pelaksana				1		1
2.	Sekretariat			2			2
3.	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan			2	1		3
4.	Seksi Penanganan Darurat logistik dan Kebakaran		4	8			12
5.	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi			3			3
6.	Pranata Komputer Terampil					1	1
7.	Arsiparis Terampil					1	1
8.	Penata Penanggulangan Bencana Pertama					1	1
9.	Pemadam Kebakaran Pemula					8	8
10.	Operator Layanan Operasional					2	2
J U M L A H			4	15	2	13	34

Sumber : BPBD Kab. Belitung 2025

Tabel 4.30
Komposisi PPPK Paruh Waktu BPBD Kabupaten BelitungTahun 2025

No.	URAIAN	Jumlah
1.	Operator Layanan Operasional	20
Jumlah		20

Sumber : BPBD Kab. Belitung 2025

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

➤ Permasalahan dan solusi dalam pencapaian target SPM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung,
Permasalahan :

- a) Kesulitan Penetapan jumlah target penerima layanan dasar, dikarenakan jumlah dan lokasi penertiban tidak dapat diketahui secara pasti (sebagai acuan penghitungan jumlah perkiraan yang akan terdampak akibat penegakan Perda dan Perkada);



- b) Standar sarana dan prasarana minimal terutama perlengkapan operasional belum optimal;
- a) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Anggota Satlinmas belum optimal.

Solusi :

- a) Prediksi Jumlah target penerima layanan dasar berdasarkan jumlah pelanggar tahun sebelumnya dan kemudian disesuaikan dengan jumlah tahun berjalan;
 - b) Mengoptimalkan pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada dengan “Tanpa Kecelakaan atau Kerugian”.
 - c) Mengoptimalkan Sarpras yang tersedia dan mengupayakan penyediaan sarana dan Prasarana secara bertahap;
- Permasalahan dan solusi dalam pencapaian target SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung,

Permasalahan :

- a) Identifikasi data warga yang menjadi target layanan SPM belum optimal .
- b) Sulitnya menentukan jumlah target pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan kebakaran dalam SPM karena tentunya tidak ada yang berharap terjadi bencana atau targetnya adalah nol;
- c) Standar sarana dan prasarana minimal terutama perlengkapan operasional belum optimal;
- d) Standar peningkatan kapasitas anggota TRC dan Anggota Damkar belum optimal.

Solusi :

- a) Optimalisasi pendataan warga yang menjadi target layanan SPM;
- b) Merencanakan dan menyusun penyediaan sarana dan Prasarana secara bertahap;
- c) Merencanakan dan menyusun kebutuhan peningkatan kapasitas anggota TRC dan Anggota Damkar.

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota, Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal. Terdapat 5 (lima) jenis pelayanan dasar dalam Permensos tersebut yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab. /kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab. /kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab. /kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab. /kota;
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana pada saat dan pasca tanggap darurat bencana.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sesuai dengan Jenis Layanan yaitu Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar dan Lanjut Usia diketahui bahwa jumlah Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar dan Lanjut Usia yang ada di DTKS adalah sebagai berikut



Tabel 4.31

Hasil Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS T)ahun 2025

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH	KET
1.	Penyandang Disabilitas	632 Orang	
2.	Anak Terlantar	219 Orang	
3.	Lanjut Usia	7923 Orang	
4.	Gelandangan Pengemis	19 Orang	

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2025

Dari data tersebut di atas, setelah dilakukan verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diperoleh Sasaran yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan keterlantaran sesuai dengan jenis layanan:

Tabel 4.32

Sasaran yang harus dipenuhi Pelayanan SPM urusan Sosial pada Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH	KET
1.	Penyandang Disabilitas Terlantar	30 Orang	
2.	Anak Terlantar	15 Orang	
3.	Lanjut Usia Terlantar	60 Orang	
4.	Gelandang Pengemis	19 Orang	

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2025

Sedangkan untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota dan Perlindungan Sosial Korban Bencana pada saat dan pasca tanggap darurat bencana data bersifat asumtif berdasarkan data kejadian pada tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan pemenuhan Kebutuhan Dasar berdasarkan jumlah Warga Negara yang sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya dan belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jumlah jenis layanan dasar yang dikategorikan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis serta Perlindungan Sosial bagi korban bencana yang belum mampu untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya adalah berjumlah sebagai berikut:

Tabel 4.33

Perhitungan Sasaran Pelayanan Dasar SPM Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH SASARAN	RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR	
			Jumlah Yang Sudah Terpenuhi	Jumlah Yang Belum Terpenuhi
1.	Penyandang Disabilitas Terlantar	30 Orang	-	30 Orang
2.	Anak Terlantar	15 Orang	-	15 Orang
3.	Lanjut Usia Terlantar	60 Orang	-	60 Orang
4.	Gelandangan dan Pengemis	19 Orang	-	19 Orang
5.	Korban Bencana Alam dan Sosial	183 Orang	-	183 Orang

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2025

Target capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2025 adalah 100% dengan rincian target capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel berikut :



Tabel 4.34
Target Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Belitong Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Target Capaian
		Indikator Kinerja	2023
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti skala Kabupaten / Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100 %
		Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100 %
		Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100 %
		Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100 %
		Persentase (%)Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	
5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota	100 %
		Persentase (%) Korban Bencana Alam Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota	

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2025

4.6.3 Realisasi

Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar yang telah disusun dijabarkan dalam Program dan Kegiatan. Target pencapaian Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan Dasar yang diperoleh pada setiap tahunnya.

Pelaksanaan Pemenuhan kebutuhan dasar yang tertuang dalam Program dan Kegiatan adalah pemberian bantuan pemakanan atau pemenuhan kebutuhan pangan/pokok bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar.

Selain itu pemenuhan kebutuhan lainnya berupa fasilitasi untuk pelayanan berupa pemenuhan kebutuhan alat bantu, pemenuhan penyediaan Administrasi Kependudukan, fasilitasi pengobatan atau bantuan biaya berobat kepada pihak lain, serta penyediaan sandang.

Realisasi dari pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2025 dapat tergambar dalam tabel 4.35 berikut :



Tabel 4.35
Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2025
Berdasarkan Mutu Layanan

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TUNTAS UTAMA						97.43 %
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI:	Orang	30	30	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	30	30	0.00	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	30	30	0.00	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	30	30	0.00	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	30	30	0.00	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	3	3	0.00	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	30	30	0.00	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	30	30	0.00	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	10	10	0.00	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	4	4	0.00	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5	5	0.00	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	3	3	0.00	100.00 %
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti					96.67 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI:	Orang	15	15	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					16.67 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	



	JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					83.33 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	orang	15	15	0.00	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	15	15	0.00	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	15	15	0.00	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	15	15	0.00	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	15	15	0.00	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	15	15	0.00	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	15	15	0.00	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	0.00	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	15	15	0.00	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	0	0	0.00	100.00 %
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					98.46 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI:	Orang	60	60	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					18.46 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					92.31 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	60	60	0.00	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	60	60	0.00	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	60	60	0.00	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	60	60	0.00	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	60	60	0.00	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	60	60	0.00	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	60	60	0.00	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	0.00	100.00 %



	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Orang	1	1	0.00	100.00 %
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI:	Orang	19	19	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	19	19	0.00	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	19	19	0.00	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	18	18	0.00	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang	Orang	3	3	0.00	100.00 %
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	19	19	0.00	100.00 %
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	19	19	0.00	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	4	4	0.00	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0.00	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2	2	0.00	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	19	19	0.00	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	17	17	0.00	100.00 %
	12 . Layanan rujukan	Orang	17	17	0.00	100.00 %
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					92.00 %
	Ya Terjadi Bencana					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	



	JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)) :	Orang	183	183	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					12.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					60.00 %
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	164	164	0.00	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang	Orang	183	183	0.00	100.00 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0.00	0.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	33	33	0.00	100.00 %

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2025

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Belitung dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4. 6
Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian SPM Tahun 2025
Bidang Urusan Sosial Kabupaten Belitung

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. BELITUNG	1,018,373,970,435
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	9,599,945,891
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	950,861,013
	APBD	950,861,013
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	950,861,013
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2025

Tabel 4.37
Program dan Kegiatan Yang Mendukung Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Belitung Serta Realisasinya APBD Tahun 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. BELITUNG				950,861,013	785,858,598	82.65 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				478,930,204	368,303,195	76.90 %



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2025

	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152			425,656,874	367,177,195	86.26 %
	1.06.04.2.01.0001	1	Penyediaan permakanan	Orang	137,123,081	134,303,570	0%
	1.06.04.2.01.0002	2	Penyediaan sandang	Orang	53,625,000	52,069,650	0%
	1.06.04.2.01.0003	3	Penyediaan alat bantu	Orang	49,062,000	46,597,800	0%
	1.06.04.2.01.0004	4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	8,308,617	4,044,000	0%
	1.06.04.2.01.0005	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	4,051,140	0	0%
	1.06.04.2.01.0006	6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	4,084,887	3,850,000	0%
	1.06.04.2.01.0007	7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	2,665,950	709,400	0%
	1.06.04.2.01.0008	8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	750,000	623,500	0%
	1.06.04.2.01.0009	9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	7,241,487	6,095,650	0%
	1.06.04.2.01.0010	10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	130,684,130	106,991,230	0%
	1.06.04.2.01.0011	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	3,574,437	1,478,145	0%
	1.06.04.2.01.0012	12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	24,486,145	10,414,250	0%
	JUMLAH INDIKATOR				425,656,874	367,177,195	86.26 %
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			53,273,330	1,126,000	2.11 %
	1.06.06.2.01.0001	1	Penyediaan makanan	Orang	14,278,929	0	0%
	1.06.06.2.01.0002	2	Penyediaan sandang	Orang	4,241,836	0	0%
	1.06.06.2.01.0003	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	3,332,800	0	0%
	1.06.06.2.01.0004	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	3,799,000	0	0%
	1.06.06.2.01.0005	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	27,620,765	1,126,000	4.08 %
	JUMLAH INDIKATOR				53,273,330	1,126,000	2.11 %
	JUMLAH PROGRAM				478,930,204	368,303,195	76.90 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		13,537,849	9,118,618	67.36 %
		2.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		343,573,560	313,094,840	91.13 %
		3.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		114,819,400	95,341,945	83.04 %

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2025



4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil merupakan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM tahun 2025 pada Bidang sosial yaitu :

- Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) sebanyak 31 orang
- PPPK Paruh Waktu 5 orang
- Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya:
 1. SDM PKH sebanyak 19 Orang
 2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebanyak 5 Orang
 3. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 49 Orang
 4. Relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebanyak 42 Orang

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial yaitu data PMKS yang bersifat dinamis dan berubah-ubah, terjadinya ego sektoral, keterbatasan SDM Kesejahteraan Sosial, anggaran dan sarana prasarana.

Permasalahan yang dihadapi pun dapat di kategorikan berdasarkan Tahapan penerapan SPM di Bidang Sosial diantaranya sebagai berikut:

- a. Pada tahapan Pengumpulan Data; permasalahan yang dialami diantaranya Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar bersifat dinamis sehingga sulit untuk menetapkan data baku, sedangkan untuk data Gepeng dan korban bencana bersifat asumsi berdasarkan data realisasi pada Tahun sebelumnya.
- b. Pada tahapan Penghitungan Kebutuhan; yang menjadi masalah adalah Permasalahan dalam penghitungan kebutuhan bukan berdasarkan kebutuhan penerima layanan, namun berdasarkan anggaran yang tersedia.
- c. Pada tahapan Perencanaan dan Penganggaran; permasalahan yang dialami yaitu terkait terbatasnya anggaran sehingga penghitungan kebutuhan yang sudah dihitung dalam perencanaan berdasarkan analisis kebutuhan tidak dapat seluruhnya masuk dalam penganggaran.
- d. Pada tahapan Pelaksanaan; permasalahan yang dialami diantaranya terbatasnya SDM membuat layanan yang diberikan kurang maksimal dan masih kurangnya sinergitas dari Lembaga/Instansi lain dalam upaya pemberian layanan.

Selain permasalahan terkait tahapan penerapan SPM, terdapat permasalahan lain yang juga menjadi fokus perhatian dalam pencapaian penerapan SPM yaitu Peran Sekretariat Bersama Penerapan SPM yang belum optimal sehingga banyak permasalahan penerapan SPM tidak menjadi *concern* bersama dalam solusi dan pemecahan masalah.

Adapun langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh yaitu melaksanakan verifikasi dan validasi data PMKS secara periodik dan terencana, penyiapan dan penguatan SDM Kesejahteraan Sosial melalui Diklat dan Bimtek dan anggaran disesuaikan dengan PMKS yang dilayani, penyediaan sarana dan prasarana, dan penguatan PSKS.

4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

➤ Urusan Pendidikan

Rincian Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Pendidikan



a. Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar

- 1) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
- 2) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- 3) Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar
- 4) Pembinaan kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 5) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 6) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 7) Penyelenggaraan proses belajar dan Ujian bagi peserta Didik
- 8) Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas
- 9) Penyediaan Biaya personil peserta didik sekolah dasar
- 10) Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik

b. Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama

- 1) Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama
- 2) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 3) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 4) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 5) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 6) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 7) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

- 1) Pembangunan Sarana, prasarana dan utilitas PAUD
- 2) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
- 3) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
- 4) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- 5) Pengelolaan Dana BOP PAUD
- 6) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- 7) Penyelenggaraan proses belajar PAUD

d. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan

- 1) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 2) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan
- 3) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- 4) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

➤ **Urusan Kesehatan**

Rincian Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan terdiri dari:

Tabel 4.38
Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayana Dasar SPM	Program	Kegiatan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Antenatal Care (ANC)
			Pemberian bantuan keuangan stimulus persiapan persalinan bagi ibu hamil
			Pemberian bantuan berupa bahan makanan untuk ibu hamil dengan ekonomi khusus
			Pengadaan Buku KIA
			Pemberian Tablet Tambah Darah
			Penguatan Audit Maternal Perinatal(AMP)
			Desiminasi hasil kajian Audit Maternal Perinatal(AMP)
			Kelas Ibu Hamil



No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Program	Kegiatan
			Pemantauan P4K
			Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan Keluarga (Ibu Hamil)
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemberian paket persalinan untuk ibu bersalin dengan ekonomi khusus.
			Penguatan Audit Maternal Perinatal(AMP)
			Pelayanan KB Pasca Salin
			Pelayanan Kesehatan ibu Nifas
			Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan Keluarga (Ibu Bersalin)
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penguatan Audit Maternal Perinatal(AMP)
			Pemberian buku KIA bayi kecil
			Pelayanan esensial pada bayi baru lahir
			Skrining hipotiroid kongenital
			Penyeliaan fasilitatif kesehatan ibu dan bayi
			Penyediaan BMHP SHK
			Penyelenggaraan pelatihan konseling menyusui bagi tenaga kesehatan
			Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan Keluarga (Bayi Baru Lahir)
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemberian bantuan berupa bahan makanan untuk balita dengan ekonomi khusus
			Koordinasi Penguatan Buku KIA
			Pemantauan pemanfaatan kohort Balita
			Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
			Deteksi Dini Tumbuh Kembang balita (DDTK)
			Pelayanan imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
			Penguatan orientasi aplikasi SDIDTK
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Pemberian Vit K dan vaksin HB O
			Perawatan Tali Pusat
			Skrining Hipotiroid Kongenital
			Penyeliaan Fasilitatif kesehatan ibu dan bayi
4	Pelayanan Kesehatan balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemberian bantuan berupa bahan makanan untuk balita dengan ekonomi khusus
			Koordinasi Penguatan Buku KIA
			Pemantauan pemanfaatan kohort Balita
			Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
			Deteksi Dini Tumbuh Kembang balita (DDTK)
			Pelayanan imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
			Penguatan orientasi aplikasi SDIDTK
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Koordinasi lintas sector terkait pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
			Penguatan Posyandu Remaja
			Penjaringan kesehatan anak sekolah
			Pelayanan vaksinasi anak sekolah (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)
			Pembinaan PKPR
			Pembinaan UKS/M
			Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan Keluarga (Usia Pendidikan Dasar)
			Penyediaan BMHP (strip HB)
6	Pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengukuran TB, BB, lingkaran perut, tekanan darah, pemeriksaan tajam penglihatan, tajam pendengaran dan skrining Penyakit Tidak Menular
			Pemeriksaan kadar gula dalam darah
			Pemeriksaan SADANIS dan IVA (bagi sasaran wanita usia 30 – 50 tahun) yang sudah kontak seksual



No	Jenis Pelayanan Dasar SPM	Program	Kegiatan
7	Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin
			Memberikan penyuluhan / konseling kesehatan
			Pelayanan kesehatan lansia
			Posyandu Lansia
			Mengikuti sosialisasi dan bimtek terkait pelayanan kesehatan pada usia lanjut melalui zoom meeting dari Kementerian Kesehatan RI
8	Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan Keluarga (Usia Lanjut)
			Pengukuran tekanan darah
			Pelayanan non farmakologi
			Pelayanan farmakologi
			Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Melakukan rujukan jika diperlukan
			Pencatatan dan pelaporan
			Pemeriksaan Klinis
			Pemeriksaan Penunjang
			Terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat)
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terapi farmakologi
			Melakukan rujukan jika diperlukan
			Edukasi kesehatan jiwa dan kepatuhan minum obat
			Pemeriksaan kesehatan jiwa yang meliputi wawancara, pemeriksaan status mental, dan diagnosis klinis
			Melakukan rujukan (oleh Puskesmas) ke Fasilitas kesehatan lanjutan (RSUD dan RSJ)
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberculosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Supervisi Program TBC ke Puskesmas
			Pembinaan dan Pendampingan dalam Penjaringan Terduga TBC dan Deteksi Dini Kasus TBC di Puskesmas
			Pendampingan dan penguatan Pasien TBC RO beresiko Mangkir Berobat di Fasyankes
			Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program P2-TBC dan P2-HIV
			Pertemuan Koordinasi Komunitas Penyintas TBC Kabupaten Belitung
			Pertemuan penguatan Pasien TBC RO beresiko Mangkir Berobat di Fasyankes (Saraseha TBC RO)
			Pembentukan KOPI TBC Belitung
			Pengadaan Katride TCM Tahun 2025
			Pertemuan MICA TBC RO
			Pertemuan Validasi Data TBC Rutin Setiap Bulan
			Feed Back Laporan TBC Semester Ke Bupati dan Semua Lintas Sektor Terkait.
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan perawatan dukungan dan pengobatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (HIV/ PIMS)
			Supervisi Program HIV ke Puskesmas
			Sosialisasi dan screening HIV pada populasi kunci
			Sosialisasi dan screening HIV pada warga binaan pemasyarakatan
			Screening HIV di tempat hiburan
			Peningkatan kasasitas Tim PDP (Perawatan Dukungan Pengobatan) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program P2-TBC dan P2-HIV
			Pertemuan Validasi Data HIV Rutin Setiap Bulan
			Iklan layanan masyarakat terkait HIV melalui radio



Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2025

➤ **Urusan Pekerjaan Umum**

Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

Tabel 4.39
Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2025
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
-1	-2	-3	-4	-5
	KAB. BELITUNG			
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638		
	1.03.03.2.01.0029	29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit
	1.03.03.2.01.0032	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR
	JUMLAH INDIKATOR			
	JUMLAH PROGRAM			
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559		
	1.03.05.2.01.0039	39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga
	1.03.05.2.01.0040	40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2025

➤ **Urusan Perumahan Rakyat**

Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri dari:

- ✓ Program Pengembangan Perumahan
 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

➤ **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Program dan Kegiatan Urusan Ketenraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

Tabel 4.40
Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja

1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)			Indikator	target	realisasi	Persentase capaian
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			100	100	100 %
		1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Laporan	12	12	100%



1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)			Indikator	target	realisasi	Persentase capaian
		2	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit	11	11	100%
		3	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	30	30	100%
		4	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	1	1	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Tahun 2025

Program dan Kegiatan Urusan Ketenraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

Tabel 4.41

Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
(1)	(2)
1	Program Penanggulangan Bencana
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025

➤ **Urusan Sosial**

Rincian Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2024 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:

Tabel 4.42

Program dan Kegiatan Pencapaian SPM Tahun 2025
pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
	KAB. BELITUNG			
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			



	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152		
	1.06.04.2.01.0001	1	Penyediaan permakanan	Orang
	1.06.04.2.01.0002	2	Penyediaan sandang	Orang
	1.06.04.2.01.0003	3	Penyediaan alat bantu	Orang
	1.06.04.2.01.0004	4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
	1.06.04.2.01.0005	5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang
	1.06.04.2.01.0006	6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang
	1.06.04.2.01.0007	7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang
	1.06.04.2.01.0008	8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
	1.06.04.2.01.0009	9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang
	1.06.04.2.01.0010	10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang
	1.06.04.2.01.0011	11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
	1.06.04.2.01.0012	12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen
	JUMLAH INDIKATOR			
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153		
	1.06.06.2.01.0001	1	Penyediaan makanan	Orang
	1.06.06.2.01.0002	2	Penyediaan sandang	Orang
	1.06.06.2.01.0003	3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit
	1.06.06.2.01.0004	4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang
	1.06.06.2.01.0005	5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang
	KEGIATAN LAINNYA			
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA			
		1.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
		2.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
		3.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2025



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan paparan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 yang telah dijelaskan pada Bab-bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Belitung pada tahun 2025 sebagai suatu tahapan proses pemerintahan, dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah terdapat program yang berhasil dilaksanakan dengan baik dan terdapat juga program-program yang belum optimal hasilnya seperti perencanaannya. Namun demikian, pada masa yang akan datang hendaknya dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga program-program dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Belitung dapat mencapai hasil maksimal sesuai dengan yang direncanakan.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2025 masih terdapat kendala dalam realisasinya yang disebabkan masih terbatasnya sumber daya aparatur dan juga sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaannya. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Kabupaten Belitung dapat meminimalisasi berbagai kendala tersebut sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Untuk memperoleh gambaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada masa yang akan datang secara lebih efektif dan efisien, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Meminimalisasi jumlah program-program yang akhirnya batal dilaksanakan dan juga program-program yang ternyata tidak dapat diselesaikan sesuai dengan rencana, diharapkan semua unsur terkait pada masa yang akan datang membuat perencanaan program-program dengan perhitungan yang matang. Dengan demikian diharapkan kinerja dapat lebih efektif karena tidak menghabiskan waktu untuk pelaksanaan program-program yang tidak dapat diselesaikan atau batal dilaksanakan.
- b. Diharapkan OPD dalam penyampaian data dan bahan untuk menunjang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Belitung dapat meningkatkan kelengkapan dari laporannya masing-masing sesuai dengan format yang diberikan demi untuk memudahkan rekapitulasi data. Selain itu diharapkan agar menyampaikan laporannya tepat waktu sehingga penyampaian LPPD Kabupaten Belitung ke Provinsi dapat disampaikan sebelum 31 Maret setiap tahunnya.
- c. Agar kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan Laporan dapat meningkatkan kesadaran tentang tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tidak terkesan hanya baik pada sisi kuantitas personil penyusunan namun tidak pada sisi kualitas/kinerjanya.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan tersusunnya Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar acuan dalam penyusunan program kegiatan pemerintahan pada masa yang akan datang, agar terjadi kesinambungan pembangunan yang terpola dan tersusun secara tahap demi tahap dan sistematis.



Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung
Menurut Struktur Umur, Jenis Kelamin Tahun 2025

NO	STRUKTUR UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0-4	6.566	5.993	12.559
2	5-9	7.777	7.321	15.098
3	10-14	8.414	7.984	16.398
4	15-19	8.016	7.670	15.686
5	20-24	7.944	7.776	15.720
6	25-29	7.870	7.562	15.432
7	30-34	7.569	7.087	14.656
8	35-39	7.405	6.867	14.272
9	40-44	7.942	7.548	15.490
10	45-49	7.572	7.010	14.582
11	50-54	6.220	5.887	12.107
12	55-59	4.969	4.829	9.798
13	60-64	4.017	3.998	8.015
14	65-69	3.036	3.119	6.155
15	70-74	1.874	2.186	4.060
16	>75	1.780	2.584	4.364
TOTAL		98.971	95.421	194.392

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung 2025



Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Pekerjaan Tahun 2025

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Belum/Tidak Bekerja	21.625	19.449	41.074
2	Mengurus Rumah Tangga	2	49.151	49.153
3	Pelajar/Mahasiswa	18.703	17.039	35.742
4	Pensiunan	992	444	1.436
5	Pegawai Negeri Sipil	1.839	2.124	3.963
6	Tentara Nasional Indonesia	209	3	212
7	Kepolisian RI	456	29	485
8	Perdagangan	659	168	827
9	Petani/Pekebun	5.437	267	5.704
10	Peternak	15	3	18
11	Nelayan/Perikanan	7.602	14	7.616
12	Industri	35	4	39
13	Konstruksi	52	2	54
14	Transportasi	53	-	53
15	Karyawan Swasta	8.564	3.104	11.668
16	Karyawan BUMN	195	59	254
17	Karyawan BUMD	19	22	41
18	Karyawan Honorer	739	849	1.588
19	Buruh Harian Lepas	21.183	519	21.702
20	Buruh Tani/Perkebunan	138	32	170
21	Buruh Nelayan/Perikanan	222	2	224
22	Buruh Peternakan	4	2	6
23	Pembantu Rumah Tangga	1	47	48
24	Tukang Cukur	3	-	3
25	Tukang Listrik	13	-	13
26	Tukang Batu	8	-	8
27	Tukang Kayu	45	-	45
28	Tukang Sol Sepatu	4	-	4
29	Tukang Las/Pandai Besi	20	-	20
30	Tukang Jahit	18	16	34
31	Tukang Gigi	-	-	-
32	Penata Rias	6	5	11
33	Penata Busana	-	-	-
34	Penata Rambut	7	8	15
35	Mekanik	103	-	103
36	Seniman	27	2	29
37	Tabib	2	-	2
38	Paraji	-	2	2
39	Perancang Busana	-	-	-
40	Penterjemah	-	-	-
41	Imam Masjid	1	-	1
42	Pendeta	15	2	17
43	Pastor	2	-	2
44	Wartawan	23	-	23
45	Ustadz/Mubaligh	6	-	6
46	Juru Masak	2	5	7
47	Promotor Acara	-	-	-
48	Anggota DPR RI	-	-	-



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2025

49	Anggota DPD RI	1	-	1
50	Anggota BPK	-	-	-
51	Presiden	-	-	-
52	Wakil Presiden	-	-	-
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	-	-	-
54	Anggota Kabinet Kementrian	-	-	-
55	Duta Besar I	-	-	-
56	Gubernur	-	-	-
57	Wakil Gubernur	-	-	-
58	Bupati	-	-	-
59	Wakil Bupati	1	-	1
60	Walikota	-	-	-
61	Wakil Walikota	-	-	-
62	Anggota DPRP Prof.	3	1	4
63	Anggota DPRD Kab./Kota	22	3	25
64	Dosen	7	11	18
65	Guru	112	297	409
66	Pilot	1	-	1
67	Pengacara	11	4	15
68	Notaris	2	4	6
69	Arsitek	2	-	2
70	Akuntan	-	1	1
71	Konsultan	10	1	11
72	Dokter	34	52	86
73	Bidan	-	56	56
74	Perawat	12	39	51
75	Apoteker	2	15	17
76	Psikiater/Psikolog	-	3	3
77	Penyiar Televisi	-	-	-
78	Penyiar Radio	1	1	2
79	Pelaut	136	-	136
80	Peneliti	-	-	-
81	Sopir	374	1	375
82	Pialang	-	-	-
83	Paranormal	-	-	-
84	Pedagang	375	108	483
85	Perangkat Desa	128	98	226
86	Kepala Desa	20	-	20
87	Biarawan/Biarawati	-	5	5
88	Wiraswasta	8.577	1.232	9.809
89	Anggota Lemb.Tinggi Lainnya	1	-	1
90	Artis	-	-	-
91	Atlit	-	-	-
92	Cheff	-	-	-
93	Manajer	-	-	-
94	Tenaga Tata Usaha	-	-	-
95	Operator	-	-	-
96	Pekerja Pengolahan Kerajinan	-	-	-
97	Teknisi	-	-	-
98	Asisten Ahli	-	-	-
99	Pekerjaan Lainnya	90	116	206
TOTAL		98.971	95.421	194.392



Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Menurut Agama Tahun 2025

NO	AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Islam	91.420	87.921	179.341
2	Kristen	1.787	1.796	3.583
3	Katholik	660	618	1.278
4	Hindu	426	378	804
5	Budha	4.572	4.605	9.177
6	Konghuchu	100	98	198
7	Aliran Kepercayaan	6	5	11
TOTAL		98.971	95.421	194.392

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung 2025



Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Belitung
Menurut Desa/Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2025

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	L	P	JUMLAH
1	TANJUNGPANDAN	KOTA	2.008	2.092	4.100
2		PARIT	2.726	2.724	5.450
3		LESUNG BATANG	3.450	3.485	6.935
4		PANGKALLALANG	6.659	6.498	13.157
5		TANJUNGPENDAM	2.612	2.605	5.217
6		PAAL SATU	4.248	4.202	8.450
7		KAMPONG DAMAI	1.946	1.941	3.887
8		BULUH TUMBANG	2.205	2.064	4.269
9		PERAWAS	2.726	2.645	5.371
10		DUKONG	3.447	3.268	6.715
11		JURU SEBERANG	1.453	1.338	2.791
12		AIR SAGA	6.589	6.258	12.847
13		AIR MERBAU	4.346	4.300	8.646
14		AIK PELEMPANG JAYA	3.780	3.703	7.483
15		AIK KETEKOK	2.860	2.715	5.575
16		AIK RAYAK	5.237	5.113	10.350
Jumlah			56.292	54.951	111.243
1	MEMBALONG	MEMBALONG	2.611	2.504	5.115
2		PERPAT	1.012	953	1.965
3		LASSAR	1.830	1.660	3.490
4		SIMPANG RUSA	1.640	1.491	3.131
5		KEMBIRI	1.543	1.457	3.000
6		BANTAN	1.501	1.424	2.925
7		TANJUNGRUSA	1.102	1.079	2.181
8		MENTIGI	731	719	1.450
9		PULAU SELIU	573	502	1.075
10		PULAU SUMEDANG	267	289	556
11		GUNUNG RITING	721	678	1.399
12		PADANG KANDIS	679	649	1.328
Jumlah			14.210	13.405	27.615
1	SELAT NASIK	SELAT NASIK	1.191	1.144	2.335
2		PETALING	328	317	645
3		SUAK GUAL	492	446	938
4		PULAU GERSIK	905	878	1.783
Jumlah			2.916	2.785	5.701
1	SIJUK	SIJUK	1.645	1.603	3.248
2		BATU ITAM	1.371	1.317	2.688
3		TERONG	1.429	1.401	2.830
4		AIR SERUK	3.287	3.168	6.455
5		TANJUNG BINGA	3.417	3.250	6.667
6		AIR SELUMAR	1.786	1.712	3.498
7		SUNGAI PADANG	1.297	1.213	2.510
8		KECIPUT	1.359	1.301	2.660
9		PELEPAK PUTE	1.065	945	2.010
10		TANJONG TINGGI	588	582	1.170



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2025

Jumlah			17.244	16.492	33.736
1	BADAU	BADAU	1.864	1.767	3.631
2		AIR BATU BUDING	787	765	1.552
3		SUNGAI SAMAK	1.321	1.239	2.560
4		KACANG BUTOR	1.455	1.337	2.792
5		CERUCUK	1.086	992	2.078
6		PEGANTUNGAN	1.070	1.007	2.077
7		IBUL	726	681	1.407
Jumlah			8.309	7.788	16.097
TOTAL			98.971	95.421	194.392

Sumber: DKB Semester 2 Tahun 2025 Kabupaten Belitung



CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN
YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025

Pada Tahun 2025 , Kabupaten Belitung memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan baik skala nasional maupun regional, sebanyak 17 (Tujuh Belas) penghargaan. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh antara lain sebagai berikut.

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Perangkat Daerah Penerima Penghargaan
1.	Predikat Dwitungga dalam Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
2.	Aksi Hak Asasi Manusia Kabupaten Belitung mendapatkan nilai 96 mendapatkan peringkat pertama di tingkat Kanwil HAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
3.	Hasil Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Belitung Tahun 2025 mendapatkan Nilai 99,4 dengan kategori AA (Istimewa)	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung
4.	Juara III Kader IMP	BKKBN Prov. Babel	Kecamatan Membalong
5.	ASEAN Community-Based Tourism Award 2025-2027	Asean	Kecamatan Sijuk
6.	Juara Harapan I Desa Wisata Berbasis Alam Wonderful Indonesia Awards 2025 (Desa Tanjung Binga)	Nasional	Kecamatan Sijuk
7.	Desa Wisata Berkelanjutan (Desa Wisata Kreatif Terong)	Nasional	Kecamatan Sijuk
8.	Juara I KB Lestari	Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kecamatan Sijuk
9.	Juara I Kampung KB (Desa Tanjong Tinggi)	Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kecamatan Sijuk
10.	Juara II Lomba Desa dan Kelurahan (Desa Air Seruk)	Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kecamatan Sijuk
11.	Juara II Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (Desa Air Seruk)	Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kecamatan Sijuk
12.	Juara II UPPKA Harum Manis	Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kecamatan Sijuk
13.	Juara III TPS3R	Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kecamatan Sijuk
14.	Pelayanan terbaik sebagai helpdesk pada Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025	ARSIP NASIONAL-RI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung
15.	Penilaian Audit Kearsipan Eksternal dan Internal Tahun 2025	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung
16.	Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2025. Nilai 94,71 - Kategori A – Zona Hijau – Opini Kualitas Tertinggi.	Ombudsman R.I	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
17.	Penghargaan kepada Kabupaten Belitung terhadap Hasil Pemantauan	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kabupaten Belitung Tahun 2025

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Perangkat Daerah Penerima Penghargaan
	dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2025. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Dinas Sosial Belitung memperoleh nilai 4,11 dengan kategori A-	Reformasi Birokrasi R.I Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2025 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayan Publik pada Lingkup Pemerintah Daerah tahun 2025.	Perlindungan Anak Kabupaten Belitung